LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat menyampaikan "**Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014**".

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan dan tugas di Sub Sektor Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai Desember 2014, yang menyajikan berbagai informasi mengenai moda transportasi darat, yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan dan keselamatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi darat pada khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi Indonesia.

Jakarta, Agustus 2015

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iv
Daftar Tabel		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
	C. VISI DAN MISI	3
	D. RUANG LINGKUP	4
BAB II	**PENDAHULUAN**	
	A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	5
	B. DIREKTORAT LLAJ	41
	C. DIREKTORAT LLASDP	80
	D. DIREKTORAT BSTP	112
	E. DIREKTORAT KTD	198
BAB III	**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**	
	A. BPLJSKB BEKASI	237
	B. BLLAJSDP	
	1) BLLAJSDP JAMBI	243
	2) BLLAJSDP DENPASAR	266
	3) BLLAJSDP PALANGKARAYA	275
	4) BLLAJSDP PALU	284
	C. KOPP	
	1) KOPP MERAK	291
	2) KOPP GILIMANUK	300
	3) KOPP LEMBAR	301
	4) KOPP PAGIMANA	302
	D. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN	
	1) UPP KARIANGAU	307
	2) UPP GORONTALO	307
	3) UPP KALABAHI	308
BAB IV	**PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2014**	
	A. ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	313
	B. REALISASI ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	313
BAB V	**PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN**	
	A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	322
	B. DIREKTORAT LLAJ	322
	C. DIREKTORAT LLASDP	326
	D. DIREKTORAT BSTP	327
	E. DIREKTORAT KTD	327
	F. BPLJSKB BEKASI	328
	G. BLLAJSDP	
	(1) BLLAJSDP JAMBI	338
	(2) BLLAJSDP DENPASAR	341

(3) BLLAJSDP PALANGKARAYA 343
(4) BLLAJSDP PALU 344
H. OPP
(1) KOPP MERAK 349
(2) KOPP GILIMANUK 351
(3) KOPP LEMBAR 352
(4) KOPP PAGIMANA 353
I. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN
(1) UPP KARIANGAU 354
(2) UPP GORONTALO 354
(3) UPP KALABAHI 355

BAB VI PENUTUP 357

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM bidang LLASDP	35
Gambar II.2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	35
Gambar II.3	Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip	37
Gambar II.4	Dokumentasi Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian	38
Gambar II.5	Perawatan Vinyl Lantai	40
Gambar II.6	Bangunan Terminal Purabaya Tahap IV	42
Gambar II.7	Bangunan Utama dan Ruang Tunggu Terminal Pacita Tahap V	43
Gambar II.8	Emplacement Jalan Masuk Belakang Terminal Penumpang Sukabumi Tahap II	44
Gambar II.9	Penyerahan Penghargaan Penilaian Kinerja dan Tata Laksana Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A	45
Gambar II.10	Rapat Kerja Teknis Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tahun 2014	45
Gambar II.11	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi SIMLALIN	57
Gambar II.12	Rakernis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2014	60
Gambar II.13	Her-Registrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Angkutan Perusahaan Jalan Tahun 2014	61
Gambar II.14	Kegiatan Semilokas Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2014	61
Gambar II.15	Ceremonial Penganugrahan PO. Terbaik tahun 2014 oleh Menteri Perhubungan	63
Gambar II.16	Survei ke Perusahaan Otobis sebagai nominasi Pemilihan Perusahaan Terbaik Tahun 2014	63
Gambar II.17	Acara Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan Tahun 2014 di Malang	63
Gambar II.18	Pelaksanaan Survai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	65
Gambar II.19	Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2014	66
Gambar II.20	Fasilitas Kedatangan dan Keberangkatan Angkutan Pemadu Moda	67
Gambar II.21	Kegiatan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang	71
Gambar II.22	Kegiatan Pelaksanaan Produksi Karoseri	72
Gambar II.23	Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	73

Gambar II.24	Kegiatan Penegakan Hukum Perijinan Angkutan	74
Gambar II.25	Kegiatan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor	75
Gambar II.26	Pengawasan Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor	75
Gambar II.27	Rakernis PPNS LLAJ di Denpasar	76
Gambar II.28	Kegiatan Peningkatan Keterampilan PPNS LLAJ	79
Gambar II.29	Kondisi Jaringan Jalan Kab. Takalar	116
Gambar II.30	Kondisi Jaringan Jalan di Kota Palembang	117
Gambar II.31	Pembukaan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014	120
Gambar II.32	Kegiatan Diskusi Panel Sesi 1 dan Sesi 2 Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014	120
Gambar II.33	Kondisi Jaringan Jalan di Kota Cirebon	122
Gambar II.34	Kondisi Jaringan Jalan di Kota Surakarta	125
Gambar II.35	Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2014	129
Gambar II.36	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Medan Tahun 2014	130
Gambar II.37	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Batam Tahun 2014	130
Gambar II.38	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Padang Tahun 2014	131
Gambar II.39	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Bandar Lampung Tahun 2014	132
Gambar II.40	Kegiatan Workshop Forum ATCS di Kota Surakarta Tahun 2014 di Wilayah II	137
Gambar II.41	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Bandung Tahun 2014	138
Gambar II.42	Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Yogyakarta Tahun 2014	139
Gambar II.43	Kondisi Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional di Kota Palu Tahun 2014	141
Gambar II.44	Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kota Kediri Tahun 2014	142
Gambar II.45	Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014	144
Gambar II.46	Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kabupaten Jembrana Tahun 2014	146
Gambar II.47	Monitoring BRT Transpadang	154
Gambar II.48	Monitoring BRT di Pekanbaru	155
Gambar II.49	Kegiatan Sosialisasi Angkutan Perkotaan	156
Gambar II.50	Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Forum Transit	157
Gambar II.51	Monitoring Rencana Penyelenggaraan BRT Transdirogo	160

Gambar II.52	Bandara Haluoleo	165
Gambar II.53	Bandara Syamsudin Noor	165
Gambar II.54	Bandara Mutiara SIS Al – Jufrie	166
Gambar II.55	Bandara Batoambari	167
Gambar II.56	Bandara HAS Hanandjoendin	167
Gambar II.57	Bandara Fatmawati Soekarno	168
Gambar II.58	Bandara Tjilik Riwut	168
Gambar II.59	Pembuatan Bus Pemadu Moda	169
Gambar II.60	Pembangunan Fasilitas Integrasi di Palembang	170
Gambar II.61	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Surakarta	171
Gambar II.62	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Yogyakarta	171
Gambar II.63	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Ambon	172
Gambar II.64	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Jayapura	173
Gambar II.65	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Ternate	174
Gambar II.66	Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Banyuwangi	175
Gambar II.67	Pelabuhan Penyeberangan Padangbai	176
Gambar II.68	Stasiun Kereta Api Purwosari	177
Gambar II.69	Bandara Abdul Rachman Saleh	178
Gambar II.70	Bandara M. Kaharuddin	178
Gambar II.71	Bandara El Tari	179
Gambar II.72	Pembuatan Bus Pemadu Moda	180
Gambar II.73	Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	180
Gambar II.74	Wawancara Dengan Kabid Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan	185
Gambar II.75	Kegiatan Survey Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional di Kota Batam	185
Gambar II.76	Survey Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kota Banda Aceh	186
Gambar II.77	Pelaksanaan Sosialiasasi ANDALALIN	190
Gambar II.78	Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di Kota Denpasar	191
Gambar II.79	Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di Kota Bogor	192
Gambar II.80	Angkot yang Telah Melepas converter Kit dan Tabung di Kota Surabaya	194
Gambar II.81	Tahapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan	227
Gambar III.1	Kegiatan Monitoring Prasarana dan Keselamatan Tahun 2014	247
Gambar III.2	Diagram Rekapitulasi Pelanggaran hasil Penindakan Razia di Kota	

	Pekanbaru Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014	258
Gambar III.3	Diagram Rekapitulasi Pelanggaran Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2014	259
Gambar III.4	Dokumentasi Kegiatan Monitoring Sarana 2014	260
Gambar III.5	Gedung Kantor BLLAJSDP Jambi yang Lama	261
Gambar III.6	Gedung Kantor BLLAJSDP Jambi yang Baru	262
Gambar III.7	Perbandingan Surat Masuk dan Keluar pada Tahun 2013 dan 2014	263
Gambar III.8	Kegiatan Pemaparan Penyusunan DED Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	267
Gambar III.9	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	267
Gambar III.10	Kegiatan Pengawasan Perbaikan Dermaga I Padang Bai	268
Gambar III.11	Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Gubernur tentang Pemasangan 10.000 PJU dan 8.000 CCTV	268
Gambar III.12	Kegiatan Survey Rute Trayek Trans Sarbagita Koridor 6	269
Gambar III.13	Kegiatan Integrasi Urban Road Safety Program	270
Gambar III.14	Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Jawa Barat	270
Gambar III.15	Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	270
Gambar III.16	Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Jawa Timur	271
Gambar III.17	Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Nusa Tenggara Barat	271
Gambar III.18	Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Nusa Tenggara Timur	271
Gambar III.19	Kegiatan Pemantauan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik	272
Gambar III.20	Kegiatan Pemantauan Terminal Mengwi	272
Gambar III.21	Kegiatan Pemantauan Pelabuham Padang Bai	273
Gambar III.22	Kegiatan Pemantauan PKB Bali	275
Gambar III.23	Kegiatan Penegakan Hukum Terpadu	275
Gambar III.24	Foto Pengujian Kendaraan Bermotor	276
Gambar III.25	Foto Terminal Tipe A	276
Gambar III.26	Foto Penimbangan Kendaraan	277
Gambar III.27	Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	292

Gambar III.28 Grafik Rekapitulasi Pegawasi Berdasarkan Status Keluarga 293
Gambar III.29 Grafik Rekapitulasi Pegawasi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 293
Gambar III.30 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 294
Gambar III.31 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Latihan Jabatan 294
Gambar III.32 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Agama 295
Gambar III.33 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon 295
Gambar III.34 Grafik Persentase Jumlah Pegawai KOPP Pagimana Berdasarkan Tingkat Pendidikan 306
Gambar III.35 Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 307

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	19
Tabel II.2	MoU Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah	21
Tabel II.3	Kegiatan KSLN Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2014	28
Tabel II.4	Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	31
Tabel II.5	Pegawai Berdasarkan Golongan	31
Tabel II.6	Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel II.7	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel II.8	Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjang	32
Tabel II.9	Pegawai Berdasarkan Eselonering	32
Tabel II.10	Tabel Data Pegawai	36
Tabel II.11	Tabel Digitalisasi Arsip Vital	37
Tabel II.12	Penerbitan SUT	53
Tabel II.13	Penerbitan SRUT	53
Tabel II.14	Penguji Kendaraan Bermotor	53
Tabel II.15	Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	54
Tabel II.16	Program dan Realisasi Kegiatan Pembangunan LLASDP tahun 2014	89
Tabel II.17	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan Tahun 2011 - 2014	90
Tabel II.18	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Tahun 2011 - 2014	91
Tabel II.19	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011 - 2014	91
Tabel II.20	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau	92
Tabel II.21	Jumlah Kapal SDP yang beroperasi Tahun 2011 – 2014	93
Tabel II.22	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2010 - 2014	94
Tabel II.23	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	94
Tabel II.24	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	94
Tabel II.25	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2007 - 2014	94
Tabel II.26	Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas Tahun 2014	95
Tabel II.27	Produksi Penumpang Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2014	96
Tabel II.28	Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat LLASDP TA. 2014	104
Tabel II.29	Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran I)	105
Tabel II.30	Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran II)	105

Tabel II.31	Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran III)	106
Tabel II.32	Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran IV)	106
Tabel II.33	Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran V)	106
Tabel II.34	Analisa Kinerja Keuangan	109
Tabel II.35	Realisasi Anggaran Kegiatan Rutin	109
Tabel II.36	Penyerapan Anggaran Tahun 2014	111
Tabel II.37	Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Belitung	114
Tabel II.38	Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kabupaten Belitung	115
Tabel II.39	Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Takalar	115
Tabel II.40	Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Takalaer	116
Tabel II.41	Ruang Muilik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Palembang	117
Tabel II.42	Ruang Muilik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Cirebon	121
Tabel II.43	Ruang Muilik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Surakarta	122
Tabel II.44	Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Surakarta	122
Tabel II.45	Ruang Muilik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Blitar	123
Tabel II.46	Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Surakarta	124
Tabel II.47	Ruang Muilik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Sukabumi	124
Tabel II.48	Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Sukabumi	125
Tabel II.49	Laporan Perhitungan Penurunan Emisi GRK	184
Tabel II.50	Tingkat Emisi GRK Sektor Transportasi Kalimantan Selatan Tahun 2012	184
Tabel II.51	Penurunan Emisi Sektor Transportasi	184
Tabel II.52	Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Batam	186
Tabel II.53	Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Banda Aceh	187
Tabel II.54	Dokumen Hasil ANDALALIN	187
Tabel II.55	Daftar Persetujuan Hasil ANDALALIN	188
Tabel II.56	Rencana Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK di DIY	195
Tabel II.57	Tingkat Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	196
Tabel II.58	Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Surakarta	196
Tabel II.59	Daftar Dokumen Hasil ANDALALIN	197
Tabel II.60	Daftar Persetujuan Hasil ANDALALIN	198
Tabel II.61	Data Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2010 - 2014	208
Tabel II.62	Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan di Daerah	216
Tabel II.63	Keikutsertaan Provinsi Dalam Kegiatan AKUT Selama 9 Tahun Terakhir Tahun 2006 – 2014	224

Tabel II.64	Lokasi Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	227
Tabel II.65	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis di Bidang Audit Keselamatan Jalan	229
Tabel II.66	Data Jumlah Peserta Pelatihan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan	231
Tabel II.67	Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan	231
Tabel II.68	Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan	233
Tabel II.69	Jumlah Peserta Pemberdayaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan dan ASDP	234
Tabel III.1	Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Tahun 2014	240
Tabel III.2	Rekapitulasi Jumlah Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2014	241
Tabel III.3	Tebel RAB Rekapitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Kuta Cane – Batas Kota Sumatera Utara 28,78 Km di Provinsi Aceh	249
Tabel III.4	Tabel RAB Rekapitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Kota Jambi Segmen Kota Jambi – Simpang Tuan 30,07 Km di Provinsi Jambi	251
Tabel III.5	Tabel RAB Rekapitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Batas Sumatera Utara – Bagan Batu 50 Km (Provinsi Riau)	254
Tabel III.6	Rekapitulasi Pelanggaran Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014	258
Tabel III.7	Persentase Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Riau Tahun 2014	259
Tabel III.8	Rincian Bahan Sosialisasi BLLAJSDP Jambi	261
Tabel III.9	Komposisi Jabatan BLLAJSDP Jambi	264
Tabel III.10	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. BLLAJSDP Jambi	265
Tabel III.11	Daftar Peralatan Kantor BLLAJSDP Jambi	265
Tabel III.12	Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Jabatan	287
Tabel III.13	Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	287
Tabel III.14	Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Golongan	287
Tabel III.15	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Golongan Tahun 2014	292
Tabel III.16	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Status Keluarga Tahun 2014	292
Tabel III.17	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014	293

Tabel III.18	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	294
Tabel III.19	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Latihan Jabatan Tahun 2014	294
Tabel III.20	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Agama Tahun 2014	295
Tabel III.21	Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Eselon Tahun 2014	295
Tabel III.22	Kelompok Jabatan Fungsional	304
Tabel III.23	Nama – Nama Pegawai Outsourching	305
Tabel III.24	Jumlah Pegawai KOPP Pagimana Berdasarkan Tingkat Pendidikan	306
Tabel III.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	307
Tabel III.26	Lintasan Yang Dilayani Oleh Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	309
Tabel III.27	Inventarisasi Barang Milik Negara	310
Tabel IV.1	Neraca per 31 Desember 2014	319
Tabel V.1	Kebutuhan Pegawai Balai LLAJSDP Jambi Untuk Kegiatan 9 Provinsi	339

BAB I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, *vice versa*. Namun demikian, agar pembangungan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya.

Kemajuan transportasi memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban, dan keberhasilannya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor lainnya, seperti kualitas, biaya dan tingkat pelayanan sistem transportasi itu sendiri. Tanpa perhatian terhadap faktor-faktor ini, maka hampir dipastikan kemajuan transportasi nasional dapat menimbulkan berbagai biaya sosial (*social costs*) baik berupa kecelakaan, kemacetan, kebisingan, dan polusi.

Untuk mengurangi paradoks atau dampak negatif dari pengembangan sistem transportasi pada pembangunan peradaban dimaksud, maka perlu disusun rumusan rencana pengembangan sistem transportasi nasional. Pentingnya rumusan rencana ini tidak saja dimaksudkan agar langkah pencapaian tujuan yang diharapkan dapat lebih terarah dan sistematis, namun juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pencapaian tujuan pengembangan transportasi nasional yang diinginkan. Hingga saat ini transportasi jalan masih mempunyai peran yang sangat dominan. Hampir 84% total perjalanan antar propinsi menggunakan transportasi jalan, sedangkan peran angkutan kereta api masih sangat kecil sekitar 7% karena jasa angkutan penumpang kereta api nasional hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara peran angkutan sungai, danau dan penyeberangan juga masih relatif kecil yakni berkisar 5%.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian (*out-come*) selama satu tahun anggaran sejalan dengan Sistem Transportasi Nasional pada bidang Angkutan Jalan maupun bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap tahun menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014 disusun dengan maksud sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Tujuan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 tahun 2013, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengembangkan organisasi dengan dibentuknya Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) di 8 (delapan) lokasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 dan 86 Tahun 2011.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan peraturan dan perundangan adalah sebagai berikut :

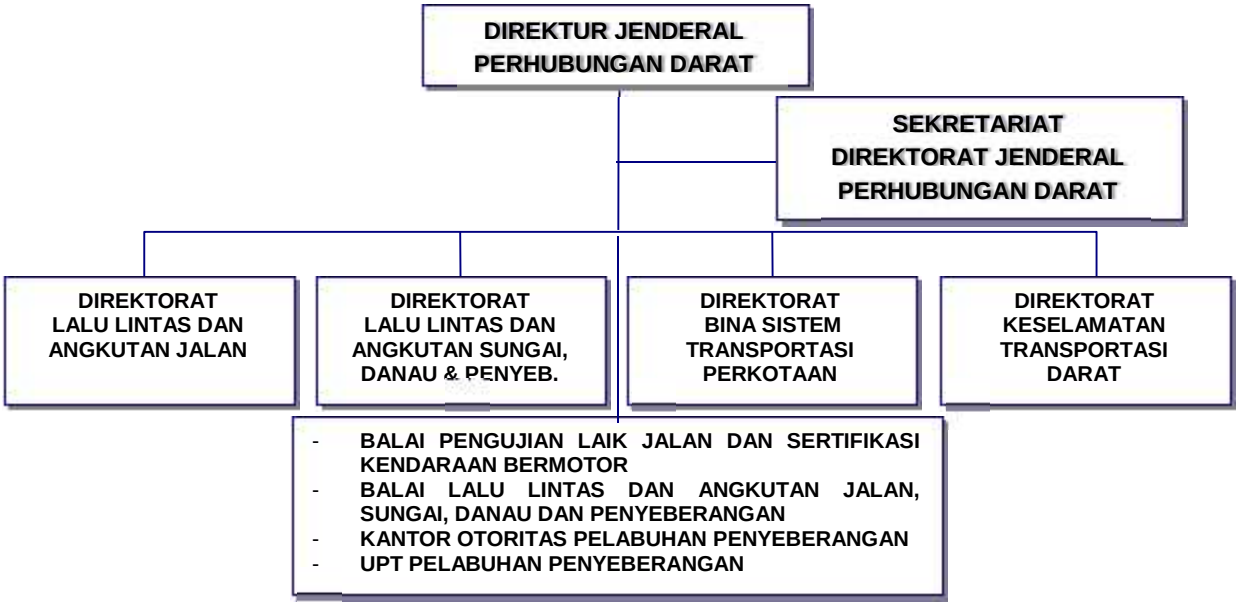

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

C. VISI DAN MISI

1. Visi

"Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung-jawabkan"

2. Misi

Misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah :

a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.

b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan, keselamatan transportasi darat yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

c. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.

d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. **Bidang Pemerintahan**

   Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup kegiatan non fisik yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan fisik, seperti : penyusunan petunjuk dan pedoman teknis, kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

2. **Bidang Pembangunan**

   Kegiatan di bidang pembangunan mencakup kegiatan fisik, dimana pendanaannya baik rutin dan pembangunan dibiayai oleh APBN yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran.

3. **Bidang Operasional**

   Kegiatan di bidang operasional mencakup perencanaan teknis, fasilitas perlengkapan ataupun pendukung yang mana kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pada pembinaan teknis.

BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

1. BAGIAN PERENCANAAN

Berdasarkan KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 tahun 2013, Bagian Perencanaan telah melakukan kegiatan tahun 2014, antara lain :

a. Subbag Rencana dan Program

1) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2014

   Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2014.

2) Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2014.

   Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2014 dengan total pagu sebesar Rp. 14.000.000.000,- tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan.

4) Pembekalan Teknis Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2014.

5) Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis bidang Perhubungan Darat Tahun 2014.

   Rakornis Ditjen Hubdat dilaksanakan di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2014 dan diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri atas pejabat di lingkungan Kemenhub, Dishub Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan UPT dilingkungan Ditjen Hubdat.

   Maksud diselenggarakannya Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2014 ini adalah sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan sehingga

dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di Pusat maupun di Daerah. Sedangkan tujuan diselenggarakannya Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Koordinasi dan Sinergitas dalam Penyelenggaraan Pembangunan maupun Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
b. Dan Sebagai Upaya Perkuatan (Revitalisasi) Kapasitas Institusional dalam Melaksanakan Tupoksi Sehingga dapat Terwujud Institusi yang Lebih Kuat dengan Tingkat Kinerja yang Lebih Baik dalam Melayani Masyarakat.

Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2014 yang telah disepakati antara lain :

a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi darat, perlu direncanakan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang komprehensif, sistemik dan berkelanjutan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Kementerian Perhubungan 2015-2019, KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dilingkungan Kementerian Perhubungan dan PM 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perhubungan;
b. sinergi dan harmonisasi rencana pengembangan infrastruktur perhubungan darat perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan kewenangan, optimalisasi anggaran dan kemampuan daerah, serta pengalokasian anggaran subsidi angkutan umum;
c. dalam rangka meningkatkan azas manfaat hasil pembangunan infrastruktur transportasi darat, perlu dilakukan langkah optimalisasi dan sinergi antara pusat dan daerah terkait dengan pengalihan status asset (hibah);
d. dalam kaitannya dengan pembangunan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penetapan daerah yang mendapatkan alokasi DAK perlu dipertimbangkan kembali bukan berdasarkan pemerataan daerah tetapi juga potensi perkembangan daerah yang bersangkutan;
e. dalam rangka optmalisasi/pembatasan kuota jenis BBM Tertentu (JBT), maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasi

dampak/*multiplier effect* yang akan ditimbulkan, antara lain : regulasi terkait pengendalian BBM Kuota oleh Pemda, diversifikasi energi, optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dan keberpihakan pemerintah dalam rangka pemberian subsidi BBM khususnya dalam penyelenggaraan angkutan umum (operator);

f. pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat yang berkompeten baik di tingkat pusat maupun daerah mutlak harus segera dipenuhi untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dan besarnya tantangan ke depan dalam upaya pengembangan sub sektor transportasi darat yang dilaksanakan melalui jalur pembibitan dan jalur pelatihan teknis yang berkualitas;

g. Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Darat yang ada saat ini harus diberdayakan secara efektif di lingkungan pemerintah daerah di masa otonomi daerah dan terus dilakukan peningkatan kapasitasnya sebagai salah satu upaya untuk menangani permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika masyarakat;

h. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang terpadu dan terarah, perlu segera dilakukan tindak lanjut berupa :

   (1) Penyelesaian penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nasional;

   (2) Perbaikan system dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor termasuk penyelenggaraan pengujian berkala oleh swasta antara lain :

      a) Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM);

      b) Pengembangan Database;

      c) Optimalisasi Penyelenggaraan Kalibrasi;

      d) Penerapan Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

   (3) Membangun dan mengembangkan system penyelenggaraan angkutan jalan serta mempercepat penyelesaian regulasi.

i. Penanganan pengawasan angkutan barang sebagai salah satu rencana aksi yang ada dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) perlu segera dilakukan evaluasi dan reformulasi kebijakan;

j. Kebijakan pengembangan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan 5 (lima) pilar yang dilakukan secara bersamaan antara lain : Penigkatan peran angkutan umum, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Penurunan polusi udara dan suara, *Transport Demand Management* (TDM) dan Pengembangan *Non Motorized Transport* (NMT);
k. Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang lebih optimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, secara bertahap dan berkelanjutan Pemerintah Pusat memberikan bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada daerah sebagai *stimulant* (rangsangan) untuk mewujudkan kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan;
l. Dalam rangka peningkatan kinerja angkutan sungai dan danau perlu keberpihakan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau termasuk SBNP di sungai serta pelaksanaan registrasi angkutan sungai dan danau;
m. Dalam rangka peningkatan kinerja angkutan penyeberangan perlu dilakukan rehabilitasi serta pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan dengan komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dan/atau badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana angkutan Penyeberangan dalam bentuk partisipasi pembangunan, termasuk pembebasan lahan, penyediaan jalan akses pelabuhan serta anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaannya;
n. Dalam pembenahan sistem penyelenggaraan ASDP diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk integrasi pelayanan, meliputi dukungan fasilitas integrasi jaringan dan fisik layanan angkutan dari dan ke pelabuhan penyeberangan, penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dan penyempurnaan regulasi khusus ASDP;
o. Keselamatan yang merupakan isu global telah ditindaklanjuti dengan perwujudan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang secara berkesinambungan diimplementasikan rencana aksi oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait secara sinergis;
p. Perwujudan bidang keselamatanan merupakan suatu kesisteman perlu ditangani secara sinergis dan koordinatif sudah ditampung dalam RPJMN dan

juga didukung melalui pendanaan DAK yang harus ditindaklanjuti dalam aktualisasi rencana aksi yang dituangkan dalan RPJMD;

q. Sistem Manajamen Keselamatan (SMK) bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 22/2009 dan tertuang dalam RUNK (Piliar 1) segera diimplementasikan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum.

b. Subbag Pemantauan dan Evaluasi

1) Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2014

Dalam penetapan kinerja berdasarkan pada prioritas program transportasi darat tahun 2014 sebagai berikut :

a) Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
b) Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
c) Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
d) Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan Perundangan.
e) Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan di Bidang Transportasi Darat.

2) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2014

LAKIP disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2014, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kinerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

3) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2014

4) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemaduan jaringan transportasi darat tahun 2014.

c. Subbag Sistem Informasi dan Pelaporan

1) Menyusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013

   Sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2) Penyusunan Data Statistik Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013

   Kegiatan penyusunan Data Statistik Perhubungan Darat Tahun 2013 meliputi :

   a) Menyusun format struktur data dan informasi perhubungan darat.
   b) Melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.
   c) Melakukan *updating* data perhubungan darat.
   d) Melakukan kompilasi data dan informasi.
   e) Melakukan pemetaan data dan informasi kondisi dan perkembangan perhubungan darat.
   f) Melakukan *editing* dan pengelompokan data terhadap data yang sifatnya tahunan (*time series*).

3) Pengembangan Sistem Informasi

   Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan Darat Tahun 2014 meliputi:

   g) Melakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap dan berkelanjutan.
   h) Melakukan pengadaan *server* dalam mendukung pembangunan *Datawarehouse* Ditjen Perhubungan Darat.
   i) Melakukan peningkatan kapasitas *Bandwidth* jaringan komputer Ditjen Perhubungan Darat.
   j) Melakukan pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat.
   k) Melakukan Pengembangan Data Perhubungan Darat pada Profil dan Kinerja Perhubungan Darat Tahun 2014.

4) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dipantau oleh Tim UKP4 dengan memberikan laporan pada tiap triwulan melalui system e-Monitoring Kemenhub. Pada Tahun 2014 terdapat 2 (Dua) subtansi yaitu Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dan Prioritas Nasional.

d. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat

Kegiatan ini meliputi penyusunan Kajian/Studi Kebijakan/Pedoman yang mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan Transportasi Darat. Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 20 (Dua puluh) kegiatan yaitu :

1) Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi Darat dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi di Wilayah Sulawesi
2) Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi Darat dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi di Wilayah Kalimantan
3) Analisis Keterpaduan Moda Transportasi Angkutan Penyeberangan dengan Angkutan Jalan di Dermaga Penyeberangan Padang Bai (Bali) - Lembar (Nusa Tenggara Barat)
4) Analisis Keterpaduan Moda Transportasi Angkutan Penyeberangan dengan Angkutan Jalan di Dermaga Penyeberangan Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) - Mengkapan (Riau)
5) Pengembangan *Data Ware House* Perhubungan Darat
6) Pengembangan *Portal* Perhubungan Darat
7) Lanjutan Pengembangan Aplikasi SIK Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai Danau Penyeberangan (BLLAJSDP)
8) Lanjutan Pengembangan Aplikasi SIK Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP)
9) Kajian Pemeliharaan Fasilitas Kelengkapan Jalan Berdasarkan *Performance Base Contract*
10) Desain Rancang Bangun Gedung Kantor BLLAJSDP dan OPP di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
11) Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi Darat dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Bali dan Nusa Tenggara
12) Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi Darat dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Sumatera
13) Penyusunan Masterplan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)
14) Perencanaan Umum Transportasi Darat dalam Mendukung Pengembangan Daerah Tertinggal di Pulau Sulawesi
15) Evaluasi Regulasi Peraturan Daerah Bidang Transportasi Darat
16) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kebutuhan Diklat PNS di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

17) Kajian Otomatisasi Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Komersil
18) Analisa Pergeseran Pergerakan Angkutan Sungai di Pulau Kalimantan
19) Penyusunan Masterplan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi Darat di Pulau Jawa
20) Penyusunan Masterplan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi Darat di Pulau Sumatera

2. BAGIAN KEUANGAN

a. Subbag Pelaksanaan Anggaran

1) Revisi Anggaran
   a) Memproses usulan revisi DIPA pada Satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
   b) Memproses usulan revisi POK pada Satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
   c) Mengajukan usulan *Multiyears Contract* pada kegiatan di Satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
2) PNBP
   a) Merekapitulasi Laporan Bulan PNBP pada Satker / UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
   b) Melakukan pembinaan penyusunan Laporan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
   a) Melakukan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
   b) Melakukan pembinaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
   c) Menyiapkan Rencana Jaringan Kerja (*Network Planning*), Bagan Balok (Barchart) dan Kurva S, Sub. Sektor Transportasi Darat;
4) Laporan Bulanan

   Merekapitulasi Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran.

b. Subbag Perbendaharaan dan BMKN

1) Inventarisasi BMN;
   a) Melakukan inventarisasi BMN pada Satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

b) Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMN

2) Penetapan Status Hibah

a) Pembinaan terhadap satker yang masih mengalami kendala dalam Penetapan Status dan Hibah BMN

b) Menyusun Laporan Hasil Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN Ditjen Perhubungan Darat

c) Melakukan proses Penetapan status Penggunaan dan Hibah Barang Milik Negara pada Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

3) Penghapusan BMN

a) Melakukan proses Penghapusan BMN terhadap hasil kegiatan Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

b) Menyusun Laporan Penghapusan BMN secara aktual dan *up to date*

4) Simak BMN

a) Menyusun Laporan BMN Semester / Tahunan Ditjen Perhubungan Darat

b) Melakukan pembinaan penyusunan Laporan BMN terhadap satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

5) Serah Terima Operasional

a) Melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap BMN yang akan dilakukan Serah Terima Operasional

b) Melakukan Berita Acara hasil Penelitian Administrasi dan Teknis terhadap staker-satker yang sudah melakukan serah Terima Operasional

6) Rapat Koordinasi Aset

a) Melakukan sosialisasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

b) Menyusun Laporan Monitoring BMN terhadap satker-satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

7) Administrasi Perbendaharaan

Menyusun laporan Perbendaharaan setiap berkala sebagai informasi atas pelaksanaan kegiatan anggaran.

c. Subbag Verifikasi Anggaran

1) Menyusun usulan calon Pengelola Anggaran;

Meneliti dan mengevaluasi usulan Calon Pengelola Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran.

2) Laporan Hasil Audit

Meneliti dan memverifiaksi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit badan / Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi kerugian Negara.

3) Sanggah Banding

Meneliti / memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggah Banding maupun Surat Pengaduan dari peserta Lelang / LSM.

3. BAGIAN HUKUM DAH KERJA SAMA

a. Subbag Peraturan Perundang-Undangan

Pada Tahun 2014 untuk Peraturan Perundang-Undangan di Sub Sektor Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, meliputi :

1) Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

2) Peraturan Menteri Perhubungan :

a) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

(2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

(3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

(4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 88 Tahun 2014 tentang Peraturan Ukuran Kapal Penyeberangan Di Lintas Merak Bakauheni.

3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :

a) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

(1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan *Newsletter* Infohubdat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 2045/AJ.405/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor.

(3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 04/AJ.101/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Lokasi Terminal PenumpangTipe A.

(4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 03/AJ.410/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 02/AJ.003/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

(6) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2344/KP.016/DRJD/2014 tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(7) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3319/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Analisis Data Kecelakaan Jalan.

(8) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3318/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Pemantauan Keselamatan Jalan.

(9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3974/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(10) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4162/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Manajemen Dan Survey Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(11) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4161/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Manajemen Kampanye Keselamatan.

(12) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4210/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Pengawasan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(13) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 6298/AJ.205/DRJD/2014 tentang Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kendaraan Pada Trayek Angkutan Antar kota Antar provinsi (AKAP) Di Seluruh Indonesia

b) Bidang Lalu Lintas Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan :

(1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4160/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (ASDP).

(2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4159/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Operasional Jembatan Bergerak Pelabuhan Penyeberangan.

(3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4158/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Pengelolaan Pelabuhan Sungai Dan Danau.

(4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4157/KP.108/DRJD/2014 tentang Kompetensi Penilaian Pelayanan Pelabuhan Dan Angkutan Penyeberangan.

4) Kegiatan yang dilaksanakan (berkelanjutan) :

a) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

(1) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

(a) RPP tentang Dampak Lingkungan LLAJ

(b) RPP tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ;

(c) RPP tentang Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;

(d) RPP tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ.

(2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

(a) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

(b) Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan.

(c) Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

(d) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Blanko Tilang.

(e) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(f) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pejalan Kaki.

(g) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang

(h) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Barang.

(i) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Batas Kecepatan

(j) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan

(k) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

(l) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

(m) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Parkir

(n) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(o) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat

(p) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

(q) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

(r) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

(s) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum

(3) Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

(a) RPD tentang Angkutan Barang Berbahaya

(b) RPD tentang Kendaraan Listrik di Jalan;

(c) RPD tentang Rute Aman Selamat Sekolah.

b) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sedangkan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah sudah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri dan peraturan Dirjen antara lain:

(1) Rancangan Peraturan Menteri :

(a) Revisi KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

(b) Review KM Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;

(c) Review KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

(d) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan;

(e) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Alur Transportasi Sungai DAS Barito.

(2) Rancangan Peraturan Dirjen :

(a) RPD tentang Alur Pelayaran dan Lalu Lintas Sungai dan Danau;

(b) RPD tentang Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan.

Dengan telah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang LLAJ direncanakan akan disusun 12 Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi 8 Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas untuk posisi masing-masing RPP yang masih dilaksanakan antara lain :

Tabel II.1. Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah

Sebagai Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

No.	Judul RPP	Posisi Saat Ini	Keterangan
1.	RPP Dampak Lingkungan LLAJ	Kelompok Kerja (Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan Perindustrian)	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian Perhubungan.
2.	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ	idem	idem
4.	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ	idem	idem
5.	RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ	Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi.	Menunggu Draft dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2014.

Untuk penelaahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi Darat, Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Asistensi PERDA dan Raperda yang berkaitan dengan Ditjen Perhubungan Darat dari seluruh Indonesia dimana kegiatannya berkelanjutan.

b. Subbag Bantuan Hukum dan Dokumentasi

1) Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain :

Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pertimbangan hukum, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut :

a) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait lainnya. Adapun penyuluhan peraturan perundang-undangan yang dilakukan antara lain :

(1) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

(3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

(4) Peraturan Dirjen No. SK.7234/AJ.401/DRJD2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

b) Pemberian Bantuan dan Pertimbangan Hukum Dalam Perkara

Pertimbangan hukum diberikan dalam rangka permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas surat-surat sanggahan, pengaduan masyarakat, ataupun permasalahan teknis lainnya yang memerlukan tanggapan dan jawaban yang memerlukan dukungan pertimbangan dan kajian dari sisi legal atau peraturan perundangan yang berlaku. Berikut pemberian bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara :

(1) Gugatan Perkara Perdata No. No.131/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM yang diajukan oleh Agus Lasmono Dkk (Penggugat) Merupakan gugatan Perdata eks pegawai Perum Damri Kantor Cabang Surabaya Kepadada Kemenhub RI sebagai Tergugat IV;

(2) Gugatan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2013/ PN. JKT. Tim Merupakan gugatan Perdata eks pegawai Perum Damri Kantor Cabang Semarang Kepada Kemenhub RI sebagai Tergugat III.

(3) Gugatan Perbuatan melawan hukum Nomor: 249/Pdt.G/2012/ PN Bekasi Merupakan gugatan atas sengketa Tanah Hak Pakai Nomor 5 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung yang digunakan sebagai Balai Laik Jalan dan

Sertifikasi Kendaraan Bermotor, antara NY. Yohanna de Meyyer (penggugat) dengan Pemeintah RI c.q Menteri Perhubungan C.q Direktorat Perhubungan Darat dkk.

(4) Antisipasi Sengketa Informasi Publik antara Sutarno B Martowiharsono (Pemohon) dengan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Termohon).

(5) Pendampingan terhadap permasalahan hukum Tindak Pidana Korupsi pada Trans Jakarta yang dilakukan atas nama terdakwa R. Drajad Adhyaksa, ATD, MT dan Setiyo Tuhu, SE, MM.Tr.

Hambatan yang dialami oleh bagian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum maupun penyusunan peraturan masih perlu dukungan peningkatan kualitas SDM yang dapat melakukan penanganan kasus-kasus yang ada di lingkungan Ditjen Hubdat, serta dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan peraturan perundangan dimana memerlukan kecermatan, ketelitian serta kemampuan dalam penguasaan penerapan peraturan perundangan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu perlunya peningkatan potensi SDM melalui Diklat/kursus di bidang bantuan hukum, bidang penyusunan maupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang Hukum secara berkelanjutan.

2) Data kesepakatan bersama di bidang transportasi darat :

Data Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Tahun 2014 :

Tabel II.2. *MoU* Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
1.	Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Karta Negara Tentang Pembayaran Biaya Operasional Kapal Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Pada Lintas Tenggarong Kota – Tanggarong – Seberang Kabupaten Kutai Karta Negara Propinsi Kalimatan Timur	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jakarta, 15 Januari 2014	1 Tahun
2	Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Inspeksi Keselamatan Jalan	Ditjen Hubdat dengan BPSDM	Jakarta, 10 Nop 2014	1 Bulan

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2014.

c. Subbag Bagian Humas dan KSLN

Kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri merupakan bidang tugas Sub Bagian Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang telah dilaksanakan tahun 2014 yang berhubungan dengan kegiatan Peliputan dan Dokumentasi antara lain kegiatan Dokumentasi, jumpa pers/siaran pers, pameran/visualisasi, langganan koran untuk keperluan kliping dan penerbitan *newsletter* infoHUBDAT.

1) Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Publikasi

a) Dokumentasi (72 kegiatan)

Januari (5 kegiatan)

(1) Silaturahmi Kemenhub, Jakarta, 2 Januari 2014.

(2) Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenhub, Jakarta, 3 Januari 2014.

(3) Pelantikan Pejabat Eselon II dan III Kemenhub, Jakarta, 9 Januari 2014.

(4) Penandatangan *MoU* antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Jakarta, 15 Januari 2014.

(5) Serah terima jabatan Direktur LLAJ dan KTD, Jakarta, 17 Januari 2014.

Februari (4 kegiatan)

(1) Penyuluhan Penegakan HukumBidang LLAJ, Semarang, Jawa Tengah, 13 Februari 2014.

(2) Pembekalan Teknis Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 19 Februari 2014.

(3) Rapat Pembekalan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan di Daerah, Jakarta, 20 Februari 2014.

(4) Rapat Pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT), Jakarta, 21 Februari 2014.

Maret (7 kegiatan)

(1) Sosialisasi Kelaikan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Banjarmasin, 4 Maret 2014.

(2) Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2014, Solo, 11 Maret 2014.

(3) Kunjungan Presiden RI ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, 5 Maret 2014.

(4) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Uji Publik PM Rambu, Surabaya, 13 Maret 2014.

(5) Wawancara Dirjen Perhubungan Darat dengan wartawan *USA Today*, 18 Maret 2014.

(6) *Employee Gathering* Direktorat BSTP, Bogor, 22 Maret 2014.

(7) Peresmian KMP Inerie II, Flores, NTT, 25 Maret 2014.

April (6 kegiatan)

(1) Peresmian Pengoperasian KMP Kalabahi LintasWahai (PulauSeram),FakFak, Papua Barat, 10 April 2014.

(2) Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalantahun 2014, Bandung, 16 April 2014.

(3) Pertemuan Forum Transit VIII, Bogor, 16 April 2014.

(4) Rapat Koordinasi Teknis Terminal PenumpangAngkutanJalan, Batam, 24 April 2014.

(5) Media Visit Direktur KTD ke Kompas Gramedia, Jakarta, 28 April 2014.

(6) Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV Kemenhub, Jakarta, 28 April 2014.

Mei (5 kegiatan)

(1) Rapat Persiapan Angkutan Lebaran 2014, Jakarta, 7 Mei 2014.

(2) Serah Terima Jabatan Kepala Balai LLAJSDP Denpasar, Jakarta, 7 Mei 2014.

(3) Rapat Koordinasi Penguji Kendaraan Bermotor se-Kalimantan 2014, Balikpapan, 13 Mei 2014.

(4) Lokakarya Pengangkut Limbah B3, Bekasi, 22 Mei 2014.

(5) *The 5thVice Ministerial Level Meeting in Transportation Sector between Indonesia and Japan*, Solo, 30 Mei 2014.

Juni (7 kegiatan)

(1) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2014, Jakarta, 4 Juni 2014.

(2) Penyusunan Rencana Induk Nasional Transportasi Sungai dan Danau Wilayah Kalimantan, 10 Januari 2014.

(3) Rapat Koordinasi Teknis PPNS bidang LLAJ, Bali, 5 Juni 2014.

(4) Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Kabupaten Banyumas, Purwokerto, 11 Juni 2014.

(5) Penyusunan Rencana Induk Nasional Transportasi Sungai dan Danau Wilayah Sumatera 2014-2034, 17Januari 2014.

(6) Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor tingkat Nasional tahun 2014, Surabaya, 18 Juni 2014.

(7) Peninjauan Jalur Pantura oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2014, 20 Juni 2014.

Juli (8 kegiatan)

(1) Pembukaan Posko Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub, Jakarta, 1 Juli 2014.

(2) Peninjauan Jalur Selatan Jawa Menjelang Angkutan Lebaran 2014 oleh Menteri Perhubungan, Jawa Barat, 2 Juli 2014.

(3) Pengarahan kepada PO Bus menghadapi Angkutan Lebaran 2014, Jakarta, 17 Juli 2014.

(4) Gelar Pasukan Kesiapan Angkutan Lebaran Jawa Barat 2014, Cirebon, 16 Juli 2014.

(5) Apel Pembukaan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional 2014, Jakarta, 21 Juli 2014.

(6) Kunjungan Menhub dan Dirjen Perhubungan Darat ke Posko Angkutan Lebaran 2014, Jakarta, 22 Juli 2014.

(7) Pelepasan Mudik Gratis Direktorat LLASDP, Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 24 Juli 2014.

(8) Pelepasan Mudik Gratis Kemenhub, Jakarta, 24 Juli 2014.

Agustus (7kegiatan)

(1) Penutupan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2014, Jakarta, 6 Agustus 2014.

(2) Halal bi Halal Menhub dengan Pegawai Kemenhub, Jakarta, 4 Agustus 2014.

(3) Pelantikan Pejabat Eselon I dan II Kemenhub, Jakarta, 8 Agustus 2014.

(4) Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Halal bi Halal Keluarga besar Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 17 Agustus 2014.

(5) Peluncuran KMP Sebuku, Palembang, 19 Agustus 2014.

(6) Peresmian Terminal tipe A Pacitan, Pacitan, JawaTimur, 27 Agustus 2014.

(7) Serah Terima Jabatan Direktur KTD, Jakarta, 25 Agustus 2014.

September (7 kegiatan)

(1) Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Jalan, Solo, 3 September 2014.

(2) Pertemuan Forum Transit IX, Semarang, 4 September 2014.

(3) Pemberian Penghargaan Kementerian Perhubungan 2014, Jakarta, 10 September 2014.

(4) Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Jakarta, 17 September 2014.

(5) Peringatan Puncak Hari Perhubungan Nasional 2014, Jakarta, 12 September 2014.

(6) Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang LLAJ, Bogor, 22 September 2014.

(7) Sosialisasi PP yang terkait UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ, Makassar, 25 September 2014.

Oktober (6 kegiatan)

(1) Peluncuran Bus Trans JabodetabekPerum PPD Bantuan Kemenhub, Tangerang Selatan, 1 Oktober 2014.

(2) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ tahun 2014, Jakarta, 7 Oktober 2014.

(3) Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan AngkutanJalan 2014, Malang, 8 Oktober 2014.

(4) Rapat Koordinasi Teknisbidang Perhubungan Darat 2014, Yogyakarta, 14 Oktober 2014.

(5) Peresmian Terminal Wonogiri, Wonogiri, Jawa Tengah, 16 Oktober 2014.

(6) Pelepasan Pejabat Purna Bhakti Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 31 Oktober 2014.

November (6 kegiatan)

(1) Bimbingan Teknis Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum, Bandung, Jawa Barat, 3 November 2014.

(2) Pertemuan Menhub dengan Mitra Kerja dan Para Pengusaha Angkutan Umum (JalandanPenyeberangan), Jakarta, 3 November 2014.

(3) Jumpa Pers Menhub terkait Kenaikan Harga BBM, Jakarta, 12 November 2014.

(4) *Parent Training* bagi Pendamping Delegasi dalam rangka *Indonesia Road Safety Children Colloquium*, Jakarta, 12 November 2014.

(5) Temu Sahabat Keselamatan, Menolong Sesama di Jalan, Jakarta, 13 November 2014.

(6) Pengarahan Menhubkepada Pejabat Eselon III dan IV Kemenhub, Jakarta, 14 November 2014.

Desember (9 kegiatan)

(1) Kunjungan Delegasi Mozambik ke RTTMC Ditjen Hubdat, Jakarta, 1 Desember 2014.

(2) PelantikanPejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kemenhub, Jakarta, 8 Desember 2014.

(3) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Natal 2014 danTahunBaru 2015, Jakarta, 10 Desember 2014.

(4) Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 12 Desember 2014.

(5) Serah Terima Jabatan Sesditjen dan Direktur LLASDP, Jakarta, 15 Desember 2014.

(6) Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Kemenhub, Jakarta, 16 Desember 2014.

(7) Peninjauan Kesiapan Angkutan Natal 2014 danTahunBaru 2015, Cirebon, 17-18 Desember 2014.

(8) Peninjauan Angkutan Natal 2014 danTahun Baru 2015, Solo, 18 Desember 2014.

(9) Peninjauan Menhub dan Plt Dirjen Perhubungan Darat ke Bali danB anyuwangi Pantau Angkutan Natal 2014 danTahun Baru 2015.

b) Jumpa Pers 2014 :

Pada tahun 2014 telah dilakukan Liputan Pers banyak 5 kali dengan keterangan sebagai berikut:

(1) Press Background Penanganan Permasalahan Transportasi Perkotaan, Jakarta, 14 Maret 2014.

(2) Press Background Kondisidan Rencana Aksi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Jakarta, 11 Juni 2014.

(3) Jumpa Pers rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu 2014, Jakarta, 4 Juni 2014.

(4) Jumpa Pers Menhub terkait Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Jakarta, tanggal 12 November 2014.

(5) Jumpa Pers Akhir Tahun 2014, Jakarta, 6 Januari 2015.

c) Liputan Pers 2014 :

Pada tahun 2014 telah dilakukan Liputan Pers sebanyak 6 kali dengan keterangan sebagai berikut :

(1) Liputan Newsletter infoHUBDAT OPP Lembar, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 26 Februari 2015.

(2) Liputan Pers Kesiapan Kota Solo Menyelenggarakan Mudik Gratis Kemenhub pada masa Angkutan Mudik dan Balik Angkutan Lebaran 2014.

(3) Liputan Pers Angkutan Perintis DAMRI di Mataram dan Banten Selatan, 5 Juni 2014.

(4) Liputan Pers Peresmian Terminal Tipe A Pacitan, Pacitan, JawaTimur, 27 Agustus 2014.

(5) Liputan Pers Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat 2014, Yogyakarta, 14 Oktober 2014.

(6) Liputan Pers Peresmian Terminal Wonogiri, Wonogiri, Jawa Tengah, 16 Oktober 2014.

d) Langganan Koran

Humas Ditjen Hubdat berlangganan 16 media cetak harian nasional maupun local sebagai bahan kliping berita harian dengan daftar sebagai berikut :

(1) Kompas

(2) Seputar Indonesia (Sindo)

(3) Pos Kota

(4) Rakyat Merdeka

(5) Pelita

(6) Terbit

(7) Warta Kota

(8) Media Indonesia

(9) Suara Karya

(10) Koran Tempo

(11) Suara Pembaruan

(12) Indo Pos

(13) Republika

(14) Bisnis Indonesia

(15) Pikiran Rakyat

(16) Sinar Harapan

e) Penerbitan Newsletter

Newsletter info HUBDAT terbit berkala setiap triwulan. Pada tahun 2014 telah terbit 4 edisi sebagai berikut :

(1) Info HUBDAT edisi Maret 2014 (tema cover : OPP Lembar : Kini Atur Jadwal Kapal dan Kunjungan Presiden RI ke Pelabuhan Merak);

(2) infoHUBDAT edisi Juni 2014 (tema cover : Kemenhub Maksimalkan Persiapan Angkutan Lebaran 2014 dan Menilik Angkutan Perintis Andalan Masyarakat Daerah Terpencil);

(3) infoHUBDAT edisi September 2014 (tema cover : Analisa dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2014 dan Terminal Pacitan, Penggerak Ekonomi Masyarakat);

(4) infoHUBDAT edisi Desember 2014 (tema cover : Kilas Balik 2014).

2) Rekapitulasi Kegiatan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014

Tabel II.3. Kegiatan KSLN Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2014

NO	KEGIATAN	TEMPAT/WAKTU
1.	*Policy Dialogue and Workshop on Logistic between Indonesia and Japan.*	Bogor, Jawa Barat 28 s/d 30 Januari 2014
2.	*BIMP-EAGA 2014 Strategic Planning Meeting*	Davao City, Philippines 11-13 Februari 2014
3.	*Capacity Building Program : Building Leaders in Urban Transport Planning*	*Singapura* *20 s.d 25 Januari 2014*
4.	*The 39th APEC Transportation Working Group Meeting.*	Christchurch, Selandia Baru 31 Maret-4 April 2014
5.	*Public Transport Workshop*	Manila, Philippines 5-7 Maret 2014
6.	*The 9th ASEAN-Japan Experts Group* Meeting on Logistics.	Kuala Lumpur, Malaysia 6-7 Maret 2014
7.	*4th Public and Private Joint Forum in Asian region*-The 18th JASIC Asia	Pattaya, Thailand. 26-28 Maret 2014

NO	KEGIATAN	TEMPAT/WAKTU
	Government/Industry Meeting	
8.	*The 1st Task Force on the Implementation of ASSM (1st ASSM Task Force) back-to-back 27th ASEAN Maritime Transport Working Group (AMTWG)*	Phnom Penh, Kamboja 18-21 Maret 2014
9.	*27th ASEAN TFWG Meeting dan 3rd Expert Group Meeting on CBTP 3rd Expert Group Meeting on CBTP*	Lombok, Nusa Tenggara Barat 22-24 April 2014
10.	*"Manajemen Krisis Senior/ Senior Crisis Management (SCM)"*	Wahington DC, AS 5-9 Mei 2014
11.	*International Transport Forum (ITF) 2014*	Leipzig, Jerman. 22-23 Mei 2014
12.	*the 5th Vice Ministerial Meeting Indonesia-Japan in the Transport Sector,*	Solo, Indonesia 30-31 Mei 2014
13.	*The 12th Task Force for MRAs on Automotive Product 19th ACCSQ-Automotive Product Working Group (APWG)*	Yangon, Myanmar 6-8 Mei 2014
14.	*Training on Quantifying Urban Transport GHG* (green House Gas) Emissions	Leipzig, Jerman 17-21 Mei 2014
15.	*Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Project Review Group (PRG) Meeting.*	Perth, Australia 11 Juni 2014
16.	*BIMP-EAGA Air, Land, and Sea Linkages Working Groups Meeting*	Davao, Filipina 21-22 Mei 2014
17.	*37th ASEAN STOM*	Nay Pyi Taw, Myanmar 3-5 Juni 2014
18.	Kunjungan Kerja ke *Public Transport Authority* dan Operator Transportasi Perkotaan serta peninjauan ke fasilitas interchange antar moda	Istanbul, Turki 8-13 Juni 2014
19.	*ADB-ASEAN Regional Train the Trainer Road Safety* Capacity Building Program TA 8075-REG : Improving Road Safety	Manila, Filipina 23 Juni-4 Juli 2014
20.	*40th APEC TPT WG*	Hong Kong, China 18-22 Agustus 2014
21.	*23rd ASEAN Land Transport Working Group (LTWG),* 5th ASEAN Multisectoral Road Safety Special Working Group (MRSSWG)	Boracay Island, Aklan, Filipina. 11-15 Agustus 2014
22.	*2nd Indonesia-Australia Transport Forum*	Lombok, NTB, Indonesia 13-14 Agustus 2014
23.	*The 2nd ASSM* dan *28th ASEAN Maritime Transport Working Group (AMTWG)*	Siem Reap, Kamboja 19-22 Agustus 2014
24.	*The 2nd BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting*	Jayapura, Papua 1 s.d 5 September 2014
25.	*The 20th Meeting of the ACCSQ-Automotive Product* Working Group (APWG) 13th Task Force Meeting on the Mutual Recognition Arrangement (MRA)	Manila, Filipina. 16-18 September 2014
26.	Penyiapan Bahan Persidangan Sosek	Kedutaan Besar RI di

NO	KEGIATAN	TEMPAT/WAKTU
	Malindo tahun 2014	Kuala Lumpur, Malaysia 17-19 September 2014
27.	*4th Expert Group Meeting on Cross Border Transport of* Passenger (CBTP), 28th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG), And The 6th Transit Transport Coordination Board (TTCB)	Medan, Sumatera Utara. 29 September – 3 Oct-14
28.	*Regional Expert Group Meeting on Sustainable and Inclusive Transport Development*	Ahmedabad, India. 29 September-1-Oct-14
29.	*The 5th Public and Private Joint Forum in Asian region*	Da Nang, Vietnam
30.	-The 19th JASIC Asia Government/Industry Meeting	1-3 Oktober 2014
31.	*UN-ESCAP Committee on Transport, Fourth Session*	Bangkok, Thailand 15-17 Oktober 2014
32.	*the ASEAN-ROK Capacity Building Training Program* on Land Expropriation & Compensation and Inland Logistics	Seoul, Korea 28 Oktober-7 November 2014
33.	*ITSAP Project Review Group (PRG) Meeting* ke-15	Jakarta, Indonesia 16-Oct-14
34.	*The Climate Reality Leadership Corps (CRLC).*	Rio de Janeiro, Brazil 4-6 November 2014
35.	*The Integrated Conference of Better Air Quality(BAQ) 2014 and Intergovernmental Eighth Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia*	Colombo, Sri Lanka 19-21 November 2014
36.	*38th ASEAN STOM* dan *19th ATM*	Mandalay, Myanmar November 2014
37.	*the 9th BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting*	Bandar Seri Begawan 19 November 2014
38.	*ESCAP South-South Cooperation Programme on Accesibility for Persons with Disabilities*	Guangzhou, Macau, dan Hongkong. 10-19 Desember 2014

Sumber : Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2014.

4. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

a. Subbag Kepegawaian dan Organisasi

Dalam pelaksanaan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum telah dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui keikutsertaan pegawai pada diklat-diklat teknis.

Pengembangan SDM melalui diklat-diklat teknis guna meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan unit kerja, tidak hanya yang diselenggarakan

oleh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi juga yang dilaksanakan oleh institusi lainnya baik lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan substansi perhubungan darat.

1) Data Pegawai Ditjen Perhubungan Darat

Pegawai Ditjen Perhubungan Darat posisi tahun 2014 diklasifikasikan menurut unit kerja, golongan, pendidikan umum dan jenis kelamin sebanyak 751 pegawai. dimana yang sudah mengikuti diklat penjenjangan struktural sebanyak 159 pegawai dan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 118 pegawai. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.4. Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Setditjen	140	139	130	128	136
2.	Direktorat LLAJ	129	141	128	127	127
3.	Direktorat LLASDP	95	95	71	70	69
4.	Direktorat BSTP	83	89	78	73	75
5.	Direktorat KTD	57	64	62	59	63
6.	UPT. BPLJSKB Bekasi	56	63	55	53	51
7.	UPT. PelabuhanPenyeberangan	56	69	59	42	43
8.	DAMRI	11	9	7	0	0
9.	Dishub/TugasPerbantuan Daerah (D-III ALL/LLASDP)	1	0	0	0	0
10.	KOPP Merak	-	-	11	13	21
11.	KOPP Gilimanuk	-	-	6	8	21
12.	KOPP Lembar	-	-	7	11	18
13.	KOPP Pagimana	-	-	5	26	42
14.	BLLAJSDP Jambi	-	-	4	6	21
15.	BLLAJSDP Denpasar	-	-	11	13	23
16.	BLLAJSDP Palangkaraya	-	-	6	8	12
17.	BLLAJSDP Palu	-	-	4	12	23
Jumlah		**628**	**669**	**644**	**649**	**751**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Tabel II.5. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Golongan IV	50	50	55	56	67
2.	Golongan III	419	441	436	447	486
3.	Golongan II	158	177	152	142	197
4.	Golongan I	1	1	1	1	1
Jumlah		**628**	**669**	**644**	**649**	**751**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Tabel II.6. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Doktoral/S3	1	1	1	2	3
2.	PascaSarjana/S2	95	112	135	141	161
3.	Spesialis	4	3	3	3	3
4.	Sarjana/S1	197	215	214	228	233
5.	Diploma IV	28	37	42	45	58

No.	Pendidikan Terakhir	2010	2011	2012	2013	2014
6.	Diploma III/SarjanaMuda	105	121	100	92	130
7.	Diploma I/II	17	21	20	20	23
8.	SMU	175	152	124	114	26
9.	SLTP	4	5	4	3	3
10.	SD	2	2	1	1	1
Jumlah		**628**	**669**	**644**	**649**	**751**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Tabel II.7. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JenisKelamin	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perempuan	156	177	167	160	189
2.	Pria	472	492	477	489	562
Jumlah		**628**	**669**	**644**	**649**	**751**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Tabel II.8. Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat Penjenjangan Struktural	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Lemhanas	-	0	0	1	1
2.	Sepati/Dikpim I	1	1	2	2	1
3.	Sespa/Spamen/Dikpim II	16	14	14	15	15
4.	Sepadya/Spama/Dikpim III	49	44	45	45	48
5.	Sepala/Adum/Dikpim IV	60	63	76	87	94
Jumlah		**126**	**122**	**137**	**150**	**159**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Tabel II.9. Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Eselonering	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Eselon I	1	1	1	1	1
2.	Eselon II	5	5	5	5	4
3.	Eselon III	24	24	31	32	31
4.	Eselon IV	60	60	83	80	80
5.	Eselon V	4	4	4	4	2
Jumlah		**94**	**94**	**124**	**122**	**118**

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

Dari data di atas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir komposisi formasi pegawai relatif tidak banyak perubahan, terutama dari segi jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan mulai berimbangnya jumlah mutasi pegawai (pensiun, pindah unit kerja, termasuk tugas perbantuan daerah) dengan pengadaan pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2) Posisi Pelaksanaan Tugas

a) Bidang Kepegawaian dan Organisasi

1) Realisasi Kepangkatan PNS

Dalam periode April sampai dengan Oktober 2014 terdapat formasi kenaikan pangkat (KP) sebanyak 187 pegawai, dengan rincian:

(a) Kenaikan Pangkat Reguler : 166 pegawai

(b) Kenaikan Pangkat Pilihan : -

(c) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah: 11 pegawai

(d) Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu: 10 pegawai

2) Pensiun Pegawai

Dalam tahun anggaran 2014, jumlah pensiun pegawai sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian :

(a) Golongan IV : 6 pegawai

(b) Golongan III : 1 pegawai

(c) Golongan II : -

Pegawai yang meninggal pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian :

(a) Golongan IV : 1 pegawai

(b) Golongan III : 1 pegawai

3) Pemberian Tanda Penghargaan

Dalam upaya pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun anggaran 2014, telah diberikan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada 57 pegawai dengan rincian :

(a) Satyalancana Wira Karya : - pegawai

(b) Satyalancana Karya Satya 30 tahun : 13 pegawai

(c) Satyalancana Karya Satya 20 tahun : 11 pegawai

(d) Satyalancana Karya Satya 10 tahun : 33 pegawai

Tanda penghargaan dimaksud merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas pengabdian PNS dalam melaksanakan tugasnya.

4) Diklat Teknis Fungsional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2014 dilakukan penyiapan daftar pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 128 pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik dilingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

(a) Diklat Kepemimpinan : 21 pegawai

(b) Diklat Luar Negeri : 1 pegawai

(c) Diklat Dalam Negeri : 149 pegawai

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2014 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam pembinaan kepegawaian dan tata kelola organisasi yang baik, yang meliputi :

(a) Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.

(b) Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2015.

(c) Sosialisasi Bidang Kepegawaian Tahun 2014.

(d) Penyertaan Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional dan Short Courses baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun diluar Kementerian Perhubungan.

(e) Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

(f) Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

(g) Pemetaan Profile Potensi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.

(h) Peningkatan Kemampuan pelaksanaan Tugas Pegawai Ditjen Perhubungan Darat.

(i) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian.

(j) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu) Di lingkungan Ditjen Hubdat.

(k) Penataan Nomenklatur Jabatan Teknis dan Penyempurnaan Uraian Jabatan/Pekerjaan Direktorat Jenderal.

(l) Penyusunan dan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan KM 68 Tahun 2013.

(m) Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM bidang LLAJSDP.

(n) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan usulan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.

(o) Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.

(p) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.

(q) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional PKB.

(r) Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat.

Gambar II.1. Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM bidang LLAJSDP

Gambar II.2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

b. Subbag Tata Usaha

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sepanjang tahun 2014 meliputi :

1) Penyiapan Dan Penyusunan Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Subbag Tata Usaha melakukan kegiatan rutin dalam pengelolaan administrasi penggajian dengan menyiapkan ± 751 data gaji dan tunjangan pegawai sepanjang tahun 2014 yang meliputi Gaji Induk (Bulanan), Gaji Susulan, Persekot Gaji,Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat, Uang Duka Tewas, dan

Gaji ke-13, uang makan, uang lembur , Daftar Pembayaran Tunjangan Pegawai, KP4, SPT Pajak. Data – data tersebut selanjutnya diproses dan menghasilkan Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2) Updating Data Pegawai

Updating Data Pegawai merupakan kegiatan rutin pengelolaan data kepegawaian, yang meliputi pengumpulan data pegawai dengan melakukan updating (perubahan / pendataan kembali) dan menghasilkan laporan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) dan Data Nominatif per triwulan. Dalam melakukan tugas updating data digunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) mencakup proses yang berkaitan dengan perencanaan Sumber Daya Manusia, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan serta Pensiun Pegawai. Subbag Tata Usaha selalu melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dengan menghadiri undangan Rakor Data dan Informasi, Evaluasi dan pemuktahiran Data. Berikut Update Data Pegawai pada Desember 2014.

Tabel II.10. Tabel Data Pegawai

No.	Unit Kerja	Tahun 2014
1	Setditjen Hubdat	136
2	Direktorat LLAJ	127
3	Direktorat LLASDP	69
4	Direktorat BSTP	75
5	Direktorat KTD	63
6	UPT BPLJSKB Bekasi	57
7	UPT Penyeberangan	43
8	KOPP Merak	21
9	KOPP Gilimanuk	21
10	KOPP Lembar	18
11	KOPP Pagimana	42
12	BLLAJSDP Jambi	21
13	BLLAJSDP Denpasar	23
14	BLLAJSDP Palangkarya	12
15	BLLAJSDP Palu	23
	Jumlah	751

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

3) Pengelolaan Tata Persuratan dan Tata Naskah

Pengelolaan Tata Persuratan merupakan kegiatan rutin Subbag Tata Usaha dengan melakukan penomoran surat masuk dan surat keluar sebanyak ± 10.000 sepanjang tahun 2014. Sedangkan untuk Pengelolaan Tata Naskah Subbag Tata

Usaha selalu memberikan informasi, monitoring dan evaluasi Tata Naskah persuratan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

4) Pengelolaan Kearsipan

Dalam Pengelolaan Kearsipan Subbag Tata Usaha melakukan beberapa Kegiatan antara lain :

a) Sepanjang tahun 2014 Penataan dan pemeliharaan arsip dilakukan pada 2 (dua) lokasi. Lokasi pertama pada Kantor Pusat Ditjen Hubdat Subbag Tata Usaha melakukan penataan dan penyusunan arsip inaktif sebanyak ±1.597 berkas dan lokasi kedua di Depo Arsip Kementerian Perhubungan di Bandung dengan jumlah arsip inaktif sebanyak ±1.332 berkas.

Gambar II.3. Dokumentasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip

b) Pengiriman dan Penyusutan Arsip ke Depo Arsip di Bandung dan Gedung Arsip Ditjen Hubdat di bekasi.

c) Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan Ditjen Hubdat yang dituangkan dalam **Perdirjen Nomor : SK.6840/UM.001/DRJD/2013**

d) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip Vital sebanyak 25.852 lembar yang terdiri atas :

Tabel II.11. Tabel Digitalisasi Arsip Vital

No	Tahun	Jumlah Digitalisasi
1	2000	7.407 Lembar Arsip SK
2	2001	5.123 Lembar Arsip SK
3	2002	6.980 Lembar Arsip SK
4	2003	6.342 Lembar Arsip SK

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubdat – 2014.

5) Penggandaan dan Pencetakan

Penggandaan bahan –bahan kerja pegawai, pencetakan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta Peraturan - Peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

6) **Pengiriman Surat Dinas**

Pengiriman / ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Ditjen Perhubungan Darat maupun Instansi lainnya.

7) **Pengelolaan Sistem Absensi Elektronik Pegawai**

Sistem Absensi Elektronik Pegawai diberlakukan pada awal tahun 2014 lalu memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan kehadiran pegawai. Subbag Tata Usaha memiliki tanggung jawab dalam hal Pembinaan Kedisiplinan Pegawai sangat terbantu dengan diberlakukannya absensi elektronik tersebut.

8) **Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian**

Penyelenggaraan Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian merupakan kegiatan dalam rangka pembinaaan Sumber Daya Manusia untuk menambah bekal pemahaman pada Peraturan – Peraturan di bidang Ketatausahaan Kepegawaian mengenai Undang – Undang, Peraturan Pemerintah Bidang Ketatausahaan Kepegawaian (Sistem Administrasi Perkantoran, Tata Naskah, Kearsipan dan Budaya Kerja). Kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian dilakukan di bulan Oktober selama 3 hari di kota Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 50 pegawai dan mengundang 6 narasumber di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menangani bidang Kearsipan dan Pengelolaan Data dan Informasi serta ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Gambar II.4. Dokumentasi Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian

9) **Digitalisasi Berkas Data Pegawai.**

Pengolahan Arsip pegawai berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan nama (Sistem Informasi Arsip Pegawai) SIAP adalah suatu Sistem Informasi yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip data pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sistem Informasi ini berbasis web dan dapat diakses melalui jaringan intranet maupun internet menggunakan browser oleh seluruh pegawai. Sistem Informasi Arsip Pegawai menggunakan teknologi digital arsip yang merupakan sebuah konsep penataan arsip/dokumen ke dalam bentuk elektronik secara terstruktur dalam suatu media yang terintegrasi. Untuk tahun 2014 Subbag Tata Usaha telah mengerjakan Digitalisasi Arsip berkas data pejabat Struktural Eselon I,II,III dan IV, dengan jumlah 11.140 lembar yang terdiri atas data SK,DRH, DP3, Ijasah, Sertifikat dan arsip data pegawai lainnya.

c. **Subbag Rumah Tangga**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 di bidang kerumah tanggaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, meliputi :

1) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mencakup : pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan pembuatan laporan barang milik negara tiap semester;
2) Pengadaan keperluan operasional kantor seperti : alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
3) Pengadaan pakaian Dinas harian sesuai dengan jumlah pegawai
4) Pengadaan pakaian Korpri sesuai dengan jumlah pegawai;
5) Pengadaan pakaian olahraga sesuai dengan jumlah pegawai;
6) Pengadaan pakaian kerja satpam;
7) Pengadaan pakaian kerja pramubakti;
8) Pengadaan obat-obatan dan honorarium dokter dan perawat pada poliklinik;
9) Pengelolaan Limbah pada poliklinik;
10) Pengadaan barang inventaris kantor seperti : Komputer, Notebook, Monitor TV, Scanner, Printer, Camera DSLR, Eksternal Hard disc, Lemari Arsip, LCD Projector,

Mesin Faximile/ telepon, Meubelair Kantor, AC Split, Penghancur kertas, Alat pengukur jarak inframerah, Alat Perekam suara, dan Trolli Barang;

11) Pengadaan Peralatan pada Gedung Arsip;
12) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4;
13) Perbaikan Barang Inventaris Kantor;
14) Perawatan Vinyl Lantai;

Gambar II.5. Perawatan Vinyl Lantai

15) Perawatan Ruang Setditjen;
16) Perawatan Ruang Direktorat LLAJ;
17) Perawatan Ruang Direktorat LLASDP;
18) Perawatan Ruang Direktorat BSTP;
19) Perawatan Ruang Direktorat KTD;
20) Perawatan Gedung Karsa lantai 3;
21) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 2, Roda 4 dan Roda 6;
22) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga keamanan;
23) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga pramubakti;
24) Pelayanan urusan dalam lainnya.

B. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. SUB DIREKTORAT JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
4) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan
6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

a. Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Terminal Solo tahap VI;

   Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) diperuntukkan untuk membangun :

   a. Pekerjaan lanjutan anjungan
   b. Pekerjaan pagar dan talud
   c. Pekerjaan rigid pavement
   d. Pekerjaan landscape dan PJU
   e. Pekerjaan prasarana
   f. Pekerjaan Gapura
   g. Pekerjaan gedung parkir bus malam

2) Rehabilitasi Terminal Purabaya Tahap VI;

   Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) diperuntukkan untuk membangun :

   a. Pekerjaan Struktur (area Kantor UPT, Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP)
   b. Pekerjaan Arsitektur (area Kantor UPT, Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP)
   c. Pekerjaan M/E (area Kantor UPT, Ruang Tunggu Keberangkatan AKDP)
   d. Pekerjaan Rumah Pompa dan Groundwater Resevoir.

Gambar II.6. Bangunan Terminal Purabaya Tahap IV

3) Rehabilitasi Terminal Bawen tahap II;

Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) diperuntukkan untuk membangun :

a. Pekerjaan Area Keberangkatan AKAP/AKDP
b. Pekerjaan Gedung Kedatangan AKAP/AKDP
c. Pekerjaan Jalur Keberangkatan

4) Rehabilitasi Terminal Cilacap tahap I;

Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) diperuntukkan untuk membangun :

a. Pekerjaan Gedung Utama
b. Pekerjaan Gedung Ruang Tunggu Keberangkatan AKAP/AKDP
c. Pekerjaan Ruang Utilitas
d. Pekerjaan Area Istirahat Pengemudi

5) Pembangunan terminal penumpang di Kabupaten Pacitan tahap V;

Pembangunan Terminal Pacitan tahap V (lima) di tahun 2014 adalah pembangunan tahap akhir terminal Pacitan, saat ini terminal pacitan telah beroperasi.

Gambar II.7. Bangunan Utama dan Ruang Tunggu Terminal Pacitan Tahap V

6) Pembangunan terminal penumpang Tipe A di Kota Depok tahap IV;

Pada Tahun 2014 merupakan pembangunan tahap ke 4(empat), pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk membangun :

a. Pekerjaan lanjutan finishing Gedung Utama Terminal
b. Pekerjaan M/E Gedung Utama Terminal

7) Pembangunan terminal penumpang di Sukabumi tahap II;

Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk membangun :

a. Pekerjaan Emplacement Jalan Masuk Belakang Terminal

b. Pekerjaan Pos Jaga

c. Pekerjaan Kanstein

Gambar II.8. Emplacement Jalan Masuk Belakang Terminal Penumpang Sukabumi Tahap II

8) Pembangunan terminal penumpang Wonogiri tahap V ;

Pada Tahun 2014 pelaksanaan pembangunan tahap akhir diperuntukkan untuk membangun :

a. Pekerjaan lanjutan anjungan

b. Pekerjaan pagar dan talud

c. Pekerjaan rigid pavement

d. Pekerjaan landscape dan PJU

e. Pekerjaan prasarana

f. Pekerjaan Gapura

g. Pekerjaan gedung parkir bus malam

9) Melakukan penilaian Kinerja dan tata laksana penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A ;

Penilaian kinerja dan tata laksana penyelenggaraan terminal tipe A merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai terminal dari sisi kinerja pelayanan terminal dan kebersihan terminal itu sendiri. Kegiatan ini merupakan aksi dari perhubungan darat untuk mendukung gerakan Indonesia bersih.

Gambar II.9. Penyerahan Penghargaan penilaian Kinerja dan tata laksana penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A

10) Melakukan monitoring evaluasi perencanaan dan pembangunan terminal penumpang tipe A;

11) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyusunan Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

    Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ beserta Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan serta untuk mendapatkan masukan sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya sebagai mana yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Kegiatan ini dilaksanakan di 2(dua) kota yaitu Yogyakarta dan Makassar.

12) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014;

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan menjadi Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, dengan cara mengumpulkan para Kepala Dinas di Kota Batam.

Gambar II.10. Rapat Kerja Teknis Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tahun 2014

13) Melakukan perumusan rancangan peraturan menteri perhubungan bidang LLAJ tahap II;

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perbaikan-perbaikan terhadap konsep-konsep Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Bidang LLAJ berdasarkan masukan-masukan yang disepakati dalam rapat pembahasan dan menyusun konsep-konsep akhir Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Bidang LLAJ sebagai hasil kesepakatan dalam rapat pembahasan.

14) Perumusan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Peti Kemas dan Alat Berat di Pulau Sumatera;

Melakukan penyusunan kebijakan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, peti kemas dan Alat Berat di Pulau Sumatera.

Menyusun konsep peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan lintas angkutan peti kemas dan alat berat di Sumatera untuk kondisi saat ini maupun prediksi yang akan datang.

15) Perencanaan teknis Sertifikasi petugas terminal penumpang angkutan jalan;

Melakukan analisis faktor-faktor yang terkait dengan penetapan standar sertifikasi petugas terminal penumpang dan Menyusun konsep pedoman sertifikasi petugas terminal penumpang angkutan jalan.

16) Perumusan dan penetapan standar akreditasi tipe terminal penumpang angkutan jalan;

Tujuan dari kegiatan ini adalah penyusunan konsep standar akreditasi tipe terminal penumpang angkutan jalan dan penyusunan draf SK Dirjen mengenai standar akreditasi tipe terminal.

17) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

Kegiatan ini meliputi :

a. Melakukan identifikasi permasalahan pelayanan terminal angkutan penumpang menurut pengguna jasa;
b. Melakukan penyusunan kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
c. Menyusun konsep peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

18) Perumusan dan penetapan simpul terminal penumpang angkutan jalan tipe A di Pulau Jawa dan Sumatera;

    Melakukan analisis penyusunan kebijakan penetapan simpul terminal penumpang di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan menyusun konsep peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai penetapan simpul terminal penumpang angkutan jalan tipe A di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

19) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Penyusunan Kompetensi Petugas Terminal

20) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Interkoneksi Manajemen Operasional Terminal Tipe A.

21) Perumusan dan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional

    Kegiatan ini meliputi :

    a. Penyusunan konsep Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional khusus Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan untuk antar kota yang melebihi wilayah provinsi.
    b. Penyusunan konsep peraturan mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional khusus Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan untuk antar kota yang melebihi wilayah provinsi.

22) Perencanaan dan Penetapan Jaringan Lintas Peti Kemas dan Alat Berat di Pulau Sumatera;

    Kegiatan ini meliputi:

    a. Melakukan penyusunan kebijakan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, peti kemas dan Alat Berat di Pulau Sumatera.
    b. Menyusun konsep peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan lintas angkutan peti kemas dan alat berat di Sumatera untuk kondisi saat ini maupun prediksi yang akan datang.

23) Penyusunan Pedoman Penetapan dan rencana lokasi terminal Barang untuk Umum;

    Melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap simpul terminal barang untuk umum angkutan jalan di Indonesia. Memberikan masukan konsep Pedoman Penetapan dan Rencana Simpul Terminal Barang untuk Umum Angkutan Jalan dalam bentuk *legal drafting* dan naskah akademis.

b. Seksi Pengembangan Transportasi Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Sewa Jaringan komunikasi CCTV di 45 Lokasi

   Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. Adapun ke 45 lokasi yang dimaksud adalah Terminal Merak, Pintu Tol Merak, ASDP Merak, Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Patrol, Losarang, Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Losari JT Tanjung (Brebes), Padalarang, Cileunyi, Nagrek, JT Gentong, Sadang, Kadipten, Sumpiuh, Ciamis, Comal, Karanganyar, JT. Kulwaru, Simpang Jomin II, Pamanukan, Ciasem, Pasar Eretan, Subang, Pasar Limbangan, Perempatan Naregong, Wangon, Karangpucung, Ketanggungan, Keluar Tol Pejagan,Tarahan Lampung, Bakauheni Lampung, Tanjung Pura Karawang, Flyover Karawang, Gadog Puncak, Ciawi, Jalan Baru Nagrek Cicalengka, Jalan Baru Nagrek Cikaledong, Malangbong.

2) Operasional dan pengembangan VMS;

3) Revitalisasi dan Pengembangan sistem RTTMC;

4) Operasional dan pemeliharaan CCTV;

5) Pemeliharaan LPJU tenaga surya CCTV;

6) Revitalisasi Smartcard Terminal

7) Pengembangan Sistem Informasi Jaringan Jalan berbasis WEBGIS;

   Pengembangan Sistem Informasi Jaringan Jalan berbasis WEBGIS ini mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta memberikan peranan kepada masyarakat sebagai subyek dalam memberikan informasi tentang kinerja jaringan jalan. Dengan terbatasnya petugas dan infrastruktur LLAJ di lapangan maka peranan masyarakat sebagai pengguna langsung jaringan jalan sangat di butuhkan.

8) Pengadaan dan Pemasangan CCTV penunjang angkutan lebaran di 10 (Sepuluh) lokasi,

   Pengadaan dan pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pemantauan arus dan kepadatan lalu lintas terutama pada saat masa Angkutan Lebaran yang menyebabkan timbulnya titik-titik kemacetan di sepanjang jalur yang dilalui oleh pemudik. Adapun 10 lokasi pemasangan CCTV yaitu Tanjakan Tarahan Lampung, Bakauheni Lampung, Tanjung Pura

Karawang, Fly Over Karawang, Pertigaan Pantura Ciasem, Gadog Puncak, Ciawi, Jalan Baru Nagrek Cicalengka, Jalan Baru Nagrek, Malangbong;

9) Pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di terminal Pacitan;
10) Pengembangan Tenaga listrik terminal penumpang AKAP;
11) Peningkatan kinerja jaringan transportasi jalan mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran di Jawa Barat;
12) Penyusunan Penentuan Kinerja (PK) Tahun 2014.
13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.
14) Penyusun Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2014.

    Melakukan pengumpulan dan memperbarui data yang terkait dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka. Data yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15) Penyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2014.

    Melakukan pengumpulan dan penyusunan hasil laporan kegiatan yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama tahun 2014.
16) Melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2014/1435 H

    Mengumpulkan data dan meyusun laporan terkait penyelenggaraan angkutan lebaran, data yang dikumpulkan ialah data yang moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara dan moda perkeretaapian.
17) Melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan angkutan Natal 2014 dan Tahun baru 2015;

    Mengumpulkan data dan meyusun laporan terkait penyelenggaraan angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, data yang dikumpulkan ialah data yang moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara dan moda perkeretaapian.
18) Penyusunan RKAKL bidang LLAJ tahun 2014
19) Penyusunan Renstra 2015-2019 Direktorat LLAJ
20) Melaporkan hasil evaluasi Satker daerah Provinsi untuk triwulan III tahun 2014.
21) Penyusunan SIM Database Terminal Penumpang Tipe A di Pulau Sumatera

Maksud dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data teknis baik data sekunder atau data primer di wilayah studi sebagai bahan masukan dalam pengisian content website SIM database terminal penumpang tipe A.

22) Penyusunan Pedoman Andalalin Pembangunan Terminal

Kegiatan ini meliputi :

a. Melakukan identifikasi dan kajian terhadap hal-hal mengenai penilaian andalalin pembangunan terminal penumpang dan terminal barang angkutan jalan.
b. Menyusun pedoman penyusunan dan penilaian Andalalin pembangunan terminal penumpang dan terminal barang angkutan jalan.
c. Menyusun konsep peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai pedoman penyusunan dan penilaian Andalalin pembangunan terminal penumpang dan barang angkutan jalan.

2. SUB DIREKTORAT SARANA ANGKUTAN JALAN

Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 68 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;
2) Penyiapan bahan penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;

3) Penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan
6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2014
   Memberikan penyuluhan kepada para penguji dengan materi/metode yang telah ditentukan seperti ceramah, diskusi dan pelatihan mengenai perkembangan teknologi kendaraan bermotor beserta peralatan pengujiannya. Dilaksanakan di Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang ;
2) Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014
   Melakukan penilaian/seleksi terhadap para penguji kendaraan bermotor dari masing-masing Kabupaten/Kota. Dilaksanakan di Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang;
3) Harmonisasi bidang Otomotif dan Penyelenggaraan Indonesian Automotive Standard Internationalization Forum (IASIF) Tahun 2014
   Forum ini merupakan wahana bagi stake holders bidang otomotif di Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah (Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan BPPT), industri (ATPM, importir, karoseri, dan bengkel rekondisi), serta akademisi untuk membahas masalah regulasi

otomotif, harmosisasi peraturan sektor otomotif Indonesia dan dunia (regional maupun internasional). Dilaksanakan di Bandung;

4) Pemeliharaan (Surveilance) Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe sesuai Standar ISO 9001 : 2008 Tahun 2014.

   Melakukan pelatihan internal audit ISO 9001:2008 bagi internal auditor proses pengesahan sertifikat uji tipe dan registrasi uji tipe kendaran bermotor, melakukan workshop untuk mengetahui costumer feedback, melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pelaksanaan internal audit, melakukan pelaksanaan tinjauan manajemen, dan melakukan audit surveilance. Dilaksanakan di Bandung;

5) Pengembangan dan Pemeliharaan Link Sytem

   Koordinasi dengan instansi terkait didaerah sebagai unit pengujian untuk mencari data PKB di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, melakukan Instalasi SIM PKB dan memberikan pelatihan kepada staf pengujian kendaraan bermotor dalam rangka migrasi data, mengadakan perangkat keras dan install perangkat pendukung, pemasangan peralatan dan instalasi sistem Kementerian Perhubungan, penyediaan koneksi internet selama satu tahun di Kementerian Perhubungan, training penggunaan system dan pendampingan selama satu tahun, dan jasa pemeliharaan selama satu tahun.

6) Pengembangan dan Pemeliharaan Digitalisasi

   Memelihara dan Pengembangan sistem informasi untuk Uji Tipe dan Rancang bangun kendaraan bermotor yang sudah ada dan terbangun, dan dapat mengikuti perkembangan yang ada.

7) Review DED Test Track Balai Uji Tipe Kendaraan Bermotor

   Melaksanakan pekerjaan teknis jalan (Final Engineering) lengkap yang mencakup pengukuran topografi dan perencanaan teknis DED Kawasan guna pembangunan Kawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Cibitung;

8) Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor

   Melakukan pengujian tipe CBU dan pengecekan varian tipe kendaraan bermotor. Surat keterangan yang telah diterbitkan sebanyak 142 surat.

9) Penerbitan sertifikat uji tipe (SUT) kendaraan bermotor.

   Selama tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 840 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.12. Penerbitan SUT

No	Jenis	Jumlah
1.	Sepeda motor	185
2.	Kendaraan bermotor roda 3	8
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	528
4.	Landasan kendaraan bermotor	87
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	24
6.	Kendaraan Khusus	8
TOTAL		**840**

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2014.

10) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT)

Untuk tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 355.149 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut:

Tabel II.13. Penerbitan SRUT

No	Bulan	Cetak/Kirim ke APM & Dishub	CBU Bekas	Rusak	Total
1.	Januari	38.291	7	30	38.328
2.	Februari	38.334	4	46	38.384
3.	Maret	29.354	32	38	29.424
4.	April	32.478	6	96	32.580
5.	Mei	29.464	1	69	29.534
6.	Juni	12.901	0	46	12.947
7.	Juli	26.902	2	20	26.924
8.	Agustus	38.677	0	245	38.922
9.	September	22.807	0	108	22.915
10.	Oktober	15.426	26	22	15.474
11.	November	43.781	45	131	43.957
12.	Desember	25.736	1	23	25.760
TOTAL		**354.151**	**124**	**874**	**355.149**

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2014.

11) Penerbitan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor.

Selama tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 228 sertifikat dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14. Penguji Kendaraan Bermotor

No	Jenjang Kompetensi	Jumlah
1.	Pelaksana Pemula	61
2.	Pelaksana	120
3.	Pelaksana Lanjutan	25
4.	Penyelia	22
TOTAL		**228**

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2014

12) Data Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk tahun 2014 dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi data unit pengujian kendaraan bermotor adalah :

Alat uji non mekanik : 211 unit

Alat uji mekanik : 282 unit

Alat uji keliling : 38 unit

13) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetakan buku uji;

14) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang rekomendasi distribusi buku uji;

15) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetak stiker tanda samping;

16) Melakukan witness uji emisi kendaraan bermotor di Jepang, Thailand, Vietnam, China dan India.

b. Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi;

Perawatan peralatan kalibrasi alat uji pengujian kendaraan bermotor, Kalibrasi peralatan kalibrasi alat uji pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi peralatan kalibrasi, dan Pengadaan Peralatan Kalibrasi.

2) Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan terkait pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Bandung.

3) Pelaksanaan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;

Total surat keterangan kegiatan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang dikeluarkan selama tahun 2014 berjumlah 92 surat keterangan.

4) Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;

Selama tahun 2014 telah dihasilkan sebanyak 1.551 Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.15. Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Rancang bangun kereta tempelan	42
2.	Rancang bangun kereta gandengan	1
3.	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	1.440
4.	Sistem Pemasangan BBG	-
	TOTAL	**1.482**

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2014.

5) Penilaian fisik kendaraan dalam rangka penghapusan kendaraan dinas milik instansi pemerintah.

   Selama tahun 2014 terdapat 56 unit kendaraan dinas milik kementerian dan BUMN telah dinilai kondisi teknisnya dalam rangka penghapusan dari daftar inventaris negara. Penilaian kondisi teknis merupakan salah satu syarat penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah.

6) Pencetakan Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor serta Sertifikat dan Stiker Kalibrasi.

   Mencetak Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor untuk masing-masing jenjang, membuat Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor untuk masing-masing jenjang, mencetak Sertifikat Kalibrasi untuk masing – masing unit Pengujian Kendaraan Bermotor, mencetak Stiker Tanda Kalibrasi untuk masing – masing alat uji kendaraan bermotor.

3. SUB DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;

3) Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
5) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
6) Penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
7) Penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Maluku Utara;

   Maksud dari Bimbingan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah memberikan Bimbingan Teknis kepada petugas perhubungan di daerah dan pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
2) Penetapan Petunjuk Peringatan,Perintah atau Larangan Pada Jalan Tol (Jawa barat dan Jawa Timur);
3) Perumusan Penetapan No. Rute Jalan Nasional di Maluku dan Maluku Utara;
4) Penetapan Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Pulau Jawa;
5) Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lau Lintas Jalan;
6) Peraturan Menteri nomor 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan;
7) Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
8) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas;

Memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tersusunnya sistem informasi Lalin yang dapat menyajikan data-data seperti jembatan timbang dan Fasilitas Perlengkapan Jalan secara cepat dan tepat termuat beberapa informasi dalam matrik dan multimedia visual yang akan diinput oleh Satker sementara APBN di setiap provinsi.

Gambar II.11. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi SIMLALIN

9) Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Lalu Lintas;
10) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahap VI;
11) Pemeliharaan Sistem Informasi Lalin di Jalan Nasional.

b. Seksi Perlengkapan Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, Seksi Perlengkapan Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Semiloka Perlengkapan Jalan di Manado;
2) Sosialisasi Perusahaan Perlengkapan Jalan di Bali;
3) Pembinaan dan Sosialisasi Jembatan Timbang di Semarang;
4) Pembangunan laboratorium fasilitas perlengkapan jalan tahap V;
5) Penyusunan Struktur dan Kelembagaan Laboratorium Fasilitas Perlengkapan Jalan;
6) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap VI di Jalur Pantura;

7) Pengadaan dan Pemasangan LPJ Solar Cell Tahap VI di Jalur Pansela;
8) Pengadaan dan pemasangan LPJ Solar Cell Tahap VI di Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera;
9) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell di Jalur Pantura;
10) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell di Jalur Pansela;
11) Rehabilitasi APILL di Jalan Nasional di Pulau Jawa Berbasis Solar Cell tahap VI;
12) Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk ASIA dan ASEAN HIGHWAY;
13) Pengembangan Sistem Informasi E-enforcement Penanganan Angkutan Barang di PKB dan JT di Pulau Jawa;
14) Pengadaan Peralatan Penunjang System Informasi Lalin di Jalan Nasional;
15) Pengadaan Alat Uji Fasilitas Perlengkapan Jalan;
16) Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Masa Angkutan;
17) Penetapan Operasional Jembatan Timbang;
18) Inventarisasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan Untuk ASIA dan ASEAN HIGHWAY di P. Sumatera-Jawa-Bali Tahap IV;
19) Kajian Teknis Pengunaan Pengenal Lokasi (identifikator) Pada Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan;
20) Inventarisasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan untuk Asia dan ASEAN Highway;
21) Survey TC Angkutan Lebaran Tahun 2014;
22) Survey Sarana dan Prasarana kegiatan Angkutan Lebaran 2014.

4. SUB DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN

Sub Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berabahaya dan Alat Berat, pemberian Izin Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat serta perhitungan tarif angkutan umum sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya dalam :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk

mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
3) Penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dan alat berat di jalan;
4) Penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
6) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, Sub Direktorat Angkutan Jalan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Rakernis Bidang Angkutan Jalan

   Kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Jalan dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan September 2014. Maksud dilaksanaannya Kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2014 di Kota Solo adalah untuk Mengevaluasi dan Mensosialisasikan kebijakan – kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menyangkut upaya membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan Angkutan umum di jalan, yaitu Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis, Perusahaan Angkutan Umum AKAP, AJAP, Pariwisata dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat.

Gambar II.12. Rakernis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2014

b. Heregistrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Perusahaan Angkutan Jalan

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan melaksanakan amanat Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyelenggaraan pemberian perizinan angkutan umum dalam trayek, dilakukan kegiatan pendataan ulang atau Her-Registrasi kepada perusahaan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek perihal kondisi manajemen perusahaan yang meliputi data administrasi perusahaan, armada serta operasional di lapangan.

Kegiatan Her-Registrasi kepada sebagian Perusahaan Angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek di Pulau Bali, yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Oktober Tahun 2014, dengan hasil :

(1) Tersusunnya data perizinan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang terbaru tentang operasional dan pelayanan dari masing – masing Perusahaan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek;

(2) Tersusunnya data tentang ketersediaan sarana angkutan AKAP di lapangan sebagai dasar dalam pemberian izin penyelanggaraan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek;

(3) Terciptanya pelayanan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang lebih mengutamakan keselamatan/kualitas pelayanan kepada pengguna jasa;

Gambar II.13. Her-Registrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Angkutan Perusahaan Jalan Tahun 2014

c. Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan

Kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dilaksanakan di Kota Bandung pada bulan April 2014. Maksud dilaksanaannya kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2014 di Kota Bandung ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah menyangkut upaya pemerintah untuk membantu usaha angkutan dan memberikan motivasi usaha serta peningkatan performance usaha dibidang angkutan.

Gambar II.14. Kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2014

d. Pelaksanaan Pemilihan Perusahaan Angkutan Jalan dengan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2014 (1433 H)

Kegiatan ini sebagai upaya Pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan antar kota antar provinsi melalui pemberian Reward bagi Perusahaan Angkutan Umum yaitu dengan melakukan Pemilihan Pengusaha Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan Angkutan Pariwisata yang diharapkan tidak hanya dilakukan pada periode Angkutan Lebaran saja tapi merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sekali pada semua perusahaan angkutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari hasil kegiatan yang dilakukan, diperoleh penganugrahan kepada Perusahaan yang terbaik dengan berbagai kategori, yaitu :

(1) Kategori AKAP Ekonomi Terbaik
   a) PO. Litha & Co Transport di Kota Makassar;
   b) PO. Bima Suci di Kabupaten Jakarta;
   c) PT. Sinarjaya Megahlanggeng di Jakarta;

(2) Kategori AKAP Non Ekonomi Terbaik
   a) CV. Bintang Sempati di Banda Aceh;
   b) PO. Samarinda Lestari di Kota Balikpapan;
   c) PT. Hiba Utama cq Laju Prima di Kota Jakarta;
   d) PO. San Putra Sejahtera di Kota Bengkulu;
   e) PO. Eka di Kabupaten Mojokerto;
   f) PO. Rosalia Indah di Kota Surakarta.

(3) Kategori Pariwisata Terbaik
   a) CV. Pratama Putra di Kota Sidoarjo;
   b) PO. Ramayana di Kota Magelang;
   c) PT. Big Bird di Jakarta.

Selain penganugrahan PO. Terbaik, terdapat penganugrahan perusahaan penerima Lifetime Achievement, antara lain :

(1) Hartiningsih, Pimpinan PO. Gunung mas di Kota Madiun;
(2) H. Imam salahudin, Pimpinan PO. Putri jaya di Kab. Brebes;
(3) Danar rahmanto, Pimpinan PO. Timbul jaya di Kab. Wonogiri;
(4) Ir. S. Yuyadi, Pimpinan PO. Langen mulyo di Kota Yogyakarta;
(5) H.Abdul Wahab Usman, Pimpinan PO. Kurnia di Kab. Pidie;
(6) D. Rukmana, Pimpinan PO Lana Jaya di Kota Sukabumi;
(7) Apang Komara, Pimpinan PO Langgeng Jaya di Kota Sukabumi;

(8) Ir. H. Ade Ruhyana. M, Pimpinan PO. Doa Ibu di Kota Tasikmalaya;

(9) Philip Hutapea, Pimpinan PO. Makmur di Kota Medan;

(10) T. Setiawan, Pimpinan PO. Setia Negara di Kota Jakarta.

Gambar II.15. Ceremonial Penganugrahan PO. Terbaik Tahun 2014 oleh Menteri Perhubungan

Gambar II.16. Survai ke Perusahaan Otobis sebagai nominasi Pemilihan Perusahaan Terbaik Tahun 2014

e. Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Aangkutan Jalan

Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan dilaksanakan di Kota Malang pada bulan Oktober 2014. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk :

(1) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha terkait dengan keahlian dalam manajemen pengelolaan perusahaan angkutan yang baik, efektif dan efisien dari segi Sumber Daya Manusia, Teknologi Administrasi dan Keuangan

Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan yang tepat, cepat, aman, nyaman dan selamat.

(2) Memberikan sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada pengguna jasa maupun pihak ketiga berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

(3) Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pengusaha angkutan dalam bidang manajemen pengelolaan sumber daya manusia, Teknologi Administrasi dan Keuangan Perusahaan untuk menciptakan perusahaan angkutan AKAP, AJAP, Pariwisata dan Angkutan Barang Khusus yang berdaya saing sehat dan profesional dalam rangka mempersiapkan dan membentuk perusahaan angkutan jalan yang kuat menghadapi era perdagangan bebas sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan angkutan asing terutama dibidang angkutan barang.

Gambar II.17. Acara Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan Tahun 2014 di Malang

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bertahap dari bulan Maret sampai bulan Desember 2014.

Dasar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi angkutan perintis tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

(1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Satuan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 022-03.1.466570/2014 tanggal 05 Desember 2013;

(2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.655/AJ.003/DRJD/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2014;

Gambar II.8. Pelaksanaan Survai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

g. Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Umum

(1) Evaluasi Jaringan Trayek

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa " Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan trayek yang sudah ada maupun yang perlu dikembangkan serta evaluasi kebutuhan angkutan AKAP sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek dan kebutuhan angkutan. Untuk Tahun 2014, dilaksanakan Evaluasi Jaringan Trayek AKAP di Pulau Jawa dan Sumatera.

(2) Monitoring Tarif Angkutan Umum

Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2014 dilaksanakan di Kota Surabaya, Banda Aceh, Medan, Semarang, Balikpapan, Palu, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Pacitan dan Solo.

Maksud dilakukannya kegiatan evaluasi biaya pokok angkutan antar kota kelas ekonomi adalah untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi.

Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi biaya pokok angkutan antar kota kelas ekonomi, adalah : Untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait dengan harga-harga komponen biaya pokok angkutan ; Untuk mengetahui apakah pemberlakuan tarif angkutan antar kota di lapangan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ; Agar dapat ditemukenali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemberlakuan tarif angkutan di lapangan sehingga dapat diambil langkah-langkah solusi dan antisipasi kebijakan tarif angkutan ke depan ; dan Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan tarif angkutan antar kota kelas ekonomi.

Gambar II.19. Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2014

h. Evaluasi Kinerja angkutan umum di Bandara Internasional Sokarno – Hatta

Kegiatan Evaluasi Kinerja angkutan umum di Bandara Internasional Sokarno – Hatta dilaksanakan pada bulan Januari 2014.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung – Bandara Soekarno Hatta adalah : Melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung – Bandara Soekarno Hatta (BSH);Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberlakuan Tarif Angkutan Pemadu Moda yang berlaku pada saat ini;Mendapatkan preferensi penumpang Angkutan Pemadu Moda untuk dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan untuk Mengumpulkan bahan-bahan pendukung untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung– Bandara Soekarno Hatta.

Gambar II.20. Fasilitas Kedatangan dan Keberangkatan Angkutan Pemadu Moda

i. Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan.

Maksud dilakukannya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan pada Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Jalan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saatini;

(2) Menemukenali permasalahan yang mendasar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sarana dan prasarana angkutan jalan yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Jalan;

(3) Menemukan dan mengenali permasalahan mendasar pada manajemen perusahaan angkutan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan.

Adapun tujuan dilakukannya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan pada Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui pemenuhan fasilitas Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan pada masing-masing kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan jalan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

(2) Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan prosedur perawatan, pemeliharaan dan operasional kendaraan dalam rangka mencegah dan meminimalisasi kecelakaan di jalan;

(3) Untuk mengetahui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing perusahaan angkutan sebagai dasar evaluasi pelayanan di saat ini dan masa mendatang;

(4) Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan angkutan ajalan dalam rangka penyelenggaraan angkutan yang aman dan selamat;

(5) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan kajian dalam perencanaan kebijakan Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan, terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Perusahaan Angkutan Jalan pada sarana dan prasarana perusahaan Angkutan Jalan.

j. Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO.

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO dilaksanakan pada bulan November 2014 di Kota Bandung.

Adapun manfaat dari dilaksanakan kegiatan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO di Batam adalah : memudahkan para pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan, sehingga mutu Proses, Produk dan Sumber Daya dapat terkendali dan konsisten; Dengan adanya Sasaran Mutu yang telah ditetapkan di semua unit yang merupakan terget secara yang harus dicapai, maka akan mendorong seluruh komponen yang ada di Pusat Pelayanan Pemberian Izin Trayek, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dijen Perhubungan Darat; Dapat memberi peningkatan dalam banyak hal, termasuk kepuasan pelanggan:dan dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan sering memicu peningkatan produktivitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014, Subdit Angkutan Jalan melakukan study, sebagai berikut :

1) Survey Load Faktor Angkutan Penumpang Umum AKAP di Pulau Sumatera Tahap II

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal (145) ayat (1) telah diamanatkan bahwa Menteri melakukan evaluasi kebutuhan angkutan tiap-tiap trayek sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan evaluasi tersebut perlu data pendukung baik data primer maupun data sekunder yang akurat serta pengamatan langsung di lapangan mengingat dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin tingginya biaya transportasi sebagai pendukung kegiatan pergerakan masyarakat, telah mempengaruhi pola pergerakan masyarakat saat ini.

Sangat penting bagi Pemerintah selaku regulator untuk mengetahui perkembangan perubahan paradigma yang terjadi pada masyarakat terkait kebutuhan transportasi sebagai dasar dalam pembuatan regulasi di bidang transportasi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan Survei Load Faktor Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Pulau Sumatera Tahap II dengan maksud kegiatan mendapatkan data primer terkait kendala dan kinerja kondisi eksisting jaringan trayek dan jaringan pelayanan angkutan AKAP dan tentunya sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek AKAP, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa AKAP di wilayah Sumatera.

2) Kajian Blueprint Angkutan Jalan Perintis.

Kewajiban penyelenggaraan angkutan umum yang telah tercantum dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selaku pemerintah pusat.

Konektivitas antar satu tempat ke tenpat lain antar daerah di Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah kepulauan harus ditunjang dengan adanya pelayanan jasa transportasi berupa angkutan perintis. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan perintis kepada masyarakat agar konektivitas kegiatan masayarakat terlaksana dengan optimal diperlukan adanya suatu pedoman yang berupa Blueprint Angkutan Jalan Perintis.

5. SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2) Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5) Penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/ pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Seksi Monitoring Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Monitoring Operasional melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Pengawasan Operasional Angkutan Orang dan barang.

   Subdit Pengendalian Operasional akan dilakukan pengawasan, pengendalian, penegakan hukum lalu lintas atas angkutan orang dan angkutan barang dijalan yang selama ini belum secara optimal dilaksanakan, dapat secara efektif dilakukan terhadap pelanggaran operasional angkutan dan indikasi tidakan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar II.21. Kegiatan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang

2) Pengawasan Pelaksanaan Produksi Karoseri.

Industri karoseri sebelum melaksanakan produksi secara masal, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai uji tipe terlebih dahulu, yaitu uji terhadap prototipe kendaraan bermotor yang akan diproduksi masal, baik hanya uji landasan maupun uji kendaraan secara lengkap. Setelah mendapatkan hasil uji tipe yang ditunjukkan dengan sertifikat uji tipe, maka industri melakukan produksinya secara masal, pada tahap inilah pengawasan harus juga dilakukan, supaya produksi yang dilakukan oleh industri karoseri tetap mengacu kepada uji yang telah ada, sehingga terjamin mutunya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Sudah menajdi tugas pokok Direktorat LLAJ untuk melakukan pengendalian operasional di lapangan supaya tetap terjaga pelayanan angkutan jalan yang optimal, baik dari segi perangkat lunak seperti peraturan dan kebijakan, maupun perangkat keras yang antara lain adalah pelayanan prasarana jalan sehingga terdapat kepastian investasi usaha angkutan dan tersedianya pelayanan angkutan yang sesuai harapan masyarakat.

Gambar II.22. Kegiatan Pelaksanaan Produksi Karoseri

3) Pengembangan jaringan alat komunikasi.

   Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor PP. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memberikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sub bidang Perhubungan Darat terkait dengan pengawasan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub bidang perhubungan darat, diperlukan jaringan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah daerah, baik dalam kerangka koordinasi secara formal maupun secara informal seperti melalui alat komunikasi yang secara langsung dapat menghubungkan antara dinas teknis daerah dengan pemerintah pudat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat.

4) Pemeliharaan dan Pengoperasian alat Komunikasi.

5) Monitoring pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.

   Penanganan muatan lebih di jalan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (UPPKB) yang operasional oleh Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, sampai saat ini menjadi sorotan masyarakat pengguna jalan, terutama masih beroperasinya kendaraan dengan muatan yang menurut pandangan mata dapat diindikasikan melanggar ketentuan berat muatan.

   Sejak awal Tahun 2009, Ditjen Perhubungan Darat telah meniadakan toleransi terhadap prosentase muatan lebih di Jembatan Timbang, setelah melalui sosialisasi dan penurunan secara bertahap, kebijakan tersebut perlu diterapkan

di lapangan dalam penerapannya. Ditjen Perhubungan Darat merupakan salah satu instansi Pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam pengawasan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana amanat PP Nomor 38 Tahun 2007, secara terus menerus mengadakan kegiatan monitoring ke lapangan guna memastikan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas maupun pengguna jalan dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.

Gambar II.23. Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor

6) Penegakan hukum perijinan angkutan secara nasional.

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan angkutan umum di jalan adalah sebagaimana amanat PP No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, secara periodik dilakukan penegakan hukum perijinan angkutan nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek,izin penyelenggaraan angkutanh orang tidak dalam trayek dan/atau pengendalian operasional harus dilakukan pengawasan di lapangan

secara rutin untuk menjamin operasional angkutan yang tertib adminstrasi dan taat peraturan perundangan.

Gambar II.24. Kegiatan Penegakan Hukum Perijinan Angkutan

7) Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan angkutan umum di jalan adalah sebagaimana amanat PP No.80 Tahun 2012 tentang tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka meningkatkan, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran di jalan, secara periodik dilakukan penegakan hukum dimensi kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga untuk melakukan pengendalian operasional angkutan barang, harus dilakukan pengawasan di lapangan secara rutin untuk menjamin operasional angkutan yang tertib adminstrasi dan taat peraturan perundangan.

Gambar II.25. Kegiatan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor

8) Pengawasan Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Ditjen Perhubungan Darat u.b Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain adalah pengawasan secara teknis dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah menjadi tugas pokok Direktorat LLAJ untuk melakukan pengendalian operasional di lapangan supaya tetap terjaga pelayanan angkutan jalan yang optimal, baik dari segi perangkat lunak seperti peraturan dan kebijakan, maupun perangkat keras yang antara lain adalah pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk di dalamnya adalah pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang harus dilakukan dengan pengujian secara berkala.

Gambar II.26. Pengawasan Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Seksi Bimbingan Teknis PPNS

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Bimbingan Teknis PPNS melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Rakernis PPNS bidang LLAJ di Denpasar, Prov Bali.

   Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar lebih dari 500 Kabupaten/Kota dan 33 Provinsi yang masing-masing personil berasal dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, hal tersebut memberikan andil untuk memperbanyak perbedaan pendapat dan pandangan mengenai penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga memerlukan kesatuan pola tindak dan cara pandang yang sama terhadap tata cara dan proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

   Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan tugas penyidikan kepada PPNS bidang LLAJ sementara lingkup tugas dan wewenang PPNS LLAJ berbeda antara UU No. 22 Tahun 2009 dengan UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, memerlukan pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar II.27. Rakernis PPNS LLAJ di Denpasar

2) Penyuluhan Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Semarang Prov Jawa Tengah.

   Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh a. Penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Selain melakukan tindakan penyidikan sebagaimana tersebut di atas, PPNS diberikan tugas berdasarkan Pasal 264 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angktuan Jalan menyebutkan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh a. Petugas Kepisian negara Republik Indonesia; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan oleh Pemerintahan Daerah diatur pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dimana dalam bidang perhubungan sub bidang perhubungan darat sub sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan, urusan penyidikan tindak pidana bidang LLAJ dilaksanakan oleh :

- Pemerintah untuk penyidikan pelanggaran Undang-Undang tentang LLAJ,
- Provinsi melakukan penyidikan pelanggaran Perda Provinsi tentang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor dan ketentuan perijinan angkutan umum, serta
- Kabupaten/Kota melakukan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten/Kota tentang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, palanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor dan ketentuan perijinan angkutan umum.

3) Pengadaan Buku Pedoman PPNS.

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dimana salah satunya adalah pembentukan Unit Pengendalian Operasional pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka tugas pengawasan, pengendalian, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Ditjen Perhubungan Darat selama ini belum secara optimal

dilaksanakan, dapat secara efektif dilakukan terhadap pelanggaran operasional angkutan umum dan indikasi tindakan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 262 menjelaskan mengenai kewenangan penyidik pegawai negeri sipil PP 80 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan. Agar PPNS memahami tugas dan fungsinya sebagai penyidik maka perlu dilengkapi dengan buku pedoman PPNS yang didalamnya memuat mengenai fungsi, tugas dan kewenangan PPNS. Di samping itu dengan adanya Undang undang nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang undang nomor 14 Tahun 1992 terdapat beberapa perubahan terkait keaenangan PPNS sehingga dengan adanya buku pedoman PPNS diharapkan PPNS dapat memperoleh panduan yang singkat dan jelas sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di lapangan.

4) Monitoring Komprehensif Pimpinan Ditjen Hubdat.

Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Perhubungan Darat sebagai salah satu pembina sarana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dimana salah satu tugasnya sebagai pengawas sarana dan prasarana LLAJ, dengan demikian untuk meningkatkan pelayanan bidang sarana dan prasarana LLAJ kepada masyarakat maka diperlukan monitoring ke daerah untuk mendapatkan data data sarana dan prasarana serta melakukan audiensi dengan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga dengan adanya komunikasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan kinerjanya.

Disamping itu, dengan adanya monitoring komprehensif Pimpinan Ditjen Hubdat diharapkan pengawasan pelaksanaan program di Provinsi dapat terlaksana dan evaluasi program dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program yang akan datang.

5) Peningkatan Ketrampilan (refreshing) PPNS LLAJ.

Berdasarkan Pasal 259 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada era Otonomi Daerah saat ini, selain bidang-bidang pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi kewenangan pusat, seluruh kewenangan ada pada daerah untuk melaksanakan secara operasional di lapangan dengan sistem Desentralisasi, termasuk pula dalam bidang perhubungan, makin banyak urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah. Unit-unit pelaksana Daerah, dalam hal ini Dinas-Dinas Daerah melaksanakan tugas operasional di daerah yang menjadi kewenangannya. Tidak terkecuali adalah penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi wilayah kewenangannya, sehingga aparat dinas perhubungan daerah memerlukan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat menyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk meningkatkan kemampuan PPNS dalam melaksanakan tugas diperlukan pendalaman materi tentang tugas dan wewenang PPNS sehingga dengan adanya Undang – Undang 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang Undang 14 tahun 1992 para PPNS tetap memahami tugas dan wewenangnya sesuai perundang undangan yang berlaku.

Gambar II.28. Kegiatan Peningkatan Keterampilan PPNS LLAJ

C. DIREKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (LLASDP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 156, disebutkan Direktorat LLASDP yang merupakan salah satu unit kerja dibawah Ditjen Perhubungan Darat mempunyai Tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 156, pada pasal 157 disebutkan Direktorat LLASDP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur (NSPK) dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, Inspektur Sungai dan Danau, Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau, serta Penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

1. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota;
- penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Anev Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Anev Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyusunan Evaluasi Kinerja Lintas Penyeberangan.
2) Penyusunan data jaringan transportasi sungai danau.

3) Mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
4) Mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
5) Mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
6) Menyusun informasi jaringan transportasi SDP untuk bahan pembinaan.
7) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP Provinsi.
8) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP.
9) Menyusunan Penetapan Kinerja 2015, LAKIP 2014, dan Laptah 2014.

b. Seksi Pengembangan Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 Seksi Pengembangan Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Pengawasan pengembangan terhadap penetapan lintas penyeberangan antar propinsi maupun antar negara;
2) Mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
3) Memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota;
4) Mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
5) Mengelola kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

6) Melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
7) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP di beberapa provinsi;
8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9) Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

2. Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Evaluasi Kinerja Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2014.
2) Pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan sarana sungai danau dan penyeberangan;
3) Peningkatan kemampuan SDM di bidang pembangunan kapal baru dan manajemen keselamatan sarana penyeberangan.

b. Seksi Bimbingan Perawatan Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Monitoring Registrasi Sarana Angkutan Sungai dan Danau
2) Monitoring Pelaksanaan Docking Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2014
3) Peningkatan kemampuan SDM di bidang perawatan dan mempertahankan klas kapal penyeberangan.

3. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Rancang Bangun Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
2) Menyusun bahan laporan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
3) Memberikan bimbingan teknis terkait dengan desain dermaga kepada satker daerah;
4) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan yang didanai oleh APBN;
5) Melakukan inventarisasi data pelabuhan SDP di Indonesia yang sudah terbangun;
6) Melakukan pemantauan terhadap progres-progres kegiatan pembangunan dermaga di daerah yang didanai dari APBN;
7) Memberikan bimbingan teknis di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
8) Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tahun 2014

b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan perumusan rencana pembentukan OPLAP/OPP;
2) Memantau kinerja pelabuhan SDP di Indonesia;
3) Pemantauan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan yang diusahakan;
4) Sosialisasi pedoman teknis yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri maupun Dirjen Perhubungan Darat;

5) Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sistem informasi berbasis spasial (GIS).

4. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Manajemen Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaikan ASD;
2) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur ASD;

3) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Pengerukan Alur Pelayaran SDP dan Kolam Pelabuhan serta Reklamasi;
4) Penyusunan Data Base Rambu SDP;
5) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Keberangkatan ASD.
6) Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di adakan di 6 Provinsi yaitu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak), Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir), Provinsi Jambi (Kab. Tanjung Jabung Timur), Provinsi Kalimantan Tengah (Pangkalan Bun), Provinsi Papua Barat (Sorong)
7) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau
8) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

b. Seksi Alur dan Perambuan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Alur dan Perambuan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaikan ASD
2) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur ASD
3) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Pengerukan Alur Pelayaran SDP dan Kolam Pelabuhan serta Reklamasi
4) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Keberangkatan ASD
5) Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT dan instansi di daerah mengenai studi desain pengerukan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
6) Sosialisasi Pedoman Teknis Bidang LLASDP
7) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau
8) Pemantauan dan Evaluasi Alur Pelayaran Penyeberangan (SBNP)

5. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian

persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan SDP.

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Pemeriksaan kesiapan perangkat operasi sarana dan prasarana, pemantauan dan pengawasan angkutan penyeberangan pada angkutan lebaran tahun 2014.
2) Penyusunan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas komersil.
3) Pemeriksaan kapal angkutan penyeb. setelah melakukan docking tahunan.

4) Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal.

b. Seksi Tarif dan Keperintisan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Tarif dan Keperintisan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Monitoring penyelengaraan angkutan penyeberangan perintis.
2) Monitoring pelaksanaan docking kapal penyeberangan perintis.
3) Pamantauan Tarif Angkutan Penyeberangan.
4) Penyelengaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) tahun 2014.
5) Pembahasan formulasi perhitungan tarif jasa pelabuhan (PP No. 6 tahun 2009).

6. BIDANG PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan adalah program kerja yang berorientasi pada pembangunan fisik, yang didanai oleh DIPA dan dilaksanakan oleh Satker dan UPT LLASDP . Jumlah satker dan UPT yang didanai dengan APBN di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada tahun 2014 sebanyak 34 satker dan 3 UPT dengan pagu dana sebesar Rp 1,916,492,183,993,- dengan rincian masing-masing program adalah sebagai berikut: Pembangunan Dermaga Sungai, Dermaga Danau, Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan, Kapal Penyeberangan, Pembangunan Bus Air, Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan, Pembangunan Breakwater, Pengerukan Alur Pelayaran, Studi Kebijakan, Pradesain Prasarana SDP dan Pradesain Sarana SDP, Subsidi Perintis serta Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan di bidang LLASD.

Tabel II. 16.
Program dan Realisasi Kegiatan Pembangunan LLASDP Tahun 2014

No.	Program	Rencana	Realisasi
1	Pembangunan Dermaga Sungai		
	a. Baru	6	6
	b. Lanjutan	13	13
	c. Rehabilitasi	9	8
2	Pembangunan Dermaga Danau		
	a. Baru	2	2
	b. Lanjutan	-	-
	c. Rehabilitasi	6	6
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Baru	9	9
	b. Lanjutan	48	47
	c. Rehabilitasi	23	22
4	Pembangunan Kapal Penyeberangan		
	a. Baru	6	5
	b. Lanjutan	9	7
	c. Rehabilitasi	-	-
5	Pembangunan Bus Air/Kapal Sungai	7	7
6	Pembangunan SBNP Pelabuhan	134	130

No.	Program	Rencana	Realisasi
7	Pengerukan Alur Pelayaran	4	3
8	Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan a. Baru b. Lanjutan c. Rehabilitasi	 - 1 -	 - 1 -

7. BIDANG OPERASIONAL

Kegiatan Bidang Operasional yang dilaksanakan pada tahun 2014, adalah kegiatan yang pendanaannya dibiayai oleh dana APBN untuk mendukung penyelenggaraan operasional LLASDP dilapangan yaitu; kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh UPT LLASDP, mendukung kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Satker LLASDP dan kegiatan penyelenggaraan operasional angkutan penyeberangan perintis.

8. PERKEMBANGAN PRASARANA LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Lintas Penyeberangan

Sejak pertama kali ditetapkannya lintas penyeberangan pada tahun 1989, melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sebanyak 44 lintas penyeberangan, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 207 lintas penyeberangan, ditambah dengan 50 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 257 lintas penyeberangan. Dari sisi pengoperasiannya, sebanyak 48 lintas adalah berupa lintas penyeberangan dengan angkutan komersil dan sisanya sebanyak 181 lintas penyeberangan perintis.

Tabel II.17.

Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan Tahun 2011-2014

No.	Status Operasional Lintas	2011	2012	2013	2014
1.	**Jumlah lintas yang ditetapkan**				
	a. Melalui Keputusan Menhub	**193**	**193**	**193**	**207**
	b. Melalui Keputusan Pemda	**43**	**50**	**50**	**50**
2.	**Status Pengoperasian**				
	a. Lintasan yang beroperasi	**165**	**179**	**216**	**229**
	b. Lintasan yang belum dan tidak beroperasi*	**75**	**95**	**29**	**4**
3.	**Jenis Pengoperasian Angkutan**				
	a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil	**45**	**42**	**48**	**48**
	b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis	**120**	**137**	**169**	**178**

*Keterangan *) : jumlah lintas yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang belum beroperasi dan tidak beroperasi (ditutup)*

Berdasarkan jenis pengoperasiannya, lintas penyeberangan yang sudah beroperasi dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintas komersil dan lintas perintis (yang disubsidi pemerintah dan tidak disubsidi pemerintah). Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi berjumlah sebanyak 229 lintasan, yang terdiri dari 48 lintas komersil dan 178 lintas perintis.

Tabel II.18.
Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Tahun 2011 - 2014

No.	Jenis Pengoperasian	2011	2012	2013	2014
a.	Lintasan komersil	45	42	48	48
b.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	117	134	158	178
c.	Lintasan perintis yang tidak disubsidi pemerintah	3	3	0	0
	Jumlah Yang Beroperasi	**165**	**179**	**206**	**226**

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

1) Lintasan Komersil

   Pada tahun 2014, lintas komersil sebanyak 48 lintas penyeberangan dengan rincian status yaitu : Antar Propinsi (AP) sebanyak 10 lintas dan Dalam Propinsi (DP) sebanyak 38 lintas.

2) Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah

   Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2014 berjumlah 178 lintas penyeberangan dengan 24 lintas penyeberangan perintis antar Propinsi dan 154 lintas perintis Dalam Propinsi.

b. Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2014, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 156 unit, yang terdiri dari 35 pelabuhan yang diselenggarakan Indonesia Ferry (Persero), 117 pelabuhan oleh Dinas Perhubungan, 4 pelabuhan oleh UPT Ditjen Perhubungan Darat dan sisanya sebanyak 54 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Tabel II.19.
Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011-2014

No.	Penyelenggara	2011	2012	2013	2014
1.	PT. ASDP Persero	34	34	34	35
2.	Dinas Perhubungan	113	106	106	117
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	3	4	4	4
4.	Dalam Proses Pembangunan	33	40	66	54
Jumlah		**183**	**184**	**210**	**210**

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

c. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Kedua jaringan tersebut dapat dilakukan dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan tidak dalam trayek.

Tabel II.20.
Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau

No.	PROPINSI	DANAU			SUNGAI		
		Jml	Panjang (Km)	Navigable	Dermaga (Unit)	Jml	Luas (Km^2)
1	NAD	10	1.749	660	2	1	490
2	Sumatera Utara	20	1.796	1.269	-	1	1.250
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	4	391
4	Riau	21	2.747	2.082	25	-	-
5	Jambi	19	3.858	2.578	16	1	50
6	Sumatera Selatan	35	4.856	3.771	13	1	122
7	Lampung	8	695	530	8	-	-
8	Jawa Barat	1	122	22	-	3	205
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	600
10	Jawa Timur	1	500	39	-	-	-
11	Bali	-	-	-	-	2	190
12	Kalimantan Barat	11	1.227	760	22	-	-
13	Kalsel	15	1.737	1.223	20	1	40
14	Kalimantan Timur	17	4.089	2.786	26	3	390
15	Kalteng	21	3.108	2.285	28	-	-
16	Sulawesi Selatan	9	548	222	-	4	120
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	34
18	Sultra	2	175	87	-	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	-	2	33
20	Papua	24	734	4.940	-	3	372
JUMLAH		**214**	**34.342**	**23.255**	**160**	**27**	**3.737**

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

d. Dermaga Sungai dan Danau

Jumlah dermaga sungai dan danau lebih kurang 95 buah, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah.

Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, untuk angkutan sungai kewenangannya diserahkan kepada daerah, namun demikian pemerintah pusat tetap memegang fungsi pembinaan di bidang transportasi sungai dan danau. Oleh karena itu sebagai wujud pembinaan di bidang transportasi sungai dan danau ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan melakukan beberapa kegiatan dalam lingkup angkutan sungai dan danau, diantaranya adalah:

penyusunan naskah akademis cetak biru transportasi sungai, penyusunan data base transportasi sungai dan kegiatan penyuluhan keselamatan.

Untuk data-data transportasi sungai baik data mengenai alur pelayaran sungai, sarana dan prasarana transportasi sungai hingga saat ini Direktorat LLASDP masih melakukan kompilasi dan inventarisir data-data tersebut melalui kegiatan penyusunan cetak biru transportasi sungai dan penyusunan data base transportasi sungai. Melalui kedua kegiatan tersebut, data-data transportasi sungai di Indonesia diharapkan dapat terkompilasi dengan baik, sehingga diperoleh data yang akurat dan up to date selaras dengan perkembangan pembangunan transportasi sungai.

9. PERKEMBANGAN SARANA LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Kapal Penyeberangan

Sampai dengan tahun 2014 terdapat 325 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro dan 14 unit LCT (Landing Craft Tank).

Tabel II.21.
Jumlah Kapal SDP yang beroperasi Tahun 2011-2014

No.	Jenis Kapal	2011	2012	2013	2014
1.	Kapal Ro-Ro	228	254	306	325
2.	Kapal LCT	12	13	15	14
3.	Kapal cepat penumpang	2	-	-	-
4.	Kapal penumpang/bus air	-	-	-	-
Jumlah		**242**	**267**	**321**	**339**

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 324 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kerja Sama Operasi (KSO), swasta dan Pemda.

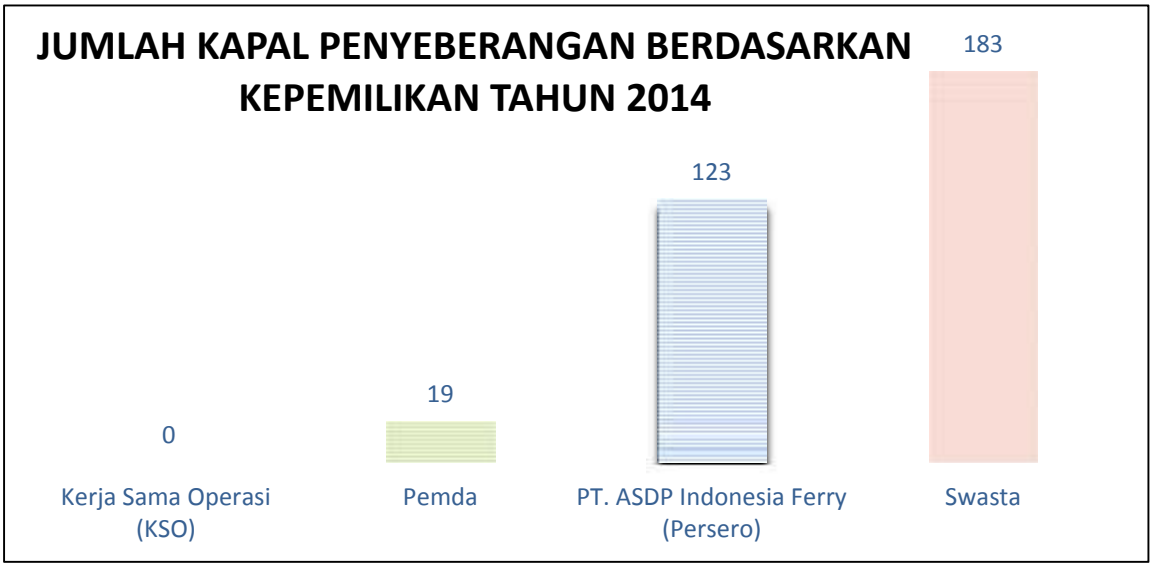

b. Subsidi Kapal Perintis

Subsidi kapal perintis pada tahun 2014 sebesar Rp. 243.471.910.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 178 (yang dikelola Satker Keperintisan Pusat) lintas dan total frekuensi penyeberangan 30.184 trip.

Tabel II.22.
Subsidi Kapal Perintis Tahun 2010 - 2014

Tahun	Jumlah lintas penyeberangan perintis	Total frekuensi penyeberangan	Nilai subsidi (juta rupiah)
2010	100	19.523	101.550
2011	117	26.858	157.852
2012	109	26.280	130.209
2013	133	24.885	263.283
2014	178	30.184	243.472

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

Tabel II.23.
Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai

No.	JENIS	Isi Kotor (m^3)	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
			Brg(ton)	Penump.			
1	Speed Boat	1-5	-	<14	0.35-0,60	<200	<40
2	Long Boat	5-10	-	<60	0,40-0,60	<85	20-30
3	Bis Air	<200	<10	<200	0,80-1,50	75-100	12-15
4	Klotok	<15	<5	-	0,50-0,65	5-15	7-12
5	Truk Air	15-200	20-70	-	1,00-1,60	22-33	7-8
6	Barge Steel Hull	50-190	50-150	-	1,00-1,60	-	-
7	Barge (tiung)	20-50	15-35	-	1,00-1,60	-	-
8	Tug Boat	20-50	-	-	0,80-1,40	<100	30-60

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

Tabel II.24.
Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan

No.	Kapal RO-RO	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
		Brg(ton)	Penump.			
1	75 GT	4	50	1.9	350	10
2	200 GT	5	50	1.9	700	10
3	300 GT	15	80	2.0	1200	7
4	500 GT	19	202	2.15	1600	11
5	600 GT	21	214	2.15	1650	10
6	1500 GT	32	390	2.8	3200	15

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

10. PERKEMBANGAN KINERJA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

a. Produksi Angkutan Penyeberangan

Tabel II.25.
Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2007 – 2014

TAHUN	PENUMPANG (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	BARANG (ton)
2007	40.557.832	5.720.396	6.154.104	31.936.937
2008	46.926.166	6.850.114	7.374.333	41.079.174
2009	54.585.603	6.224.249	6.799.229	41.802.355
2010	36.525.720	8.040.808	4.910.551	210.889

TAHUN	PENUMPANG (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	BARANG (ton)
2011	52.589.081	5.605.469	6.550.439	96.997
2012	58.673.855	5.605.699	7.264.604	48.599
2013	61,633,566	7,691,627	7,508,013	-
2014	64,638,781	7,833,412	8,412,245	54,690

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

b. Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas

Tabel II.26.

Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas Tahun 2014

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN			
			PNP	R2	R4	BRG
1	Bajoe - Kolaka	2.412	361.527	25.987	38.737	-
2	Balikpapan - Mamuju	366	63.145	3.175	2.928	-
3	Balikpapan - Taipa	211	20.698	1.538	2.246	-
4	Bastiong - Rum	3.099	462.317	74.913	31.746	-
5	Bastiong - Sidangole	798	118.179	16.997	6.982	-
6	Bastiong - Sofifi	2.847	587.421	68.788	29.001	-
7	Batulicin - Tj. Serdang	18.206	1.328.088	273.126	170.242	-
8	Bau bau - Wara	4.938	588.919	89.450	41.903	-
9	Bira - Pamamata	1.423	258.409	24.609	25.374	-
10	Bira - Sikeli Tondasi	46	1.203	41	177	-
11	Bitung - Ternate	515	31.956	906	6.537	-
12	Galala - Namlea	630	246.330	26.938	10.053	-
13	Galala - Poka	23.696	2.701.167	659.629	140.528	-
14	Hunimua - Waipirit	5.772	1.051.120	145.260	73.148	-
15	Kalabahi - Kupang	180	78.423	5.437	1.191	-
16	Kariangau - Penajam	33.258	2.588.103	227.942	545.587	-
17	Kayangan - Pototano	26.960	2.221.816	294.793	289.659	-
18	Ketapang - Gilimanuk	166.245	15.285.322	1.594.808	2.320.450	-
19	Kota - Siantan	23.994	3.740.029	1.128.564	217.589	-
20	Kupang - Aimere	171	39.495	3.929	813	-
21	Kupang - Larantuka	277	90.412	10.421	3.238	-
22	Kupang - Rote	820	263.013	52.882	11.141	-
23	Kupang - Sabu	179	34.173	4.607	1.171	-
24	Luwuk - Salakan	500	67.820	12.503	4.190	-
25	Merak - Bakauheni	59.732	17.958.097	579.522	3.207.931	-
26	Padang - Tua Pejat	202	52.721	5.056	794	-
27	Padang bai - Lembar	18.767	1.731.954	283.761	303.589	-
28	Pagimana - Gorontalo	455	102.009	5.416	4.183	-
29	Nusa Penida - Padangbai	330	35.868	18.686	10.216	-
30	Telaga Punggur - Karimun	167	9.146	587	1.725	-
31	Rasau Jaya - Teluk Batang	822	42.720	9.003	6.133	-
32	Sape - Labuhan Bajoe	1.165	97.995	6.524	15.702	-
33	Sape - Waikelo	263	34.923	2.683	5.502	-
34	Sei Air - Bengkalis	6.484	1.416.901	227.755	114.861	-
35	Sibolga - Gunung Sitoli	546	187.927	4.011	7.196	-
36	Sibolga - Teluk Dalam	75	11.608	255	241	-

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN			
			PNP	R2	R4	BRG
37	Sinabag - Labuhan Haji	365	131.543	13.204	8.093	-
38	Singkil - Sinabang	141	236.618	1.316	3.358	-
39	Siwa - Lasusua	595	119.536	7.661	7.664	-
40	Tampo - Torobulu	2.454	445.908	68.290	28.427	-
41	Tj. Api api - Tj. Kelian	3.004	330.295	24.395	51.214	-
42	Tayan - Teraju	13.351	278.170	5.883	66.791	-
43	Tebas Kuala - Tebas Seberang	9.299	317.743	32.393	68.413	-
44	Telaga Punggur - Tj. Uban	4.533	846.290	112.937	67.955	-
45	Tj. Harapan - Tj. Kalong	10.451	428.469	69.812	69.844	-
46	Tomok - Ajibata	55	882.124	10.778	110.373	-
47	Ujung - Kamal	29.465	5.239.576	1.347.731	193.843	-
48	Ulhee Leu - Balohan	1.542	713.176	97.217	35.927	-
JUMLAH I **		481.806	63.880.402	7.682.119	8.364.606	-

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

c. Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis Seluruh Lintas

Tabel II.27.
Produksi Penumpang Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2014

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN		
			PNP	R2	R4
1	Namlea - Kayeli	678	15.857	3.540	8
2	Tulehu - Umeputih	108	10.021	1.834	1.641
3	Umiputih - Nalahia	106	7.070	627	160
4	Nalahia - Amahai	98	3.242	273	18
5	Tolehu - Kailolo	408	10.827	5.243	3.220
	Tolehu - Kailolo	-	202	133	40
6	Kailolo - Umeputih	316	5.748	2.139	804
	Kailolo - Umeputih	-	178	73	20
7	Umiputih - Wailey	310	10.600	3.993	166
8	Tarakan - Toli-toli	101	13.670	416	257
9	Tarakan - Nunukan	278	5.706	1.257	97
10	Tarakan - Ancam	264	838	367	-
11	Toli-toli - Baroko	4	-	-	-
12	Baroko - Amurang	-	-	-	-
13	Ulee Lheue - Lamteng	359	393	155	427
14	Sadai - Tanjung Ru	176	3.084	610	-
15	Karimun - Mengkapan	212	8.247	521	-
	Karimun - Mengkapan	36	1.252	90	-
16	Tj. Pinang - Tj. Balai Karimun	181	2.382	551	-
17	Dabo - Tj. Pinang	185	3.789	951	-
18	Dabo - Telaga Punggur	94	6.258	508	-

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN		
			PNP	R2	R4
19	Tj. Balai Karimun - Kundur	254	3.408	1.822	-
20	Batulicin - Garongkong	151	7.120	709	-
21	Bau bau - Dongkala	2	123	14	1
	Bau bau - Dongkala	385	22.877	2.758	326
22	Dongkala - Mawasangka	264	4.925	1.157	130
23	Dongkala - Kasipute	278	4.211	817	121
24	Kendari - Langara	658	29.272	8.307	498
25	Kamaru - Wanci	287	360	68	278
	Kamaru - Wanci	31	44	2	23
26	Bau bau - Siompu	547	1.247	298	-
27	Raha - Pure	1.272	15.779	4.558	2.065
28	Bengkulu - Pulau Enggano	154	12.441	2.734	1.655
29	Biak - Manokwari	108	22.384	601	14
	Biak - Manokwari	6	534	21	-
30	Manokwari - Numfor	98	13.585	460	11
	Manokwari - Numfor	70	2.266	119	18
31	Manokwari - Wasior	98	10.974	492	13
32	Wasior - Nabire	94	2.382	122	9
33	Biak - Serui	97	18.816	732	29
	Biak - Serui	8	1.604	40	-
34	Serui - Waren	96	19.208	886	20
35	Waren - Nabire	8	1.493	56	-
	Waren - Nabire	96	14.795	762	16
36	Bitung - Melonguane	8	1.170	68	-
37	Pananaru - Marore	122	3.408	200	5
	Pananaru - Marore	6	-	-	-
38	Likupang - Pananaru	12	-	-	-
	Likupang - Pananaru	16	25	4	-
39	Jepara - Karimun Jawa	102	234	36	-
	Jepara - Karimun Jawa	44	6.067	1.086	36
40	Waingapu - Sabu	48	1.764	146	384
	Waingapu - Sabu	18	606	76	14
41	Waingapu - Ende	77	990	109	118
42	Waingapu - Aimere	21	709	132	44
	Waingapu - Aimere	62	4.092	487	798
43	Baranusa - Lewoleba	88	801	61	8
44	Baranusa - Kalabahi	89	1.087	236	10

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN		
			PNP	R2	R4
45	Waiwerang - Lewoleba	88	213	-	-
46	Waiwerang - Solor	48	-	-	-
47	Larantuka - Solor	48	-	-	-
48	Gorontalo - Wakai	192	31.649	1.080	43
	Gorontalo - Wakai	4	329	16	-
49	Wakai - Ampana	4	212	22	-
	Wakai - Ampana	283	28.161	2.686	3
50	Banggai - Luwuk	296	21.084	3.404	55
51	Banggai - Boniton	190	14.600	11.450	-
52	Banggai - Bobong	158	5.517	511	-
53	Kolonedale - Baturube	243	7.607	3.633	-
54	Ampana - Pasokan	184	11.908	1.918	25
55	Pasokan - Dolong	184	7.269	980	-
56	Dolong - Marisa	184	11.146	710	30
57	Bade - Moor	16	-	-	-
	Bade - Moor	31	482	29	360
58	Moor - Kepi	16	-	-	-
59	Merauke - Atsy	28	285	9	1.499
60	Merauke - Kimaam	32	2.658	107	990
61	Atsy - Agats	28	390	3	523
62	Agats - Pomako	30	346	3	817
63	Agats - Sawaerna	30	422	-	121
64	Kimmam - Moor	31	763	50	530
65	Bade - Getentiri	34	400	10	-
66	Padang - Sikakap	181	20.917	1.959	4.403
	Padang - Sikakap	11	1.694	177	-
67	Padang - Siberut	181	27.381	2.386	5.274
	Padang - Siberut	8	1.127	96	-
68	Siberut - Sikabaluan	98	7.889	446	254
	Siberut - Sikabaluan	8	280	23	-
69	Rasau Jaya - Pinang Luar	403	298	408	119
	Rasau Jaya - Pinang Luar	1.170	1.034	1.615	425
	Rasau Jaya - Pinang Luar	2.952	2.521	3.683	978
	Rasau Jaya - Pinang Luar	208	163	227	89
70	Parit Sarem - Sungai Nipah	4.485	6.349	32.339	1.384
71	Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	3.644	2.481	1.595	4.718
	Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	351	199	100	1.098

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN		
			PNP	R2	R4
72	Bira - Patumbukan	130	101	38	-
73	Patumbuka - Jampea	85	6.151	3.520	-
74	Jampea - Labuhan Bajo	46	878	144	2
75	Jampea - Marapokot	42	488	48	-
76	Patumbukan - Kayuadi	46	47	4	-
77	Kayuadi - Jampea	46	12	-	-
78	Jampea - Bonerate	46	238	24	-
79	Bonerate - Kalaotoa	46	19	-	-
80	Teluk Dalam - Pulau Tello	114	6.253	239	-
81	Singkil - Pulau Banyak	96	5.853	898	37
82	Singkil - Gunung Sitoli	86	3.167	210	166
83	Sorong - Kalobo	144	75	-	1
84	Sorong - Saosofor	20	21	-	-
85	Sorong - Kabarai	38	120	-	-
86	Sorong - Arefi	56	458	-	-
87	Arefi - Paam	56	176	-	-
88	Paam - Gag	54	146	-	-
89	Sorong - Wejim	66	1.562	-	4
90	Wejim - Kofiau	60	797	-	-
91	Sorong - Linmalas	88	1.926	-	4
92	Linmalas - Waigama	88	1.040	-	-
93	Sorong - Folley	44	315	-	-
94	Sorong - Waisai	89	416	203	7
95	Patani - Weda	86	5.947	556	10
96	Sorong - Gebe	86	1.311	31	5
97	Patani - Gebe	86	2.703	196	-
98	Sorong - Patani	54	1.201	1	-
99	Sorong - Fak fak	30	169	3	-
100	Wahai - Fak fak	28	42	-	-
101	Paciran - Bawean	92	12.686	1.873	3.610
102	Bawean - Gresik	91	24.727	2.536	1.609
103	Tobelo - Daroba	94	10.160	1.630	847
	Tobelo - Daroba	224	24.146	4.872	2.940
104	Tobelo - Subaim	62	3.509	663	502
	Tobelo - Subaim	136	7.049	1.578	1.392
105	Dowora - Sofifi	150	12.102	2.335	581
	Dowora - Sofifi	118	5.665	1.183	400

No.	LINTASAN	TRIP	MUATAN		
			PNP	R2	R4
106	Bastiong - Batang Dua	42	1.477	180	24
107	Bastiong - Makian	136	7.273	1.186	1.046
108	Makian - Babang	127	489	179	870
109	Sanana - Mangole	12	123	6	2
	Sanana - Mangole	58	372	14	10
110	Mangole - Bobong	12	115	6	1
	Mangole - Bobong	58	264	14	9
111	Babang - Obi	12	61	2	13
	Babang - Obi	57	186	13	41
112	Obi - Sanana	12	104	2	1
	Obi - Sanana	58	215	10	16
113	Tual - Larat	32	1.453	37	56
114	Tual - Kur	66	3.932	199	261
115	Tual - Tayandu	174	21.108	558	1.613
116	Tual - Holat	64	1.032	3	32
117	Tual - Weduar	40	44	1	-
118	Tual - Elat	44	620	33	347
119	Tayandu - Kur	86	4.819	343	355
120	Tayandu - Tam	88	2.725	9	333
121	Tual - Dobo	130	11.054	580	258
122	Dobo - Benjina	66	658	-	-
123	Dobo - Tabarfane	60	91	-	-
124	Kur - Kesui	56	549	1	45
JUMLAH II **		30.184	758.379	151.293	47.639

Sumber : Direktorat LLASDP, 2014

11. KEGIATAN - KEGIATAN STRATEGIS

Kegiatan - kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2014 di bidang LLASDP antara lain :

a) Prastudi Kelayakan Transportasi Penyeberangan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti.

b) Prastudi Kelayakan Transportasi Sungai Batanghari dan Sungai Niur di Jambi.

c) Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan Halmahera Maluku Utara – Likupang Sulut.

d) Kajian Jaringan Pelayanan Transportasi Penyeberangan di Wilayah Jambi, Riau & Kepri.

e) Manajemen Data Base Direktorat LLASDP.

f) Penyusunan Master Plan Pengembangan Transportasi Sungai dan Danau di Indonesia.

g) Survei Database Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai Musi.

h) Survei Database Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai Mahakam.

i) Survey Data Base Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai di Papua Barat.

j) Studi Desain Kapal :

   (1) Desain Prototype Kapal Operasional Petugas untuk Sungai dan Danau 10 pax Bahan FRP dan Polyurethane (2 Desain)

   (2) Desain Interior prototipe kapal penyeberangan penumpang RO-RO 300 GT, 500 GT dan 600 GT

   (3) Penyusunan Tata Cara Perawatan Kapal di Danau

   (4) Desain kapal-kapal sungai tradisional di Sumatera

   (5) Desain truk air untuk transportasi sungai dan danau

k) Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO baik yang disatker pusat dan daerah :

   (1) Satker Pusat

      (a) Pembangunan Kapal Sungai LCT 200 GT Kab. Asmat & Kab. Nduga Tahap II

      (b) Pembangunan Kapal Sungai LCT 200 GT Kab. Membramo Tahap II

      (c) Pembangunan Kapal 5000 GT Lintas Merak - Bakauheni Tahap III

      (d) Pembangunan Kapal 5000 GT Lintas Merak - Bakauheni Tahap III

      (e) Pembangunan Kapal 5000 GT Lintas Merak - Bakauheni Tahap III

      (f) Pembangunan Kapal 750 GT Lintas Kaimana - Tual Tahap II

      (g) Pembangunan Kapal 300 GT Lintas Merauke - Asmat Tahap II

      (h) Pembangunan Kapal 750 GT Lintas Sorong - Waigeo Tahap II

      (i) Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lintas Amolengu – Labuhan

      (j) Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 150 GT Lintas Sumpit - Ciremai

   (2) Satker Daerah

      (a) Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Kupang - Hansisi 750 GT Thp II (Termasuk supervisi) selesai

(b) Pemb./Pengad Kapal Penyeb. 750 GT lts Amurang-Pananaru-Marore (tahap I)

(c) Pemb./Pengad Kapal Pembersih Alur Pelayaran Danau Tondano (selesai)

(d) Pembangunan Kapal Ro Ro 500 GT Lintas Namlea - Waisala (Termasuk supervisi)

(e) Pemb. Kapal Penyeb. Perintis 300 GT Lts. Doro Kao - Subaim Thp I (Termasuk supervisi)

l) Pembangunan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan :

(1) Pembangunan dermaga penyeberangan baru di 9 lokasi;

(2) Pembangunan dermaga penyeberangan lanjutan di 48 lokasi;

(3) Pembangunan dermaga sungai baru di 6 lokasi;

(4) Pembangunan dermaga sungai lanjutan di 13 lokasi;

(5) Pembangunan dermaga danau di 2 lokasi;

(6) Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 23 lokasi;

(7) Rehabilitasi dermaga sungai di 9 lokasi;

(8) Rehabilitasi dermaga danau di 6 lokasi.

(9) Lanjutan Pemb. Break Water Sisi Timur dan Sisi Barat Pelabuhan Penyeb. Kendal Tahap V (Termasuk supervisi) selesai

m) Perencanaan Umum, Pradesain dan Detail Desain Prasarana SDP :

(1) DED Pelabuhan Penyeberangan Tambelan (Provinsi Kepulauan Riau) dan Sintete (Provinsi Kalbar).

(2) FS dan DED Pel. Penyeb. di Pulau Pagai Selatan Kepulauan Mentawai.

(3) DED Replacement Dermaga 1 Merak dan Dermaga 4 Bakauheni.

(4) DED Dermaga 7 Merak dan Dermaga 7 Bakauheni Berserta Fasilitas Darat.

(5) Audit Teknis Struktur dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Batulicin, Tanjung Serdang, Penajam.

(6) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Bastiong - Rum – Sidangole.

(7) Penyusunan Hirarki Pelabuhan Penyeberangan.

(8) DED Dermaga IV (Pengganti dermaga Ponton) Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

n) Studi Kebijakan di Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan :

(1) Prastudi Kelayakan Transportasi Penyeberangan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti.
(2) Prastudi Kelayakan Transportasi Sungai Batanghari dan Sungai Niur di Jambi
(3) Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan Halmahera Maluku Utara – Likupang Sulut
(4) Survei Database Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai Musi
(5) Survei Database Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai Mahakam
(6) Survei Database Jaringan Transportasi di Wilayah Sungai di Papua Barat
(7) Kajian Jaringan Pelayanan Transportasi Penyeberangan di Wilayah Jambi, Riau, dan Kepri
(8) Manajemen Data Base Direktorat LLASDP
(9) Update Peta Lintas Penyeberangan
(10) Penyusunan SBK Pemeliharaan Pelabuhan Penyeb. Tahun 2015
(11) Evaluasi Manfaat Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri
(12) Penyusunan Rencana Induk DLKR/DLKP Pel. Penyeb. (Bahaur, Paciran & Garongkong, Kendal & Kumai, Mengkapan & Kampung Balak, Gunaksa & Nusa Penida)
(13) Penetapan Kelas Alur Pelayaran dan Kebutuhan Fasilitas Alur Pelayaran di DAS Musi Prov. Sumsel
(14) Penetapan Kelas Alur Pelayaran dan Kebutuhan Fasilitas Alur Pelayaran di DAS Sungai Kayan, Provinsi Kalimantan Utara
(15) Penetapan Kelas Alur Pelayaran dan Kebutuhan Fasilitas Alur Pelayaran di Sungai Siak Prov. Riau
(16) Kajian Jenis, Struktur dan Formula Perhitungan Tarif ASD
(17) Kaji Ulang Peraturan Menteri No. KMP 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
(18) Penyusunan SOP Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan
(19) Penyusunan SOP Tata Cara Pengangkutan Transportasi Penyeberangan
(20) Penyusunan SPM Angkutan Penyeberangan Perintis untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Prov. Papua

(21) Penyusunan Tata Cara Kegiatan Penugasan Angk. Penyeb. Perintis

(22) Penyusunan SOP Rencana Pola Operasi di Lintas Penyeberangan Utama

(23) Penyusunan Master Plan Pengembangan Transportasi Sungai dan Danau di Indonesia.

12. ANALISA DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

a) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kenerja, yang bersifat kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Berdasarkan data realisasi dari masing-masing indikator kinerja, diperoleh Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat LLASDP yang disusun berdasarkan pengelompokan sasaran seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II. 28.
Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat LLASDP TA 2014

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya keselamatan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah Bangunan Pengaman Kolam Pelabuhan	lokasi	1	1	100,00
	Jumlah Sarana Navigasi SDP	unit	25	18	72,00
	Jumlah Normalisasi Alur Pelayaran SDP	lokasi	4	3	75,00
	Jumlah Studi Kebijakan Transportasi SDP	laporan	23	23	100,00
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 1)					**86,75**
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal	Jumlah lintas keperintisan penyeberangan yang terlayani	lintas	161	178	112,42
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 2)					**112,42**
Meningkatnya jumlah ketersediaan dan kelaikan sarana	Jumlah/ Ketersediaan Sarana SDP yang dibangun	unit	9	7	77,78

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
transportasi SDP	Jumlah Perencanaan Umum, Pradisain, dan detail design sarana SDP	laporan	5	5	100,00
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 3)					**88,89**
Meningkatnya jumlah ketersediaan dan kelaikan prasarana transportasi SDP	Jumlah/ Ketersediaan Prasarana SDP yang dibangun	lokasi	78	77	98,71
	Jumlah/ Ketersediaan Prasarana SDP yang direhabilitasi	lokasi	37	36	97,30
	Jumlah Perencanaan Umum, Pradisain, dan detail design prasarana SDP	laporan	8	8	100,00
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 4)					**98,67**
Meningkatnya kualitas SDM di bidang LLASDP	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan di bidang LLASD	kegiatan	6	6	100,00
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 5)					**100,00**
Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran keseluruhan)					**97,35**

Dalam rangka pencapaian sasaran no. 1 yaitu **Meningkatnya keselamatan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan,** dilakukan 4 kegiatan yang realisasi dari tiap-tiap capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel II. 29.
Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran I)

No	NAMA KEGIATAN	Capaian Kinerja
1.	Pembangunan Bangunan Pengaman Kolam Pelabuhan	100,00
2.	Pengadaan/pemasangan SBNP Pelabuhan Penyeberangan	72,00
3.	Normalisasi Alur Pelayaran SDP	75,00
4.	Studi Kebijakan Transportasi SDP	100,00
	Capaian kinerja kegiatan rata-rata	**86,75**

Dalam rangka pencapaian sasaran no 2 yaitu **Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal,** dilakukan 1 kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel II. 30.
Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran II)

No	NAMA KEGIATAN	Capaian Kinerja
1.	Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi)	112,42
	Capaian kinerja kegiatan rata-rata	**112,42**

Dalam rangka pencapaian sasaran no 3 yaitu **Meningkatnya jumlah ketersediaan dan kelaikan sarana transportasi SDP,** dilakukan 4 kegiatan yang realisasi dari tiap-tiap capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel II. 31.
Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran III)

No	NAMA KEGIATAN	Capaian Kinerja
1.	Pembangunan Kapal Penyeberangan Baru (Tahap I)	83,33
2.	Pembangunan Kapal Penyeberangan Lanjutan	77,78
3.	Pembangunan Bus Air	100,00
4.	Perencanaan Umum, Pradisain, dan detail design sarana SDP	100,00
	Capaian kinerja kegiatan rata-rata	**90,28**

Dalam rangka pencapaian sasaran no 4 yaitu **Meningkatnya jumlah ketersediaan dan kelaikan prasarana transportasi SDP**, dilakukan 9 kegiatan yang realisasi dari tiap-tiap capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel II. 32.
Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran IV)

No	NAMA KEGIATAN	Capaian Kinerja
1.	Pembangunan Dermaga Baru (Tahap I)	100,00
2.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan lanjutan	97,91
3.	Pembangunan Dermaga Sungai Baru	100,00
4.	Pembangunan Dermaga Sungai lanjutan	100,00
5.	Pembangunan Dermaga Danau	100,00
6.	Rehabilitasi dan peningkatan dermaga penyeberangan	95.65
7.	Rehabilitasi dan peningkatan dermaga sungai	100,00
8.	Rehabilitasi dan peningkatan dermaga danau	100,00
9.	Perencanaan Umum, Pradisain, dan detail design prasarana SDP	100,00
	Capaian kinerja kegiatan rata-rata	**99,28**

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas SDM di bidang LLASDP**, dilakukan 1 kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel II. 33.
Hasil Pengukuran Kinerja Utama (Pencapaian Sasaran V)

No	NAMA KEGIATAN	Capaian Kinerja
1.	Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan di bidang LLASD	100,00
	Capaian kinerja kegiatan rata-rata	**100,00**

b) Analisa Dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari hal ini dilakukan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan diatas, secara umum Direktorat LLASDP berhasil melaksanakan program/ kegiatan relatif baik, dimana dari 19

kelompok kegiatan yang dilaksanakan, sebanyak 13 kelompok kegiatan (68,42%) mempunyai persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dan/atau sama dengan 100% sedangkan 6 kegiatan (31,58%) lainnya mempunyai persentase pencapaian rencana tingkat capaian kurang dari 100%. Kelompok Kegiatan yang pencapaian rencana tingkat capaian kegiatan yang kurang dari 100% adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan, dari 25 kegiatan pembangunan yang direncanakan di awal tahun 2014, hanya terealisasi sebanyak 18 kegiatan, dimana Pembangunan SBNP di Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang tidak terlaksana diakibatkan adanya pemotongan anggaran sedangkan Pembangunan SBNP di Pelabuhan Penyeberangan Waigeo sebanyak 3 Paket tidak dilaksanakan dikarenakan gagal lelang sebanyak 3 kali, sehingga anggaran dikembalikan ke negara serta Pembangunan SBNP di OPP Merak dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada Kantor OPP Merak tidak dilaksanakan karena belum ada payung hukum terkait pembangunannya.

(2) Normalisasi alur pelayaran SDP, dari 4 kegiatan pengerukan yang direncanakan, hanya terealisasi sebanyak 3 kegiatan, dimana pengerukan alur penyeberangan Sungai Wain Balikpapan seluas 910.000 m^3 belum terealisasi dikarenakan batal kontrak.

(3) Pembangunan Kapal Penyeberangan Baru, dari 6 kegiatan pembangunan, hanya terealisasi sebanyak 5 kegiatan. Pembangunan/Pengadaan Kapal Pembersih Alur Pelayaran Danau Tondano pada satker pengembangan Sulawesi Utara tidak dilaksanakan dikarenakan gagal lelang akibat hanya memiliki 1 (satu) penawar dan menawar di atas Pagu 8M (total Pagu hanya 6M).

(4) Pembangunan Kapal Penyeberangan Lanjutan, dari 9 kegiatan yang direncanakan, hanya terealisasi sebanyak 7 kegiatan, 2 kegiatan lainnya yaitu Pembangunan kapal sungai LCT 200 GT Kab. Asmat dan Kan Nduga serta Pembangunan kapal sungai LCT 200 GT Kab Membramo tidak terlaksana akibat adanya keterlambatan dari pihak kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan.

(5) Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan, dari 48 kegiatan pembangunan yang direncanakan pada awal tahun 2014, hanya terealisasi sebanyak 47 kegiatan. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Folley (Pulau Missol) Tahap II Lintas Wahai - Waigama -Folley - Sorong pada satker pengembangan Papua Barat tidak dilaksanakan karena dikenakan tanda bintang (Blokir).

(6) Rehabilitasi dan Peningkatan Dermaga Penyeberangan dari 23 kegiatan rehabilitasi yang direncanakan pada awal tahun 2014, hanya terealisasikan 23 kegiatan. Pengadaan & Pemasangan Lampu Penerangan Sollar Cell di Dermaga Papua Barat sebesar Rp. 15.000.000.000,- tidak dilaksanakan karena dikenakan tanda bintang (Blokir).

Jumlah kegiatan pada tahun 2014 lebih sedikit dibanding tahun 2013, yaitu 19 kegiatan pada tahun 2014 dan 21 kegiatan pada tahun 2013. Terdapat 2 kegiatan yang pada tahun 2013 dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu Pekerjaan AMDAL dan Pengadaan Speedboat.

Persentase kelompok kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya lebih besar/atau sama dengan 100% mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 80,95% menjadi 68,42% dan untuk kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya kurang dari 100% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu dari 19,05% menjadi 31,58% di tahun 2014.

ITEM EVALUASI	2013	2014
Jumlah total kelompok kegiatan	**21**	**19**
– Kelompok kegiatan yang pencapaian rencana tingkat capaian ≥ 100%	17	13
– Kelompok kegiatan yang pencapaian rencana tingkat capaian < 100%	4	6
Kegiatan yang batal dilaksanakan	**4**	**6**

c) Analisa Kinerja Keuangan

Analisa kinerja keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran (input) yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dan hasil (outcomes) dapat tercapai sesuai target.

Tabel II. 34. Analisa Kinerja Keuangan

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Pembangunan dermaga penyeberangan baru (Tahap I)	58.831.565.000	57.824.099.000	33.674.275.200	58,24%
2	Pembangunan dermaga penyeberangan lanjutan	829.169.681.000	758.200.936.150	445.560.016.610	58,77%
3	Pembangunan dermaga sungai baru	38.235.152.000	37.521.967.000	31.622.342.900	84,28%
4	Pembangunan dermaga sungai lanjutan	114.262.115.000	112.461.773.000	86.910.224.940	77,28%
5	Pembangunan dermaga Danau	4.256.493.000	4.256.493.000	2.221.058.150	52,18%
6	Peningkatan/ Rehabilitasi dermaga penyeberangan.	102.534.393.000	85.142.833.100	49.751.255.790	58,43%
7	Peningkatan/ Rehabilitasi dermaga sungai	43.388.329.000	37.686.796.000	31.712.701.200	84,15%
8	Peningkatan/ Rehabilitasi dermaga danau	16.153.857.000	15.859.734.000	8.113.114.200	51,16%
9	Pembangunan kapal penyeberangan baru	25.000.000.000	23.000.822.800	20.892.117.800	90,83%
10	Pembangunan kapal penyeberangan lanjutan	287.802.053.000	282.862.343.158	255.599.986.158	90,36%
11	Pembangunan Bus Air	5.336.495.000	5.278.935.700	3.810.435.700	72,18%
12	Pembangunan breakwater	46.026.761.000	46.026.761.000	36.702.765.550	79,74%
13	Pembangunan SBNP di lintas Penyeberangan	15.330.250,000	14.230.250,000	9.649.890.000	67,81%
14	Peningkatan alur pelayaran	56.356.378.000	55.302.134.000	34.143.729.000	61,74%
15	Studi kebijakan pengemb. transportsi SDP	19.750.000.000	18.562.958.250	18.562.958.250	100,00%
16	Perencanaan Umum, Pradesain, dan Detail Desain prasarana SDP	8.105.167.000	7.932.706.774	7.839.422.816	98,82%
17	Perencanaan Umum, Pradesain, dan Detail Desain sarana SDP	2.800.000.000	2.654.332.500	2.654.332.500	100,00%
18	Penyelenggaraan angkutan penyeb. perintis (pemberian subsidi)	357.266.722.000	342.331.731.561	333.329.432.122	97,37%
19	Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan di bidang LLASDP	1.265.000.000	1.265.000.000	1.265.000.000	100,00%
	Jumlah	2.031.870.411.000	1.908.402.606.993	1.285.193.633.340	75,67%

Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan rutin dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat LLASDP Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 35. Realisasi Anggaran Kegiatan Rutin

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Analisis dan Evaluasi Kinerja Lintas dan Penyeb.	161,000,000	161,000,000	132,273,100	82,16%
2	Anev Kinerja Jaringan Transport. Sungai dan Danau	119,000, 000	119,000,000	82,869,100	69,64%
3	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengemb.	153,500,000	153,500,000	120,016,750	78,19%

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
	dan Penetapan Lintas Penyeb.				
4	LAKIP Direktorat LLASDP Tahun 2013	46,100,000	46,100,000	22,195,000	48,15%
5	Penetapan Kinerja Dit. LLASDP T.A 2014	46,100,000	46,100,000	29,185,000	63,31%
6	Laporan Tahunan Direktorat LLASDP Tahun 2013	46,100,000	46,100,000	28,944,000	62,79%
7	Monitoring Pekerjaan Perencanaan / Konsultansi	211,249,000	211,249,000	205,844,800	97,44%
8	Penyusunan Registrasi Sarana ASD	102,447,000	102,447,000	86,608,200	84,54%
9	Penyusunan Database Sarana Angkutan Penyeb.	160,752,000	160,752,000	103,045,896	64,10%
10	Evaluasi Kinerja Pembangunan Kapal Penyeb.	157,214,000	157,214,000	135,925,840	86,46%
11	Evaluasi Kinerja Operasi Sarana Angkutan Penyeb.	439,198,000	439,198,000	405,195,228	92,26%
12	Monitoring Pelayanan Pelabuhan	353,365,000	353,365,000	222,963,396	63,10%
13	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan	137,308,000	137,308,000	86,802,900	63,22%
14	Pemantauan Pelabuhan Dalam Rangka Natal & Tahun Baru 2014	37,500,000	37,500,000	37,489,100	99,97%
15	Pembahasan Terpadu Penyusunan RKA KL Kementrian Perhubungan Tahun 2015	106,814,000	106,814,000	100,582,400	94,17%
16	Koordinasi Teknis Dalam Rangka Pengoperasian Pelabuhan Penyeb. Selesai 2013	115,795,000	115,795,000	115,707,910	99,92%
17	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI (Dalam Rangka Reses)	81,290,000	81,290,000	114,789,400	141,21%
18	Monitoring Gerakan Nasional Bersih di Pelabuhan	33,200,000	33,200,000	19,584,200	58,99%
19	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana SDP	644,917,000	644,917,000	553,713,360	85,86%
20	Koordinasi Antar Lembaga Instansi Pusat dan Daerah	400,000,000	400,000,000	347,052,650	86,76%
21	Koord. Teknis Dlm Rangka Pengesahan Dokumen DLKR/DLKP/Renc. Induk Pelab. Penyeb	29,300,000	29,300,000	29,258,000	99,86%
22	Monitoring Studi Kebijakan Pekerjaan Konsultansi	25,900,000	25,900,000	18,483,300	71,36%
23	Koord. Teknis Dlm Rangka Pengesahan Dokumen DLKR/DLKP/Renc. Induk Pelab. Penyeberangan	15,000,000	15,000,000	7,908,600	52,72%
24	Evaluasi Kinerja Manajemen Lalu Lintas SDP	204,280,000	204,280,000	154,478,000	75,62%
25	Pemantauan dan Evaluasi SBNP dan Rambu Sungai Danau	202,600,000	202,600,000	136,014,000	67,13%
26	Bimtek Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan	208,520,000	208,520,000	192,169,998	92,16%
27	Konsinyering Kegiatan Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi SDP	83,973,000	83,973,000	24,936,000	29,70%
28	Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal	173,090,000	173,090,000	167,185,300	96,59%

No	URAIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
29	Evaluasi Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Angk. Penyeberangan Pada Lintas Komersil Termasuk Pemeriksaan Kapal Setelah Docking	861,410,000	861,410,000	861,211,400	99,98%
30	Pemantauan Pelaksanaan Tarif Angkutan Penyeb.	148,372,000	148,372,000	133,213,000	89,78%
31	Pemeriksaan Perangkat Operasional Sarpras Penyeb. dan Pengawasan/Pemantauan Angkutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Angleb	1,229,544,000	1,229,544,000	1,224,226,000	99,57%
32	Penghargaan Insan Angkutan SDP	217,075,000	217,075,000	166,723,000	76,80%
33	Peningkatan SDM Bidang LLASDP	52,600,000	52,600,000	0	0,00%
34	Antisipasi Antrian Kemacetan di Pelabuhan Penyeberangan Serta Survei Demand dan Supply di Lintas Komersil	279,624,000	279,624,000	257,437,800	92,07%
35	Sosialisasi dan Penyegaran Administrasi Perkantoran	309,010,000	309,010,000	266,100,000	86,11%
36	Belanja Pemeliharaan dan Keperluan Sehari Hari Perkantoran	496,430,000	496,430,000	494,925,000	99,70%
	Jumlah	**8,089,577,000**	**8,089,577,000**	**7,085,057,628**	**79,21%**

Penyerapan anggaran pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 70,12% menjadi 67,43% pada tahun 2014.

Tabel II. 36. Penyerapan Anggaran Tahun 2014

Total Anggaran	2013	2014
Alokasi/Pagu	1,859,207,703,983	1,916,492,183,993
Realisasi	1,440,421,051,390	1,292,278,690,968
% Realisasi	**70,12%**	67,43%

Selisih anggaran sebesar Rp. 624,213,493,025,- berasal dari sisa kontrak (selisih antara pagu dengan nilai kontrak), kegiatan yang tidak jadi diselenggarakan serta kegiatan yang tidak mencapai target penyelesaian sehingga dana yang telah disediakan menjadi tidak terserap.

D. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN (BSTP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Bina Sistem Tranportasi Perkotaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;

- Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- Penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan pemaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) perovinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan;
- Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- Penyampaian perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transprotasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- Penyampaian pelaksanaan kebijakan di bidang transprotasi perktoaan menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Penyampaian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transprotasi perkotaan; dan
- Penyampaian pelaksanaan uruasan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

1. SUB DIREKTORAT JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainya, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan trasnportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintregrasi dengan moda lainnya;
- Penyiapan bahan pelaksana bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yuang terintegrasi dengan moda lainnya;
- Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintergrasi dengan moda lainnya;
- Penyiapan bahan penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transporasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintergrasi dengan moda lainnya, penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportsi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

a. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan trasnportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintregrasi dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
2) Pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
3) Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo;
4) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan;

   Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Wilayah Perkotaan pada tahun 2014 di Wilayah I dilaksanakan di 3 (tiga) Kab/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kab. Belitung (Kota Tanjung Pendan).

      Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km2, dengan batas administratif sebagai berikut:

      Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kabupaten Belitung.

Tabel II.37. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Belitung

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata 2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pattimura	2.115	8	K	Baik	Baik			v	v
2	Kemuning	1.100	7	K	Baik	Baik			v	v
3	Sriwijaya	2.015	7	K	Baik	Baik			v	v
4	Sijuk	2.415	8	K	Baik	Baik	1		v	
5	Hasyim Idris	2.100	8	K	Baik	Baik	1		v	
6	Hasan Sai	2.415	8	K	Baik	Baik	1		v	
7	Jend. Gatot	1.550	8	N	Baik	Baik	1	v		

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata 2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Subroto									
8	A. Yani	2.200	8	P	Baik	Baik	1,5	v		
9	Diponogoro	2.415	8	K			1	v		
10	Jend. Sudirman	9.303	12	N	Baik	Baik	1,5	v		

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Tabel II.38. Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kabupaten Belitung

No.	Nama Ruas Jalan	Kecepatan Rata-rata Kendaraan
1	Pattimura	40 km/jam
2	Kemuning	45 km/jam
3	Sriwijaya	45 km/jam
4	Sijuk	35 km/jam
5	Hasyim Idris	40 km/jam
6	Hasan Sai	45 km/jam
7	Jend. Gatot Subroto	45 km/jam
8	A. Yani	30 km/jam
9	Diponogoro	40 km/jam
10	Jend. Sudirman	35 km/jam

Sumber : Data Hasil Survei 2014

b) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kab. Takalar

Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandra Bone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai,yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kabupaten Takalar.

Tabel II.39. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Takalar

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Diponegoro	1,4	8	N	Baik	Baik	1,5	v	v	

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Jenderal Sudirman	2,2	15	N	Baik	Baik	1,5	-	-	v
3	Jenderal Ahmad Yani	1,8	8	N	Baik	Baik	1,5	v	v	
4	Sultan Hasanudin	1,5	7	K	Baik	Baik	1,0	v	-	-
5	Mappajalung DG Kawang	3,0	7	K	Baik	Baik	1,0	v	-	-
6	Pajonga DG Ngalle	1,5	7	K	Baik	Baik	1,0	v	-	-

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Tabel II.40. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kabupaten Takalar

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (Km	Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)
1	Diponegoro	1,4	40,00
2	Jenderal Sudirman	2,2	30,00
3	Jenderal Ahmad Yani	1,8	35,00
4	Sultan Hasanudin	1,5	30,00
5	Mappajalung DG Kawang	3,0	35,00
6	Pajonga DG Ngalle	1,5	30,00

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Gambar II.29. Kondisi Jaringan Jalan Kab. Takalar

c) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kota Palembang

Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59'27.99'LS 104°45'24.24'BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kota Palembang.

Tabel II.41. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Palembang

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata-rata	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Veteran	1,6	12	N	Aspal	Sesuai				v
2	Jend. Sudirman	5,1	12	N	Aspal	Sesuai				v
3	Demang Lebar Daun	4,1	12	N	Aspal	Sesuai				v
4	Basuki Rahmat	1,98	12	N	Aspal	Sesuai				v
5	Gubernur H. Bastari	5,5	12	N	Aspal	Sesuai				v
6	Merdeka	1,28	12	P	Aspal	Sesuai				v
7	Kol. Atmo	1,1	12	P	Aspal	Sesuai				v
8	Angkatan 45	1,9	12	P	Aspal	Sesuai				v
9	Bambang Utoyo	2,2	8	K	Aspal	Sesuai				v
10	Tasik	0,62	8	K	Aspal	Sesuai				v

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Gambar II.30. Kondisi Jaringan Jalan di Kota Palembang

5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Perkotaan; Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Transportasi Perkotaan pada tahun 2014 di Wilayah I dilaksanakan di 4 (empat) Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a) Monev Rencana Induk Transportasi Perkotaan di Prov. Sulawesi Tengah
   b) Monev Rencana Induk Transportasi Perkotaan di Prov. Kalimantan Selatan
   c) Monev Rencana Induk Transportasi Perkotaan di Prov. Riau
   d) Monev Rencana Induk Transportasi Perkotaan di Prov. Kalimantan Timur
6) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan pada Kawasan Kota Banda Aceh, Sabang, Jantho (Basajan);
7) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Manado dan Sekitarnya.

b. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua;
2) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II;
3) Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo;

   Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Hotel Maqna kota Gorontalo dan dibuka oleh Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan serta dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) pejabat/staf Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dan Balai LLAJSDP di Palu.

   Adapun judul paparan dan Narasumber adalah sebagai berikut:

   a) Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan oleh Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan;
   b) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Transportasi Darat oleh Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat;
   c) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Provinsi Gorontalo oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
   d) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan dan Sosialisasi Wahana Tata Nugraha (WTN) oleh Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan;
   e) Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan oleh Kasubdit Angkutan Perkotaan;
   f) Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan oleh Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan;
   g) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan oleh Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan; dan

h) Penyelenggaraan Integrasi Moda Transportasi Perkotaan oleh Kasubdit Pemadu Moda Transportasi Perkotaan.

Dari hasil pembahasan materi dan diskusi dalam sesi pembahasan Bimtek Bidang Transportasi Perkotaan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Perlu penyusunan rencana induk transportasi perkotaan pada Kawasan Perkotaan Gorontalo dan sekitarnya (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo dan Kab. Bone Bolango) sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan.
b) Dalam pembangunan database bidang jalan di perkotaan, pengumpulan data-data informasi bidang jalan (perkotaan) serta kebutuhannya perlu dikembangkan untuk provinsi Gorontalo / Sulut / Sulsel / Sulteng / Sultra / Maluku/ Maluku Utara dan kab/kota di masing-masing provinsi.
c) Perlu segera disusun Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana diamanahkan PP 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan untuk kawasan perkotaan di Prov. Gorontalo dan sekitarnya serta perlunya keberpihakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum di masing-masing kabupaten/kota.
d) Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di kawasan perkotaan yang diimplementasikan melalui tahapan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, pengawasan sesuai kewenangannya melalui optimaliasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka mencapai tingkat pelayanan yang diharapkan.
e) Pembangunan transportasi perkotaan agar tetap berorientasi terhadap kebijakan yang ramah lingkungan melalui manajemen kebutuhan perjalanan, berpindah ke moda tranportasi yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi moda transportasi dan teknologi kendaraan.
f) Sebagai amanah Undang-Undang di bidang Transportasi dari seluruh pelayanan moda yang ada baik moda jalan, moda kereta api, moda laut, dan moda udara harus mampu mengakomodasi asas keterpaduan yang mengintegrasikan prasarana perpindahan moda, pelayanan dan

operasional maupun system pembayarannya yang mampu mengintegrasikan antar moda maupun intra moda yang ada sehingga tercipta pelayanan yang lebih cepat, efisien dan memudahkan masyarakat.

g) Perlu segera dilakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di wilayah Provinsi Gorontalo yang mampu melaksanakan tugas sebagai penyelenggara transportasi perkotaan;

h) Dimasa mendatang, dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan pelayanan transportasi perkotaan yang efektif dan efisien, maka keterlibatan seluruh elemen (perguruan tinggi, institusi penelitian, industri dan pemerintah) mutlak diperlukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui implementasi program yang terpadu dan terencana dengan baik.

Gambar II.31. Pembukaan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014

Gambar II.32. Kegiatan Diskusi Panel Sesi 1 dan Sesi 2 Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014

4) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan Tahun 2014;

Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Wilayah Perkotaan pada tahun 2014 di Wilayah II dilaksanakan di 5 (lima) Kab/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kota Cirebon

Kota Cirebon sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Kota Cirebon terletak pada 6°41'LU 108°33'BT pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kota Cirebon.

Tabel II.42. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Cirebon

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata 2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jl. Tuparev	350	10	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
2	Jl. Kartini	1.050	14	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
3	Jl. A. Yani	5.000	16	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
4	Jl. Cipto. M	2.628	12	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
5	Jl. Siliwangi	1.564	15	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
6	Jl. Kesambi	2.220	14	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
7	Jl. Sudirman	1.890	18	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5	-		
8	Jl. Brigjen Dharsono	24.000	12	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
9	Jl. Wahidin	12.000	14	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
10	Jl. Tentara pelajar	829	12	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Gambar II.33. Kondisi Jaringan Jalan di Kota Cirebon

b) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kota Surakarta

Kota Surakarta dikelilingi oleh 3 kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur dibatasi dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kota Surakarta.

Tabel II.43. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Surakarta

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata 2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jl. Slamet Riyadi	6,4	16,8	N	RATA	SESUAI	1 M		√	
2	Jl. Jenderal Soedirman	0,5	15,2	K	RATA	SESUAI	1 M		√	
3	Jl. Diponogoro	1	12,4	K	RATA	SESUAI	1.5M		√	
4	Jl. Urip Sumoharjo	3,4	12,4	N	RATA	SESUAI	1.5M		√	
5	Jl. Adi Sucipto	3,9	14,8	K	RATA	SESUAI	1M	√		

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Tabel II.44. Tabel Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Surakarta

No.	Nama Ruas Jalan	Kecepatan Rata-rata Kendaraan
1	Jl. Slamet Riyadi	48,5
2	Jl. Jenderal Soedirman	45,6
3	Jl. Diponogoro	40,8
4	Jl. Urip Sumoharjo	40,02
5	Jl. Adi Sucipto	42,45

Sumber : Data Hasil Survei 2014

c) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kota Blitar

Letak Geografis Kota Blitar terletak ± 160 km sebelah Barat Daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Kota ini terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan.

Batas Wilayah Satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah Kabupaten Blitar karena posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kota Blitar.

Tabel II.45. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Blitar

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jalan Bali	1.450	9	N	ASPAL	Sesuai	-			√
2	Jalan Imam Bonjol	1.200	8	N	ASPAL	Sesuai	-			√
3	Jalan Kalimantan	1.530	8	N	ASPAL	Sesuai	-			√
4	Jalan Kenari	2.233	8	N	ASPAL	Sesuai	-			√
5	Jalan Veteran	715	8	K	ASPAL	Sesuai	-			√
6	Jalan Palem	572	8	N	ASPAL	Sesuai	2	√		
7	Jalan S.Supriyadi	1.765	8	N	ASPAL	Sesuai	-			√
8	Jalan Tanjung	1.221	9	P	ASPAL	Sesuai	-			√
9	Jalan A.Yani	395	10	K	ASPAL	Sesuai	-			√
10	Jalan Merdeka	1.050	12	K	ASPAL	Sesuai	-			√

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Tabel II.46. Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Blitar

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (Meter)	Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)
1	Jalan Bali	1.450	18,86
2	Jalan Imam Bonjol	1.200	18,86
3	Jalan Kalimantan	1.530	15,5
4	Jalan Kenari	2.233	12,26
5	Jalan Veteran	715	19
6	Jalan Palem	572	19,3
7	Jalan S.Supriyadi	1.765	16,74
8	Jalan Tanjung	1.221	15,56
9	Jalan A.Yani	395	16,3
10	Jalan Merdeka	1.050	17,78

Sumber : Data Hasil Survei 2014

d) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan di Kota Sukabumi

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik koordinat 106° 45' 50" BT dan 106° 45' 10" Bujur Timur, 6° 50' 44" Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan 0° – 3° dan 3° – 8° di bagian utara. Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km.

Dari Data yang diperoleh dari hasil survey di lapangan, diketahui panjang jalan, lebar jalan dan kondisi jalan di Kota Sukabumi.

Tabel II.47. Ruang Milik Jalan dan Kondisi Permukaan di Kota Sukabumi

No.	Nama Jalan	Panjang (m)	Lebar Rata2 (m)	Status Jalan (N/P/K)	Kondisi Badan Jalan					
					Jalur Lalu Lintas		Bahu Jalan			
							Ada			Tidak ada
					Permukaan	Penggunaan	Lebar Rata2	Penggunaan		
								Sesuai	Tdk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Ahmad Yani	1.244	10.0	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
2	Alun - Alun Utara	0.095	12.0	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
3	Amubawa Sasana	0.805	6.0	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
4	Arief Rachman Hakim	0.920	8.0	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
5	Babakan Sirna	0.400	5.0	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
6	Balai Desa	0.336	4.0	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
7	Balandongan	1.675	3.0	P	Hotmix	Jalur Lalin	1,5	-		
8	Bantar Panjang	0.447	3.0	N	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
9	Begeg	0.537	3.0	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		
10	Benteng	0.700	4.0	K	Hotmix	Jalur Lalin	1,5 M	v		

Sumber : Data Hasil Survei 2014

Tabel II.48. Waktu Tempuh di Ruas Jalan Utama di Kota Sukabumi

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (Meter)	Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)
1	Jl. A. Rahman Hakim	0.920	21,18
2	JL.Ahmad.Yani	1.244	11,25
3	Jl. Bhayangkara	1.675	30,86
4	Jl. Garuda	0.890	21,79
5	Jl. Jend. Sudirman	0.957	22,23
6	Jl. K. H. Ahmad Sanusi	0.300	22,23
7	Jl. Laks. R. E. Martadinata	0.930	18,17
8	Jl. Lingkar selatan	0.799	41,36
9	Jl. Merdeka	2.250	34,56
1	Jl. Otto Iskandar Dinata	1.889	19,34

Gambar II.34. Kondisi Jaringan Jalan di Kota Sukabumi

2. SUB DIREKTORAT LALU LINTAS PERKOTAAN

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, penyelenggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas

pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;

- Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; dan
- Penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, bimbingan teknis dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

a. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Pemberian Bimbingan Teknis Lalu Lintas di Perkotaan di wilayah I
   a) Bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan dengan pendanaan dari DIPA Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan tahun anggaran 2014. Adapun waktu bimbingan teknis dilaksanakan di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 24 - 25 September 2014.
   b) Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan transportasi di daerah, berikut materi Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas di Perkotaan:
      (1) Pengarahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
      (2) Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan dan Kegiatan WTN;

(3) Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan;
(4) Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
(5) Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan;
(6) Mekanisme Pengajuan Usulan Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan dengan Pola Pendanaan APBN dan DAK;
(7) Mekanisme Penyerahan Aset;
(8) Tata Cara Penempatan dan Standarisasi Material Fasilitas Perlengkapan Jalan;
(9) Pengoperasian dan Perawatan APILL.

c) Penceramah/penyaji materi pada bimbingan teknis ini terdiri dari:
(1) Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan, Direktorat BSTP;
(2) Kasubdit Angkutan Perkotaan, Direktorat BSTP;
(3) Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan, Direktorat BSTP;
(4) Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan, Direktorat BSTP;
(5) Kabag. Keuangan, Setditjen Hubdat;
(6) Kasubag Rencana dan Program, Setditjen Hubdat;
(7) Kasi Manajemen dan Rekayasa Jalan, Direktorat LLAJ;
(8) PT. Marktell.

d) Peserta bimbingan teknis ini terdiri dari Kepala Dinas/Pejabat Teknis Dishub Prov dan Ibukota Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan, Kepala Dinas/Pejabat teknis Kab./Kota se Sumatera Bagian Selatan, dan Kepala Balai/Pejabat teknis Balai LLAJSDP Jambi dan Bali.

e) Dari hasil pembahasan dan diskusi atas materi yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas di Perkotaan bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dapat disimpulkan beberapa hal penting antara lain sebagai berikut:
(1) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dimana tujuan dari pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas

dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Untuk optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu dilakukan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan, penetapan kebijakan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu, serta optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam melaksanakan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain dampak pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terhadap lingkungan, sinergitas dengan strategi lain dan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan lainnya serta mempertimbangkan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang.

(3) Perlu segera dilakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Jawa yang mampu melaksanakan tugas sebagai penyelenggara transportasi perkotaan;

(4) Perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), Balai LLAJSDP, dan Pemerintah Daerah (Dishub Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membidangi perhubungan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik;

(5) Perlu adanya perencanaan yang matang sehingga penyelenggaraan transportasi perkotaan dapat terlaksana dengan baik, di samping perlu adanya koordinasi dan kesiapan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan.

(6) Foto pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas di Kota Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014.

Gambar II.35. Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2014

2) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Area Traffic Control System di Wilayah Perkotaan Tahun 2014 di Wilayah I;

a) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Medan Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Medan didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 4.833.550.150,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Medan di pasang pada 6 (enam) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Speed dan Counting Kendaraan, Kamera PTZ, Kamera Fix, Public Announcer, Display Info Simpang dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta perangkat CC-Room;

(2) Pembangunan ATCS di Kota Medan di 6 (enam) lokasi persimpangan, yaitu:

- Simpang 3 Sisingamangaraja – Al-Falah;
- Simpang 4 Sisingamangaraja – HM. Joni;
- Simpang 3 Gerbang Tol Amplas;
- Simpang 3 Gerbang Tol Tanjung Morawa;
- Simpang 4 Kayu Besar (Tanjung Morawa);
- Simpang 4 AH. Nasution – Simp. Bajak (Marendal).

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Medan Tahun 2014.

Gambar II.36. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Medan Pada Tahun 2014

b) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Batam Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Batam didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Batam di pasang pada 8 (delapan) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, pekerjaan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta perangkat CC-Room;

(2) Pada saat dilakukan monitoring, pembangunan ATCS di Kota Batam sudah terpasang di 8 (delapan) persimpangan yaitu :

- Simpang 3 Indo Mobil;
- Simpang 4 Jam;
- Simpang 4 Kabil;
- Simpang 4 BI;
- Simpang 4 Frangky;
- Simpang 4 Masjid Raya;
- Simpang 4 KDA;
- Simpang 4 Ikan Daun.

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Batam Tahun 2014

Gambar II.37. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Batam Pada Tahun 2014

c) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Padang Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Padang didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 4.813.129.000,- (empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Padang di pasang di 6 (enam) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Speed dan Counting Kendaraan, Kamera PTZ, Kamera Fix, Display Info Simpang dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta CC-Room;

(2) Pada saat dilakukan monitoring, pembangunan ATCS di Kota Padang sudah dilakukan dan sudah terpasang di 6 (enam) persimpangan yaitu

- Simpang 3 Khotib Sulaiman – S.Parman (DPRD);
- Simpang 3 Bagindo Aziz Chan – Thamrin (Alang Laweh);
- Simpang 4 A.Dahlan – Gajah Mada (Alay);
- Simpang 3 Perintis Kemerdekaan – Agus Salim (Sawahan);
- Simpang 3 Sawahan – Jl. Wahidin (Wahidin);
- Simpang 3 Sawahan – Sutomo (Haru).

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Padang Tahun 2014

Gambar II.38. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Padang Pada Tahun 2014

d) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Bandar Lampung didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 2.939.517.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). Pelaksanaan

penerapan ATCS di Kota Bandar Lampung di pasang pada 4 (empat) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Kamera Fix dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta CC-Room;

(2) Pembangunan ATCS di Kota Bandar Lampung terpasang di 6 (enam) persimpangan yaitu:

- Simpang Pramuka;
- Simpang Unila;
- Simpang Sultan Agung;
- Simpang Urip Sumoharjo.

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Gambar II.39. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2014

3) Wahana Tata Nugraha

a) Dasar Hukum

(1) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

(3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 141 Tahun 2014 Tentang Panitia Pelaksana Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014;

(4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.747 Tahun 2014 Tenteng PenetapanKota/Kabupatendan Provinsi SebagaiPenerimaPenghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014.

b) Pelaksanaan kegiatan Penghargaan WTN Tahun 2014 dimulai pada Bulan Februari Tahun 2014 dan berakhir dengan penetapan penerima Penghargaan WTN pada tanggal 10 September Tahun 2014.

c) Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

   (1) Tahap Pertama berupa Penilaian Administrasi, yang terdiri atas aspek Administratif Transportasi Kota, yang dilakukan oleh penilai dari Panitia Tingkat Provinsi. Adapun Kota-kota yang diusulkan oleh Panitia Tingkat Provinsi berjumlah 201 (dua ratus satu) kota dari 28 Provinsi, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Tingkat Nasional maka ditetapkan sebanyak 176 Kota/Kab dinyatakan lulus Tahap Pertama.

   (2) Tahap Kedua merupakan Penilaian Aspek Teknis dan Operasional, yang dilakukan bersama-sama oleh: Panitia Tingkat Nasional, Panitia Tingkat Provinsi dan Akademisi setempat, dengan hasil sebanyak 176 Kota/Kab dinyatakan lulus Tahap Kedua.

   (3) Tahap Ketiga, merupakan penilaian terhadap komitmen Kepala Daerah dalam Pengembangan dan Pembangunan Transportasi Perkotaan, yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Nasional.

d) Berdasarkan penilaian dari ketiga tahapan tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 747 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2014, telah ditetapkan penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah :

   (1) 7 (Tujuh) Provinsi, menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama;

   (2) 2 (Dua) Kota, menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kencana;

   (3) 11 (Sebelas) Kota, menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha;

   (4) 1 (Satu) Kota, menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan;

   (5) 96 (Sembilan puluh enam) Kota, menerima Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas; dan

(6) 65 (Enam puluh lima) Kota, menerima Penghargaan Plakat Wahana Tata Nugraha.

e) Foto penetapan penerima Penghargaan WTN pada tanggal 10 September Tahun 2014

4) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014 (Penyusunan Draft Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan);

5) Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Koridor Bandung Raya;

6) Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Koridor Jakarta Tangerang;

7) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendukung Transportasi Massal Perkotaan (BRT) di Koridor Bandung Raya;

8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendukung Transportasi Massal Perkotaan (BRT) di Koridor Jakarta-Tangerang;

9) Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pada Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi;

10) Penyusunan Pedoman Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dan Kendaraan Tidak Bermotor;

11) Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penerangan Jalan Umum (PJU) dan APILL Tenaga Surya.

b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II;

2) Pelaksana Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2014 di Wilayah II.

a) Kegiatan Forum ATCS Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26November 2014, bertempat di Pendhapi Gede Kompleks Balaikota Surakarta, dimulai pukul 09.00 s.d pukul 15.30 WIB;

b) Kegiatan Forum ATCS Tahun 2014 ini mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

(1) Terselenggaranya sistem pengaturan dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang transportasi perkotaan yang terkoneksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan guna peningkatan kinerja Lalu Lintas di Perkotaan;

(2) Terwujudnya penyelenggaraan / Area Traffic Control System (ATCS) dan kemungkinan pengembangan fungsi-fungsinya di bidang transportasi perkotaan;

(3) Menemukenali permasalahan-permasalahan penyelenggaraan Area Traffic Control System (ATCS) di daerah;

(4) Mengusulkan rekomendasi dalam penyelenggaraan ATCS (Perencanaan - Penyelenggaraan - Operasional).

c) Peserta Forum terdiri dari Kepala Dinas/PejabatTeknis Dishub Provinsi dan Kepala Dinas/Pejabat teknis Kab./Kota yang akan atau sudah menyelenggarakan ATCS dalam pengaturan persimpangan; dan Kepala Balai/Pejabat teknis Balai LLAJSDP dengan jumlah keseluruhan peserta diperkirakan 75 orang. (daftar hadir terlampir);

d) Materi dan narasumber/pembicarapadaForum ini adalah

(1) Diskusi Panel sesi I (kebijakan dalam penyelenggaraan ATCS dan wacana pengembangan ATCS)

- Direktur BSTP dengan tema **"Kebijakan Umum Penyelenggaraan ATCS di wilayah perkotaan"**;
- Kapusdatin Kementerian Perhubungan dengan tema **"Tata Aturan Penyelenggaraan Teknologi Informasi Untuk Sektor Transportasi"**
- Kementerian kominfo dengan tema **"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Kepentingan Transportasi Perkotaan"**;
- BPPT dengan tema **"Aplikasi dan Teknologi Untuk Pengaturan Sistem Transportasi Perkotaan di Indonesia"**;

- Akademisi dari Universitas Sebelas Maret dengan tema **"Peluang Pengembangan Teknologi Informasi Untuk Kepentingan Lalu Lintas Perkotaan Kedepan"**.

(2) Diskusi Panelsesi II (dengan tema "Berbagi Pengalaman Dalam Penyelenggaraan ATCS") yang dipaparkan oleh :

- Dishub Kota Surakarta;
- Dishub Kota Medan;
- Dishub Kota Surabaya dan;
- Dishub Kota Denpasar.

e) Dari hasil pembahasan dan diskusi atas materi yang disampaikan dalam Forum ATCS, dapat disimpulkan beberapa hal penting antara lain sebagai berikut:

(1) Penerapan pengendalian simpang dengan APILL Terkoordinasi atau yang lebih dikenal dengan ATCS merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan penanganan transportasi perkotaan pada pilar kedua yaitu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

(2) Penerapan ATCS sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi baik dalam bentuk teknologi perangkat lunak (sofware), link komunikasi maupun perangkat keras (hardware). Agar semua peralatan teknologi informasi ini dapat dipergunakan secara luas untuk pengembangan ATCS, dibutuhkan regulasi dan standar peralatan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi;

(3) Penerapan ATCS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan teknologi informasi untuk sektor transportasi harus dapat diakses oleh masyarakat luas dan bersifat terbuka. Untuk itu penerapan ATCS harus memenuhi kaidah dan tata aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan;

(4) Untuk memberdayakan industri Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) dalam negeri dalam pengembangan ATCS, dibutuhkan penelitian dan uji coba pengembangan teknologi ATCS yang dapat dilakukan oleh BPPT, perguruan tinggi, badan/lembaga penelitian lainnya dan industri nasional;

(5) Dalam rangka penerapan transportasi pintar, yang salah satunya dilakukan melalui penerapan ATCS, maka Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus secara serius merencanakan, melaksanakan dan mengoperasikan ATCS secara bertahap. Komitmen Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pendanaan dan pengembangan SDM dalam penerapan ATCS menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan ATCS;

(6) Sebagai pembina teknis dibidang pengembangan ATCS, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan secara berkesinambungan memberikan bimbingan teknis dan bantuan teknis penerapan ATCS kepada Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Khusus usulan bantuan teknis harus disampaikan melalui Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi.

f) Foto pelaksanaan Kegiatan Forum ATCS di Kota Surakarta Tahun 2014

Gambar II.40. Kegiatan Workshop Forum ATCS di Kota Surakarta Tahun 2014 di Wilayah II

3) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Area Traffic Control System di Wilayah Perkotaan Tahun 2014 di Wilayah II;

a) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Bandung Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Medan didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Bandung di pasang pada 6 (enam) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Kamera PTZ, Kamera Fix, Public

Announcer, Display Info Simpang dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta perangkat CC-Room;

(2) Pembangunan ATCS di Kota Bandung di 6 (enam) lokasi persimpangan, yaitu:

- Simpang Paskal;
- Simpang Cipaganti;
- Simpang Cihampelas;
- Simpang Tamansari;
- Simpang Cikapayang;
- Simpang Pahlawan.

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Bandung Tahun 2014

Gambar II.41. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Bandung Pada Tahun 2014

b) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Pekalongan Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Pekalongan didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 3.860.968.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Pekalongan di pasang pada 6 (enam) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Kamera PTZ, Kamera Fix, dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta CC-Room;

(2) Pembangunan ATCS di Kota Pekalongan di 6 (enam) lokasi persimpangan, yaitu:

- Simpang 4 Ponolawen;

- Simpang 3 Darma Bakti;
- Simpang 4 Grogolan;
- Simpang 4 Posis;
- Simpang 3 Terminal 1;
- Simpang 3 Terminal 2.

c) Monitoring Area Traffic Control System di Kota Yogyakarta Tahun 2014

(1) Pembangunan ATCS di Kota Pekalongan didanai melalui APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 3.860.968.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pelaksanaan penerapan ATCS di Kota Pekalongan di pasang pada 6 (enam) persimpangan dengan pembangunan beberapa perangkat APILL ATCS, pemasangan detektor kendaraan, Kamera PTZ, Kamera Fix, dan jaringan link komunikasi data berbasis Fiber Optic serta CC-Room;

(2) Pembangunan ATCS di Kota Yoyakarta di 6 (enam) lokasi persimpangan, yaitu:

- Simpang 4 Ponolawen;
- Simpang 3 Darma Bakti;
- Simpang 4 Grogolan;
- Simpang 4 Posis;
- Simpang 3 Terminal 1;
- Simpang 3 Terminal 2.

(3) Foto pelaksanaan Monitoring Area Traffic Control System di Kota Yogyakarta Tahun 2014

Gambar II.42. Kondisi Existing Pengembangan ATCS di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2014

4) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pengaturan Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Wilayah II;

   Penyusunan pengaturan arus ruas Jalan Nasional Kota Palu yaitu pada ruas Jalan Gajah Mada, dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 2014, dengan hasil sebagai berikut:

   a) Sistem satu arah (One Way) pada ruas Jalan Gajah Mada telah meningkatkan kelancaran lalu lintas bagi para pengguna jalan di Kota Palu terutama bagi pengguna kendaraan pribadi dan penumpang angkutan umum, sebagaimana hasil kajian MRLL Sistem Satu Arah (SSA) ruas Jalan Gajah Mada kinerja lalu lintas sebelum diberlakukan sistem satu arah pada saat peak hour V/C ratio rata-rata pada segmen 1, 2 dan 3 adalah 0,83 (Tk. Pelayanan D) dan setelah diberlakukan sistem satu arah V/C ratio rata-rata pada segmen 1, 2 dan 3 menjadi 0,63 (Tk. Pelayanan C) (Sumber: Balai LLAJSDP Palu).
   b) Dalam rangka mewujudkan peyelenggaraan transportasi perkotaan yang aman, selamat, tertib dan lancar maka dibutuhkan kinerja lalu lintas dan angkutan yang mengakomodir seluruh perjalanan dalam wilayah kota. Disamping itu pengaturan arus lalu lintas perkotaan pada jalan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus memenuhi aturan antara lain larangan parkir di badan jalan, hambatan samping terbatas dan perlengkapan jalan di pasang pada tempat yang dibutuhkan.
   c) Pada ruas pengalihan jalan yang digunakan dalam sistem SSA ruas Jalan Wahidin dan ruas Jalan Wahid Hasyim status jalannya adalah jalan kota sehingga tingkat pelayanannya berbeda dengan ruas Jalan Gajah Mada (jalan nasional), untuk itu dibutuhkan persyaratan pengajuan peningkatan status jalan dari jalan kota menjadi jalan nasional kepada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
   d) Foto pelaksanaan Pengaturan Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Kota Palu Tahun 2014

Gambar II.43. Kondisi Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional di Kota Palu Tahun 2014

5) Pelaksanaan Kegiatan Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Wilayah II;

a) Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kota Kediri

(1) Simpang 4 Muning

Kondisi simpang:

- Jarak dari CC-Room sekitar 1,39 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Semeru 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 36,9 km/jam;
- Tipe Jalan Agus Salim 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 38,6 km/jam;
- Terdapat papan reklame yang mengganggu APILL;
- Tiang APILL di ruas Jaln Semeru menjadi satu dengan kaki reklame.

(2) Simpang 4 Bandar Ngalim

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Muning sekitar 1 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Agus Salim 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 38,6 km/jam;
- Tipe Jalan Bandar Ngalim 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 34,7 km/jam;
- Terdapat atap PKL yang menutuli tiang APILL di ruas Jalan Hasyim Ashariyang berpotensi menghambat proses pembangunan.

(3) Simpang 4 Alun-Alun

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Bandar Ngalim sekitar 0,53 km;
- Terdapat APILL dan kamera pemantau;
- Tipe Jalan Bandar Ngalim 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 34,7 km/jam;
- Tipe Jalan Brigjen Katamso2/1 UD dengan kecepatan sebesar 34,9 km/jam;
- Tipe Jalan Urip Sumoharjo 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 46,9 km/jam;
- Antrian cukup panjang (sekitar 5-20 m) terutama di ruas Jalan Bandar Ngalim yang merupakan jembatan.

(4) Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kota Kediri.

Gambar II.44. Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kota Kediri Tahun 2014

b) Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo

(1) Simpang 3 Larangan

Kondisi simpang:

- Jarak dari CC-Room sekitar 1,37 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Raya Candi 6/2 D dengan kecepatan sebesar 31 km/jam;
- Tipe Jalan Mojopahit 6/2 D dengan kecepatan sebesar 32,9 km/jam;

- Tipe Jalan Gatot Subroto 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 37,5 km/jam.

(2) Simpang 4 Celep

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 3 Larangan sekitar 0,91 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Mojopahit 4/2 D dengan kecepatan sebesar 33,5 km/jam;
- Tipe Jalan Hasanudin 2/1 UD dengan kecepatan sebesar 22,9 km/jam;
- Tipe Jalan Erlangga 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 23,7 km/jam.

(3) Simpang 4 Alun-Alun / Pemda

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Celep sekitar 1,75 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan A. Yani 6/2 D dengan kecepatan sebesar 42,8 km/jam;
- Tipe Jalan Gub. Suryo Barat 2/2 D dengan kecepatan sebesar 34,9 km/jam;
- Tipe Jalan Urip Sumoharjo 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 30,8 km/jam;
- Tipe Jalan Untung Suropati 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 29,5 km/jam.

(4) Foto Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar II.45. Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

c) Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Jembrana

(1) Simpang 4 Pengadilan

Kondisi simpang:

- Jarak dari CC-Room sekitar 300 m;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Raya Sudirman 4/2 D dengan kecepatan sebesar 41 km/jam;
- Tipe Jalan Hassanudin 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 35 km/jam;
- Tipe Jalan Mayor Sugianyar 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 32 km/jam.

(2) Simpang 4 Batu Agung

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Pengadilan sekitar 1 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Sudirman 4/2 D dengan kecepatan sebesar 43,5 km/jam;
- Tipe Jalan Pulau Irian 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 32,9 km/jam;
- Tipe Jalan Sawe Batu Agung 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 33,7 km/jam.

(3) Simpang 4 Pahlawan

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Pengadilan sekitar 2,5 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Sudirman 4/2 D dengan kecepatan sebesar 42 km/jam;
- Tipe Jalan Pahlawan 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 34 km/jam;
- Tipe Jalan Rajawali 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 31 km/jam.

(4) Simpang 4 Ahmad Yani

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Pahlawan sekitar 500 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Udayana 4/2 D dengan kecepatan sebesar 43 km/jam;
- Tipe Jalan Ratna 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 35 km/jam;
- Tipe Jalan Yos Sudarso 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 31 km/jam.

(5) Simpang 4 Kaliakah

Kondisi simpang:

- Jarak dari Simpang 4 Ahmad Yani sekitar 2 km;
- Terdapat APILL;
- Tipe Jalan Udayana 4/2 D dengan kecepatan sebesar 40 km/jam;
- Tipe Jalan Desa Kaliakah 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 32 km/jam;
- Tipe Jalan Desa Kaliakah 2/2 UD dengan kecepatan sebesar 30 km/jam.

(6) Foto Survey Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2014 di Kabupaten Jembrana.

Gambar II.46. Kondisi Traffic Light Pada Jalan Nasional di Kabupaten Jembrana Tahun 2014

6) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2014 (Penyusunan Draft Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan);
7) Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Koridor Bandung Raya;
8) Pengadaan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Koridor Jakarta Tangerang;
9) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendukung Lalu Lintas;
10) Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pada Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi;
11) Penyusunan Pedoman Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dan Kendaraan Tidak Bermotor;
12) Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penerangan Jalan Umum (PJU) dan APILL Tenaga Surya.

3. SUB DIREKTORAT ANGKUTAN PERKOTAAN

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan Teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- Penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanananya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa saran angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

a. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pertemuan Forum Sistem Transit;

   Pertemuan Forum Transit pertama di tahun 2014 dilaksanakan di kota Bogor pada tanggal 16 sd 17 April 2014.

   a) Permasalahan Penyelenggaraan Pertemuan Forum Sistem Transit:

      Pelaksanaan forum transit yang dilakukan dua kali setahun dipandang tidak efektif dikarenakan progress operasional dan data-data penyelenggara BRT belum optimal jika dinilai selama 6 (enam) bulan. Disamping itu data-data produksi dan operasional masih belum up to date.

   b) Pemecahan:

      Diusulkan penyelengaraan forum transit satu kali setahun.

2) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus Pelajar/Mahasiswa/Kampus/Umum Perkotaan sebanyak 45 unit;
3) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Jabodetabek sebanyak 120 Unit;
4) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Mebidangro sebanyak 30 Unit;
5) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Surabaya Metropolitan Area sebanyak 30 Unit;
6) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Bandung Raya sebanyak 30 Unit;
7) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Sarbagita sebanyak 30 Unit;
8) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Maminasata sebanyak 30 Unit;
9) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Euro II Engine Model 2 (dua) pintu sebanyak 15 Unit;
10) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT sebanyak 15 Unit;
11) Survey Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Pada Masa Angkutan Lebaran 2014;
12) Survei Monitoring dan Persepsi Masyarakat meliputi Survei Wawancara Pemudik Pengguna Bus Di Terminal, Survei Mudik Bersama, Survei Mudik Gratis, Survei Pengguna Kendaraan Pribadi Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) serta Survei Pasar Tumpah.
    (1) Survei Wawancara Pemudik Pengguna Bus di Terminal

        Survei persepsi pemudik yang menggunakan bus di terminal dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2014 di 4 (empat) lokasi survei, yaitu Terminal Kampung Rambutan, Terminal Rawamangun, Terminal Pulo Gadung dan Terminal Kalideres.
    (2) Survei Mudik Bersama

        Survei mudik bersama dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2014 di 3 (tiga) lokasi pemberangkatan mudik bersama, yaitu pemberangkatan di Senayan, Sunter dan Kemayoran.
    (3) Survei Mudik Gratis

Merupakan Prakarsa Kemenhub dalam rangka memberikan pelayanan mudik kepada masyarakat dengan cara memberikan kesempatan bagi pengguna kendaraan bermotor roda 2 untuk dapat mudik dengan aman dan nyaman. Sepeda motor milik pemudik akan diangkut menggunakan truck dan kapal laut sementara orangnya akan dinaikan menggunakan bus. Mudik Gratis dilakukan dengan 2 gelombang yaitu :

(a) Mudik Gratis menggunakan Bus dilakukan pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Monas. Surveyor mengambil sampel sejumlah 200 sampel pada kegiatan mudik Gratis ini.

(b) Mudik Gratis menggunakan Kapal Laut di Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan Tanjung Emas (Semarang) dan Panjang (Lampung) dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dan hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014. Surveyor mengambil sampel sejumlah 100 sampel pada kegiatan mudik gratis menggunakan kapal laut setiap harinya.

(4) Survei Mudik Pengguna Kendaraan Pribadi Roda 4 (Empat)

Survei Mudik Pengguna Kendaraan Pribadi Roda 4 (Empat) dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2014 di 4 (empat) lokasi survei:

(a) Perbatasan Karawang-Bekasi yang berlokasi di Rest Area Km 57, Jl. Tol Jakarta-Cikampek (Arah Cikampek);

(b) Perbatasan Bogor-Cianjur yang berlokasi di Restoran Rindu Alam II, Jl. Raya Cipanas, Puncak-Cianjur;

(c) Perbatasan Bogor-Sukabumi yang berlokasi di Lido Lakes Resort & Conference, Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km. 21

(d) Perbatasan Tangerang-Serang yang berlokasi di Palm Square, Km. 13,5, Jl. Tol Jakarta-Merak (Arah Merak).

(5) Survei Mudik Pengguna Kendaraan Pribadi Roda 2 (dua) juga dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2014 di 4 (empat) lokasi survei yaitu :

(a) Perbatasan Karawang-Bekasi yang berlokasi di Masjid An-Nur, Jl. Baru-Tanjung Pura, Karawang;

(b) Perbatasan Bogor-Cianjur yang berlokasi di Restoran Rindu Alam II, Jl. Raya Cipanas, Puncak;

(c) Perbatasan Bogor-Sukabumi yang berlokasi di Lido Lakes Resort & Conference, Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km. 21;

(d) Perbatasan Tangerang-Serang yang berlokasi di SPBU Jatake, Tangerang, Arah Merak.

(6) Survei Pasar tumpah dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2014 di 3 (tiga) lokasi survei yaitu :

(a) Pasar Ciasem, Kabupaten Subang;

(b) Pasar Tegal Gubug, Kabupaten Cirebon;

(c) Pasar Bulakamba, Kabupaten Brebes.

i. Permasalahan Angkutan Lebaran:

Analisa dan evaluasi dilaporkan secara harian, seharusnya analisa dan evaluasi data secara kumulatif.

ii. Pemecahan:

Analisa dan evaluasi dilaporkan pada akhir kegiatan dengan data yang terakumulasi.

13) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dilakukan:

(a) Survei Pemantauan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di 4 (Empat) Koridor Transjakarta sebagai bahan laporan UKP 4 untuk posisi B06 (Juni 2014). Berdasarkan rekap hasil survey untuk total 6 (enam) aspek dalam SPM, maka diperoleh prosentase yang sesuai dengan SPM sebesar 82.66 persen (Aspek Keamanan, aspek Keselamatan, aspek Keterjangkauan dan aspek Kesetaraan) dan yang belum sesuai dengan SPM sebesar 17.34 persen (Aspek Kenyamanan dan aspek keteraturan).

(b) Survei Pemantauan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di 7 (Tujuh) Koridor Transjakarta sebagai bahan laporan UKP 4 untuk posisi B09 (September 2014). Berdasarkan rekap hasil survey untuk total 6 (enam) aspek dalam SPM , maka diperoleh prosentase yang sesuai dengan SPM sebesar 85.90 persen (Aspek Keamanan, aspek Keselamatan, aspek Keterjangkauan dan aspek Kesetaraan) dan yang belum sesuai dengan SPM sebesar 13.99 persen (Aspek Kenyamanan dan aspek keteraturan).

(c) Survei Pemantauan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di 11 (Sebelas) Koridor Transjakarta sebagai bahan laporan UKP 4 untuk posisi B12 (Desember 2014). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di 11 (sebelas) Koridor Tranjakarta, maka diperoleh data Beberapa aspek yang masih memperoleh prosentase kecil di bawah 90% adalah keselamatan, (83.15%), Kenyamanan di halte (75.14%), Kenyamanan di bus (76.93%), Kesetaraan (89.61%), dan Keteraturan (66.07%). Pada aspek-aspek tersebut belum terpenuhinya SPM ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pada Aspek Keselamatan :

i. Kesesuaian SOP Penanganan Keadaan Darurat hanya 68.85%, prosedur kesesuaian SOP penanganan keadaan darurat harus diperjelas sehingga penumpang bisa mendapat rasa aman yang diinginkan.

ii. Kesesuaian tombol pembuka pintu otomatis hanya mencapai 66.32%, pintu pembuka otomatis harus berfungsi dan sesuai dengan kegunaan nya, sehingga pada saat keadaan darurat dapat dipergunakan oleh para penumpang sesuai dengan fungsinya.

iii. Fasilitas kesehatan dibus hanya 45.27%, keberadaan dan kelengkapan fasilitas kesehatan seperti kotak P3K harus diperhatikan untuk pertolongan pertama pada keadaan darurat.

(b) Pada Aspek Kenyamanan di halte :

i. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi hanya sebesar 37.50%, fasilitas pengatur suhu ruangan harus tersedia dan suhu ruangan pada halte maksimal 27 derajat celcius harus tercapai demi kenyamanan para penumpang yang sedang menunggu bus dihalte.

ii. Luas lantai per orang di halte sebesar 71.87%, hal ini menunjukkan kesesuaian luas lantai per orang dihalte pada saat-saat tertentu melebihi batas toleransi kenyamanan penumpang yaitu 4 orang/m2 (waktu puncak) dan 2 orang/m2 (waktu non puncak).

iii. Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang dihalte sebesar 76.34%, kemudahan naik/turun penumpang belum terpenuhi sesuai SPM hal ini harus diperhatikan demi kelancaran naik/turun penumpang dan kenyamanan penumpang bus.

(c) Pada Aspek Kenyamanan di Bus

i. Kesesuai fasilitas pengatur suhu hanya sebesar 58.12%, fasilitas pengatur suhu ruangan harus tersedia dan suhu ruangan didalam bus maksimal 27 derajat celcius harus tercapai demi kenyamanan para penumpang.

ii. Keberadaan dan kesesuaian fasilitas kebersihan di bus masing-masing hanya sebesar 60.98% dan 63.84%, keberadaan dan kesesuaian fasilitas kebersihan ini harus diperhatikan demi menjaga kebersihan di dalam bus sehingga penumpang akan merasa nyaman.

iii. luas lantai per orang di bus sebesar 61.60% hal ini menunjukkan kesesuaian luas lantai per orang di bus pada saat-saat tertentu melebihi batas toleransi kenyamanan penumpang yaitu 4 orang/m2 (waktu puncak) dan 2 orang/m2 (waktu non puncak).

(d) Pada Aspek Kesetaraan :

Ruang khusus untuk kursi roda ketersediaan nya sebesar 78.12%, keberadaan ruang khusus kursi roda harus tersedia sesuai dengan SPM Bus Transjakarta demi mengakomodir kepentingan penumpang difabel.

(e) Pada Aspek Keteraturan :

i. Waktu tunggu yang sesuai hanya 40.54% dan yang tidak sesuai 59.46%, hal ini menyebabkan penumpang menunggu terlalu lama di halte;

ii. Informasi pelayanan yang sudah sesuai SPM hanya 61.16.57%, hal ini diharapkan agar lengkapi dan di up date kembali untuk informasi pelayanan yang belum sesuai dengan kondisi saat ini demi kenyamanan pengguna bus;

iii. Informasi kedatangan mobil bus, yang belum sesuai cukup besar yaitu 33.62%, hal ini perlu diperbaiki dan dilengkapi sesuai

schedule yang direncanakan, sehingga ada kepastian bagi calon penumpang untuk menggunakan angkutan Transjakarta;

iv. Ketepatan untuk kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan bus yang sesuai SPM hanya sebesar 45.28%, prosentase kesesuaian ini sangat kecil dan menunjukkan bahwa jadwal kedatangan dan keberangkatan bus sebagian besar tidak sesuai dengan schedule;

v. Keberadaan informasi gangguan perjalanan mobil bus, yang belum sesuai SPM adalah hanya sebesar 21.69%, dan dari yang ada kesesuaian informasinya hanya 28.21%, prosentase ini menunjukkan belum berjalannya keberadaan system informasi gangguan perjalanan mobil bus, sehingga penumpang tidak mendapat penjelasan apabila terdapat gangguan di perjalanan;

a) Permasalahan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan:

SPM yang dimonitoring yang mengacu ke PM Nomor 10 tahun 2012 dinilai terlalu tinggi tidak cocok untuk diaplikasikan diluar Jakarta.

b) Pemecahan:

Perlu penyederhanaan dan revisi PM Nomor 10 tahun 2012 sehingga dapat diaplikasikan pada BRT dikota lainnya.

14) Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan;

Konsolidasi penataan angkutan perkotaan dilaksanakan dibeberapa kota, yaitu:

a) Kota Medan

Pada kegiatan konsolidasi dikota Medan dilakukan survey rute BRT Trans Mebidang dan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penerapan BRT Trans Mebidang dikantor kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 sd 04 Maret 2014. Adapun rute yang disurvei yaitu Terminal Binjai – Pusat Pasar Kota dan Pusat Pasar – Terminal Lubuk Pakam.

b) Kota Makassar

Pada kegiatan konsolidasi dikota Makassar dilakukan survey rute BRT Trans Mamminasata dan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penerapan BRT Trans Mebidang dikantor kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawasi Selatan pada tanggal 05 sd 06 Maret 2014. Adapun rute yang disurvei yaitu Mall GTC – Mall Panakukang.

(1) Permasalahan Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan:

Pada kegiatan ini yang banyak berangkat ke daerah adalah para pejabat BSTP. Terkait hal tersebut banyak laporan yang terlambat dibuat.

(2) Pemecahan:

Agar para pejabat yang berangkat ke daerah segera menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berangkat.

15) Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan;

Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan dilaksanakan untuk beberapa Kota yaitu:

a) Kota Padang

Gambar II.47. Monitoring BRT Transpadang

b) Kota Pekanbaru

Monitoring penyelenggaraan BRT di kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 16 - 18 November 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan pada koridor jalan yang dilayani oleh Trans Metro Pekanbaru dan fasilitas pendukungnya, serta melalui rapat koordinasi

dengan Dinas Perhubungan Propinsi Riau, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Wakil dari PD Pembangunan Kota Pekanbaru.

Gambar II.48. Monitoring BRT di Pekanbaru

(1) Permasalahan Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan:

Pada kegiatan ini pada dasarnya adalah menunggu permohonan dari daerah yang mengajukan permohonan jaringan trayek, akibatnya kegiatan ini rawan terhadap kurangnya penyerapan dana.

(2) Pemecahan:

Akan proaktif berkoordinasi dengan daerah khususnya daerah-daerah yang akan menerapkan dan mengembangkan BRT. Koridor yang diusulkan nantinya akan disurvei dan dibuatkan persetujuannya pada kegiatan ini.

16) Sosialisasi Angkutan Perkotaan

Kegiatan sosialisasi angkutan perkotaan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2014 dengan tema Peran Serta Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan.

Gambar II.49. Kegiatan Sosialisasi Angkutan Perkotaan

a) **Permasalahan Sosialisasi Angkutan Perkotaan:**

Berdasarkan surat edaran MenpanRB RI No. 11/2014 tentang pembatasan pertemuan/rapat diluar kantor mengakibatkan tidak tertampungnya tamu dan undangan pada kegiatan tersebut yang dilakukan di ruang Singosari.

b) **Pemecahan:**

Berdasarkan SE MenpanRB RI No. 11/2014 tersebut kegiatan dapat di lakukan di luar kantor apabila fasilitas dilingkungan instansi pemerintah masing-masing atau jika peserta tidak mungkin ditampung ditempat fasilitas instansi tersebut. Terkait hal tersebut kegiatan sosialisasi akan dilakukan diluar kantor mengingat jumlah peserta yang diundang relatif banyak.

17) Pengawasan studi Pedoman Teknis Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan;
18) Pengawasan studi Pedoman Perencanaan Teknis Perhitungan Kebutuhan Sarana Angkutan Massal Perkotaan;
19) Pengawasan studi Identifikasi Trase dan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal Jabodetabek;

b. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pertemuan Forum Sistem Transit;

Pertemuan Forum Transit kedua di tahun 2014 dilaksanakan di kota Semarang pada tanggal 03 sd 05 September 2014. Workshop dihadiri oleh 9 (sembilan) Dinas Perhubungan Provinsi, 23 (dua puluh tiga) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota, 13 (tiga belas) Pengelola/Operator Sistem Transit (termasuk Perum Damri dan Perum PPD), perwakilan dari Universitas Diponegoro Semarang, LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Semarang, MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Jawa Tengah, GIZ Sutip dan ITDP Indonesia.

Gambar II.50. Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Forum Transit

a) Permasalahan Penyelenggaraan Pertemuan Forum Sistem Transit:

Pelaksanaan forum transit yang dilakukan dua kali setahun dipandang tidak efektif dikarenakan progress operasional dan data-data penyelenggara BRT belum optimal jika dinilai selama 6 (enam) bulan. Disamping itu data-data produksi dan operasional masih belum up to date.

b) Pemecahan:

Diusulkan penyelengaraan forum transit satu kali setahun.

2) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus Pelajar/Mahasiswa/Kampus/Umum Perkotaan sebanyak 45 unit;
3) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Jabodetabek sebanyak 120 Unit;
4) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Mebidangro sebanyak 30 Unit;
5) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Surabaya Metropolitan Area sebanyak 30 Unit;
6) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Bandung Raya sebanyak 30 Unit;
7) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Sarbagita sebanyak 30 Unit;
8) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Aglomerasi untuk Maminasata sebanyak 30 Unit;
9) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus BRT Euro II Engine Model 2 (dua) pintu sebanyak 15 Unit;
10) Pengawasan Tehnik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT sebanyak 15 Unit;
11) Survey Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Pada Masa Angkutan Lebaran 2014;
12) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan;
13) Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan;

Konsolidasi penataan angkutan perkotaan dilaksanakan dibeberapa kota, yaitu:

a) Kota Denpasar

Pada kegiatan konsolidasi dikota Denpasar dilakukan survey rute BRT Sarbagita dan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penerapan BRT

Sarbagita dikantor Dishub Provinsi Bali pada tanggal 6 sd 7 Maret 2014. Adapun Rute/Trayek yang diusulkan yaitu Mengwi –Kota PP.

b) Kota Bandung

Pada kegiatan konsolidasi dikota Bandung dilakukan survey rute BRT Trans Metro Bandung dan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penerapan BRT Sarbagita dikantor Dishub Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 sd 12 Maret 2014. Adapun Rute/Trayek yang diusulkan yaitu Elang - Jatinangor.

c) Kota Surabaya

Pada kegiatan konsolidasi dikota Surabaya dilakukan survey rute BRT Surabaya Metropolitan Area dan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penerapan BRT Surabaya Metropolitan Area dikantor kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 sd 11 Maret 2014. Adapun rute yang disurvei yaitu menjadi Sidoarjo-Bungurasih.

(1) Permasalahan Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan:

Pada kegiatan ini yang banyak berangkat ke daerah adalah para pejabat BSTP. Terkait hal tersebut banyak laporan yang terlambat dibuat.

(2) Pemecahan:

Agar para pejabat yang berangkat ke daerah segera menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berangkat.

14) Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan;

Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan dilaksanakan untuk beberapa Kota yaitu:

a) Kota Madiun

Monitoring rencana kesiapan penyelenggaraan BRT Transdirogo di kota Madiun dilaksanakan pada tanggal 23 sd 25 November 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan pada koridor terpilih yang akan dilayani oleh Transdirogo dan fasilitas pendukungnya.

Gambar II.51. Monitoring Rencana Penyelenggaraan BRT Transdirogo

b) Kota Jember

Monitoring persiapan penyelenggaraan BRT di kota Jember dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Oktober 2014. Adapun rute yang direncanakan dikembangkan menjadi BRT adalah Rute D (Terminal T. Alun – Terminal Pakusari) dengan panjang rute +- 19 Km dan saat ini dilayani 36 unit angkot. Sementara ini baru dilakukan DED terhadap pelayanan angkutan kota yang ada di Kabupaten Jember untuk persiapan transformasi ke angkutan massal.

(1) Permasalahan Koordinasi dan Persetujuan Rencana Jaringan Trayek Perkotaan:

Pada kegiatan ini pada dasarnya adalah menunggu permohonan dari daerah yang mengajukan permohonan jaringan trayek, akibatnya kegiatan ini rawan terhadap kurangnya penyerapan dana.

(2) Pemecahan:

Akan proaktif berkoordinasi dengan daerah khususnya daerah-daerah yang akan menerapkan dan mengembangkan BRT. Koridor yang diusulkan nantinya akan disurvei dan dibuatkan persetujuannya pada kegiatan ini.

15) Pengawasan studi Pedoman Teknis Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan;

16) Pengawasan studi Pedoman Perencanaan Teknis Perhitungan Kebutuhan Sarana Angkutan Massal Perkotaan;

17) Pengawasan studi Identifikasi Trase dan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal Jabodetabek;

4. SUB DIREKTORAT PEMADU MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta

bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
- Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perktoaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
- Penyiapan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penmpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek angkutan penumpang umum dan barang;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau bersekala nasional; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis penyusunan rncana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan

yang menghubungkan antara simpul transportasi, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perktoaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda, serta penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional.

a. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1) Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan;

   a) Kota Bandar Lampung

      Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

   b) Kota Bengkulu

      Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

   c) Kota Gorontalo

      Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

   d) Kota Surakarta

      Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Agustus 2014. Kegiatan monitoring

dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

e) Kota Tanjung Pinang

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

f) Kota Pangkal Pinang

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Pangkal Pinang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

2) Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Pemaduan Moda Tansportasi Perkotaan;

a) Kota Banjarmasin

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Banjarmasin. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

b) Kota Gorontalo

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Gorontalo. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

c) Kota Palembang

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Palembang. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda

Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

d) Kota Pekanbaru

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Pekanbaru. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

e) Kota Pontianak

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Pontianak. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

3) Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara.

a) Kota Kendari

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Kendari. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.52. Bandara Haluoleo

b) Kota Banjarmasin

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.53. Bandara Syamsudin Noor

c) Kota Palu

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Palu. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.54. Bandara Mutiara SIS Al – Jufrie

d) Kota Bau-Bau

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Bau-Bau. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.55. Bandara Batoambari

e) Kota Tanjung Pandan

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Tanjung Pandan. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.56. Bandara HAS Hanandjoedin

f) Kota Bengkulu

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Bengkulu. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.57. Bandara Fatmawati Soekarno

g) Kota Palangkaraya

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.58. Bandara Tjilik Riwut

4) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda;

Penyusunan Laporan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda di laksanakan di Kota Bogor. Kegiatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda dilaksanakan melalui Konsinering yang dilakukan beberapa

kali dengan hasil terbentuknya satu buah buku laporan mengenai Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda.

5) Pengadaan Bus Pemadu Moda 10 unit;

Pengadaan Bus Pemadu Moda dilakukan melalui lelang yang diadakan oleh Pantia lelang dari Satuan Kerja Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.59. Pembuatan Bus Pemadu Moda

6) Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda di Palembang;

Pembangunan Fasilitas Integrasi di Kota Palembang dibangun dengan dana APBN Direktorat BSTP dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.60. Pembangunan Fasilitas Integrasi di Palembang

b. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1) Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan;

   a) Kota Surakarta

      Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 November 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.61. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Surakarta

b) Kota Yogyakarta

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s/d 2 Maret 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.62. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Yogyakarta

c) Kota Ambon

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Ambon dilaksanakan pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.63. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Ambon

d) Kota Jayapura

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Juni 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.64. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Jayapura

e) Kota Ternate

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Agustus 2014. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.65. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Ternate

f) Kota Banyuwangi

Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan di kota Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2014.

Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui survey lapangan dilintasi oleh Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.66. Monitoring Kinerja Pelayanan Angkutan di Kota Banyuwangi

2) Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Pemaduan Moda Tansportasi Perkotaan;

a) Kota Kabupaten Karang Asem

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di Kabupaten Karang Asem. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.67. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai

b) Kota Mataram

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Mataram. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun.

c) Kota Surakarta

Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan di kota Surakarta. Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Monitoring Fasilitas Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pembanguan fasilitas integrasi dan melakukan monitoring fasilitas integrasi yang sudah dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di berikut ini :

Gambar II.68. Stasiun Kereta Api Purwosari

3) Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara.

a) Kabupaten Malang

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kabupaten Malang. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.69. Bandara Abdul Rachman Saleh

b) Kota Sumbawa

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Sumbawa. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.70. Bandara M. Kaharuddin

c) Kota Kupang

Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan di Kota Kupang. Kegiatan Survey Pola Pelayanan Angkutan Pemaduan Moda Bandar Udara dilaksanakan melalui survey lapangan dengan menentukan titik pemberangkatan bus pemadu moda dan usulan

trayek bus pemadu moda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.71. Bandara El Tari

4) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda;

   Penyusunan Laporan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda di laksanakan di Kota Bogor. Kegiatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda dilaksanakan melalui Konsinering yang dilakukan beberapa kali dengan hasil terbentuknya satu buah buku laporan mengenai Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemaduan Moda.

5) Pengadaan Bus Pemadu Moda 10 unit;

   Pengadaan Bus Pemadu Moda dilakukan melalui lelang yang diadakan oleh Pantia lelang dari Satuan Kerja Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.72. Pembuatan Bus Pemadu Moda

6) Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda di Bogor;

Pembangunan Fasilitas Integrasi di Kota Bogor dibangun dengan dana APBN Direktorat BSTP dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.73. Pembangunan Fasilitas Integrasi di Bogor

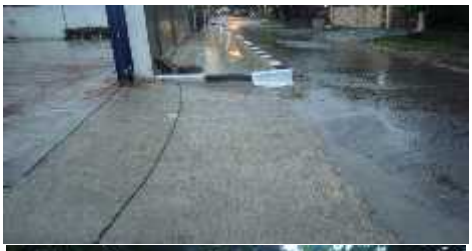

7) Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan di Jabodetabek Tahap III;

   Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan di Jabodetabek Tahap III diadakan oleh Pantia lelang dari Satuan Kerja Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, dengan hasil satu buah buku laporan.

8) Penyusunan DED Fasilitas Integrasi Moda Transportasi di Wilayah Perkotaan JABODETABEK;

   Penyusunan DED Fasilitas Integrasi Moda Transportasi di Wilayah Perkotaan JABODETABEK diadakan oleh Pantia lelang dari Satuan Kerja Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, dengan hasil satu buah buku laporan.

9) Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Angkutan Taksi di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta – Solo);

   Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Angkutan Taksi di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta – Solo) diadakan oleh Pantia lelang dari Satuan Kerja Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, dengan hasil satu buah buku laporan.

5. SUB DIREKTORAT DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi

penilai analis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma , pedoman, kriteria dan pelaporan di bidang penyelenggaran transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transporasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional di kawasan perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkunagan dan penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis penangan dampak transportasi berupa peralatan pendukung penggunaan bahan bakar alternatif, pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid serta peralatan pemantau emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor;
- Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen dibidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- Penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilaian analissi dampak lalu lintas; dan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan penylenggaraan teknis pelaksnaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

a. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I meliputi daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan yaitu :

   Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang dampak transportasi perkotaan antara lain:

   a) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
   b) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Kompetensi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
   c) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Standar, Prosedur, dan Tata Cara untuk Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Penyusunan Andalalin;

2) Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan melalui kegiatan:

   a) Penyusuan naskah akademis Pedoman Teknis Penanganan Dampak Lingkungan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   b) Kegiatan Monitoring dan evaluasi RAN/D-GRK

      Kegiatan Monitoring dan evaluasi RAN/D-GRK dilaksanakan yaitu:

      (1) Provinsi Sumatera Utara

         Kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 April 2014 di Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan laporan perhitungan penurunan emisi GRK.

Tabel II.49. Laporan Perhitungan Penurunan Emisi GRK

No	Komponen terkait penurunan emisi GRK	Satuan	Quantity			
			2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kegiatan inti	kegiatan	-	-	2	6
2	Jumlah kegiatan pendukung eksisting	kegiatan	-	-	5	-
3	Total anggaran kegiatan inti	Rp. juta	-	-	1.178	
4	Total anggaran kegiatan pendukung	Rp. juta	-	-	1.490	
5	Capaian penurunan emisi 2020	ton eCO2	4.540.000,0			
6	Capaian penurunan emisi 2013	% thd BaU	226,831 0,000967656% dari emisi BaU			
7	Biaya penurunan emisi per kegiatan inti	Rp./ton emisi	11.208.373			
8	Biaya penurunan emisi per total kegiatan (inti+pendukung)	Rp./ton emisi	25.385.347			

(2) Provinsi Kalimantan Selatan

Kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Agustus 2014 di Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan baru menyusun Baseline dan inventori emisi GRK.

Tabel II.50. Tingkat Emisi GRK Sektor Transportasi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Kategori	Pemakaian BBM (kL)	Emisi GRK (Gg CO_2-eq)			
		CO_2	CH_4	N_2O	Total
Kendaraan Bermotor (*Cars*)/penumpang	*6,425.88*	*440,86*	4,41	6,216	451,486
Sepeda motor (*Motorcycles*)	*10,877.47*	*755,76*	*7,56*	10,36	*773,68*
Kendaraan R3	*9,517.78*	62,98	0,63	0,592	64,202
Truk Ringan (*Light-duty Trucks*)	*11,015.79*	*797,60*	0,84	11,84	810,28
Truk Berat dan Bus (*Heavy-duty Trucks and Buses*)	*917.98*	697,90	0,777	10,952	709,629
Angkutan air (*Water-borne Navigation*)	*6,798.41*	498,50	0,546	7,696	506,742
Total		**3253,600**	**14,763**	**47,656**	**3.316,019**

(3) Provinsi Sumatera Barat

Kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 23 September 2014 di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat telah melaporkan rencana aksi penurunan emisi GRK. Untuk sektor transportasi telah dilaksanakan pelatihan smart driving.

Tabel II.51. Penurunan Emisi Sektor Transportasi

No	Tahun	Target (tCO2Eq)	Realisasi (tCO2Eq)	%
1	**2011**	27.496	66,54	0,2
2	**2012**	48.118	66,66	0,1
3	**2013**	101.790	76,00	0,07

(4) Provinsi Sulawesi Selatan

Kunjungan lapangan ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Agustus 2014 di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. Namun hingga saat ini belum disampaikan laporan penurunan emisi GRK.

Gambar II.74. Wawancara Dengan Kabid Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan

c) Penyusunan Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan

d) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan yaitu melalui kegiatan Evaluasi Dampak Lalu Lintas Pada Kawasan Jalan Nasional Perkotaan. Kegiatan dilaksanakan antara lain:

(1) Kota Batam

Survey Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Batam Pada tanggal 16 s.d 18 Oktober dan 6 s.d 8 November 2014

Gambar II.75. Kegiatan Survey Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan di Kota Batam

Tabel II.52. Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Batam

NO	NAMA RUAS JALAN	KECEPATAN (km/jam)	TINGKAT PELAYANAN
1.	Ruas Jalan Ahmad Yani	60	C
2.	Ruas Jalan Suprapto	58	C
3.	Ruas Jalan Yos Sudarso	70	C
4.	Ruas Jalan Jenderal Sudirman	50	C

(2) Kota Banda Aceh

Survey Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kawasan Jalan Nasional Perkotaan Di Kota Banda Aceh Pada tanggal 13 s.d 15 November 2014.

Gambar II.76. Survey Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kota Banda Aceh

Tabel II.53. Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Banda Aceh

NO	NAMA RUAS JALAN	KECEPATAN (km/jam)	TINGKAT PELAYANAN
1.	Ruas Jalan Tengku Umar	61	C
2.	Ruas Jalan Sultan Iskandar Muda	51	C
3.	Ruas Jalan Cut Nyak Dhien	48	C

e) Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan melalui kegiatan Koordinasi Dan Penilaian ANDALALIN Pada Jalan Nasional Tahun 2014.

Pada tahun 2014, dokumen hasil ANDALALIN yang diterima oleh tim evaluasi dokumen hasil ANDALALIN berjumlah 35 (tiga puluh lima) dokumen.

Tabel II.54. Dokumen Hasil ANDALALIN

No.	Dokumen Hasil ANDALALIN	Lokasi Pembangunan
1.	Pembangunan Bangka *Mixed Use*	Kabupaten Bangka Tengah
2.	Pembangunan Hotel Odua Weston	Kota Jambi
3.	Pembangunan Showroom Toyota PT. Agung Automall	Kota Jambi
4.	Pembangunan Jember Icon (*Mixed Building*)	Kabupaten Jember
5.	Pembangunan Industri *Meubelair/Furniture*	Kabupaten Lamongan
6.	Pembangunan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Erman	Kabupaten Pasuruan
7.	Pembangunan Kawasan Industri Manyar	Kabupaten Gresik
8.	Pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar-Gresik	Kabupaten Gresik
9.	Pembangunan Hotel Amaris	Kota Kendari
10.	Pembangunan Industri Alas Kaki	Kabupaten Lamongan
11.	Pembangunan Ruko Citi 9 (lamongan *Square*)	Kabupaten Lamongan
12.	Pembangunan Kondominium Hotel	Kabupaten Badung
13.	Pembangunan Showroom, Bengkel dan Gudang PT. Astra Internasional Tbk	Kabupaten Gresik
14.	Pembangunan Hotel Daun-Daun	Kota Kediri
15.	Pembangunan Jambi *City* Hotel	Kota Jambi
16.	Pembangunan Hotel *T-One*	Kota Jambi
17.	Pembangunan Perumahan Graha Pratama Indramayu	Kabupaten Indramayu
18.	Pembangunan SPBU Gayam	Kabupaten Bojonegoro
19.	Pembangunan Pabrik Sepatu PT. Nikomas Gemilang	Kabupaten Indramayu
20.	Pembangunan Lubuk Linggau *Mixed Use Development*	Kota Lubuk Linggau
21.	Pembangunan *Food Court Food Capital*	Kota Jambi
22.	Pembangunan Showroom dan servis kendaraan	Kabupaten Sarolangun
23.	Pembangunan Hotel Grand Aston	Kota Jambi
24.	Pembangunan Jambi Prima Mall	Kota Jambi
25.	Pembangunan Ruko Sanggung *Square*	Kabupaten Sukoharjo
26.	Pembangunan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong Surabaya	Kota Surabaya
27.	Pembangunan Aston Jambi Hotel & *Conference Center*	Kota Jambi
28.	Pembangunan Showroom dan Bengkel Hino	Kota Tangerang
29.	Pembangunan Laguna Hotel	Kabupaten Karanganyar
30.	Pembangunan Terminal Penumpang AKDP	Kabupaten Nabire
31.	Pembangunan Victoria Square Cimone	Kota Tangerang
32.	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi

33.	Pembangunan Stadion Olah Raga dan Sarana Penunjang Lainnya	Kabupaten gresik
34.	Pembangunan Gedung Pemungut Pajak Golongan C Kab. Magelang	Kabupaten Magelang
35.	Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Ruko	Kabupaten Lamongan

f) Dari 35 (tiga puluh lima) dokumen hasil ANDALALIN yang diterima oleh tim evaluasi dokumen hasil ANDALALIN, terdapat 4 (empat) hasil ANDALALIN yang disetujui. Daftar persetujuan hasil ANDALALIN tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II.55. Daftar Persetujuan Hasil ANDALALIN

No.	Dokumen Hasil ANDALALIN	Nomor dan Tanggal SK
1.	Pembangunan Ruko Citi 9 (lamongan *Square*)	KP. 700 Tahun 2014 8 Agustus 2014
2.	Pembangunan Jambi *City* Hotel	KP. 833 Th 2014 20 Oktober 2014
3.	Pembangunan SPBU Gayam	KP. 834 Th 2014 20 Oktober 2014
4.	Pembangunan Hotel *T-One*	KP. 924 Tahun 2014 17 Desember 2014

b. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II meliputi daerah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan yaitu :

   Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang dampak transportasi perkotaan antara lain:

   a) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
   b) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Kompetensi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
   c) Rancangan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Standar, Prosedur, dan Tata Cara untuk Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Penyusunan Andalalin;
   d) Sosialisasi Analisis Dampak Lalu Lintas

      Kegiatan Sosialisasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Tahun Anggaran 2014 terdiri dari 2 (dua) Angkatan, yaitu Angkatan V dan VI telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis s.d Jum'at, 2 s.d 3 Oktober 2014

Tempat : Hotel Grand Cempaka
Ruang Semanggi I dan II, Lantai 2
Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta

Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi ANDALALIN berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang, terdiri dari peserta yang berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dan peserta yang berasal dari Kementerian Perhubungan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini terdiri dari:

(1) "Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 32 Tahun 2011" disampaikan oleh Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan, Direktorat BSTP, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

(2) "Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Ditinjau dari Sudut Pandang Pembinaan Jalan" disampaikan oleh Kasubdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum ;

(3) "Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Sebagai Bagian dari Pemberian Izin Mendirikan Bangunan" disampaikan oleh Kasubdit Penataan Kota Kecil, Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan

(4) "Modul ANDALALIN" disampaikan oleh Tim PUSTRAL Universitas Gadjah Mada;

Gambar II.77. Pelaksanaan Sosialisasi ANDALALIN

e) Sosialisasi Smart Driving

Kegiatan Sosialisasi Smart Driving dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Denpasar dan Kota Bogor.

Kegiatan Sosialisasi Smart Driving Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu:

Kota Denpasar :

Hari/tanggal	:	Selasa s.d Jum'at, 27 s.d 31 Oktober 2014
Tempat	:	The Jayakarta Bali Beach Resort, Jl. Werkudara, Legian, Bali

Kota Bogor :

Hari/tanggal	:	Selasa s.d Jum'at, 25 s.d 28 November 2014
Tempat	:	Padjajaran Suites Resort Bogor, Jl. Bogor Inner Ring Road Lot XIX C-2 No. 17 Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor

Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di kota Denpasar berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di kota Bogor berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Peserta Sosialisasi Smart Driving berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Pehubungan Kab/Kota se-Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Bodetabek dan pengemudi angkutan umum;

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini terdiri dari:

(1) "Kebijakan Transportasi Perkotaan dalam Rangka Pengurangan Emisi Gas Buang dan Efisiensi Energi" disampaikan oleh Direktorat BSTP, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

(2) "Fenomena Kecelakaan Lalu Lintas dan Sebab Sebabnya" disampaikan oleh Direktorat KTD, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

(3) "Modul Smart Driving" disampaikan oleh Tim PT. Gagas Transcom.

Gambar II.78. Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di Kota Denpasar

Gambar II.79. Kegiatan Sosialisasi Smart Driving di Kota Bogor

2) Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan melalui kegiatan:
   a) Penyusuan naskah akademis Pedoman Teknis Penanganan Dampak Lingkungan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   b) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Perkotaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Perkotaan dilaksanakan di 2 (dua) Kota yaitu:
      (1) Kota Bogor

      Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2014, 17-19 Juli 2014 dan 16-18 Oktober 2014. Hasil monitoring dan wawancara sebagai berikut:

      (a) Data yang didapat dari hasil pengawasan pengujian kendaraan bermotor terhadap fasilitas bahan bakar gas (tabung dan Converter Kit) pengujian kendaraan bermotor (KIR) Dishub Kota Bogor, sudah tidak ada yang terpasang;
      (b) Dikarenakan tidak terdapat SPBG di Kota Bogor, mengakibatkan kendaraan angkot melepas atau tidak menggunakan bahan bakar

gas dengan alasan beban kendaraan bertambah yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar;

(c) Dishub Kota Bogor telah menghimbau kepada para pemilik angkutan kota agar mengembalikan Converter Kit yang telah dilepas ke Dishub Kota Bogor;

(d) Sebagian kecil tabung Converter Kit telah dikembalikan ke Dishub Kota Bogor oleh pemilik kendaraan angkutan kota.

(e) Belum terdapat bengkel yang bersertifikasi pemerintah dan keterbatasan ketersediaan Spare Part (suku cadang), mengakibatkan pelayanan kurang optimal;

(f) Biaya perawatan kendaraan setelah menggunakan bahan bakar gas lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar minyak;

(g) Ada anggapan dari sebagian pengemudi angkot, bahwa setelah menggunakan gas sebagai bahan bakar, kendaraan menjadi kurang nyaman dalam berkendara;

(2) Kota Surabaya

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2014, 29-31 Agustus 2014 dan 25-27 September 2014. Hasil monitoring dan wawancara sebagai berikut:

(a) Pemantauan dilapangan lebih ditekankan pada keberadaan alat instalasi CK yang kemungkinan masih terpasang di angkot, namun hasil monitoring dilapangan, tidak terdapat lagi angkutan kota yang terpasang Converter Kit.

(b) Pemantauan dilaksanakan di Terminal Joyoboyo, Sub Terminal Manukan Kulon, Terminal Petekan, dan Terminal Benowo

(c) kendala program gasifikasi yaitu letak SPBG yang tidak strategis pada jalur trayek angkot dan jumlah tempat pengisian BBG masih sangat kurang sehingga hal ini menyebabkan para operator/pemilik kendaraan angkot merasa kesulitan untuk mendapatkan BBG dan melepaskan Converter Kit dan tabungnya.

(d) Ada anggapan dari sebagian pengemudi angkot, bahwa setelah menggunakan gas sebagai bahan bakar, kendaraan menjadi kurang nyaman dalam berkendara;

(e) Masih ada kekuatiran sopir angkot mengenai mesin (engine) yang menggunakan BBG karena dapat menimbulkan kerusakan mesin lebih cepat.

(f) Posisi engine idle, performa engine kurang bagus (mesin mudah mati) dan juga saat selesai penggunaan dari Premium ke BBG (setting/penyetelan).

(g) Dari penggunaan bahan bakar jenis BBG pindah ke BBM, dinilai boros (setting/penyetelan).

(h) Ketidaktahuan pengoperasian dari sopir angkot dalam menggunakan BBG.

(i) Posisi tabung BBG masih dianggap oleh beberapa pengemudi angkot dapat merusak suspensi/shockbreker belakang (tabung).

Gambar II.80. Angkot yang Telah Melepas Converter Kit dan Tabung di Kota Surabaya

c) Kegiatan Monitoring dan evaluasi RAN/D-GRK

Kegiatan Monitoring dan evaluasi RAN/D-GRK dilaksanakan antara lain:

(1) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 19 Maret 2014 di Kota Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Namun hingga saat ini belum ada laporan kegiatannya.

(2) Provinsi Yogyakarta

Kunjungan lapangan ke Provinsi Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Oktober 2014 di Kota Yogyakarta.

Komitmen Pemda DIY dalam penurunan emisi GRK ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 51Tahun2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel II.55. Rencana Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK dI DIY

Sektor	BAU Baseline GRK (Gg)	Kemampuan SKPD	CO_2 (Gg)	CO_2 (Ton-eq)	Keterangan
Sektor Peternakan	346.447	10.09%	34.9565	34,956.47	Biogas, Pupuk Organik, Komposting (Korelasi dengan Pertanian dan Energi), dsb.
Sektor Kehutanan	0.936	0.28%	0.0026	2.62	Rehabilitasi Hutan, Penanaman Tanaman Hutan, Termasuk Quick Win, dsb.
Sektor Pertanian	34.410	5.06%	1.7411	1,741.15	Perurunan Alami dan Penggunaan Pupuk Organik, dsb.
Sektor Industri	2.595	0.05%	0.0013	1.30	Produksi Bersih, Penataan & Efisiensi ATG, Penggunaan Limbah Industri, dsb.
Sektor Transportasi	231.863	6.23%	14.4461	14,446.06	ATCS, Manajemen Traffic, Optimasi Simpang, Pelayanan AUP, Termasuk *Quick Win*, dsb.
Sektor Limbah	300.342	4.33%	13.0055	13,005.49	Reduksi Open Burning, Sanitary Landfill (3 TPA), BOD Removal, 3R, Migrasi Pit Laterine ke Tangky Septic (Pedesaan), dsb.
Sektor Energi Listrik	1.311.540	1.22%	16.0008	16.000.79	Panel Surya, Demplot LED, Desa Mandiri Energi, dsb.
Jumlah	2,228.132		80.75	80,752.88	

(3) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 September 2014 di Kota Semarang.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (pertanian, kehutanan, energi, transport, industri, pengolahan limbah, keg pendukung lain).

Tabel II.57. Tingkat Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi

Bidang	Kegiatan Mitigasi	2010		2011		2012		2013		2014		Baseline 2010 (ton CO2e)	BAU 2020 (ton CO2e)	Keterar
		Jumlah Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (ton CO2e)	Jumlah Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (ton CO2e)	Jumlah Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (ton CO2e)	Jumlah Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (ton CO2e)	Jumlah Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (ton CO2e)			
ansportasi	Kegiatan Inti	4	63.265,14	4	8.899,14	4	6.892,63	4	6.713,34	4	19.022,20	9.737.000,00	25.078.000	targe penuru 3.134.
	Kegiatan Pendukung													

TAHUN	Aksi Mitigasi	Tahun 2010		SUMBER ANGGARAN
		Capaian Kegiatan	Penurunan Emisi	
2010	Pengadaan ATCS	1 paket	0	APBD
	Pengadaan Shelter BRT	20 unit bis/53 unit Shelter	7.316,72	APBN dan APBD
	Angkutan Umum yang diremajakan	100 unit	55.168,90	Swasta
	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving	40 instruktur	779,52	

TAHUN	Aksi Mitigasi	Tahun 2011		SUMBER ANGGARAN
		Capaian Kegiatan	Penurunan Emisi	
2011	Pengadaan ATCS	1 paket	0	APBD
	Pengadaan Shelter BRT	20 unit bis	7.316,72	APBN dan APBD
	Angkutan Umum yang diremajakan	103 unit	802,90	Swasta
	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving		779,52	

TAHUN	Aksi Mitigasi	Tahun 2012		SUMBER ANGGARAN
		Capaian Kegiatan	Penurunan Emisi	
2012	Pengadaan ATCS	2 paket	0	APBD
	Pengadaan Shelter BRT	20 unit bis/4 SHELTER	6.066,34	APBN dan APBD
	Angkutan Umum yang diremajakan	106 unit	826,29	Swasta
	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving			

TAHUN	Aksi Mitigasi	Tahun 2012		SUMBER ANGGARAN
		Capaian Kegiatan	Penurunan Emisi	
2013	Pengadaan ATCS	2 paket	0	APBD
	Pengadaan Shelter BRT	20 unit bis	6.066,34	APBN dan APBD
	Angkutan Umum yang diremajakan	83 unit	647	Swasta
	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving			

3) Penyusunan Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan

4) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan yaitu melalui kegiatan Evaluasi Dampak Lalu Lintas Pada Kawasan Jalan Nasional Perkotaan. Kegiatan dilaksanakan antara lain:

   a) Kota Surakarta

      Survey evaluasi dampak lalu lintas kawasan jalan nasional perkotaan di kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Januari 2014 dan 11 s.d 13 Desember 2014.

Tabel II.58. Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional Perkotaan di Kota Surakarta

NO	NAMA RUAS JALAN	KECEPATAN (km/jam)	TINGKAT PELAYANAN
1.	Ruas Jalan Slamet Riyadi	40	C
2.	Ruas Jalan Kolonel Sutarto	60	C
3.	Ruas Jalan Ir. Sutami	55	C
4.	Ruas Jalan Ahmad Yani	48	C

5) Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan melalui kegiatan Koordinasi Dan Penilaian ANDALALIN Pada Jalan Nasional Tahun 2014.

Pada tahun 2014, dokumen hasil ANDALALIN yang diterima oleh tim evaluasi dokumen hasil ANDALALIN berjumlah 35 (tiga puluh lima) dokumen.

Tabel II.59. Daftar Dokumen Hasil ANDALALIN

No.	Dokumen Hasil ANDALALIN	Lokasi Pembangunan
1.	Pembangunan Bangka *Mixed Use*	Kabupaten Bangka Tengah
2.	Pembangunan Hotel Odua Weston	Kota Jambi
3.	Pembangunan Showroom Toyota PT. Agung Automall	Kota Jambi
4.	Pembangunan Jember Icon (*Mixed Building*)	Kabupaten Jember
5.	Pembangunan Industri *Meubelair/Furniture*	Kabupaten Lamongan
6.	Pembangunan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Erman	Kabupaten Pasuruan
7.	Pembangunan Kawasan Industri Manyar	Kabupaten Gresik
8.	Pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar-Gresik	Kabupaten Gresik
9.	Pembangunan Hotel Amaris	Kota Kendari
10.	Pembangunan Industri Alas Kaki	Kabupaten Lamongan
11.	Pembangunan Ruko Citi 9 (lamongan *Square*)	Kabupaten Lamongan
12.	Pembangunan Kondominium Hotel	Kabupaten Badung
13.	Pembangunan Showroom, Bengkel dan Gudang PT. Astra Internasional Tbk	Kabupaten Gresik
14.	Pembangunan Hotel Daun-Daun	Kota Kediri
15.	Pembangunan Jambi *City* Hotel	Kota Jambi
16.	Pembangunan Hotel *T-One*	Kota Jambi
17.	Pembangunan Perumahan Graha Pratama Indramayu	Kabupaten Indramayu
18.	Pembangunan SPBU Gayam	Kabupaten Bojonegoro
19.	Pembangunan Pabrik Sepatu PT. Nikomas Gemilang	Kabupaten Indramayu
20.	Pembangunan Lubuk Linggau *Mixed Use Development*	Kota Lubuk Linggau
21.	Pembangunan *Food Court Food Capital*	Kota Jambi
22.	Pembangunan Showroom dan servis kendaraan	Kabupaten Sarolangun
23.	Pembangunan Hotel Grand Aston	Kota Jambi
24.	Pembangunan Jambi Prima Mall	Kota Jambi
25.	Pembangunan Ruko Sanggung *Square*	Kabupaten Sukoharjo
26.	Pembangunan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong Surabaya	Kota Surabaya
27.	Pembangunan Aston Jambi Hotel & *Conference Center*	Kota Jambi
28.	Pembangunan Showroom dan Bengkel Hino	Kota Tangerang
29.	Pembangunan Laguna Hotel	Kabupaten Karanganyar
30.	Pembangunan Terminal Penumpang AKDP	Kabupaten Nabire
31.	Pembangunan Victoria Square Cimone	Kota Tangerang
32.	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi wilayah Kota Bekasi	Kota Bekasi
33.	Pembangunan Stadion Olah Raga dan Sarana Penunjang Lainnya	Kabupaten gresik
34.	Pembangunan Gedung Pemungut Pajak Golongan C Kab. Magelang	Kabupaten Magelang
35.	Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Ruko	Kabupaten Lamongan

6) Dari 35 (tiga puluh lima) dokumen hasil ANDALALIN yang diterima oleh tim evaluasi dokumen hasil ANDALALIN, terdapat 4 (empat) hasil ANDALALIN yang

disetujui. Daftar persetujuan hasil ANDALALIN tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II.60. Daftar Persetujuan Hasil ANDALALIN

No.	Dokumen Hasil ANDALALIN	Nomor dan Tanggal SK
1.	Pembangunan Ruko Citi 9 (Iamongan *Square*)	KP. 700 Tahun 2014, 8 Agustus 2014
2.	Pembangunan Jambi *City* Hotel	KP. 833 Th 2014, 20 Oktober 2014
3.	Pembangunan SPBU Gayam	KP. 834 Th 2014, 20 Oktober 2014
4.	Pembangunan Hotel *T-One*	KP. 924 Tahun 2014, 17 Desember 2014

E. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (KTD)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat.
b. Pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;
c. Penyusunan kualifikasi dan pemberian teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha , kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

1. SUB DIREKTORAT MANAJEMEN KESELAMATAN

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3 – 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sudah sewajarnya menjadi prioritas nasional maupun daerah yang mendesak untuk segera diperbaiki. Permasalahan keselamatan jalan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tetapi juga menjadi masalah daerah. Setiap tahun, di seluruh dunia terdapat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, atau lebih dari 3.000 jiwa per harinya. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, diperkirakan korban kecelakaan akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi.

Pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Maret tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011–2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Semangat pendeklarasian Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ini sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri telah membuat Instruksi Menteri dan Surat Edaran Menteri yaitu sebagai berikut :

1) Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM.1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi;
2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 551.1/1807/SJ tentang Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas;
3) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Mengingat permasalahan keselamatan jalan merupakan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyusun draft Pedoman Penyusunan

Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013. Draft Pedoman tersebut telah disampaikan kepada Bappenas untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

a. Penilaian Inventarisasi Kinerja Manajemen Keselamatan Transportasi Darat

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang langka, acak dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh suatu situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Sedangkan salah satu penyebab kecelakaan adalah manusia (90%) dari penyebab yang lain. Ada beberapa perubahan cara pandang tentang keselamatan yang bersifat lebih baik, diantaranya adalah :

1) Kecelakaan Lalu lintas adalah buah dari kelalaian dan ketidaksiapan.
2) Penurunan peluang kecelakaan adalah adalah peluang bisnis.
3) Upaya perwujudan keselamatan transportasi darat adalah investasi

Di dunia setiap tahun sekitar 1 juta orang meninggal dan lebih 50 juta orang luka karena kecelakaan lalu lintas jalan, 75% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi berkisar US$ 500 milyar untuk negara-negara berkembang dan transisi atau diperkirakan sekitar 2% - 4% dari GDP.

Pada tahun 2020 WHO memperkirakan jumlah kematian di seluruh dunia akibat kecelakaan lalu lintas naik menjadi 2,3 juta setiap tahun memempati urutan ketiga setelah Ischemic heart disease dan Unipolar major depression (Krug, 2000).

Dengan adanya fenomena seperti itu maka PBB mengeluarkan suatu resolusi No. A/58/289 tanggal 14 April 2004 yang berisi agar setiap Negara anggota meningkatkan perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan jalan, sehingga mampu mengurangi tingkat kecelakaan.

Kemudian juga Resolusi Sekjen PBB A/Res/60/5 tanggal 1 Desember 2005 lebih menekankan kembali agar setiap negara mengambil langkah-langkah spesifik seperti: Peningkatan penggunaan helm dan sabuk keselamatan, Drink and Drive dan setiap negara wajib membentuk "*a National Lead Agency on Road Safety*". Untuk menindak lanjutinya maka diadakan *4th United Nations Road Safety Collaboration Meeting* pada hari ketiga membahas *The First United Nation Global Road Safety Week* yang dilaksanakan bulan April 2007.

Pada tanggal 2 Maret tahun 2010, PBB mengeluarkan resolusi A/64/255 tentang Decade of Road Safety 2011-2020, dimana dalam resolusi itu diharapkan tiap Negara anggota PBB memberikan atau membuat Rencana aksi keselamatan transportasi Darat. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan itu adalah lima pilar yang terdiri atas:

1) Manajemen Keselamatan (Road safety Management);
2) Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road);
3) Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle);
4) Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer People);
5) Penanganan Korban Paska Kecelakaan (Post Crash).

Proses pengambilan data kinerja keselamatan transportasi darat dengan menggunakan kuesioner yang dikirim oleh Direktorat Keselamatan Transportasi Darat ke Dinas Perhubungan Provinsi yang akan dilakukan penilaian. Dalam data kinerja sistem keselamatan jalan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, misal Dinas perhubungan Daerah, BPS Daerah, Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait. Ada langlah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan.

Untuk mendapatkan data ini diperlukan koordinasi antar instansi, karena keberadaan data tidak hanya berasal dari satu instansi.

1) Sumber Data

   Data berasal dari instansi terkait sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Sebaiknya dalam pengisian data dari instansi terkait di ketahui oleh pejabat yang berwenang.

2) Jenis Pertanyaan

   Dalam formulir untuk mendapatkan data ada 2 jenis pertanyaan, yaitu:

   - Pilihan ganda bertingkat

     Adalah pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan ganda tapi mempunyai skor yang bertingkat. Untuk pertanyaan bentuk ini maka surveyor cukup menulis pilihannya saja pada kolom jawaban (kolom kedua).

   - Pilihan Ganda rangkap

     Adalah pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan ganda tapi responden boleh memilih lebih dari satu.

3) Jenis Data

Data-data yang dibutuhkan merupakan data yang mempunyai satuan bervariasi dimana tiap jenis data diperlakukan berbeda agar menghasilkan satu jenis data. Untuk mengatasi hal ini akan dilakukan standarisasi atau dapat dilakukan pengkatagorian untuk data yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

Setelah proses pengumpulan data dari lapangan dan telah dimasukan ke dalam komputer. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Ada beberapa tahap dalam analisis data dari mulai standarisasi sampai dengan ranking kinerja atau penggolongan kinerja.

4) Variabel yang Digunakan

Data yang didapat dari lapangan ataupun dari instansi tertentu sangat bervariasi bentuk dan satuannya. Jika akan dilakukan penggabungan terhadap data-data tersebut maka harus dilakukan standarisasi nilai dari data. Variabel-variabel yang akan dijadikan parameter adalah sebagai berikut :

a) Pilar 1: Manajemen Keselamatan *(Road safety Management)*

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yang terdiri atas:

(1) Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan, meliputi :
   - (a) Kesekretariatan forum lalulintas dan angkutan jalan di daerah;
   - (b) Kegiatan pertemuan yang diadakan oleh forum tahun 2013;

(2) Riset Keselamatan, meliputi :
   - (a) Kegiatan penelitian kecelakaan di daerah;
   - (b) Kegiatan penelitian bidang keselamatan;

(3) Pendataan Kecelakaan Lalulintas, meliputi :
   - (a) Data kecelakaan tahun 2013 yang bersumber dari Kepolisian;
   - (b) Kemudahan dalam mengakses data kecelakaan;
   - (c) Penyebarluasan data kecelakaan tahun 2013;
   - (d) Sistem Informasi bidang keselamatan jalan.

(4) Dana Keselamatan, meliputi :
   - (a) Prosentase dana keselamatan jalan terhadap total APBD tahun 2013 (tidak termasuk DAK).

(5) Kemitraan Keselamatan Jalan, meliputi :
   - (a) Keterlibatan peran swasta dalam kegiatan keselamatan jalan.

(6) Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, meliputi:

(a) Perusahaan angkutanu mum di daerah yang sudah membangun Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum;

(b) Pemerintah daerah sudah memiliki asesor/penilai terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum;

(c) assessment/penilaian terhadap Sistem Manajemen KeselamatanAngkutan Umum.

(7) Penyempurnaan peraturan dibidang keselamatan, meliputi:

(a) Peraturan di daerah yang mengatur bidang keselamatan yang sudah ada.

b) Pilar 2: Jalan yang Berkselamatan *(Safer Road)*

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:

(1) Badan Jalan Yang Berkeselamatan, meliputi :

(a) Respon terhadap keberadaan jalan berlubang;

(b) Respon terhadap keberadaan genangan air;

(c) Respon terhadap keberadaan jalan licin.

(2) Daerah PotensiKecelakaan, meliputi:

(a) Kegiatan inspeksi keselamatan terhadap struktur/geometric jalan untuk mengetahui daerah potensi kecelakaan;

(b) Penanganan terhadap daerah potensi kecelakaan.

(3) Daerah Rawan Kecelakaan, meliputi:

(a) Inventarisasi lokasi rawan kecelakaan;

(b) Penanganan terhadap lokasi rawan kecelakaan.

(4) Kondisi Prasarana/Perlengkapan Jalan, meliputi:

(a) Inspeksi keselamatan terhadap prasarana/perlengkapan jalan;

(b) Penanganan terhadap prasarana/perlengkapan jalan.

(5) Manajemen Kecepatan, meliputi:

(a) Kajian terhadap manajemen kecepatan maksimum di ruas jalan tertentu;

(b) Dilakukan pemasangan rambu pembatasan kecepatan pada ruas jalan.

(6) Lingkungan Jalan Yang Berkeselamatan, meliputi:

(a) Kajian terhadap gangguan samping (objek berbahaya di pinggir jalan);

(b) Pengendalian fungsi tepi jalan melalui kegiatan penataan atau penertiban.

(7) FasilitasPejalan Kaki, meliputi:

(a) program penyediaan fasilitas pejalan kaki;

(b) implementasi terhadap program.

(8) Fasilitas Sepeda, meliputi:

(a) program penyediaan fasilitas sepeda;

(b) implementasi terhadap program.

(9) Fasilitas Sepeda Motor, meliputi:

(a) program penyediaan fasilitas sepeda motor;

(b) implementasi terhadap program.

c) Pilar 3: Kendaraan yang Berkeselamatan *(Safer Vehicle)*

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:

(1) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:

(a) Kepemilikan alat uji mekanik;

(b) SDM Penguji;

(c) SOP Pengujian;

(d) Data jumlah kendaraan wajib uji;

(e) Pemeriksaan dimensi kendaraan;

(f) Perlakuan terhadap kelebihan dimensi bak muatan;

(g) Jumlah lokasi pengujian;

(h) Monitoring terhadap lokasi pengujian.

(2) Penanganan MuatanLebih (Overloading), meliputi:

(a) Keberadaan jembatan timbang;

(b) Cara pengawasan terhadap muatan lebih;

(c) Prosentase kendaraan yang dikenai tilang/sanksi terhadap jumlah kendaraan yang ditimbang.

(3) Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum, meliputi:

(a) Pemeriksaan sabuk keselamatan pada angkutan umum pada saat pengujian;

(b) Pengecekan perlengkapan keselamatan pada kendaraan di terminal.

(4) Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan, meliputi:

(a) Pemeriksaan kendaraan bermotor terhadap persyaratan teknis dan laik jalan selama tahun 2013;

(b) Pengawasan terhadap kepatuhan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu;

(c) Keberadaan kendaraan umum tidak bermotor (becak) beroperasi;

(d) Keberadaan sepeda motor yang dimodifikasi sebagai angkutan umum (becak bermotor, bajaj dll) beroperasi;

(e) kebijakan yang mengatur kelaikan kendaraan umum penumpang bermotor (becak bermotor, bajaj dll).

d) Pilar 4: Pengguna Jalan yang berkeselamatan *(Safer People)*

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:

(1) Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi, meliputi:

(a) Keberadaan sekolah mengemudi;

(b) Diadakan pembinaan terhadap manajemen sekolah mengemudi;

(c) Penilaian terhadap kinerja sekolah mengemudi.

(2) Penyelenggaraan Surat Ijin Mengemudi, meliputi:

(a) Keberadaan fasilitas sarana dan prasarana uji SIM;

(b) Perbaikan materi uji SIM pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012;

(c) Persyaratan kompetensi untuk instruktur penguji SIM;

(d) Penggunaan simulator mengemudi (driving simulator);

(e) Keberadaan lapangan untuk uji praktek;

(f) Fasilitas pemeriksaan kesehatan dalam sistem perolehan SIM.

(3) Sosialisasi Dan Kampanye Keselamatan Jalan, meliputi:

(a) Kegiatan sosialisasi dan kampanye keselamatan;

(b) Pembentukan masyarakat peduli keselamatan (Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan, Pemilihan Pelajar Pelopor, Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan, Pemilihan Putra Dan Putri Keselamatan);

(c) Ketersediaan fasilitas sosialisasi keselamatan (ZOSS, Taman Lalu lintas, Kendaraan Sosialisasi dll).

(4) Penegakkan Hukum, meliputi:

(a) Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran lalulintas LLAJ;

(b) Penindakan terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan;

(c) Penindakan terhadap pelanggaran batas kecepatan;

(d) Penindakan terhadap pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk;

(e) Penindakan terhadap pelanggaran penggunaan telpon seluler sambil mengemudi;

(f) Ada pengawasan lalulintas dengan media elektronik (*CCTV, speed camera, dll)*.

e) Pilar 5: Penanganan Paska Kecelakaan *(Post Crash)*

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:

(1) Sistem Layanan Gawat Darurat, meliputi:

(a) Ketersediaan kendaraan ambulan untuk melayani korban kecelakaan;

(b) Pelayanan kesehatan (puskesmas, rumahsakit, klinik) yang siap untuk menangani korban kecelakaan lalulintas.

(2) Sistem Komunikasi Gawat Darurat *One Access Call*, meliputi:

(a) Ketersediaan nomor akses yang bisa dihubungi jika terjadi kecelakaan *(emergency call)*.

(3) Penjaminan Korban Kecelakaan Yang Dirawat di RumahSakit, meliputi:

(a) Ada sistem penjaminan terhadap korban kecelakaan dari asuransi terhadap korban kecelakaan lalulintas.

(4) Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan, meliputi:

(a) ada program rehabilitasi korban pasca kecelakaan.

b. Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat

Berbicara mengenai transportasi jalan dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas berarti berkaitan erat dengan budaya masyarakat secara menyeluruh. Untuk membina budaya masyarakat yang sadar akan pentingnya ketertiban demi keselamatan, bukanlah waktu yang singkat dan tidak dapat di bangun seketika. Sejak kecil setiap orang harus sudah ditanamkan nilai-nilai ketertiban khususnya tertib berlalu lintas karena erat kaitannya dengan keselamatan. Suatu cara terbaik

untuk membentuk budaya adalah melalui jalur pendidikan. Mendidik bukan hanya mengajarkan namun dalam proses pendidikan termasuk juga didalamnya adalah pemberlakuan system reward dan punishment yaitu memberikan hukuman sebagai konsekuensi kesalahan dan memberikan pujian atau penghargaan sebagai kompensasi suatu prestasi.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka proses penanaman budaya tertib berlalu lintas. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat juga mengajak peran aktif pihak swasta untuk ikut menyelamatkan generasi muda negeri ini melalui kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat.

Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan:
   " Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 208 ayat (1) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain dengan pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ.
4) Telah terbentuk The World Youth Assembly for Road Safety pertama kali dideklarasikan di Genewa tanggal 23-24 April 2007 yang diikuti oleh 400 pemuda sebagai duta keselamatan dari 100 negara. The World Youth Assembly for Road Safety merupakan persatuan pemuda sedunia untuk keselamatan jalan dalam rangka peningkatan kesadaran akan keselamatan dikalangan pemuda.

Calon peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah seluruh pelajar dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a) Pelajar SMU/ sederajat
b) Pelajar SMU / sederajat yang telah mengikuti proses seleksi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi dan menjadi juara I.

Penilaian terhadap para pelajar atau peserta meliputi penilaian karya tulis dan penampilan saat mempresentasikan karyanya tersebut. Kriteria pemilihan berdasarkan 4 (empat) kategori yang terbagi atas Leadership, Public Speaking, Norma / Etika dan Materi Karya Tulis. Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor dilakukan oleh tim penilai independen yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, Jurnalis dan Psikolog. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat telah melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor Transportasi Darat dari tahun 2009-2014.

Tabel II.61. Data Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2010 - 2014

No.	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi
1	2010	13	5
2	2011	30	12
3	2012	16	14
4	2013	22	17
5	2014	38	19

Sumber : Direktorat KTD, 2014

Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2014

a) Juara I

Nama	:	Rizqi Maghribi
Asal Sekolah	:	SMA Negeri 1 Pontianak
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Total Nilai	:	83,78

b) Juara II

Nama	:	Farah Dini Rachmawati
Asal Sekolah	:	SMA Negeri 3 Mojokerto
Provinsi	:	Jawa Timur
Total Nilai	:	82,62

c) Juara III

Nama	:	Shendyanto Tirtoputro
Asal Sekolah	:	SMA Negeri 8 Kota Yogyakarta
Provinsi	:	DI. Yogyakarta
Total Nilai	:	82,16

c. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat berusaha meningkatkan keselamatan berlalu lintas untuk mewujudkan terjaminnya perjalanan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga pengguna jalan dapat sampai ke tujuan dengan selamat, aman dan tepat waktu. Sementara itu Korban kecelakaan semakin tahun semakin meningkat. Maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk peningkatan keselamatan jalan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan melakukan kegiatan. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan sehingga tingkat kecelakaan dapat ditekan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai saat ini. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan dilaksanakan dalam bentuk lomba karya tulis tentang keselamatan jalan. Pendaftaran lomba karya tulis ini dilakukan dengan cara mengirimkan biodata dan karya tulisnya melalui website *www.ktd-hubdat.dephub.go.id*. Penjurian online dilakukan melalui 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan penilaian oleh 4 orang juri yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc, Achmad Suhendra, S.Sos, Budi Rahardjo, dan Ririk Ratnasari, M.Pd untuk mendapatkan 15 peserta terbaik dimana kelimabelas orang tersebut dipanggil ke Jakarta untuk memaparkan hasil karya tulisnya. Adapun pemenang dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan adalah sebagai berikut :

1) Pemenang I	:	ADRIAN BELA WIDODO
Asal Sekolah	:	Universitas Diponegoro
Provinsi	:	Jawa Tengah
Total Nilai	:	85,01
2) Pemenang II	:	AHMAD FEBRI FIRMANSAH
Asal Sekolah	:	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Provinsi	:	Jawa Timur

Total Nilai : 84, 17

3) Pemenang III : AKBAR SATRIA FITRIAWAN

Asal Sekolah : Universitas Gadjah Mada

Provinsi : DI Yogyakarta

Total Nilai : 81,71

d. Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi nomor 58/289 Tanggal 23 April 2004, A/ 60/5 tanggal 26 October 2005 on "improving global road safety" dan telah diperbaharui dengan resolusi nomor 62/244 tanggal 25 april tahun 2008. Kemudian Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa – Bangsa, pada laporannya tahun 2009 dalam sidang umum mendorong Negara – Negara anggota untuk mendukung upaya – upaya untuk mendirikan aksi satu dekade. Satu dekade akan memberikan kesempatan untuk jangka panjang dan kegiatan terkoordinasi untuk mendukung keselamatan jalan raya nasional dan lokal.

Selain itu dengan telah disahkannya Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang LLAJ, maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-undang No.22 tahun 2009 di maksud. Pembahasan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah melibatkan banyak instansi terkait dan telah dihasilkan beberapa masukan dalam penyusunan undang-undang LLAJ ini. Paradigma dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 ini adalah pembinaan bidang LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Menteri Perhubungan namun bersifat kolektif pada beberapa instansi seperti :

1) Urusan Pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
2) Urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana LLAJ.
3) Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan industri LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.
4) Urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan teknologi LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi.

5) Urusan Pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, undang-undang ini juga didasari pada semangat bahwa penyelenggaraan LLAJ bersifat lintas sektoral yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta pemangku kepentingan dengan pembentukan Forum LLAJ. Salah satu kegiatan yang diupayakan untuk memberikan kesamaan pemahaman akan keselamatan lalu lintas yang tertuang didalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat adalah agar instansi – intansi stake holder yang bertanggung jawab masalah Keselamatan transportasi darat di Indonesia memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 yang baru tersebut. Selain itu, melalui kegiatan ini, wawasan dan pengetahuan Dinas Perhubungan di daerah dapat lebih diperkaya lagi terutama wawasan yang berhubungan dengan kebijakan keselamatan transportasi jalan dalam rangka penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya tentang penerapan manajemen kecepatan.Hasil dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat ini adalah tersusunnya draft RPM Manajemen Kecepatan, dimana dalam penyusunan draf RPM Manajemen Kecepatan yang selanjutnya akan diproses lebih legal secara terstruktur.

1) Pelaksanaan di Bandung Jawa Barat

   Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pertama di Bandung

   Hari/Tanggal : Selasa - Rabu / 25-26 Februari 2014

   Tempat : Banana Inn Hotel

   Alamat : Jalan Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, Jawa Barat

   Kegiatan di Bandung, Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat yang pertama dengan mengundang Narasumber, Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Direktorat KTD, Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Bagian Hukum Sesditjenhubdat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, GRSPI menghasilkan kerangka RPM Manajemen Kecepatan

2) Pelaksanaan Surakarta Jawa Tengah

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Kedua di Surakarta :

Hari/Tanggal : Rabu - Kamis / 23-24 April 2014

Tempat : Kusuma Sahid Prince Hotel

Alamat : Jl. Sugiyopranoto, N0. 20, Solo Jawa Tengah

Kegiatan di Solo, Jawa Tengah merupakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat yang kedua dengan mengundang Narasumber, Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Direktorat KTD, Direktorat LLAJ, Bagian Hukum Sesditjenhubdat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Pusjatan PU, menghasilkan Batang Tubuh RPM Manajemen Kecepatan.

3) Pelaksanaan Mataram NTB

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Ketiga di Mataram, Lombok :

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2014

Tempat : Lombok Raya Hotel

Alamat : Jl. Panca Usaha no. 11, Mataram

Kegiatan di Mataram, Nusa Tenggara Barat merupakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat yang ketiga dengan mengundang Narasumber, Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Direktorat KTD, Direktorat LLAJ, Bagian Hukum Sesditjenhubdat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, menghasilkan Draf RPM Manajemen Kecepatan

2. SUB DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN

a. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2014 Jakarta

- Tanggal : 21 September 2014

  Tempat : Jalan Merdeka Barat , Jl. MH. Tamrin

  Kegiatan : Safety Walk

Peserta : 2000 Orang (Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Pegawai dan Undangan Kementerian Perhubungan dan Masyarakat Umum)

b. Pekan Keselamatan Daerah

1) Pekan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Tanggal :Minggu, 20 - 26 April 2014

  Tempat :Aula Tanjung Pendam kota Tanjung Pandan, dan sekolah-sekolah di Provinsi Kep.Bangka Belitung

  Kegiatan :Pembukaan oleh Gubernur, Penyerahan Maskot Miniatur Zeta, Dialog interaktif, Fun Ride, dan kegiatan dilanjutkan sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah di Provinsi Kep.Bangka Belitung

  Peserta :1000 Orang (Instansi Pemerintah, Club Motor dan Masyarakat Umum)

2) Provinsi Sumatera Barat

- Tanggal : 14 September 2014

  Tempat : Halaman Kantor Gubernur

  Kegiatan : Pencanangan Pekan Keselamatan, Gerak Jalan, Marching Band, Flyering, Hiburan (doorprize)

  Peserta : 700 Orang (Dishub Prop. Sumbar, Pemda Provinsi Sumbar, SMU se-Kota Padang, Taruna Perhubungan dan Masyarakat Umum)

3) Provinsi Riau

- Seminggu sebelum kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2014, Dinas Perhubungan Propinsi Riau mengadakan kegiatan "Car Free Day" yang dilaksanakan pada:

  Hari/Tanggal : Minggu / 27 April 2014

  Waktu : 08.00 WIB – selesai

  Tempat : Jalan Diponegoro (depan kediaman Gubernur)

- Puncak acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2014 di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru yang diselenggarakan pada:

  Hari/Tanggal : Minggu / 4 Mei 2014

  Waktu : 07.00 WIB – selesai

  Tempat : Obyek Wisata Alam Mayang, Kota Pekanbaru.

4) Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Hari/Tanggal : 27 Oktober 2014
  Tempat : Halaman Rumah Dinas Gubernur Provinsi NTT
  Kegiatan : Penandatanganan SK Pembentukan KMSK oleh Staff Ahli Gubernur, Penyerahan Sertifikat dan Piala Cerdas Cermat Kepada Siswa/i SMA Negeri 2 Kupang, Karnaval Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diawali dengan Marching Band.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau, Kepala Polisi Daerah Propinsi Riau, Kajati, Danlanud, Dirlantas, Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau, Kepala Dinas Perhubungan Kota/Kab se-Propinsi Riau, Kasatlantas Polres se-Polda Propinsi Riau, DPD Organda, IPKBI dan Kepala Balai LLAJSDP Jambi. Juga dihadiri oleh beberapa instansi dari daerah yang meliputi Stakeholder terkait, serta instansi lain yang peduli keselamatan transportasi jalan. Adapun rincian kegiatan pada acara Pekan Keselamatan di Kota Pekanbaru meliputi:

a) Tamu undangan dan peserta Family Gathering memasuki tempat acara.
b) Disambut dengan tarian selamat datang dengan pakaian adat.
c) Sambutan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau, menyampaikan laporan kegiatan.
d) Sambutan Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau.
e) Pembacaan Deklarasi Keselamatan Jalan oleh Bapak Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau di ikuti semua undangan dan dilanjutkan pemukulan gong dan pelepasan burung merpati diikuti oleh suara sirine kendaraan bermotor.
f) Pemasangan PIN Dekade Aksi Keselamatan Jalan oleh Kapolda Riau kepada FORKOMPINDA Riau.
g) Pemasangan PIN Dekade Aksi Keselamatan Jalan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Manajemen Keselamatan kepada Kadishub Kab/Kota.
h) Pembacaan doa.

i) Bapak Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau dan rombongan mengunjungi tempat lomba mewarnai dan lomba menggambar anak tingkat TK dan SD yang bertemakan "Keselamatan Jalan".

j) Orasi keselamatan oleh Komunitas Masyarakat.

k) Acara selesai dilanjutkan dengan hiburan.

- Seminggu setelah kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2014, Dinas Perhubungan Propinsi Riau mengadakan kegiatan "Ajang Kreasi Seni" yang dilaksanakan pada:

  Hari/Tanggal : Minggu / 11 Mei 2014

  Tempat : Plaza Citra Pekanbaru

c. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan

Workshop Manajemen Kampanye keselamatan Jalan pada tahun ini akan menyiapkan kampanye keselamatan jalan yang mengacu pada himbauan PBB yaitu bertema "pedestrian safety" yang di Indonesia diterjemahkan dengan lebih luas yaitu "vurnerable road user" atau pengguna jalan yang rentang yang mana didalamnya tidak hanya terfokus pada keselamatan pejalan kaki, namun juga pesepeda dan pesepeda motor.

Materi yang disampaikan selama penyelenggaraan workshop manajemen kampanye adalah prosedur atau tahapan-tahapan dalam pengelolaan kampanye keselamatan yang terencana dan terukur keberhasilannya. Tiap tahapan diulas secara mendalam melalui modul modul, yang terdiri dari:

1) Pengantar Workshop
2) Identifikasi Masalah Keselamatan
3) Manajemen Kampanye Keselamatan
4) Perilaku Kelompok Masyarakat dan Pesan
5) Penelitian Dalam Manajemen Kampanye Keselamatan
6) Strategi Kreatif dan Test Konsep
7) Strategi Media dan Rencana Pelaksanaan
8) Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan ini diformulasikan dengan bentuk sekomunikatif mungkin, bersifat dua arah agar dapat terpotret dengan tepat

permasalahan khas pada propinsi ini, Metode pembelajaran akan dilalui melalui 3 cara yaitu pengajaran, diskusi, latihan dan praktek. Diharapkan metode workshop yang disusun khusus ini dapat memberikan pemahaman secara maksimal bagi peserta, membuat kondisi pembelajaran yang menarik, dan dapat berbagi informasi pula bagi penyelenggara mengenai kampanye yang ideal bagi masyarakat setempat. Diharapkan memalui metode ini, bersama-sama kita dapat berlatih memformulasikan suatu kampanye yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Adapun pelaksanaan Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.62. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan di Daerah

No.	Tahun	Provinsi
1	2006	1. Jawa Barat 2. Banten 3. Sumatera Utara 4. Jawa Timur 5. D.I. Yogyakarta
2	2007	1. Riau 2. Kalimantan Timur 3. Jawa Tengah
3	2008	1. Kalimantan Tengah 2. Nusa Tenggara Barat
4	2009	1. Palembang 2. Manado 3. Palangkaraya
5	2010	1. Nusa Tenggara Timur 2. Bangka Belitung
6	2011	1. Kep. Riau 2. Bengkulu
7	2012	1. Gorontalo 2. DI. Yogyakarta 3. Papua
8	2013	1. Sumatera Utara 2. Sulawesi Selatan 3. Maluku
9	2014	1. Sulawesi Tengah 2. Sumatra Barat 3. Papua

Sumber : Direktorat KTD, 2014

d. Workshop Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)

Kegiatan Workshop Pembentukan Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan dilaksanakan dalam rangka upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menurunkan angka kecelakaan melalui program pendidikan dan sosialisasi keselamatan jalan, dalam membangun budaya keamanan dan keselamatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan

Angkutan Jalan, harapannya kegiatan ini dapat membentuk perilaku masyarakat yang berkeselamatan di jalan.

Untuk mempercepat proses pembentukan perilaku tersebut, pemerintah mengajak peran aktif masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK). Nantinya anggota KMSK diharapkan dapat menjadi mitra keselamatan dan pionir serta teladan bagi sekitarnya akan perubahan perilaku menjadi lebih selamat di jalan (Road Safety Agent). KMSK Mulai Dirintis Tahun 2009 Di Pulau Kalimantan dengan fokus pada lingkungan yang dilewati oleh jalan yang telah direhabilitasi Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Dana Asian Development Bank (Adb) dan sejak Tahun 2011 pembentukan KMKS Didukung Oleh APBN dengan fokus pada lingkungan sekolah. Prioritas pada sekolah dasar karena anak-anak siswa SD merupakan pengguna jalan yang rentan. Pembentukan KMSK di lingkungan sekolah diharapkan dapat membangun suasana selamat menuju dan saat pulang sekolah, baik bagi siswa maupun warga sekitar dan orang-orang yang melintasi kawasan tersebut.

Materi yang akan disampaikan selama 2 (dua) hari penyelenggaraan Workshop Pembentukan Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu:

1) Sekilas Potret Keselamatan Di Lokasi Yang Akan Dibentuk KMSK;
2) Pembekalan & Pembentukan KMSK;
3) Pembekalan Kampanye Keselamatan Jalan; Serta
4) Pembekalan Materi Sosialisasi Keselamatan Jalan Anak Usia 3 – 11 Tahun.

Demi efektifitas substasi yang disampaikan, metode workshop ini bersifat dua arah, tidak hanya pemberian materi namun juga diskusi, simulasi serta praktek yang terdiri dari :

1) Penyusunan Nama dan Kepengurusan KMSK,
2) Identifikasi masalah yang ada di setiap lokasi dan program kerja KMSK, serta
3) Penyusunan Program Sosialisasi Keselamatan Jalan Sederhana

Pada tahun 2014 Pelaksanaan Pembentukan KMSK di daerah adalah sebagai berikut:

1) Provinsi Sulawesi Selatan
   - Tanggal : 13 – 14 November 2014
     Tempat : Kenari Tower

Kegiatan : H I : Pembukaan,

H II : Pembentukan dan proses belajar langsung praktek

H III: Paparan dari peserta dan evaluasi

Peserta : 20 peserta

2) Provinsi Sulawesi Tengah

- Tanggal : 12 – 13 Oktober 2014

3) Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Tanggal : 23 – 24 Oktober 2014

e. Sosialisasi Secara Langsung

1) Banjarnegara

Kegiatan dilaksanakan dengan antusias, oleh kurang lebih 50 peserta karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan telah dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin / 25 Agustus 2014

Pukul : 09.00 WIB- selesai

Tempat : Aula Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Susunan kegiatan :

- Pembukaan oleh MC
- Doa
- Lagu Indonesia Raya
- Sambutan Kepala Dinas Kabupaten Banjarnegara sekaligus membuka secara resmi Training of Trainer penyuluh keselamatan di kabupaten Banjarnegara,
- Paparan oleh Direktorat Keselamatan Transportasi darat, disampaikan oleh Kepala Seksi Promosi tentang bagaimana potret keselamatan jalan secara umum dan peran penting penyuluh keselamatan
- Paparan detail mengenai bagaimana menjadi penyuluh penyuluh keselamatan yang ideal
- Latihan menjadi penyuluh keselamatan.
- Quiz dan anya jawab kepada seluruh peserta
- Penyematan Pin Aksi Keselamatan Jalan Indonesia
- Penutup

2) Kabupaten Banyumas

Kegiatan dilaksanakan dengan antusias, oleh kurang lebih 50 peserta karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Kegiatan telah dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis / 2 Oktober 2014

Pukul : 08.00 WIB- selesai

Tempat : Choco Klik Asiatik Function Resto, Jl. HR. Bunyamin 375 Purwokerto

Susunan kegiatan :

- Pembukaan oleh MC
- Lagu Indonesia Raya
- Laporan Kegiatan FGD oleh kepala UPP Banyumas
- Sambutan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion di kabupaten Banyumas
- Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KMSK Banyumas hasil bentukan Dishubkominfo Prov. Jawa Tengah.
- Paparan oleh Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, disampaikan oleh Kepala Seksi Promosi tentang bagaimana Latar Belakang KMSK, Peran yang dapat dilakukan oleh KMSK serta dukungan yang diharapkan untuk KMSK yang telah terbentuk.
- Paparan oleh Kapolres Banyumas tentang Potret Kecelakaan di Banyumas
- Paparan dari PT. Jasaraharja Persero kantor perwakilan Kabupaten Banyumas.
- Diskusi dan tanya jawab
- Doa
- Penutup - Ramah tamah dan makan siang

3) DKI Jakarta

Nama Kegiatan :Sosialisasi tentang tata tertib lalu lintas dan mengutamakan keselamatan bersepeda motor

Hari / tanggal : Jum'at / 10 Oktober 2014

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : SMK Teladan Utama

Susunan kegiatan :

- Pembukaan
- Sosialisasi Keselamatan Jalan
- Janji Keselamatan, Penyematan PIN DoA, pemberian Helm SNI kepada perwakilan peserta dan pemberian Bahan – bahan sosialisasi keselamatan kepada perwakilan Guru SMK Teladan Utama

  Dihadiri Oleh :

  a) Kementerian Perhubungan
  b) Guru dan Staff SMK Teladan Utama
  c) Siswa/i SMK Teladan Utama

f. Pelaksanaan Kampanye Keselamatan

1) Melakukan sosialisasi keselamatan melalui media cetak, televisi dan radio.
2) Pembuatan Reality Show Keselamatan
3) Membuat reality show tentang celebrity on the road yang berkisah tentang testimony para artis terkait keselaematan jalan sebanyak 26 episode yang ditayangkan di TV swasta.
4) Membuat peralatan sosialisasi keselamatan yang berupa pemasangan Billboard di tiga lokasi, yaitu sebagai berikut: JT.Bolongandu, Pelabuhan Bakauheni dan Terminal Pacitan.
5) Pembagian helm SNI untuk anak dan dewasa ke seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2014 tercatat 30 ribu lebih, sebagai contoh bagi orang tua dan anak agar mereka selalu menggunakan heml SNI dengan baik dan benar pada saat berkendara dengan sepeda motor.
6) Melakuakan Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Lainnya, bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi keselamatan melalui media online dengan pembuatan website keselamatan serta sosialisasi melalui media social media.

3. SUB DIREKTORAT BINA KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM

a. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi angkutan AKAP dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku

Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi AKAP adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi AKAP dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan AKAP dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
3) Menyiapkan pengemudi AKAP yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.

Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP pada tahun 2014 sudah mencapai 32 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 1220 orang.

b. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Taksi

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi taksi dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi taksi adalah memberikan penyegaran kepada para

pengemudi taksi dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan taksi dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
3) Menyiapkan pengemudi taksi yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.

Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi. Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi pada tahun 2014 sudah mencapai 12 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 380 orang.

c. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi angkutan B3 dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi B3 adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan

dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1) Meningkatkan kesadaraan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2) Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan B3 dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
3) Menyiapkan pengemudi B3 yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.

Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi B3 yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi B3 pada tahun 2014 sudah mencapai 9 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 360 orang.

d. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat Nasional merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan keselamatan bagi awak kendaraan angkutan umum. Pemilihan AKUT ini sejalan dengan Dekade Aksi Keselamatan Jalan danpelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pemilihan AKUT Tingkat Nasional yaitu Undang – Undang No.22 Tahun 2009, pasal 208, ayat 2 huruf c, yang berbunyi "*upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan*

angkutan jalan dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan".

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendudukkan awak kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara memberikan motivasi serta penghargaan terhadap profesinya.Kegiatan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dimulai dari daerah Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia kemudian dilanjutkan ke Tingkat Propinsi dan seterusnya diadakan pemilihan secara nasional bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional Republik Indonesia.

Pemilihan AKUT Tingkat Nasional juga dimaksudkan sebagai sosialisasi peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang berskala nasional melalui pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP, AKDP, Taksi/Sewa, Perkotaan, dan Pariwisata.

Kegiatan AKUT diperuntukkan bagi seluruh provinsi di Indonesia, keikutsertaan propinsi dalam kegiatan AKUT selama 9 (sembilan) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.63. Keikutsertaan Provinsi Dalam Kegiatan AKUT Selama 9 Tahun Terakhir Tahun 2006 – Tahun 2014

NO	PROVINSI	KEIKUTSERTAAN								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Nangroe Aceh Darussalam	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sumatera Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Sumatera Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Sumatera Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Bangka Belitung	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Riau	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Kepulauan Riau	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Jambi	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9	Bengkulu	V	V	V	V	V	V	-	-	-
10	Lampung	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Banten	-	V	V	V	V	V	V	V	V
12	DKI Jakarta	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Jawa Barat	V		V	V	V	V	V	V	V
14	Jawa Tengah	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	V	V	V	-	V	V	V
16	Jawa Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17	Bali	V	V	V	V	V	V	V	V	V

NO	PROVINSI	KEIKUTSERTAAN								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18	Kalimantan Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19	Kalimantan Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20	Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	V	V	V	V	V	V
22	Sulawesi Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V
23	Sulawesi Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
24	Sulawesi Tengah	-	-	V	V	V	V	V	-	V
25	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Barat	V	-	V	V	V	V	V	V	V
27	Maluku	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28	Maluku Utara	V	-	-	-	-	V	V	V	V
29	Gorontalo	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30	Nusa Tenggara Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31	Nusa Tenggara Timur	-	V	V	V	V	V	V	V	-
32	Papua	V	-	-	-	-	-	-	V	V
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Propinsi		**26**	**25**	**28**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
Jumlah Peserta		**51**	**47**	**53**	**54**	**56**	**53**	**56**	**58**	**56**

Sumber : Direktorat KTD, 2014

e. Workshop Sistem Manajemen Bagi Perusahaan Angkutan Barang

Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan barang sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu hal yang baru dalam pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum baik penumpang maupun barang. Dasar penyusunana Sistem Manajemen Keselamatan yaitu Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XI, pasal 204 yang mengatur tentang Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada saat ini Sistem Manajemen Keselamatan telah mempunyai konsep yang dapat diimplementasikan serta sudah dilaksanakan uji coba kepada perusahaan angkutan umum. Untuk mendapat masukan dari berbagai pihak telah dilakukan workshop yang menghadirkan pihak terkait Sistem Manajemen Keselamatan tersebut dan Bimbingan teknis yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk

mengetahui kondisi perusahaan angkutan barang dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan serta untuk mendapat masukan bagi pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan.

Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan barang ini juga dapat dijadikan instrumen bagi pemerintah di dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap jaminan keselamatan pelayanan angkutan barang bagi masyarakat pengguna jasa angkutan barang. Disamping itu melalui bimbingan teknis ini dapat memberikan dorongan kepada perusahaan angkutan barang untuk memiliki daya saing dalam penyelenggaraan angkutan barang bagi masyarakat.

Maksud diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan barang adalah untuk mengawasi, mengevaluasi, mensosialisasikan, menilai serta meningkatkan kemampuan perusahaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

1) Melakukan pengkajian sejauh mana Sistem Manjemen Keselamatan dapat diimplementasikan pada perusahaan angkutan barang
2) Mengetahui kelemahan serta kekurangan perusahaan angkutan barang dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan
3) Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada perusahaan angkutan barang
4) Meningkatkan daya saing perusahaan angkutan umum dalam pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum terutama di bidang keselamatan.

Gambar II.81. Tahapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan

4. SUB DIREKTORAT AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN

a. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan

Metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan perbaikan daerah potensi kecelakaan lalu lintas pada ruas terpilih sebagai tindak lanjut dalam studi SID DED Daerah Rawan Kecelakaan yang dimaksud pada tahun sebelumnya.

Lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan perbaikan daerah potensi kecelakaan lalu lintas pada ruas terpilih sesuai dengan peringkat prioritas dari hasil kajian teknis yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tahun 2014 ini ada 2 (dua) pekerjaan perbaikan lokasi potensi kecelakaan yaitu Perbaikan Lokasi Potensi/Resiko Kecelakaan Pada Perlintasan Sebidang di Provinsi Jawa Timur dan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel II.63. Lokasi Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan

No	Tahun	Provinsi	Jumlah Perbaikan	Keterangan
1	2010	Bali	1	- Kubutambahan (Singaraja – Kubutambahan KM. 12)
2	2010	NTB	1	- Jembatan Meninting (Mataram – Senggigih KM. 9)
3	2011	Kalimantan Selatan	1	- Alur Pelayaran Sungai Barito (+/- 30 Km) dari Jembatan Barito menuju hulu
4	2011	Jawa Tengah	1	- Perempatan Paldaplan, Jl. Sragen – Ngawi Km 5, Sragen
5	2012	- Jawa Tengah - Jawa Timur	2	- Sragen : Jl. Ringroad Utara (Pertigaan Ngeblak, Tikungan SMP 6, Simpang SMP 6 - Tulungagung : Jl. Sukarno Hatta – Jl. Kapt.

No	Tahun	Provinsi	Jumlah Perbaikan	Keterangan
				Pattimura
6	2013	- Jawa Tengah - Bali	2	- Temanggung : Jl. Raya Ambarawa – Magelang Km. 13, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - Bali : • Jl. Meliling – Tabanan KM. 0,24 • Ruas jalan Singaraja Denpasar, KM. 17, 36 • Jl. Raya Padangbai, KM. 3,1
7	2014	- Jawa Timur - Jawa Barat	4	- Lintas Sebidang di Ruas jalan Jombang - Lintas Sebidang di Ruas jalan Nganjuk - Ruas Jalan Ciloto - Ruas jalan Desa Bangbayang Kabupaten Cianjur

Sumber : Direktorat KTD, 2014

b. Bimbingan Teknis Di Bidang Audit Keselamatan Jalan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan audit keselamatan jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas dijalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang audit keselamatan jalan.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Audit Keselamatan Jalan antara lain meliputi:

1) Pengenalan ruang lingkup audit keselamatan jalan;
2) Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan;
3) Melakukan simulasi kegiatan audit keselamatan jalan;
4) Analisis data yang diperoleh dari hasil audit keselamatan jalan;
5) Memberikan usulan perbaikan;
6) Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan audit keselamatan jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah sebagai berikut Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan, Audit Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi Audit Keselamatan Jalan, Penanganan dan Rekomendasi.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Audit Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat).

Tabel II.65. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis di Bidang Audit Keselamatan Jalan

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2007	150	5	Provinsi NAD, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan
2	2008	90	3	Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara
3	2009	150	5	Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Barat
4	2010	120	4	Provinsi DIY, Kendari, Bengkulu dan Bangka Belitung
5	2011	60	2	Provinsi Maluku dan Sumatera Barat
6	2012	-	-	-
7	2013	60	2	Provinsi Ternate dan Lampung
8.	2014	-	-	-

Sumber : Direktorat KTD, 2014

c. Bimbingan Teknis Di Bidang Penelitian Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas dijalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik serta kemampuan untuk dapat melaksanakan tentang penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan antara lain meliputi :

1) Pengenalan ruang lingkup metode metode keselamatan jalan seperti audit dan inspeksi keselamatan jalan;
2) Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan;
3) Melakukan simulasi kegiatan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan
4) Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kecelakaan lalu lintas jalan;

5) Memberikan usulan rekomendasi perbaikan;
6) Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah sebagai berikut Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunan Jalan, Pengantar Tata Cara Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, Audit dan inspeksi Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, Penanganan Dan Rekomensasi.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat).

d. Bimbingan Teknis Di Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan identifikasi DRK dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas dijalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang identifikasi DRK.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis di bidang Identifikasi DRK antara lain meliputi Pengenalan ruang lingkup identifikasi DRK, Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan identifikasi DRK, Melakukan simulasi kegiatan identifikasi DRK Analisis data yang diperoleh dari hasil identifikasi DRK Memberikan usulan perbaikan, Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan identifikasi DRK.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan Identifikasi DRK, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi identifikasi DRK, Penanganan Dan Rekomensasi.

Tabel II.66. Data Jumlah Peserta Pelatihan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2013	30	1	Provinsi DIY
2	2014	60	2	Provinsi Maluku dan Sulawesi Selatan

Sumber : Direktorat KTD, 2014

e. Bimbingan Teknis Di Bidang Inspeksi Keselamatan Jalan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas dijalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang inspeksi keselamatan jalan.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan antara lain meliputi pengenalan ruang lingkup inspeksi keselamatan jalan, penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan, melakukan simulasi kegiatan inspeksi keselamatan jalan, analisis data yang diperoleh dari hasil inspeksi keselamatan jalan, memberikan usulan perbaikan, memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan inspeksi Keselamatan Jalan, inspeksi Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Road Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi Audit Keselamatan Jalan, Penanganan Dan Rekomendasi.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat)

Tabel II.67. Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2011	180	6	Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Bali
2	2012	60	2	Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau
3	2013	60	2	Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat
4	2014	-	-	-

Sumber : Direktorat KTD, 2014

f. **Bimbingan Teknis di Bidang Audit dan Inspeksi Alur Pelayaran Sungai** Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan tentang ruang lingkup Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP, tata cara pelaksanaan serta teori pendukung yang relevan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran Pelatihan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP adalah :

1) Memberikan pemahaman dan pelatihan pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk diarahkan sebagai investigator perairan daratan.
2) Mendorong petugas investigator perairan daratan dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan serupa dikemudian hari.
3) Meminimalkan dan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ASDP.
4) Sebagai salah satu usaha dalam mendukung program keselamatan lalu lintas ASDP

Ruang lingkup materi Pelatihan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP antara lain meliputi:

1) Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP,
2) Melakukan kegiatan simulasi Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP,
3) Analisis data yang diperoleh dari hasil simulasi serta tata cara hasil laporan penelitian Kecelakaan Lalu Lintas ASDP di lapangan,
4) Memberikan usulan perbaikan,
5) Pemahaman tentang tata cara dan teknis pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundangan Pelayaran ASDP, Alur Perairan Daratan, Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Kapal Perairan Daratan, Sarana ASDP, Kelaiklautan Kapal, Faktor-faktor Manusia, Kecelakaan Pelayaran Perairan Daratan, Pengenalan formulir dan Contoh Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Perairan Daratan, Latihan Studi Kasus Penelitian Kecelakaan Kapal, Presentasi / ANEV.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat ASDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta dosen BP2TD Palembang.

Tabel II.67. Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan

No.	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2009	150	5	- Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat
2	2010	60	3	- Pelatihan Audit Keselamatan Alur Pelayaran Sungai ASDP di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat - Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Jambi
3	2011	150	5	- Pelatihan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Maluku dan Sumatera Barat - Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimntan Tengah
4	2012	-	-	-
5	2013	50	2	Pelatihan Audit dan Inspeksi Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Barat dan Jambi
6	2014	-	-	-

Sumber : Direktorat KTD, 2014

g. Pemberdayaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan Dan ASDP

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan dan ASDP ini adalah melakukan penilaian terhadap hasil paparan survey audit keselamatan jalan dan alur pelayaran perairan daratan yang dilakukan oleh aparatur daerah untuk menentukan predikat peserta/tim terbaik.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja para personil di tingkat Provinsi yang telah mengikuti bimbingan teknis audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemberdayaan di bidang audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp di tingkat provinsi dengan cara memotivasi provinsi-provinsi untuk melaksanakan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp di wilayahnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah untuk memberi motivasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP.

Batasan kegiatan ini adalah :

1) Penyiapan persyaratan pemberdayaan
2) Koordinasi dan sosialisasi pemberdayaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp dengan Pemerintah Provinsi

3) Pelaksanaan survey terhadap ruas alur pelayaran perairan daratan terpilih oleh aparatur daerah.
4) Evaluasi dan penentuan provinsi penerima bantuan pemberdayaan
5) Pemberian bantuan pemberdayaan dan asistensi
6) Pemaparan laporan dan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP
7) Evaluasi program pemberdayaan.

Pengajar/narasumber pada kegiatan pemberdayaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdpadalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Direktorat ASDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM, Badan Litbang Perhubungan Darat, dan BP2TD Palembang)

Tabel II.69. Jumlah Peserta Pemberdayaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan dan ASDP

No.	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2009	50	5	Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi NAD, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan
2	2010	50 30	5 3	- Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Barat - Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi
3	2011	50 18	5 3	- Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung - Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
4	2012	30 21	3 3	- Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi DIY, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat - Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Riau, Maluku dan Sumatera Barat
5	2013	15 25	3 5	- Pemberdayaan Inspeksi Keselamatan Jalan di Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur - Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Selatan
6	2014	-	-	-

Sumber : Direktorat KTD, 2014

h. Peningkatan Kapasitas Inspektor Keselamatan Jalan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inspektur Keselamatan Jalan ini merupakan kegiatan pembangunan yang terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama nomor.

HK.201/1/9/DJPD/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Inspeksi Keselamatan Jalan.

Kegiatan ini akan diikuti oleh 25 peserta dari Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Balai Llajsdp Jambi, Balai Llajsdp Palangkaraya, Balai Llajsdp Denpasar, Balai Llajsdp Palu, Dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat(STTD). Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari, bertempat di Golden Boutique Hotel Jakarta, dimulai pada hari senin tanggal 17 November 2014 sampai dengan hari jumat tanggal 21 November 2014.

Materi yang akan disampaikan kepada para peserta terdiri dari :

1) Dasar hukum, regulasi dan kebijakan inspeksi keselamatan jalan;
2) Manajemen keselamatan;
3) Inspeksi keselamatan jalan;
4) Investigasi kecelakaan lalu lintas;
5) Geometrik jalan;
6) Pengenalan analisis dampak lalu lintas;
7) Keselamatan kendaraan bermotor;
8) Manajemen bahaya sisi jalan (roadside hazard);
9) Persiapan inspeksi keselamatan jalan dengan hawkeye 1000;
10) Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dengan hawkeye 1000;
11) Laporan dan evaluasi inspeksi keselamatan jalan dengan peralatan hawkeye 1000;
12) Persiapan inspeksi keselamatan jalan dengan daftar periksa (check list);
13) Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dengan daftar periksa (check list);
14) Laporan dan evaluasi inspeksi keselamatan jalan dengan daftar periksa (check list);
15) Manajemen rekayasa lalu lintas dan pengenalan perlengkapan jalan;
16) Rekomendasi pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan; dan,
17) Seminar hasil inspeksi keselamatan jalan;

Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, para peserta akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan (STTPL) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan survey kinerja keselamatan pada masa angkutan lebaran Tahun 2014 ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kesiapan dan kondisi pengemudi dan armada bus AKAP pada masa angkutan lebaran.

Terkait dengan hal tersebut diatas akan dilakukan 3 jenis survey kinerja keselamatan yaitu :

a. Monitoring kecelakaan lalu lintas pada masa angkutan lebaran ;
b. Survey kegiatan Pengemudi dan Persyaratan Teknis dan Perlengkapan Tangap Darurat bus AKAP;
c. Identitas dan Survey Daerah Rawan Kecelakaan.

Masing – masing kegiatan di lakukan dengan tim yang berbeda dan semua tim mempunyai jadwal dan tata cara yang sudah diatur.

a. Monitoring kecelakaan lalu lintas pada masa angkutan lebaran;

   Monitoring atau pemantauan kejadian kecelakaan bersumber dari web site dan internet dan posko pusat Kementerian Perhubungan yang bersumber dari Polri dilaksanakan oleh personil Direktorat KTDyang bertugas berjumlah 2 orang setiap hari, kegiatan ini berlangsung selama 16 hari (H-7 s.d H+7)dengan lokasi di ruang rapat Direktorat KTD

b. Survey kegiatan Pengemudi dan Persyaratan Teknis dan Perlengkapan Tangap Darurat bus AKAP;

   Kegiatan ini dilakukan untuk pendataan pengemudi dan kendaraan melalui wawancara dengan pengemudi pada terminal keberangkatan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.

c. Identifikasi dan Survey Daerah Rawan Kecelakaan.

   Kegiatan ini melakukan survei pemantauan pada jalur alternatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensi/rawan kecelakaaan pada Jalur AlternatifAngkutan Lebaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai lokasi potensi/rawan kecelakaan di sepanjang jalur alternatifangkutan lebarandan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemasangan papan informasi terkait lokasi potensi /rawan kecelakaan tersebut.

A. BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI

1. Seksi Sarana Pengujian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2002, Seksi Sarana Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program, melaksanakan pemeliharaan, pengadaan, inventarisasi, penilaian kinerja fasilitas, perbaikan peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembersihan dan pemeriksaan harian fisik fasilitas, peralatan uji dan sarana penunjang teknis lainnya.
b. Memeriksa dan menyiapkan sumber daya bagi peralatan uji.
c. Memastikan fasilitas peralatan uji dan sarana penunjang teknis lainya siap operasi.
d. Mencatat kondisi, merawat dan melakukan perbaikan ringan fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya.
e. Melakukan inventarisasi fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya.
f. Menyusun jadwal pemanasan, perawatan dan perbaikan fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya.
g. Melaporkan kondisi fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya, yang memerlukan perbaikan lanjutan kepada Kepala Balai PLJSKB.
h. Melakukan penyusunan petunjuk pengoperasian dan perawatan fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya.
i. Memantau dan mengawasi perawatan dan perbaikan fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainya.
j. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya dan atau suku cadangnya, berkoordinasi dengan Seksi Teknologi Pengujian.
k. Melakukan kalibrasi harian dan berkala terhadap peralatan uji dengan atau tanpa melibatkan instansi lain.
l. Melakukan evaluasi kinerja fasilitas, peralatan dan sarana penunjang teknis lainnya.
m. Memantau dan mengikuti perkembangan teknologi otomotif.
n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Staf Seksi Sarana Pengujian.
o. Melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan tugas Staf Seksi Sarana Pengujian.

p. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal maupun Horizontal.
q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Balai PLJSKB.
r. Melaksanakan tugas sebagai PNS.
s. Bertanggung Jawab atas tugas-tugas yang dilaksanakan.
t. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai PLJSKB.

Tugas pokok, tugas kedinasan maupun tugas penunjang lainnya yang telah dilaksanakan Seksi Sarana Pengujian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi:
    1) Pemeliharaan Alat Pengujian Passanger Car :
        a) Side Slip (Banzai)
        b) Brake Tester (Banzai)
        c) Speed Tester (Anzen)
        d) Axle Load Meter (Banzai)
        e) Smoke Tester (Banzai)
        f) Gasoline Gas Analyzer (Autocheck)
        g) Car Lift
    2) Pemeliharaan Alat Pengujian Sepeda Motor :
        a) Brake Tester (Saxon)
        b) Speed Tester (Saxon)
        c) Head Light Tester (L.E.T Automotive)
        d) Sound Level Meter (Saxon)
        e) Exhaust Blower
    3) Pemeliharaan Alat Pengujian Bus dan Truck :
        a) Head Light Tester (Anzen)
        b) Side Slip (Banzai)
        c) Brake Tester (Banzai)
        d) Speed Tester (Anzen)
        e) Axle Load Meter (Banzai)
        f) Load Simulator (Rice Lake)
    4) Pemeliharaan Electrik Generating Set (EGS) :
        a) Genset Merk Deutz
        b) Pengadaan Solar

5) Pemeliharaan Trafo :
   a) Trafo 1 Merk Union
   b) Trafo 2 Merk Centrado

b. Perawatan alat Uji Emisi Uero 2 :
   1) Jenis M1
   2) Jenis L

2. Seksi Sertifikasi

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji, pengolahan data hasil uji serta penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor.

tugas Seksi Sertifikasi dalam melaksanakan pokok, tugas kedinasan, maupun tugas penunjang lainya yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Memeriksa dan mengevaluasi kelengkapan dokumen teknis dan persyaratan administrasi kendaraan uji.
b. Melakukan verifikasi dokumen teknis yang diterima dengan fisik kendaraan yang akan diuji.
c. Meneruskan dokumen kendaraan uji ke Seksi Pengujian untuk memastikan fisik kendaraan uji di lapangan sama dengan data teknis yang diajukan oleh pemohon.
d. Menerima hasil uji yang telah dievaluasi oleh Seksi Pengujian.
e. Mengevaluasi kesesuaian antara hasil uji dengan dokumen teknis yang diterima dari Seksi Pengujian.
f. Membuat draft resume hasil uji.
g. Memverifikasi draft resume hasil uji untuk penyiapan bahan sertifikasi laik jalan.
h. Meneruskan resume hasil uji kepada Kepala Balai PLJSKB untuk ditandatangani.
i. Menyerahkan resume hasil uji yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai PLJSKB kepada Sub Bagian Tata Usaha untuk dikirim ke Direktorat LLAJ Ditjen. Perhubungan Darat.
j. Merekap data resume yang telah dikirim ke dalam komputer dan menyimpan berkas resume hasil uji.
k. Menyusun/inventarisasi berkas resume hasil uji dan membuat statistik resume hasil uji setiap bulan pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
l. Membuat data laporan tahunan dari rekapan data resume hasil uji sebagai bahan laporan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
m. Menerima dan menyimpan (arsip) sertifikasi kendaraan bermotor yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

n. Membuat rekapitulasi jumlah resume pengujian kendaraan bermotor tahun 2014.

Pada tahun 2014, seksi sertifikasi telah menerbitkan resume hasil pengujian sebanyak 817 buah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1. Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Tahun 2014

Jenis Kend.	BULAN												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nop	Des	
1. Sepeda motor (SM)	6	15	17	16	9	23	7	13	40	18	17	22	203
2. Mobil Penumpang (MP)	15	43	48	30	35	37	31	23	25	30	27	17	361
3. Bus	5	1	0	2	0	1	3	2	3	1	2	1	21
4. Mobil Barang (MB)	4	13	6	6	10	3	4	6	5	4	9	5	75
5. Kendaraan khusus	0	2	0	2	3	2	3	1	1	0	1	0	15
6. *Traktor head* (TH)	4	4	3	3	5	5	6	0	2	0	0	1	33
7. Landasan (LDS)	5	8	9	3	5	2	8	11	19	7	5	3	85
8. Roda tiga (R3)	0	1	1	1	4	2	0	4	3	5	3	0	24
Jumlah Total (Unit)	**39**	**87**	**84**	**63**	**71**	**75**	**62**	**60**	**98**	**65**	**64**	**49**	**817**

Sumber: Seksi Sertifikasi BPLJSKB

3. Seksi Sarana Pengujian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2002, Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan rencana dan program uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan kontruksi.

Seksi Pengujian dalam melaksanakan tugas pokok, tugas kedinasan, maupun tugas penunjang lainnya, adalah sebagai berikut:

a. Membuat dan mengatur jadwal pelaksanaan uji tipe, berdasarkan pengajuan dari pemohon dengan maksud menghindari penumpukan jumlah kendaraan yang diuji tipe dalam satu hari agar tidak melebihi kemampuan Balai PLJSKB.

b. Memastikan kepada pemohon bahwa kendaraan uji harus benar-benar dipersiapkan agar pada saat pelaksanaan uji tipe tidak ada kendala teknis yang berarti, dan menerangkan bahwa pengujian tipe tidak dapat dilakukan pengulangan uji tanpa ada surat pengantar uji ulang atas item uji yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan.

c. Memeriksa dan mencatat serta menginformasikan kepada pemohon sebelum melaksanakan uji tipe, apabila ada kondisi fisik kendaraan yang dikirim ke Balai PLJSKB memiliki cacat bawaan.

d. Mendata jumlah penguji kendaraan bermotor yang ada dan siap bertugas dan kemudian mengatur tim penguji yang akan melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor.

e. Menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengujian atas nama Kepala Balai PLJSKB.

f. Melakukan pemantauan, pengawasan dan optimalisasi pelaksanaan pengujian tipe kendaraan yang berlangsung.

g. Melakukan evaluasi atas hasil uji setelah setiap unit kendaraan selesai dilakukan pengujian tipe, secara bersama-sama dengan kelompok kerja penguji.

h. Membuat rekapitulasi terhadap jumlah dan tipe kendaraan yang di uji baik itu harian, bulanan maupun tahunan.

i. Mengatur penugasan pegawai yang akan ditugaskan untuk menjadi saksi (witness) pengujian emisi yang dilakukan diluar Balai PLJSKB.

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai PLJSKB.

Tabel III.2. Rekapitulasi Jumlah Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2014

No.	Bulan	Jumlah Uji Tipe	Jumlah Uji Ulang	Jumlah Kendaraan Uji							Total
				Mobil Penumpang	Mobil Barang	Bus	Mobil Landasan	Mobil Khusus	Kend. Roda - 3	Sepeda Motor	
1	Januari	36	3	15	8	5	5	0	0	6	39
2	Pebruari	80	7	43	16	1	9	2	1	15	87
3	Maret	75	9	49	8	0	9	1	1	16	84
4	April	61	2	32	8	2	3	3	1	14	63
5	Mei	67	4	34	15	1	5	3	4	9	71
6	Juni	69	6	37	6	1	5	1	2	23	75
7	Juli	60	2	31	7	3	8	6	0	7	62
8	Agustus	59	1	24	6	1	11	1	4	13	60
9	September	95	3	25	6	3	20	1	2	39	98
10	Oktober	61	4	30	4	1	7	0	3	19	65
11	Nopember	57	7	27	9	2	5	1	2	17	64
12	Desember	47	2	17	6	1	3	0	0	22	49
Total		**767**	**50**	**364**	**99**	**21**	**90**	**19**	**24**	**200**	**817**

Sumber: Seksi Pengujian BPLJSKB

4. Seksi Teknologi Pengujian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2002, Seksi Teknologi Pengujian mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan kajian standarisasi pengujian, analisis dan evaluasi perkembangan teknologi pengujian, serta pengelolaan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data-data dan referensi mengenai tata cara pelaksanaan pengujian didalam maupun diluar negeri.

b. Menghimpun, mempelajari, menganalisa dan mengevaluasi perkembangan teknologi pengujian.
c. Menghimpun dan mempelajari teknologi sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor.
d. Melakukan kajian terhadap tata cara pelaksanaan pengujian, perkembangan teknologi pengujian dan teknologi sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor.
e. Mengusulkan bahan standardisasi pengujian.
f. Melakukan study banding tentang tata cara pengujian sesuai dengan perkembangan teknologi.
g. Mengusulkan tata cara pengelolaan sistem informasi pengujian tipe.
h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian.
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Staf Seksi Teknologi Pengujian.
j. Melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan tugas Staf Seksi Teknologi Pengujian.
k. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal maupun Horizontal.
l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Balai PLJSKB.
m. Melaksanakan tugas sebagai PNS.
n. Bertanggung Jawab atas tugas-tugas yang dilaksanakan.
o. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai PLJSKB.
p. Agar ditambahkan anggaran untuk mempelajari regulasi internasional dibidang pengujian komponen dan sistem kendaraan bermotor.

Tugas pokok, tugas kedinasan, maupun tugas penunjang lainnya yang telah dilaksanakan Seksi Teknologi Pengujian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor bersama Kepala Balai PLJSKB dan Kasi Sertifikasi;
b. Melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait antara lainnya :
    1) Rapat koordinasi dengan Subdit SAJ terkait dengan usulan kenaikan penggunaan PNBP yang bersumber dari pelayanan jasa pengujian tipe kendaraan bermotor.

2) Rapat koordinasi dengan pihak ITB (Institut Teknologi Bandung) terkait dengan Studi/Kajian dan Pelatihan Pengujian Konstruksi Kendaraan Bermotor.
3) Rapat koordinasi bersama Badan Litbang Perhubungan Darat.
4) Rapat mengenai ACCSQ APWG bersama Kementerian Perindustrian.
5) Rapat koordinasi dengan Direktorat LLAJ dan GAIKINDO terkait sosialisasi *Brake to Idle Override System* (BIOS).
6) Rapat koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup.
7) Melakukan Koordinasi Teknis terkait peralatan uji emisi gas buang dengan HORIBA Jepang.

c. Mengadakan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung berupa pelatihan pengujian konstruksi Kendaraan Bermotor;
d. Sebagai Delegasi pada The 4th Public and Private Joint Forum in Asian Region-The 18th JASIC Asia Goverment/Industry Meeting;
e. Menghadiri The 20th Meeting of the ACCSQ-APWG and 13th Task Force Meeting on the Mutual Recognition Arrangement (MRA) di Manila, Filipina;
f. Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Perekayasa;
g. Melaksanakan pengembangan infrastruktur system teknologi informasi di Balai PLJSKB yang meliputi :
   1) Pengembangan Sistem Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
   2) Pembangunan LAN (Local Area Network) antar gedung,
   3) Penggunaan informasi publik berbasis Content Management System.
h. Mengikuti Kegiatan dan Pertemuan-Pertemuan Internasional terkait Regulasi Otomotif dan Perkembangan Teknologi Pengujian Tipe Kendaraan Bermotorseperti : ACCSQ-APWG, Expert Meeting, G/I Meeting, JASIC, JARI, JAMA, dll.

B. BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (BLLAJSDP)

1. BLLAJSDP JAMBI

a. Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana

1) Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat;
   a) Maksud dan Tujuan

      Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :
      (1) Monitoring dilakukan untuk pengendalian kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran;
      (2) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

(3) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;

(4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat.

b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan Tugas Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan mencakup Bidang Keselamatan Transportasi Darat Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai berikut :

(1) Melakukan inventarisasi kondisi eksisting ruas jalan nasional mengenai kebutuhan fasilitas keselamatan LLAJ.

(2) Melakukan kajian terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan LLAJ

(3) Pengumpulan data dan informasi Seperti data kecelakaan, data volume lalulintas dan inventarisasi kondisi jalan, serta data jumlah rambu s/d rambu dan marka jalan yang tersebar di beberapa ruas jalan.

(4) Melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan.

(5) Menerapkan konsep pengembangan pencegahan kecelakaan lalulintas jalan melalui penerapan fomulir pemeriksaan keselamatan (checking list).

(6) Menerapkan konsep dan rencana perancangan teknik jaringan jalan yang dilengkapi oleh marka dan rambu s/drambu lalu lintas yang layak guna.

(7) Informasi daerah rawan kecelakaan para pengguna jalan.

(8) Penerapan rambu - rambu dan marka jalan yang layak guna.

(9) Melakukan Inventaris Alat Keselamatan Di atas Kapal.

(10) Melakukan Identivikasi Alur Pelayaran Yang Dilalui.

(11) Penerapan Rambu – rambu perairan Daratan.

(12) Tinjauan Muatan Yang Masuk Ke dalam Kapal.

(13) Penanganan Muatan Di kapal.

(14) Standar Pelayanan Minimal Pada Angkutan Penyeberangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan ini terlampir dalam laporan tahunan ini.

2) Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Bidang Prasarana LLAJSDP;

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

(1) Melakukan inventarisasi berupa pengumpulan database bidang Perhubungan Darat, khususnya Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
(2) Monitoring dan Pengawasan dilakukan untuk pengendalian kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran;
(3) Melakukan evaluasi kondisi aktual dilapangan
(4) Memberikan masukan tentang pemeliharaan dan peningkatan kinerja Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan;
(5) Memberikan Rekomendasi dan Saran Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan Tugas Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan, mencakup Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai berikut :

(1) Melakukan inventarisasi kondisi Jalan Nasional, Provinsi, Kota Dan Kabupaten.
(2) Melakukan Inventarisasi Fasilitas Perlengkapan Jalan seperti Trotoar, Rambu, Fasilitas Penyeberangan, Lampu Penerangan, Marka,, Paku Jalan, Deliniator, Guadrail, APILL.
(3) Melakukan Pemantauan Kondisi Ruang Milik Jalan.
(4) Melakukan Pemantauan Kondisi Permukaan Jalan.
(5) Melakukan Pemantauan Kondisi Marka.
(6) Melakukan Pemantauan Kondisi Rambu.
(7) Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar).
(8) Melakukan Pemantauan Kondisi Fasilitas Penyeberangan (Zebracross).
(9) Melakukan Pemantauan Kondisi Shelter / Halte.
(10) Melakukan Pemantauan Kondisi Simpang Apill.
(11) Melakukan Pemantauan Kondisi Pagar Pengaman.
(12) Melakukan Pemantauan Kondisi Lampu Penerangan Jalan.
(13) Melakukan Pemantauan Kondisi Parkir.
(14) Melakukan Pemantauan Kondisi Terminal, dan Fasilitas Terminal.
(15) Melakukan Pemantauan Kondisi Pengujian Kendaraan Bermotor .
(16) Melakukan Inventarisasi Ruang Fasilitas Pelabuhan Dari sisi Darat.

c) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan monitoring prasarana LLAJSDP tahun 2014 diikuti oleh 90 kabupaten/kota di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi.

(1) Pesiapan

Untuk kegiatan monitoring prasarana LLAJSDP, surat permohonan bantuan personil untuk kabupaten/kota sudah dikirim pada Bulan Februari, demikian juga dengan penyusunan jadwal pelaksanaanya.

(2) Monitoring Tahap I

Monitoring tahap I dilaksanakan pada bulan April, dimana kegiatan pada tahap I ini lebih kepada penyampaian bagaimana tata cara pengisian formulir monitoring prasarana LLAJSDP Tahap I. Kegiatan ini dilakukan di kantor provinsi dengan mengundang seluruh kabupaten/kota yang mengirimkan pegawainya sebagai petugas monitoring.

(3) Monitoring Tahap II

Monitoring tahap II dilaksanakan pada bulan September, dimana kegiatan pada tahap ini ditujukan untuk mengambil formulir monitoring tahap I yang telah diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan memberikan formulir monitoring tahap II. Disamping itu pada tahap ini juga dilaksanakan pemberian honor kepada petugas monitoring provinsi, kabupaten/kota.

(4) Monitoring Tahap III

Monitoring tahap III dilaksanakan pada bulan Desember, pada tahap ini yang dilakukan adalah pengambilan formulir monitoring tahap II dan pemberian honor kepada petugas monitoring provinsi, kabupaten/kota.

d) Output Kegiatan

(1) Panjang Jalan

Ditinjau dari Jalan Nasional wilayah kerja BLLAJSDP Jambi, total panjang jalan Nasional dari ke 9 (Sembilan) propinsi adalah 10.408,55 Km.

(2) Terminal Tipe A

Untuk terminal Tipe A yang berada di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi keseluruhan berjumlah 35 unit.

(3) Terminal Tipe B

Untuk terminal tipe B yang ada di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi terdapat 67 unit.

(4) Terminal Tipe C

Untuk terminal tipe C yang ada di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi terdapat 78 unit.

e) Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan ini terlampir Pada Gambar Berikut :

Gambar III.1. Kegiatan Monitoring Prasarana dan Keselamatan 2014

3) Menyusun Studi DED MRLL Jalan Nasional Kuta Cane – Batas Kota Sumatera Utara 20,708 Km (Provinsi Aceh)

a) Maksud dan Tujuan

Kegiatan DED Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Kuta Cane – Batas Kota Sumatera Utara 28,78 km di Provinsi Aceh diselenggarakan dengan maksud melakukan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan di masa yang akan datang, melakukan inventarisasi permasalahan–permasalahan lalu lintas di ruas jalan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan ketentuan yang ada sebagai pedoman, acuan dan bahan masukan untuk upaya perbaikan kondisi ruas jalan kepada pembina jalan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Membuat perencanaan detail engineering desain (DED) kebutuhan-kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(2) Merincikan jumlah rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan untuk kegiatan MRLL jalan nasional;

(3) Mengumpulkan data dukung dalam kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(4) Sebagai dasar dalam implementasi MRLL di jalan Nasional;

(5) Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan MRLL Jalan Nasional.

b) PELAPORAN

(1) Laporan Pendahuluan

Dalam laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai pemahaman konsultan terhadap permasalahan yang dihadapi, metodologi pendekatan, rencana kerja rinci, serta jadwal pelaksanaan studi dan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan sebagai masukkan untuk laporan antara setelah diadakan penyempurnaan sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar.

(2) Laporan Antara

Laporan ini menguraikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data, penyiapan. Laporan ini diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk konsep laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(3) Laporan Konsep Laporan Akhir

Konsep laporan akhir ini mencakup seluruh rekomendasi mengenai pekerjaan yang disarankan oleh konsultan yang telah di survai sesuai dengan kondisi lapangan. Laporan pendekatan sebelum memasuki tahap Laporan Akhir. Konsep laporan akhir ini diserahkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(4) Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan hasil penyempurnaan konsep laporan akhir yang mencakup seluruh tahapan dan hasil akhir dari kegiatan ini, Laporan akhir ini diserahkan paling lambat 6 (empat) bulan setelah kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan digandakan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(5) CD dan Executive Summary

CD ini berisi softcopy paparan dan laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, dan laporan akhir, lampiran – lampiran dan design gambar dalam bentuk Autocad serta seluruh tata cara pelaksanaan pekerjaan dan aplikasi software yang digunakan. Sedangkan Executive Summary merupakan ringkasan dari laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, hingga laporan akhir. CD sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Executive Summary sebanyak 5 (lima) eksemplar diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kontrak.

c) OUTPUT KEGIATAN

Kebutuhan fasilitas jalan yang dikaji dalam DED MRLL Jalan Nasional Kuta Cane – Batas Kota Sumatera Utara 28,78 km di Provinsi Aceh berjumlah Rp. 5.261.080.000,- dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.3. Tabel RAB Rekpitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Kuta Cane – Batas Kota Sumatera Utara 28,78 Km di Provinsi Aceh

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)	165 BUAH	1.445.920,15	242.914.585,71
2	Pengadaan & Pemasangan Marka Putus-putus dan Marka Tepi (uk.3x120 mm) (thermoplastic)	13.800	34.080,06	470.304.833,05
3	Pengadaan & Pemasangan Marka Tepi Kiri dan Tengah (uk.3x120 mm) (thermoplastic)	4.120	34.080,06	140.409.848,71
4	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan Zebra Cross (uk.3x2500x300 mm)	120	193.624,80	23.234.976,10
5	Pengadaan & Pemasangan Pita Penggaduh (uk.7x7000x250 mm)	3	1.054.199,47	3.162.598,42
6	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x10x2 cm)	7	278.249,31	1.947.745,20
7	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi	50	622.204,58	31.110.229,10
8	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (dengan rambu chevron) Type 1 : Terminal End masuk ke dalam tanah	168	11.962.385,53	2.009.680.768,87

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
9	pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	42	37.296.482,59	1.566.452.268,79
10	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell)	7	41.940.307,43	293.582.152,04
			JUMLAH	**4.782.800.005,99**
			PPN 10%	**478.280.000,60**
			TOTAL	**5.261.080.006,59**
			DIBULATKAN	**5.261.080.000,00**

4) Menyusun Studi DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Kota Jambi, Segmen Kota Jambi – Simpang Tuan 30,07 Km (Provinsi Jambi).

a) Maksud Dan Tujuan

Kegiatan DED Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Lintas Timur Kota Jambi Segmen Kota Jambi – Simpang Tuan 30,07 Km Di Provinsi Jambi diselenggarakan dengan maksud melakukan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan di masa yang akan datang, melakukan inventarisasi permasalahan–permasalahan lalu lintas di ruas jalan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan ketentuan yang ada sebagai pedoman, acuan dan bahan masukan untuk upaya perbaikan kondisi ruas jalan kepada pembina jalan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Membuat perencanaan detail engineering desain (DED) kebutuhan-kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(2) Merincikan jumlah rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan untuk kegiatan MRLL jalan nasional;

(3) Mengumpulkan data dukung dalam kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(4) Sebagai dasar dalam implementasi MRLL di jalan Nasional ;

(5) Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan MRLL Jalan Nasional;

b) Pelaporan

(1) Laporan Pendahuluan

Dalam laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai pemahaman konsultan terhadap permasalahan yang dihadapi, metodologi pendekatan, rencana kerja rinci, serta jadwal pelaksanaan studi dan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan sebagai

masukkan untuk laporan antara setelah diadakan penyempurnaan sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar.

(2) Laporan Antara

Laporan ini menguraikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data, penyiapan.Laporan ini diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk konsep laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(3) Laporan Konsep Laporan Akhir

Konsep laporan akhir ini mencakup seluruh rekomendasi mengenai pekerjaan yang disarankan oleh konsultan yang telah di survai sesuai dengan kondisi lapangan. Laporan pendekatan sebelum memasuki tahap Laporan Akhir. Konsep laporan akhir ini diserahkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(4) Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan hasil penyempurnaan konsep laporan akhir yang mencakup seluruh tahapan dan hasil akhir dari kegiatan ini, Laporan akhir ini diserahkan paling lambat 6 (empat) bulan setelah kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan digandakan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

c) Output Kegiatan

Kebutuhan fasilitas jalan yang dikaji dalam DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Kota Jambi Segmen Kota Jambi – Simpang Tuan 30,07 km di Provinsi Jambi berjumlah Rp. 12.458.540.000,- dengan rincian dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel III.4. Tabel RAB Rekapitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Kota Jambi Segmen Kota Jambi – Simpang Tuan 30,07 Km di Provinsi Jambi

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	KOTA JAMBI			
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)	25 BUAH	1.704.162,68	49.420.717,79
2	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk.120x180 cm) (buah)	2 BUAH	15.526.625,30	31.053.250,61
3	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan	6	228.206,35	1.369.238,10

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Zebra Cross (uk.3x2500x300 mm)			
4	Pengadaan & Pemasangan Pita Penggaduh (uk.7x7000x250 mm)	3	1.242.480,37	3.727.441,10
5	pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	14	43.957.665,08	615.407.311,09
6	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell)	8	66.041.324,14	528.330.593,12
7	Zona Selamat Sekolah	1	338.070.757,21	338.070.757,21
	KABUPATEN MUARO JAMBI			
8	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)	90 BUAH	1.765.301,90	158.877.170,89
9	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk.120x180 cm) (buah)	60 BUAH	16.083.664,67	96.501.988,04
10	Pengadaan & Pemasangan Marka Putus-Putus dan Marka Tepi Kiri-Kanan (uk. 3x120 mm) (thermoplastic)	7086	41.607,83	294.833.060,61
11	Pengadaan & Pemasangan Marka Tepi Kiri-Kanan (uk. 3x120 mm) (thermoplastic)	6880	41.607,83	286.261.848,29
11	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan Zebra Cross (uk.3x2500x300 mm)	108	236.393,57	25.530.505,68
12	Pengadaan & Pemasangan Pita Penggaduh (uk.7x7000x250 mm)	60	1.287.056,09	77.223.365,17
13	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi	950	759.640,10	721.658.095,36
14	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (dengan rambu chevron) Type 1 : Terminal End masuk ke dalam tanah	60	14.604.694,36	876.281.661,38
15	pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	56	45.534.707,71	2.549.943.631,51
16	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell)	16	51.204.282,75	819.268.523,98
17	Zona Selamat Sekolah	11	350.199.517,79	3.852.194.695,71
			JUMLAH	**11.325.953.855,64**
			PPN 10%	**1.132.595.385,56**
			TOTAL	**12.458.549.241,20**
			DIBULATKAN	**12.458.540.000,00**

5) Menyusun Studi DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Batas Sumatera Utara – Bagan Batu 50 Km (Provinsi Riau)

a) Maksud Dan Tujuan

Kegiatan DED Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Lintas Timur Batas Sumatera Utara – Bagan Batu 50 KM (Provinsi Riau) diselenggarakan dengan maksud melakukan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan di masa yang akan datang, melakukan inventarisasi permasalahan–permasalahan lalu lintas di ruas jalan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan ketentuan yang ada sebagai pedoman, acuan dan bahan masukan untuk upaya perbaikan kondisi ruas jalan kepada pembina jalan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Membuat perencanaan detail engineering desain (DED) kebutuhan-kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(2) Merincikan jumlah rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan untuk kegiatan MRLL jalan nasional;

(3) Mengumpulkan data dukung dalam kegiatan MRLL Jalan Nasional;

(4) Sebagai dasar dalam implementasi MRLL di jalan Nasional ;

(5) Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan MRLL Jalan Nasional;

b) Pelaporan

(1) Laporan Pendahuluan

Dalam laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai pemahaman konsultan terhadap permasalahan yang dihadapi, metodologi pendekatan, rencana kerja rinci, serta jadwal pelaksanaan studi dan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan sebagai masukkan untuk laporan antara setelah diadakan penyempurnaan sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar.

(2) Laporan Antara

Laporan ini menguraikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data, penyiapan.Laporan ini diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk konsep laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(3) Laporan Konsep Laporan Akhir

Konsep laporan akhir ini mencakup seluruh rekomendasi mengenai pekerjaan yang disarankan oleh konsultan yang telah di survai sesuai dengan kondisi lapangan. Laporan pendekatan sebelum memasuki tahap Laporan Akhir. Konsep laporan akhir ini diserahkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk laporan final sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

(4) Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan hasil penyempurnaan konsep laporan akhir yang mencakup seluruh tahapan dan hasil akhir dari kegiatan ini, Laporan akhir ini diserahkan paling lambat 6 (empat) bulan setelah kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan digandakan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

c) Output Kegiatan

Kebutuhan fasilitas jalan yang dikaji dalam DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Batas Sumatera Utara – Bagan Batu 50 KM (Provinsi Riau) berjumlah Rp. 2,741,532,000.

Tabel III.5. Tabel RAB Rekapitulasi Usulan Fasilitas Perlengkapan Jalan DED MRLL Jalan Nasional Lintas Timur Batas Sumatera Utara – Bagan Batu 50 Km (Provinsi Riau)

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
1	Pengadaan Marka Jalan	11271.94 m^2	952,085,162.00
2	Pengadaan & Pemasangan Zona Selamat Sekolah	16 lokasi	225,383,000.00
3	Pengadaan & Pemasanngan Warning Light Tiang Tinggi	37 buah	170,902,967.33
4	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas	464 buah	671,691,092.45
5	Pengadaan & Pemasangan Guardrail	1 m	34,073,408.21
6	Pengadaan & Pemasangan Deliniator	520 buah	210,136,910.15
7	Pengadaan & Pemasangan Traffic Light	1 set	228,029,344.20
	JUMLAH		**2,492,301,884.34**
	PPN 10%		**249,230,188.40**
	TOTAL		**2,741,532,072.77**
	DIBULATKAN		**2,741,532,000.00**

6) Melaksanakan pemantauan ketersediaan peraturan andalalin di setiap Kabupaten/Kota;

Balai LLAJSDP memonitoring dan membantu daerah yang belum memiliki peraturan daerah terkait andalalin, baik secara teknis maupun non teknis. Salah satu cara Balai LLAJSDP Jambi dalam memonitoring peraturan daerah terkait andalalin adalah dengan menggabungkan dalam kegiatan monitoring prasarana LLAJSDP;

7) Menyusun Data Kinerja Perhubungan Darat di Wilayah Kerja BLLAJSDP Jambi

a) Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah penyusunan data kinerja perhubungan darat diwilayah kerja BLLAJSDP Jambi yang terupdate.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

(1) Tersusunnya Data Kinerja Perhubungan Darat Dl WilayahKerja BLLAJSDP Jambi.

(2) Tersusunnya Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Provinsi di wilayah kerja Balai.

(3) Memberikan informasi perkembangan pembangunan dibidang perhubungan darat (LLAJ dan ASDP).

b) Pelaporan

(1) Laporan Pendahuluan

Menguraikan mengenai pemahaman terhadap permasalahan yang ada, metodologi pendekatan, hasil-hasil evaluasi kebijaksanaan, rencana kerja pengumpulan data, diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal SPMK sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar dalam bentuk Soft Cover.

(2) Laporan Antara

Laporan ini menguraikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data, penyiapan. Laporan ini diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk konsep laporan final sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.

(3) Laporan Konsep Laporan Akhir

Konsep laporan akhir ini mencakup seluruh rekomendasi mengenai pekerjaan yang disarankan oleh konsultan yang telah di survai sesuai dengan kondisi lapangan. Laporan pendekatan sebelum memasuki tahap Laporan Akhir. Konsep laporan akhir ini diserahkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal kontrak untuk dibahas dan dipaparkan dalam rapat pembahasan dan dijadikan masukkan untuk laporan final sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.

(4) Laporan Akhir

Laporan akhir ini meliputi seluruh lingkup pekerjaan dengan mengikutsertakan seluruh perbaikan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan. Laporan ini diserahkan paling lambar 7 (tujuh) bulan setelah tanggal SPMK sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar dalam bentuk Hard Cover.

(5) Rekaman Laporan

Berisi softcopy paparan dan laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, dan laporan akhir, lampiran-lampiran. Sedangkan Excecutive Summary merupakan ringkasan dari laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, hingga laporan akhir. CD sebangak 20 (dua puluh) buah dan executive Summary sebanyak 20 (duapuluh) eksemplar diserahkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah kontrak.

c) Output Kegiatan

Penyusunan data kinerja perhubungan darat di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi sebagai berikut :

(1) Aplikasi data kinerja perhubungan darat di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi dapat memberikan acuan kepada BLLAJSDP Jambi dalam melakukan mengkoordinasi dan mengintegrasikan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan merata dari setiap unit dilingkungannya.

(2) Aplikasi data kinerja perhubungan darat di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan serta tanggung jawab dalam lairan data dan informasi, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja perhubungan.

(3) Aplikasi data kinerja perhubungan darat di wilayah kerja BLLAJSDP jambi menyediakan data yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b. Seksi Angkutan dan Teknis Sarana

1) Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana LLAJ dan SDP;

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

(1) Melakukan penegakan hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) Mengetahui tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun perusahaan angkutan umum;

b) Ruang lingkup

Ruang Lingkup kegiatan monitoring dan pengawasan bidang sarana lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2014 :

(1) Waktu dan lokasi;

(2) Pelaksana Kegiatan

(3) Obyek pemeriksaaan;

(4) Pemeriksaan;

(5) Kegiatan yang dilaksanakan;

(6) Penindakan;

(7) Sanksi pelanggaran.

c) Obyek Pemeriksaan

(1) Aspek administratif

(2) Keabsahan dokumen perjalanan yang meliputi izin penyelenggaraan angkutan/Dokumen Perjalanan, izin insidentil, dan buku uji;

(3) Penerbit dokumen perjalanan;

(4) Masa berlaku dokumen perjalanan;

(5) Dokumen perjalanan kendaraan cadangan;

(6) Pelunasan asuransi kecelakaan.

d) Aspek operasional

(1) Penyimpangan trayek;

(2) Penyimpangan jadwal perjalanan untuk dalam trayek;

(3) Penyimpangan terminal pemberhentian (asal-lintasan-tujuan);

(4) Penggunaan kendaraan cadangan;

(5) Jumlah penumpang yang diangkut;

(6) Penggunaan izin insidentil;

(7) Penyimpangan jenis pelayanan;

(8) Penyimpangan identitas kendaraan.

e) Aspek teknis

(1) Pemenuhan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;

(2) Pemenuhan persyaratan laik jalan;

(3) Kelengkapan kendaraan bermotor.

f) Pelaksanaan

Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat yang bertepat di Kota Padang dan Provinsi Riau yang bertepat di Kota Pekanbaru. Adapun hasil tersebut adalah :

(1) Provinsi Sumatera Barat

Penyitaan/penilangan dan penahanan hanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan memberikan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana yang selama ini dipergunakan oleh daerah masing-masing.

Pola penindakan tilang/penahanan kendaraan dapat diserahkan ke pengadilan atau dapat dilakukan dengan cara sidang di tempat, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing dan Koordinator daerah diberikan kebebasan memilih pola penindakan tilang/penahanan kendaraan. Sementara untuk sanksi peringatan dan teguran diberikan oleh pejabat pemberi izin trayek.

Tabel III.6. Rekapitulasi Pelanggaran Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Masa KP Habis	18
2	Penyimpangan Trayek	1
3	Tanpa KP	9
4	Tanpa STNK	1
5	Tanpa Trayek	1
6	Mati Keur	1
Jumlah		**31**

Gambar III.2. Diagaram Rekapitulasi Pelanggaran Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014

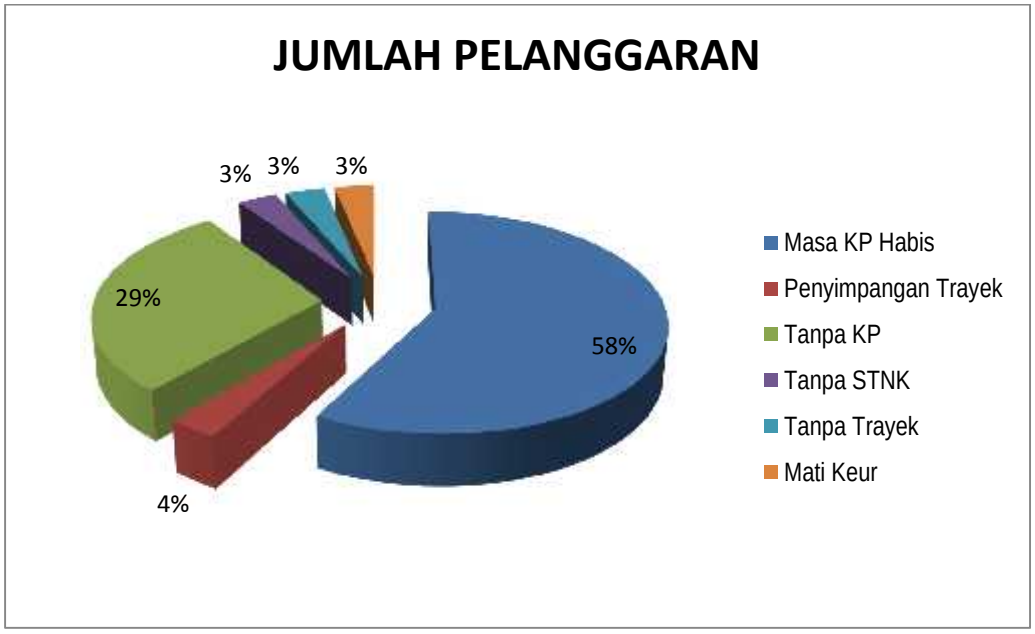

(2) Provinsi Riau

Dari hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan bidang sarana LLAJ di Kota Pekanbaru Provinsi Riau didapati hasil sebagai berikut :

Tabel III.7. Persentase Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Riau Tahun 2014

No	Uraian	Total Kendaraan Diperiksa	Total Kendaraan Ditilang Dan Disidang	Persentase
1	AKAP	44	7	15.91
2	AKDP	60	10	16.67
3	ANGKOT	11	9	81.82
4	PARIWISATA	0	0	0.00
5	AJAP	169	9	5.33
6	ANGKUTAN UMUM ILEGAL	0	0	0.00
7	ANGKUTAN BARANG	89	25	28.09
8	TAKSI	1	0	0.00
9	DLL	5	0	0.00
JUMLAH KENDARAAN		**379**	**57**	15.04

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim

Dari hasil tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pelanggaran tertinggi terdapat pada angkutan perkotaan dimana dari 11 sample didapati 9 angkot menyalahi aturan dengan presentase 81.82%.

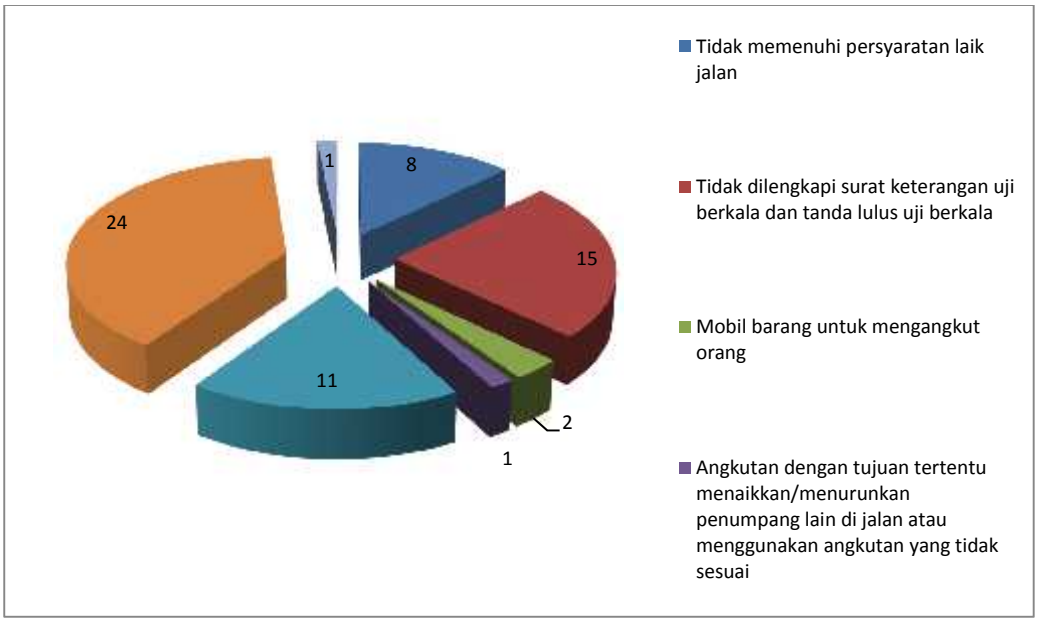

Gambar III.3. Diagaram Rekapitulasi Pelanggaran Hasil Penindakan Razia di Kota Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2014

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran tertinggi adalah jenis pelanggaran tidak memiliki izin trayek / tidak memiliki izin tidak dalam trayek sebesar 24%.

g) Dokumentasi

Gambar III.4. Dokumentasi kegiatan Monitoring Sarana 2014

2) Pengadaan Bahan Sosialisasi Keselamatan LLAJ

a) Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan sosialisasi keselamatan LLAJ yang ditujukan bagi daerah yang mengajukan bantuan permohonan bahan keselamatan LLAJ tersebut. Dengan harapan agar melalui penyuluhan sosialisasi tersebut, masyarakat mengetahui pentingnya tertib dalam berlalu lintas sehingga mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

Tabel III.8. Rincian Bahan Sosialisasi BLLAJSDP Jambi

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Kaos Anak-Anak Zeta (Keselamatan Transportasi Darat)	100	Pcs
2	Kaos Dewasa Zeta (Keselamatan Transportasi Darat)	520	Pcs
3	Rompi Keselamatan Transportasi Darat	500	Pcs
4	Stiker Keselamatan Transportasi Darat	2000	Pcs
5	Helm Keselamatan	500	Bh
6	Pin AKsi Dekade Keselamatan	200	Bh
7	Sarung Tangan Keselamatan	500	Bh
8	Tas Sosialisasi Keselamatan Jalan	398	Bh

Sumber : Balai LLAJSDP Jambi,Tahun 2014

b) Daerah yang menerima Bahan Sosialisasi yaitu :

(1) Kota Jambi, Provinsi Jambi

(2) Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

(3) Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

(4) Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

(5) Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

(6) Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan

(7) Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

c. Sub Bagian Tata Usaha

1) Lokasi dan Status Kantor BLLAJSDP Jambi

Kantor Balai LLAJSDP Jambi pada tahun 2014 berlokasi di Jl. Taspari no. Kelurahan Pematang Sulur Telanaipura – Jambi.

Gambar III.5. Gedung Kantor BLLAJSDP Jambi Yang Lama

Sehubungan dengan status kantor masih sewa kepada perorangan maka pada awal Tahun Anggaran 2015 kantor Balai LLAJSDP Jambi pindah ke Jln. Asparaus 03 No.04 RT.01 Kelurahan Beliung, Kota Baru – Jambi dengan Status sewa pada Perorangan.

Gambar III.6. Gedung Kantor BLLAJSDP Jambi Yang Baru

2) Kepegawaian dan Tata Usaha

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2014, terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2014, sebanyak 1126 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Jambi dengan rincian data sebagai berikut :

Surat Masuk sebanyak : 722 kali

Surat Keluar sebanyak : 191 kali

Surat Perintah Tugas : 213 kali

Dibandingkan pada tahun 2013 yang total surat keluar masuk Balai LLAJSDP Jambi hanya berjumlah 446, Balai LLAJSDP Jambi cenderung lebih aktif dibandingkan dengan tahun 2013. Rincian surat keluar dan masuk sebagai berikut :

Surat Masuk sebanyak : 353 kali

Surat Keluar sebanyak : 113 kali

Berikut grafik perbandingan kinerja dilihat dari banyaknya surat masuk dan keluar pada tahun 2013 dan 2014 :

Gambar III.7. Perbandingan Surat Masuk dan Keluar pada Tahun 2013 dan 2014

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) di Jambi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang–barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, secara jujur diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai dilingkungan kantor BLLAJSDP Jambi. Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di Balai LLAJSDP Jambi, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di kantor BLLAJSDP Jambi.

Pejabat struktural BLLAJSDP Jambi terdiri dari 4 (empat) orang, terdiri dari 1(satu) Kepala Balai LLAJSDP Jambi (eselon III a), 1(satu) Kasubag TU BLLAJSDP JAMBI (eselon IVa), 1(satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana BLLAJSDP (eselon IVa), 1(satu) Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana.

Jumlah Pegawai Balai LLAJSDP Jambi pada awal tahun 2014 sebanyak 14 orang Terdiri dari : PNS 6 orang, Honorer 4 orang dan Magang 4 orang. Kemudian pada bulan Februari 2014 mendapatkan penambahan jumlah

pegawai dengan status CPNS sebanyak 7 orang terdiri dari 3 orang Golongan III (1 S.1, 2 D IV) dan 4 orang Golongan II (3 D III dan 1 D II), kemudian seluruh CPNS Melaksanakan Diklat berupa :

a) Diklat Orientasi

b) Diklat Prajabatan

c) Diklat Dasar Transportasi

Peta Jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di Balai LLAJSDP dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel III.9. Komposisi Jabatan BLLAJSDP Jambi

No	Nama	NIP.	Jabatan
1	Torang Hutabarat,ATD.,M.M.	19630611 198303 1 002	Kepala Balai
2	Junaedi, S.Sos.	19620501 198403 1 001	Kepala Tata Usaha
3	Solihin Purwantara,S.SiT.	19691026 199203 1 007	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan
4	Yuliana Yenny Sorta Panjaitan, S.SiT.	19790701 200112 2 002	Pengelola Administrasi Perkantoran
5	Alexander Tigor Pardede, S.SiT.	19790828 200112 1 005	Pengevaluasi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
6	Ewan Slamet Septopo, S.E.	19700901 200502 1 001	Kasi Angkutan dan Teknis Sarana
7	Alumni Mulki, S.SiT,.M.Sc.	19830817 200501 1 003	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ
8	Yugo Antoro,S.T.	19791116 200212 1 004	Kasi Jaringan Pelayanan dan Prasarana
9	Harry Soemachda, S.E.	19711028 199503 1 001	Pengevaluasi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
10	Pande Gede Semarapura, S.Kom. M.si.	19820110 200212 1 003	Pengelola Keuangan/anggaran
11	Fitriyani, S.H.	19780330 200212 2 002	Pengelola Database Kepegawaian
12	Muhammad Khadafi, S.T.	19880508 201001 1 003	Pengawas Pembangunan Prasarana LLAJSDP
13	Pandega Prima Yudha, S.T.	19821114 201402 1 001	Pengawas Jembatan Timbang, Terminal/Pelabuhan
14	Dony Prasetio, S.ST.	19890302 201402 1 001	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan
15	Marta Anggoro, S.ST.	19910302 201402 1 003	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ
16	Firdaus, A.Md.LLAJ.	19860214 200903 1 006	Petugas Kalibrasi Peralatan PKB
17	Antonius Rulli Tua Manihuruk, A.Md LLAJ.	19840414 201001 1 026	Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian
18	Fauzie Hadianto, A.Md.	19830327 201402 1 001	Pengadministrasi Umum
19	Reza Gita Purnama, A.Md.LLAJ	19900410 201402 1 004	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan
20	Muhammad Utoyo, A.Md.LLASDP.	19910203 201402 1 003	Pengawas Pembangunan Prasarana LLAJSDP
21	Lina Listi Aningrum, A.Ma.PKB.	19920113 201402 2 005	Pengevaluasi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Mulai bulan Maret 2014 terdapat penambahan melalui mutasi PNS sebanyak 8 orang. Pada tanggal 2 bulan Mei 2014 terjadi pergantian personil Kepala Seksi Sarana sekaligus PPK dari :

Nama : HESTYANTO PRABOWO, MT

NIP : 198012172002121003

Pangkat/Golongan : Penata / III.c

Kepada :

Nama : EWAN SLAMET SEPTOPO, SE

NIP : 19700901 200502 1 001

Pangkat/ Golongan : Penata / III.c

Sehingga pada tahun anggaran 2014, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi (BLLAJSDP Jambi) sebanyak 14 (empat belas) orang, 7 (tujuh) orang CPNS dan pegawai honorer sebanyak 8 (delapan) yang terdiri dari 2 orang Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak, Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang, Pramubakti 2 (dua) orang dan Supir 2 (dua) orang.

Tabel III.10. Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. BLLAJSDP Jambi

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN						Jumlah
			S II	SI/ DIV	DIII	DII	SMA	SMP	
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	-	1
2.	Penata Tk. I	III/d	-	2	-	-	-	-	2
3.	Penata	III/c	1	4	-	-	-	-	5
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	-	-	-	-	2
5.	Penata Muda	III/a	-	5	-	-	-	-	5
6.	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	2	-	-	-	2
7.	Pengatur	II/c	-	-	3	-	-	-	3
8.	Penatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	1	-	-	1
9.	Honorer	-	-	1	2	-	4	1	8
J u m l a h			**3**	**13**	**7**	**1**	**4**	**1**	**29**

Sumber : Balai LLAJSDP Jambi,Tahun 2014

3) Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan Prasarana Kantor yang dimiliki dan digunakan Balai LLAJSDP Jambi Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2012-2014 berjumlah 189 buah dengan rincian dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel III.11. Daftar Peralatan Kantor BLLAJSDP Jambi

No	Nama Peralatan	Jumlah
1	Note Book	7
2	Printer	6
3	Desktop	3
4	LCD Proyektor	2
5	Kamera Digital	2
6	Mobil Double Kabin	2
7	Desktop	1
8	Printer	2
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3
10	Alat Pengukur Garis Tengah	1
11	Alat Ukur Lainnya	4
12	Rambu-Rambu	5
13	Meja Kerja Kayu	18
14	Kursi Besi/Metal	18
15	Televisi	1

No	Nama Peralatan	Jumlah
16	Dispenser	2
17	Handy Talky	5
18	Alat Komunikasi Lainnya	3
19	Genset	1
20	Kursi Zeis	5
21	Kursi Zeis	1
22	Refrigerator	2
23	Microwave Oven	1
24	Lampu	2
25	Senter	10
26	Jas hujan	10
27	Rompi	10
28	Trafic cone	10
29	Sepeda motor	2
30	Mesin Ketik Listrik	1
31	Lemari besi/metal	10
32	Filing cabinet Besi	10
33	Brandkas	1
34	Papan Visual	2
35	Alat Penghancur Kertas	2
36	Sice	2
37	Meja Rapat	1
38	A.C Split	4
39	Pesawat Telepon	2
40	Facsimile	1
41	Slide Projector	1
42	Lemari obat	4
43	P.C Unit	4
44	Scanerh	1
45	Modem	2
46	Kalkulator	2

2. BLLAJSDP DENPASAR

a. Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana

Seksi jaringan pelayanan dan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 86 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;

   Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah:

   a) Pengumpulan data laporan bulanan Satuan Kerja LLAJ dan LLASDP Provinsi;
   b) Peninjauan lapangan ke pembangunan terminal di Kabupaten Kefamananu Provinsi NTT, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
   c) Peninjauan lapangan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Gunaksa dan Gilimanuk Provinsi Bali, Ketapang Provinsi Jawa

Timur, dan Adonara Provinsi NTT;

d) Peninjauan lapangan fasilitas keselamatan di Provinsi Bali, Jawa Timer dan Nusa Tenggara Barat

Gambar III.8. Kegiatan Pemaparan Penyusunan DED Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

2) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan prasarana lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;

Gambar III.9. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

3) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan prasarana lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;

Gambar III.10. Kegiatan Pengawasan Perbaikan Dermaga I Padang Bai

4) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah

a) Pelaksanaan DED Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional pada 3 (tiga) Provinsi yaitu Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur);
b) Pengumpulan data perlengkapan jalan di 9 (sembilan) provinsi; dan
c) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Gambar III.11. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Gubernur tentang Pemasangan 10.000 PJU dan 8.000 CCTV

5) Melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional;

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah pelaksanaan

Analisis Dampak Lalu Lintas dengan ketua tim dari Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan di 5 (lima) Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur dan Bali.

6) Melaksanakan manajemen kebutuhan lalu lintas di jalan nasional;

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah inventarisasi dan pembahasan usulan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Denpasar mengenai usulan penerapan sistem satu arah, jalur khusus sepeda dan pembatasan angkutan barang di Provinsi Bali.

Gambar III.12. Kegiatan Survey Rute Trayek Trans Sarbagita Koridor 6

7) Melaksanakan perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan di jalan nasional;

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah :

a) Mengikuti pengawasan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
b) Melaksanakan pengumpulan data lokasi potensi kecelakaan pada 9 (sembilan) provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; dan
c) Pengumpulan data dan pemetaan daerah rawan kemacetan lalu lintas di Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten.

Gambar III.13. Kegiatan Intregrated Urban Road Safety Program

Gambar III.14. Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Provinsi Jawa Barat

Gambar III.15. Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Gambar III.16. Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Provinsi Jawa Timur

Gambar III.17. Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar III.18. Rapat Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

8) Pemantauan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor;

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah pelaksanaan monitoring penimbangan kendaraan bermotor di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar III.19. Kegiatan Pemantauan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik

9) Pemantauan penyelenggaraan terminal penumpang type A; dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah monitoring terminal penumpang type A di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar III.20. Kegiatan Pemantauan Terminal Mengwi

10) Pemantauan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah monitoring pelabuhan

sungai, danau dan penyeberangan di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Banten.

Gambar III.21. Kegiatan Pemantauan Pelabuhan Padang Bai

b. Seksi Angkutan dan Teknis Sarana

Seksi Angkutan dan Teknis Sarana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 86 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan jalan antar kota antar provinsi;
2) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan monitoring Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di 6 (enam) provinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3) Melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan pariwisata;
4) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan monitoring Angkutan Pariwisata di Provinsi Bali.
5) Melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan alat berat;
6) Melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan barang beracun dan berbahaya (B3);Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan survey jalur Angkutan Barang Beracun dan Berbahaya di Provinsi Bali.

7) Melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan antar provinsi;
8) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan monitoring Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
9) Melaksanakan pembangunan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
10) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah peninjauan lapangan pekerjaan pembangunan kapal di Galangan Dumas Kapal 750 GT, 300 GT dan 5000 GT serta Galangan Adiluhung 750 GT dan 150 GT.
11) Melaksanakan pemeliharaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sungai, danau dan penyeberangan;
12) Melakukan peningkatan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
13) Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
14) Pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional;
15) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan pemantauan pengujian berkala kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
16) Pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan sungai serta danau;
17) Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan monitoring keselamatan sarana lalu lintas dan angkutan sungai serta danau di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
18) Pemantauan penyelenggaraan pengujian berkala;

    Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah monitoring pengujian berkala di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar III.22. Kegiatan Pemantauan PKB Bali

19) Pemantauan penyelenggaraan industri karoseri; dan

20) Penyidikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah melakukan penegakkan hukum kendaraan orang dan barang di Provinsi Bali.

Gambar III.23. Kegiatan Penegakan Hukum Terpadu

3. BLLAJSDP PALANGKARAYA

a. Monitoring dan pengawasan bidang prasarana LLAJ dan SDP.

1) Prasarana LLAJ:

a) Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari 55 Kabupaten / Kota, yang dilengkapi peralatan uji yang memadai (alat uji>70%) hanya sebanyak 13 Kabupaten / Kota (23,64%), sementara 11 Kabupaten / Kota (20%) peralatan ujinya kurang memadai / lengkap (alat uji 50%-70%), dan 31 Kabupaten / Kota (56,36%) peralatan ujinya tidak memadai / lengkap (alat uji <50%), terdapat 191 orang penguji,

dimana yang telah memiliki kompetensi sebanyak 169 orang penguji, sedangkan kebutuhan sebanyak 255 orang penguji berkompetensi.

Gambar III.24. Foto Pengujian Kendaraan Bermotor

b) Terminal Penumpang Type A

Beberapa gedung terminal dibangun melampaui kondisi demand pelayanan angkutan saat ini, seperti Terminal Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Terminal W.A Gara Kota Palangkaraya, dan Terminal Km. 17 Kabupaten Banjar beberapa terminal kondisi dan lokasinya sudah tidak diminati calon penumpang sehingga tidak ada angkutan antar kota antar propinsi yang masuk-keluar, seperti Terminal Banama Teratai Kabupaten Kapuas, dan Terminal Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala.

Gambar III.25. Foto Terminal Tipe A

c) Penimbangan Kendaraan Bermotor

Kondisi gedung dan peralatan yang dibangun sebagian sudah tidak memadai guna mengawasi kendaraan dan muatan barangnya lokasi UPPKB yang ada periu dievaluasi terkait perubahan pola pergerakan angkutan barang akibat bertumbuhnya jaringan jalan dan daerah-daerah produksi baru SDM yang melaksanakan tugas penimbangan kendaraan bermotor masih kurang memadai, baik jumlah maupun kompetensinya.

Gambar III.26. Foto Penimbangan Kendaraan

d) Perlengkapan Jalan

Hasil studi SID Periengkapan Jalan se-Kalimantan Tahun 2013 menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan fasilitas periengkapan jalan pada Jalan Nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satker Pengembangan LLAJ di setiap propinsi di Kalimantan baru mencapai 39,24% dan total kebutuhan fasilitas periengkapan jalan, dimana kondisi yang terpasang dalam keadaan baik 70,75% dan rusak 29,26%.

2) Prasarana LLASDP:

a) Ketersediaan dan keberfungsian prasarana LLASDP

Di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat 11 sungai yang mempunyai potensi dilayari 8 anjir / kanal / terusan, yang dapat dilayari 110 dermaga sungai yang dioperasikan dengan kontruksi beton, ponton besi, ponton kayu, kayu ulin, maupun kombinasi beton dan kayu ulin pelabuhan penyeberangan.

Di Propinsi Kalimantan Barat terdapat 8 sungai besar utama yang masih sering dilayari , 2 danau yang mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan, 14 dermaga sungai yang dioperasikan dengan kontruksi ponton, kayu, dan beton, 13 pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan dengan jenis movable bridge (MB), ponton, dan operete.

Di Propinsi Kalimantan Selatan terdapat 13 sungai yang dapat dilayari, 9 anjir / kanal / terusan yang dapat dilayari, 1 danau yang telah dimanfaatkan 44 dermaga sungai yang dioperasikan dengan kontruksi kayu dan beton.

Di Propinsi Kalimantan Timur terdapat 16 sungai yang dapat dilayari, 3 danau yang dapat dimanfaatkan, 35 dermaga sungai yang dioperasikan dengan kontruksi kayu dan beton, 2 pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan dengan kontruksi beton.

Di Propinsi Kalimantan Utara terdapat, 24 dermaga sungai yang dioperasikan dengan kontruksi kayu dan beton, 5 pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan dengan kontruksi beton.

b) Progress pembangunan prasarana LLASDP.

Pengembangan transportasi penyeberangan di wilayah Kalimantan khususnya pembangunan prasarana dan lintas pelayanan penyeberangan untuk tahun implementasi 2010 - 2014 berdasarkan KM No.6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan sudah mencapai target dalam konteks perwujudan konsep sabuk.

Pengembangan pelabuhan penyeberangan lanjutan di Pulau Kalimantan untuk tahun lanjutan konstruksi 2014 sebanyak 5 (lima) pelabuhan penyeberangan dengan keterangan sebagai berikut:

(1) Pelabuhan Penyeberangan Ancam di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur sudah selesai dan sudah beroperasi.

(2) Pelabuhan Penyeberangan Ketapang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sudah selesai dan belum beroperasi dikarenakan jalan akses menuju pelabuhan yang belum tersedia.

(3) Pelabuhan Penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah masih dalam proses pembangunan dermaga tahap IX. Beberapa jembatan pada ruas jalan akses menuju pelabuhan masih dalam proses pembangunan.

(4) Pelabuhan Penyeberangan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur masih dalam proses pembangunan dermaga tahap VII.

(5) Pelabuhan Penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan jalan aksesnya sudah selesai dan siap dioperasikan.

Khusus untuk pelabuhan penyeberangan yang telah selesai pembangunannya dan belum diserah-terimakan (seperti Bahaur dan Kumai), belum dialokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan menjaga keamanannya sampai dapat diserahterimakan kepada Pihak Ketiga (pengelola).

b. Monitoring dan pengawasan bidang sarana LLAJ dan SDP.

1) Sarana LLAJ

a) Angkutan Perintis.

Sarana angkutan perintis yang beroperasi di wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh Perum Damri, yaitu sebagai berikut:

(1) Provinsi Kalimantan Selatan

Ada 5 trayek yang beroperasi, terdapat penambahan 1 trayek yang beroperasi yaitu trayek Tanjung - Murung Pudak, armada juga mendapat tambahan 2 bus; realisasi usulan trayek angkutan perintis dan yang beroperasi pada tahun 2013 dan 2014 sesuai SK Dirjen Hubdat adalah 100%.

(2) Provinsi Kalimantan Tengah

Ada 5 trayek yang beroperasi, untuk perubahan ada 4 trayek yang dihapus yaitu trayek Muara Teweh – Datai Nirui, Palangka Raya - Pujon, Palangka Raya – Tumbang Jutuh dan Palangka Raya - Tumbang Samba; ada penambahan 3 trayek baru yaitu Sampit - Hanau, Palangka Raya - Tumbang Telaken dan Palangka Raya -Terminal W.A Gara, armada juga mendapat tambahan 1 bus; realisasi usulan trayek angkutan perintis dan yang beroperasi pada tahun 2013 dan 2014 sesuai SK Dirjen Hubdat adalah 100%.

(3) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Ada 6 trayek yang beroperasi, terdapat penambahan 2 trayek yang beroperasi yaitu trayek Samannda – Bentian dan Samannda - Pengadan, armada juga mendapat tambahan 12 bus; realisasi usulan trayek angkutan perintis dan yang beroperasi pada tahun 2013 dan 2014 sesuai SK Dirjen Hubdat adalah 100%.

(4) Provinsi Kalimantan Barat

Ada 5 trayek yang beroperasi, untuk perubahan ada 1 trayek yang dihapus yaitu trayek Pontianak - Tayan; ada penambahan 3 trayek baru yaitu Pontianak -Pangkalan Bun, Sambas - Aruk dan Bengkayang - Jagoi Babang, armada juga mendapat tambahan 7 bus; realisasi usulan trayek angkutan perintis dan yang beroperasi pada tahun 2014 sesuai SK Dirjen Hubdat yaitu 100%, tetapi pada tahun 2013 yang beroperasi hanya 40% karena gagal lelang yang disebabkan belum tersedianya armada pada operator pelaksana yaitu Damri Stasiun Pontianak.

b) Angkutan Umum Penumpang Komersil.

(1) Angkutan AKAP

Dibandingkan dengan data tahun 2013, angkutan AKAP di: Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan jumlah armada yang beroperasi sebesar 7,9% dan penurunan kapasitas angkutnya sebesar 8,3%; Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan jumlah armada yang beroperasi sebesar 5,7%, tetapi mengalami peningkatan kapasitas angkutnya sebesar 7,3%; Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengalami penurunan jumlah armada yang beroperasi sebesar 12% dan penurunan kapasitas angkutnya sebesar 11,6%, Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan jumlah armada yang beroperasi sebesar 3,4% dan penurunan kapasitas angkutnya sebesar 3,6%.

(2) Angkutan AKDP

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat angkutan AKDP dengan jumlah armada 242 unit dan kapasitas angkut sebesar 3.809 orang, di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdapat angkutan AKDP dengan jumlah armada 1.356 unit dan kapasitas angkut sebesar 51.765 orang.

(3) Angkutan ALBN

Angkutan ALBN melayani 2 trayek, yaitu Pontianak -Kuching dan Pontianak - Bandar Sri Begawan; Trayek Pontianak - Kuching dilayani oleh 3 operator angkutan Indonesia (Perum Damri St. Pontianak, PO. Setia Jiwana Sakti, dan PT. Adau Kapuas) dengan jumlah armada 20 unit, dan 6 operator angkutan Malaysia dengan jumlah armada 20 unit, Trayek Pontianak - Bandar Sri Begawan dilayani oleh 2 operator angkutan Indonesia (Perum Damri St. Pontianak dan PO. Setia Jiwana Sakti) dengan jumlah armada 20 unit, 2 operator angkutan Brunei Darussalam dengan jumlah armada 5 unit, 2 operator angkutan Malaysia dengan jumlah armada 3 unit.

(4) Angkutan AJAP

Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat angkutan AJAP dengan jumlah armada 66 unit dan kapasitas angkut 945 orang, Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat angkutan AJAP dengan jumlah armada 105 unit dan kapasitas angkut 878 orang.

(5) Angkutan Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan terdapat angkutan pariwisata dengan jumlah armada 4 unit dan kapasitas angkut 118 orang, provinsi Kalimantan Timur terdapat angkutan pariwisata dengan jumlah armada 2 unit dan kapasitas angkut 52 orang, provinsi Kalimantan Barat terdapat angkutan pariwisata dengan jumlah armada 30 unit dan kapasitas 670 orang.

c) Angkutan Alat Berat

Angkutan alat berat di Kalimantan berdasarkan data perijinan tidak ada.

d) Angkutan Barang Khusus / B3

Berdasarkan data perijinan:

(1) Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 9 peusahaan;

(2) Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 perusahaan;

(3) Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 39 perusahaan;

(4) Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 1 perusahaan.

2) Sarana LLASDP

Jumlah trayek angkutan sungai di Kalimantan yaitu:

Di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat 51 trayek angkutan sungai yang beroperasi untuk mengangkut penumpang maupun barang; Di Propinsi Kalimantan Barat terdapat 73 trayek angkutan sungai yang beroperasi untuk mengangkut penumpang maupun barang; Di Propinsi Kalimantan Selatan terdapat 27 trayek angkutan sungai yang beroperasi untuk mengangkut penumpang maupun barang; Di Propinsi Kalimantan Timur terdapat 16 trayek angkutan sungai yang saat ini beroperasi.

c. Monitoring dan pengawasan keselamatan transportasi darat.

Hasil monitoring dan pengawasan bidang keselamatan menunjukkan cukup banyaknya daerah-daerah lokasi rawan kecelakaan di beberapa ruas jalan nasional di wilayah Kalimantan, seperti pada:

1) Ruas jalan Palangka Raya - Sampit (6 daerah rawan kecelakaan);
2) Ruas jalan Palangka Raya - Batas Kalsel (6 daerah rawan kecelakaan);
3) Ruas jalan Sp. Takaras - Telaken - Tewah (4 daerah rawan kecelakaan);
4) Ruas Jalan A. Yani (Rantau);
5) Ruas Jalan A. Yani (Martapura);
6) Ruas Jalan Pangeran Samudra (Banjarmasin);
7) Ruas Jalan Lambung Mangkurat (Banjarmasin);

8) Ruas Jalan Marabahan;
9) Ruas Jalan Samarinda - Balikpapan;
10) Ruas Jalan Samarinda - Bontang;
11) Ruas jalan Tayan - Pontianak.

Kecelakaan angkutan yang menonjol terjadi pada tanggal 29 Juli 2014 pukul 19.15 WIB di Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dimana Kapal Getek Berkah Saudara GT.17 yang dioperasikan melayani trayek Desa Panamas - Kapuas mengangkut melebihi kapasitas dan mengalami kebocoran, sehingga mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Kapal tersebut beroperasi tidak dan dermaga yang diawasi petugas Dishub. Dari total 69 penumpang, 17 orang meninggaf dan 52 orang selamat. Kerugian berupa 2 sepeda dan 19 sepeda motor tenggelam.

d. Pelaksanaan Koordinasi / Kerjasama Luar Negeri

1) Koordinasi penyusunan usulan program dan kegiatan TA. 2015.
2) Koordinasi urusan kepegawaian, keuangan dan BMN.
3) Menyelenggarakan Rakor Pengujian Kendaraan Bermotor se- Kalimantan.
4) Menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan LLASDP per propinsi se-Kalimantan, evaluasi pelayanan angkutan perintis DAMRI se-Kalimantan, dan evaluasi asset hasil pembangunan perhubungan darat dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
5) Studi banding penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor ke Jembatan Timbang Serian, Negara Bagian Serawak, Malaysia.
6) Koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemantauan Angkutan Lebaran 2014, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.
7) Koordinasi inventarisasi asset hasil pembangunan Satker PLLAJ dan Satker PLLASDP se-Kalimantan.
8) Mengikuti rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, seperti Rakomis Perhubungan Darat, Rakor PPNS, Rakor Angkutan Jalan, Sosialisasi Kelaikan Sarana Angkutan SDP, Penyusunan Rencana Induk Transportasi Sungai dan Danau, Rakor Kepegawaian, dll.

e. Penyusunan Studi

1) Studi DED Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah.

2) Studi DED Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Selatan.

3) Studi DED Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Timur.

4) Studi Penyusunan Profile dan Kinerja Balai LLAJSDP Palangka Raya.

f. Layanan Perkantoran:

Layanan perkantoran meliputi pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

1) Daftar Kepegawaian Balai LLAJSDP Palangka Raya Tahun 2014

No.	Nama	Jabatan/Status
1	Dadan M Ramdan, ATD, MSI	Kepala Balai LLAJSDP Palangka Raya
2	Utomo Harmawan, ATD., MT.	Kasi Angkutan dan Teknis Sarana
3	Ahmad Rezy Setiawan, ATD, MSi	Pengevaluasi Pelayanan Teknis dan Laik Jalan
4	B. Wahyu Hapsoro, MMTr	Kasubag Tata Usaha
5	Arivianto Utomo. S.SIT.,M.Si.	Kasi Jaringan Pelayanan dan Prasarana
6	Ita Kahayanti	Pengadministrasi Umum
7	Rional Falentino Girot,SE	Pejabat Penandatanganan SPM
8	Rezki Satriya Suherman, SE.	Bendahara Pengeluaran
9	Suprianus, S.T.	Pengawas Teknis Angkutan SDP/CPNS
10	Bagus Ganteng Novianto, S.S.T	Pengawas Alat-alat Berat/CPNS
11	Riswan Butrack, A.Md.LLASD	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan
12	Indro Dwinanto, AM.d	Operator Komputer/CPNS
13	Anggit Pambayun, A.Ma	Pengawas Keselamat Sarana LLAJ/CPNS
14	Imanuel Melki Toto	Magang
15	Andi	Magang
16	Ahmad Sulchi	Magang
17	Isro Febriansyah	Magang
18	Hilman	*Outsourching*
19	Ahmad Solehin	*Outsourching*
20	Andriansyah	*Outsourching*
21	Parna	*Outsourching*
22	Santo	*Outsourching*
23	Brisk	*Outsourching*
24	Ari	*Outsourching*

2) Daftar pejabat dan staf Balai LLAJSDP Palangka Raya yang melaksanakan diklat tahun 2014.

No.	Nama	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan
1	Dadan M Ramdan, ATD, MSI	Kuasa Pengguna Anggaran	3 s.d. 7 Maret 2014
2	B. Wahyu Hapsoro, MMTr	Pembekalan PPK	19 s.d. 23 Mei 2014
		Analisis Jabatan	27 s.d. 31 Oktober 2014
3	Utomo Harmawan, ATD., MT.	Diklat Wajib	3 s.d. 7 November 2014
4	Arivianto Utomo. S.SIT.,M.Si.	Analisi Jalan	13 s.d. 21 November 2014
5	Ahmad Rezy Setiawan, ATD, MSi	Barang dan Jasa	24 s.d. 28 Maret 2014
		Diklat Wajib	13 s.d. 15 Oktober 2015
6	Rional Falentino Girot,SE	-	-
7	Rezki Satriya Suherman, SE.	-	-
8	Riswan Butrack, A.Md.LLASD	Diklat Wajib	24s.d. 31Agustus2014
9	Ita Kahayanti	-	-
10	Bagus Ganteng Novianto, SSiT	Diklat Orientasi	14 s.d 5 Mei 2014
		Diklat Prajabatan	5 s.d. 26 Mei 2014
		Diklat Teknis	30 mei s.d. 11 Juni 2014

No.	Nama	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan
11	Suprianus, ST	Diklat Orientasi	14 s.d. Mei 2014
		Diklat Prajabatan	5 s.d. 26 Mei 2014
		Diklat Teknis	30 mei s.d. 11 Juni 2014
12	Indro Dwinanto, A.Md	Diklat Orientasi	5 s.d. ISMei 2014
		Diklat Prajabatan	5 s.d. 26 Mei 2014
		Diklat Teknis	30 mei s.d. 11 Juni 2014
13	Anggit Pambayun, A.Ma	Diklat Orientasi	14 s.d. Mei 2014
		Diklat Prajabatan	13 Juni s.d. Uuli 2014
		Diklat Teknis	2Julis.d. 14Juli2014

3) Rekapitulasi kegiatan Balai LLAJSDP Palangka Raya tahun 2014

No	Nama Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan
1	Koordinasi Kelembagaan	49
2	Undangan Rapat dan Sosialisasi	57
3	Diklat	20
4	Monitoring	27
5	PDDA	8

4) Rekapitulasi surat masuk dan keluar bulan Januari - Desember tahun 2014

No.	Jenis surat masuk	Jumlah surat
1.	Surat masuk sifatnya umum	151 Surat
2.	Surat masuk undangan	243 Surat
Jumlah surat:		394 Surat

No.	Jenis surat keluar	Jumlah surat
1.	Surat keluar sifatnya undangan,monitoring,rakor	28 Surat
2.	Surat kelauar penyampaian data	16 Surat
3.	Surat keluar permohonan usulan-usulan,pelaporan dan informasi	26 Surat
Jumlah Surat:		70 Surat

4. BLLAJSDP PALU

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 86 Tahun 2011, Sub Bagian Tata Usaha Balai LLAJSDP memiliki Tugas dan fungsi melakukan kegiatan ketatausahaan yang menyangkut :

1) Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan,
2) Melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan,
3) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian,
4) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
5) Melaksanakan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat

Adapun kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoranyang dilaksanakan di Lingkungan Balai Palu, meliputi :

1) Urusan Ketatausahaan

Ditinjau dari aspek administrasi perkantoran, urusan ketatausahaan meliputi kegiatan yang bersifat mencatat, mengagendakan dan mendistribusikan surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran 2014.

Jumlah korespodensi yang dihasilkan terhitung mulai bulan Januari s/d akhir bulan Desember 2014 tercatat sebanyak 341 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Palu dengan rincian data sebagai berikut :

a) Peraturan SK Yang Telah Diterbitkan Sebanyak 12 SK
b) Jumlah Surat Masuk Tercatat Sebanyak 207 Surat
c) Jumlah Surat Keluar Tercatat Sebanyak 290 Surat
d) Rapat Koordinasi Yang Telah Dilakukan Sebanyak 12 Kali Pertemuan
e) Koordinasi langsung dengan beberapa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dilaksanakan pada saat melakukan kunjungan dinas sosialisasi.

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2014 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 di bidang ketatausahaan meliputi :

a) Pencatatan surat masuk dan surat keluar
b) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
c) Penataan dan pemeliharaan arsip;
d) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Balai LLAJSDP Palu;
e) Pemrosesan Sistem Absensi Elektronik Pegawai;

2) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) di Palu merupakam salah satu urusan yang memiliki peranan cukup penting, dimana jalannya organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan bahan-bahan yang disediakan urusan ini termasuk Pengawasan barang–barang Inventaris Kantor.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 di pengelolaan urusan kerumah tanggaan meliputi :

a) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Palu, meliputi : pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;

b) Pencatatan surat masuk dan surat keluar
c) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
d) Penataan dan pemeliharaan arsip;
e) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Balai LLAJSDP Palu;
f) Pemrosesan Sistem Absensi Elektronik Pegawai;
g) Pengadaan keperluan operasional kantor seperti : alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
h) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
i) Pengadaan pakaian kerja satpam;
j) Pengadaan pakaian kerja pramubakti;
k) Pengadaan obat-obatan;
l) Pengadaan barang inventaris kantor seperti : Komputer, Notebook, Scanner, Printer, CCTV, Software Anti Virus, Baterai Kamera, Camera DSLR, Lensa Kamera, Lampu Blitz Kamera, Tripod Video Camera, Camera, Wirelles Portable, Sound System Ruang Rapat, Eksternal Hard disc, Lemari Arsip, LCD Projector, Mesin Faximile/ telepon, Meubelair Kantor, AC Split dan Alat Absensi Pegawai;
m) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4;
n) Perbaikan Barang Inventaris Kantor;
o) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang kantor;
p) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 2 dan Roda 4;
q) Pelayanan urusan dalam lainnya

3) Pengelolaan Urusan Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal Balai LLAJSDP Palu, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2014, terhitung mulai Januari Tahun 2014 s/d Desember 2014, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu (BLLAJSDP Palu) sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang, dan dibantu oleh pegawai honorer sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari Petugas Pramubakti sebanyak 4 (empat) orang, Petugas

Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang serta pegawai magang sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel III.12. Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Balai	1 Orang
2	Kasubag TU	1 Orang
3	Kepala Seksi	2 Orang
4	Pejabat Pelaksana	19 Orang
	Jumlah	**23 Orang**

Sumber : Balai LLAJSDP Palu, 2014

Tabel III.13. Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (Magister)	3 Orang
2	Strata 1	8 Orang
3	Diploma III	8 Orang
4	SMA/SMK	4 Orang
	Jumlah	**23 Orang**

Sumber : Balai LLAJSDP Palu, 2014

Tabel III.14. Data Pegawai Balai LLAJSDP Palu Berdasarkan Golongan

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Gol. IV	1 Orang
2	Gol. III	13 Orang
3	Gol. II	9 Orang
	Jumlah	**23 Orang**

Sumber : Balai LLAJSDP Palu, 2014

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2014 dilakukan penyiapan daftar pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 13 orang pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik dilingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

a) Diklat Kepemimpinan : 1 pegawai
b) Diklat Teknis Fungsional bidang LLAJ : 3 pegawai
c) Diklat Teknis Fungsional bidang LLASDP : 5 pegawai
d) Diklat Teknis Lainnya : 4 pegawai

Beberapa kegiatan yang dilaksanaka dalam rangka pengelolaan urusan kepegawaian pada tahun 2014 secara garis besar meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pelayanan administratif kepegawaian, sarana dan prasarana kerja serta sumberdaya manusia, antara lain :

a) Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum khususnya untuk pegawai di Lingkungan Balai LLAJSDP Palu;

b) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Struktural, Fungsional maupun Diklat Teknis khususnya bidang Transportasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja SDM perhubungan di Lingkungan Balai LLAJSDP Palu;
c) Memproses usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai ke Ditjen Perhubungan Darat;
d) Menyampaikan usulan dalm rangka Pengadaan CPNS Ditjen Perhubungan Darat formasi tahun 2015;
e) Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
f) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Wajib PNS Perhubungan dalam rangka peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
g) Mengusulkan dan Memfasiltasi pengurusan Kartu Taspen, Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);

4) Urusan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2011 menjelaskan tugas dan fungsi dari urusan keuangan adalah :

a) Melaksanakan pelayanan administrasi, proses akuntansi/ verifikasi dan komputerisasi akuntansi Sistem Informasi;
b) Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Balai LLAJSDP Palu; dan melaksanakan.
c) Melaksanakan pelayanan urusan kebendaharaan di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Palu.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 di pengelolaan urusan keuangan meliputi :

a) Melakukan Rapat pembahasan rekonsiliasi keuangan Tri wulan I di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat khususnya Wilayah Kerja Balai LLAJSDP Palu bertempat di Makasar dengan dihadiri oleh + 50 utusan Satuan Kerja dan mendapat bimbingan dan arahan dari Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat. Pelaksanaan rapat pembahasan pada tanggal 28-29 April 2014.
b) Melakukan Rapat pembahasan rekonsiliasi/Konsoliasi Laporan Keuangan Semester I di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat bertempat di Kota Manado dengan dihadiri oleh + 100 utusan Satuan Kerja dan mendapat

bimbingan dan arahan dari Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat.

c) Melakukan Rapat pembahasan rekonsiliasi Barang Milik Negara II di Lingkungan Kementerian Perhubungan bertempat di Jakarta dengan dihadiri oleh + 100 utusan Satuan Kerja dan mendapat bimbingan dan arahan dari Sekretariat Kementerian Perhubungan.

d) Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Pemeriksaan Kas, dilakukan oleh Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Palu, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan s/dketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 di pengelolaan urusan keuangan meliputi :

a) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2014 yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2014.

b) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2014;

c) Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Balai LLAJSDP Palu tahun 2014.

d) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Balai LLAJSDP Palu Tahun 2014 sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2014, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kinerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

e) Menyusun Laporan Tahunan Balai LLAJSDP Palu dan Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) yang merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Balai

LLAJSDP Palu, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Di Lingkungann Balai LLAJSDP Palu.

b. Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana

Program Kerja yang dilaksanakan pada Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana berdasarkan struktur organisasi saat ini meliputi :

1) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana LLAJSDP;
2) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Andalalin dan perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan;
3) Melaksanakan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan terminal penumpang tipe A.
4) Bekerjasama dengan Forum Bersama Lalu Lintas Provinsi Sulawesi Tengah dan stakeholder lainnya melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang berada di Jalan Nasional (Jl. Gajah Mada) yang ada di kota Palu .
5) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Santika Hotel, Makasar, pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2014 dan diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan (Propinsi, Kabupaten/Kota) seperti seluruh Kepala Dinas Perhubungan, para penguji kendaraan bermotor, unsur pembina kepegawaiannya serta para pejabat yang membawahi kepegawaian diseluruh wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu khususnya Pulau Sulawesi.
6) Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi menyelenggarkan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan dan Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan berupa pelaksanaan Fun Bike.

c. Seksi Angkutan dan Teknis Sarana

Program Kerja yang telah dilaksanakan Seksi Angkutan dan Teknis Sarana pada tahun 2014 ini meliputi :

1) Pelaksanaan Monitoring dan Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan di wilayah kerja meliputi Kab. Parimo, Kab. Poso, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Malili, Kota Palopo, Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Enrekang, Kab. Sidrap, Kota Pare-Pare, Kab. Pinrang, Kab. Polman, Kab. Majenne dan Kab. Mamuju, bertujuan memantau langsung dilapangan melalui uji petik terhadap pelayanan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta daerah-daerah rawan/atau berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaan monitoring keselamatan, selain

memantau pelaksanaan arus mudik lebaran tim Monitoring juga mengunjungi lokasi terminal dan pengujian.

2) Pelaksanaan Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2014.

   Pada saat pelaksanaan monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2014 di wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu sebagaimana arahan dan petunjuk dari Panitia Nasional Angkutan Lebaran dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan dengan menitikberatkan di Terminal Daya, Kota Makasar dan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari kerja sebelum, selama dan setelah hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 serta pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi Kota Makasar.

3) Penempelan Stiker Keselamatan Angkutan Lebaran.

4) Pelaksanaan Montoring Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.

   Pada saat pelaksanaan monitoring Angkutan Natal Tahun 2014 dan Tahun Baru di Seluruh wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu sebagaimana arahan dan petunjuk dari Panitia Nasional Angkutan Lebaran dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan dengan menitikberatkan di Terminal Daya, Kota Makasar .

5) Pelaksanaan Pendampingan pada Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha khususnya di wilayah Kerja Balai LLAJSDP Palu yang meliputi seluruh provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi, Kepuluan Maluku dan Pulau Papua.

6) Monitoring di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

C. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (KOPP)

1. KOPP MERAK

a. Sub. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan PM 85 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha
2) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
3) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
4) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
5) Melaksanakan pengelolaan urusan hukum
6) Melaksanakan pengelolaan urusan hubungan masyarakat
7) Melakukan dokumentasi penyusunan evaluasi dan laporan

Pelaksanaan Program kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar selama Tahun 2014, adapun hasilnya tercatat Surat Masuk sebanyak 5.275 buah dan Surat Keluar sebanyak 4.850 buah
2) Menyusun konsep surat atau nota dinas urusan kepegawaian (usulan Kenaikan Pangkat, Diklat, Kenaikan Gaji Berkala, Ujian Dinas / Penyesuaian Ijazah, KARPEG, ASKES, KARIS / KARSU,Cuti, DP3, pensiun, dll)
3) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai
4) Menyusun Daftar Nominatif pegawai dengan menghasilkan rekapitulasi sebagai berikut :
   a) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Golongan Tahun 2014

Tabel III.15. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Golongan Tahun 2014

IV	III	II	TOTAL
1	13	6	20

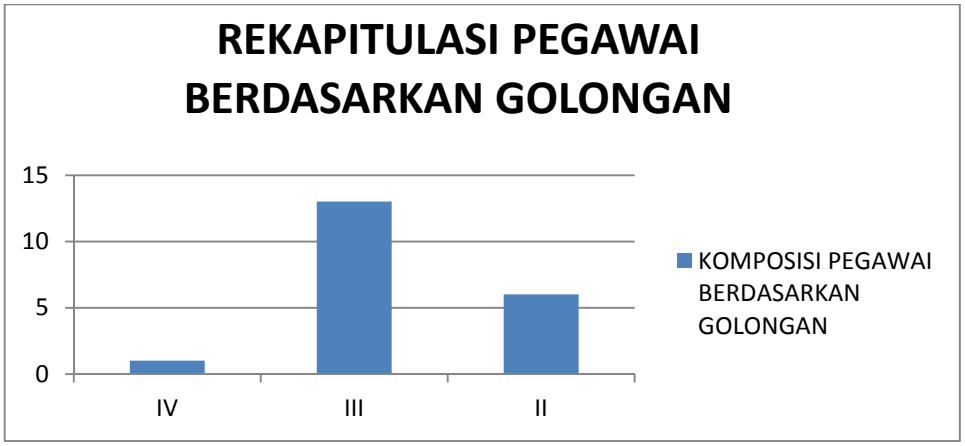

Gambar III.27. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

   b) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Status Keluarga Tahun 2014.

Tabel III.16. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Status Keluarga Tahun 2014

Kawin	Belum Kawin	TOTAL
13	7	20

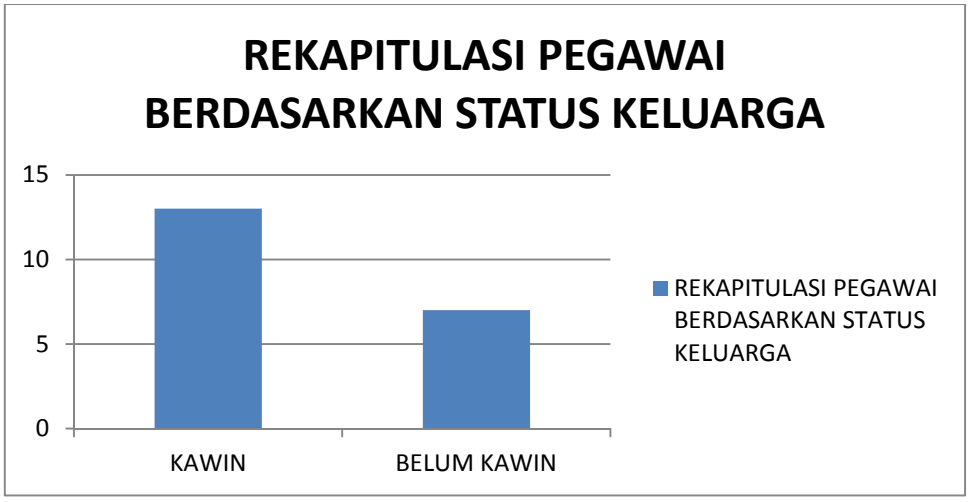

Gambar III.28. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Status Keluarga

c) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

Tabel III.17. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

S-2	S-1	Diploma 4	Diploma 3	Diploma 2	Diploma 1	SMA	SMP	SD	TOTAL
3	8	2	6	0	0	1	0	0	20

Gambar III.29. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

d) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2014.

Tabel III.18. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

Laki-laki	Perempuan	TOTAL
16	4	20

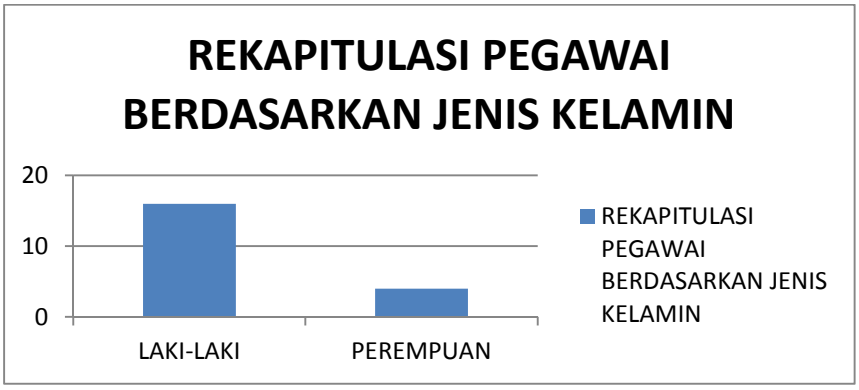

Gambar III.30. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

e) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Latihan jabatan Tahun 2014.

Tabel III.19. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Latihan Jabatan Tahun 2014

PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	Belum mengikuti	TOTAL
0	0	1	3	16	20

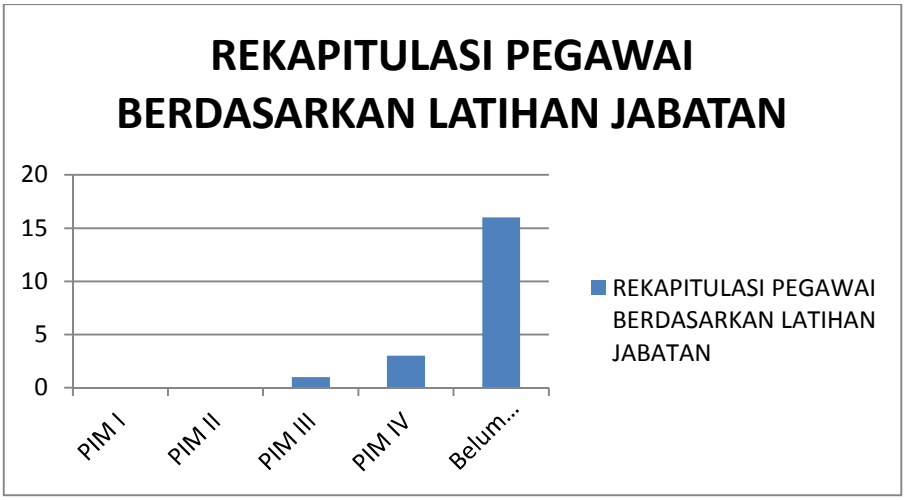

Gambar III.31. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Latihan Jabatan

f) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Agama Tahun 2014.

Tabel III.20. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Agama Tahun 2014

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	TOTAL
19	1	0	0	20

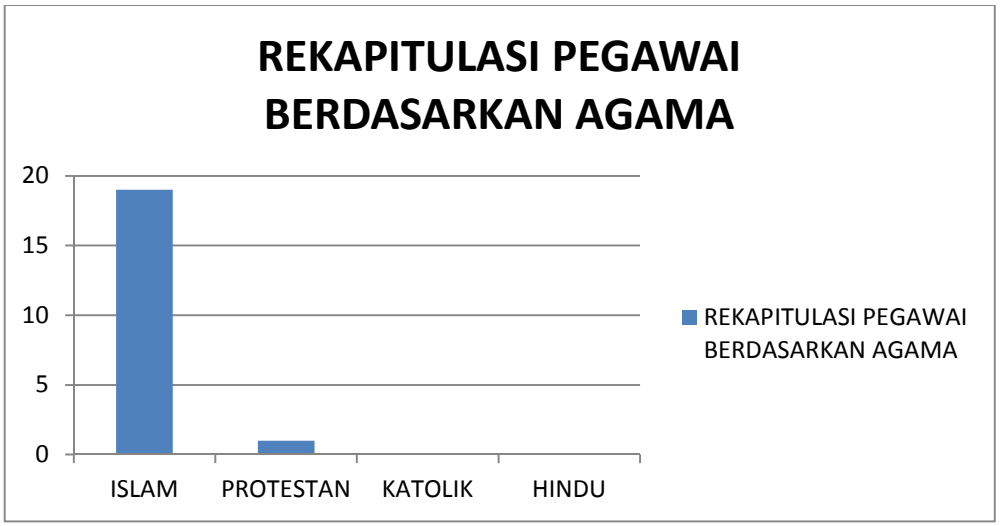

Gambar III.32. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Agama

g) Rekapitulasi Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berdasarkan Eselon Tahun 2014.

Tabel III.21. Rekapitulasi Pegawai Kantor OPP Merak Berdasarkan Eselon Tahun 2014

IIA	IIIA	IVA	Non Eselon	TOTAL
0	1	3	16	20

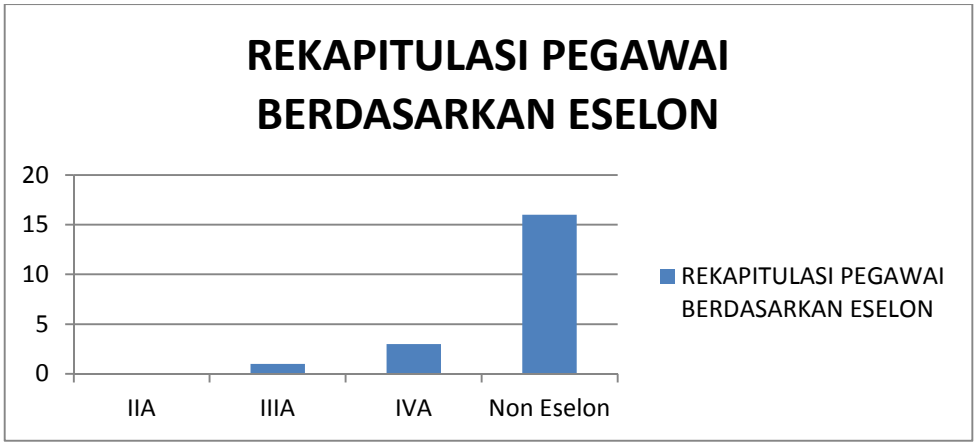

Gambar III.33. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon

5) Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan formasi pegawai
6) Melakukan analisis dan evaluasi beban kerja pegawai
7) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulannya dengan tuuan untuk dapat mengevaluasi Kinerja Pegawai Kantor OPP Merak

8) Menyiapkan berkas / data untuk pengusulan pengangkatan pegawai, Kenaikan Pangkat (KP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan pensiun pegawai
9) Menyiapkan daftar hadir pegawai dan membuat rekap kehadiran pegawai

Kegiatan-kegiatan Strategis Sub Bagian Tata Usaha Kantor OPP Merak yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah :

1) Rapat mengenai penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai , Kontrak Kerja Jabatan Fungsional dan implementasi Kontrak Kerja dengan membuat buku Harian Kerja Pegawai.
2) Rapat mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan perubahan Peta Jabatan dan uraian tugas dalam jabatan.
3) Jumlah Surat Masuk tercatat sampai dengan Desember 2014 = 5.275 buah
4) Jumlah Surat Keluar tercatat sampai dengan Desember 2014 = 4.850 buah

b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan PM 85 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1) Menginventarisasi peraturan di bidang penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
2) Menyiapkan data dan informasi lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasiitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
3) Menyiapkan bahan usulan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan menahan gelombang;
4) Menyiapkan bahan usulan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr dan sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
5) Menyiapkan bahan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran;
6) Menyiapkan bahan usulan reklamasi serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di DLKr;

7) Menyiapkan bahan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;

Pelaksanaan Program kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Merak Tahun 2015;
2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk tahun 2015.
3) Penyusunan Profil dan Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak;
4) Melakukan Pengumpulan data dan informasi tentang fasilitas dan kinerja pelabuhan penyeberangan di Wilayah Kerja Kantor OPP Merak yang tersusun kedalam sebuah buku laporan.
5) Penyusunan Bahan Koordinasi Pembangunan Dermaga VI Merak dan Bakauheni;
6) Menyiapkan Bahan hasil koordinasi dengan satker pengembangan transportasi SDP perihal pekerjaan pembangunan Dermaga VI Merak Tahap III di Wilayah Pelabuhan Merak.
7) Penyusunan Laporan Hasil Analisa dan Evaluasi Data Traffic Counting dari Hasil Pemantauan Program PMMC (Port Merak Manajemen Center)
8) Melakukan Pemantauan dan Analisa , Evaluasi berdasarkan data hasil pengamatan didalam aplikasi PMMC yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Bulanan Traffic Counting

Kegiatan-kegiatan Strategis Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kantor OPP Merak yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah :

1) Penyusunan Studi dan Kebijakan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
   a) RIP Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur Dan Tanjung Uban.
   b) Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Pelabuhan Merak .
   c) Analisa Dampak Lalu Lintas Akibat Beroperasinya Dermaga VI Merak-Bakauheni .
   d) Perencanaan Teknis Sistem Boarding Pada Pelabuhan Merak.
   e) Audit Teknis Struktur Dermaga IV Pelabuhan Merak Bakauheni.
   f) Audit Teknis Struktur Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Muntok.
   g) Studi Manajemen Operasional Pasca Pengoperasian Lintas Tj. Api-api - Tj. Kalian (Muntok).

h) Perencanaan Teknis Sitem Teknologi Informasi Di Lingkungan Kerja Opp Merak.

2) Pengadaan Barang yang terdiri dari :

a) Pengadaan 7 (Tujuh) Unit Komputer.

b) Pengadaan Interior Perkantoran.

c) Pengadaan 3 (Tiga) Unit Ac.

d) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4.

e) Pengadaan 1 (Satu) Unit Alat Penghancur Kertas.

f) Pengadaan 1(Satu) Paket Minor Civil Work.

g) Pengadaan 2 (Dua) Paket Finger Print.

h) Pengadaan Peralatan Penunjang Angkutan Lebaran.

i) Pengadaan 1 (Satu) Set Sofa.

j) Pengadaan 10 (Sepuluh) Unit Meja/Kursi Staff.

k) Pengadaan 5 (Lima) Unit Hard Dist 1 Tera.

l) Pengadaan 7 (Tujuh) Unit Printer.

m) Pengadaan 1 (Unit) Scanner.

n) Pengadaan 1 (Satu) Unit White Board.

o) Pengadaan 3 (Tiga) Unit Notebook.

p) Pengadaan Peralatan Safety Petugas Lapangan.

q) Pengadaan Digitalisasi Arsip 1(Satu) Paket.

r) Pengadaan 4 (Empat) Unit Lemari Arsip.

s) Pengadaan 4 (Empat) Filling Kabinet.

t) Pengadaan 6 (Enam) Unit Kendaraan Roda 2.

u) Pengadaan Alkom Tahap II.

v) Pengadaan 1 (Satu) Unit Genset Termasuk Instalasi.

w) Pengadaan Tracking System Tahap II.

x) Pengadaan Port Merak Managemen Center.

y) Pengadaan Sistem Informasi Sebagai Alat Pengawas.

z) Pengadaan Peralatan Penunjang Angkutan Lebaran.

aa) Pemeliharaan Gedung Kantor.

bb) Penyusunan Profil Opp Merak.

cc) Pekerjaan Pemeliharaan VMS.

dd) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Komunikasi SSB.

ee) Pekerjaan Survey Pemasangan SBNP.

c. Seksi Operasi

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan PM 85 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengaturan, pengendalian, danpengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutanpenyeberangan;
2) Melaksanakan pengusulan dan pemantauan tariff angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
3) Melaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
4) Melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitasdan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
5) Melaksanakan penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian hidup di lingkungan pelabuhan penyeberangan;
6) Melaksanakan penjadwalan keberangkatan dankedatangan kapal penyeberangan;
7) Melaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang sertajadwal docking kapal penyeberangan

Pelaksanaan Program kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan.
2) Dalan Rangka untuk meningkatkan Kinerja Angkutan Penyeberangan maka dilakukan Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan Angkutan Penyeberangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan selama per Minggu, Bulanan, serta Tahunan.
3) Monitoring Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan MerakTahun 2014.
4) Melakukan Monitoring Pelabuhan Penyeberangan yang termasuk kedalam Wilayah Kerja Kantor OPP Merak yaitu : Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Muntok, dan Pelabuhan Penyeberangan Batam.
5) Koordinasi dengan Para mitra Kerja Kantor OPP Merak.

6) Melakukan koordinasi dengan mitra kerja Kantor OPP Merak di Wilayah Kerja Kantor OPP Merak seperti PT. ASDP Indonesia Ferry, dan Perusahaan Pelayaran yang termasuk bagian didalam Wilayah Kerja Kantor OPP .
7) Angkutan Lebaran Tahun 2014.
8) Melakukan Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Tahun 2014 yang tersebar di seluruh Wlayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak.
9) Angkutan Natal Tahun 2014 dan Tahun Baru 2015.
10) Melakukan Penyelenggaraan Posko Angkutan Natal Tahun 2014 dan Tahun Baru 2015 yang tersebar di seluruh Wlayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Kegiatan-kegiatan Strategis Seksi Operasi Kantor OPP Merak yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah :

1) Rapat Evaluasi Kinerja dan Kesiapan Kapal di Lintas Merak – Bakau.
2) Rapat Evaluasi Waktu Pelayanan dan Evaluasi Kinerja Pencapaian Trip di Lintas Merak – Bakauheni.
3) Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran dan Evaluasi Penjadwalan Lintas Tj. Api-Api – Tj. Kalian.
4) Rapat Evaluasi April – Mei 2014.
5) Rapat Koordinasi Keadaan Darurat di Pelabuhan Bakauheni.
6) Rapat Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Lebaran 1435H/2014.
7) Rapat Evaluasi Angkutan Lebaran tahun 2014.
8) Rapat Sosialisasi Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan.
9) Rapat Penyelesaian Perbaikan Dermaga IV Merak.
10) Rapat Rencana Operasi Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.

2. KOPP GILIMANUK

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Pada seksi Perencanaan dan Pembangunan Kantor OPP Gilimanuk yang sudah dilaksanakan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) Studi Dan Kebijakan
   a) Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk.
   b) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja OPP Gilimanuk Thp I .
   c) Kajian Teknis Penyusunan Manajemen Pengelolaan Operasional di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk.

2) Pengadaan Barang

a) Pengadaan Alkom Thp I sebanyak 1 Paket;

b) Pengadaan Komputer (3 unit);

c) Pengadaan Laptop (4 unit);

d) Pengadaan Printer (4 unit);

e) Pengadaan Lemari Arsip (6 unit);

f) Pengadaan Meubelair (22 unit);

g) Pengadaan AC Split (3 unit);

h) Pengadaan Alat Penghancur Kertas (1 unit);

i) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (3 Unit);

j) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (2 unit);

b. Seksi Operasi

Pada Seksi Operasi ada beberapa SK/Peraturan yang sudah diterbitkan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013, guna mengoptimalisasikan kinerja kapal penyeberangan yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk.Berikut SK/Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

3. KOPP LEMBAR

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Bidang perencanaan telah melaksanakan kegiatan Tahun 2014, antara lain :

1) Penyusunan RKA-KL tahun 2014;

2) Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan Lembar dan Padangbai;

3) Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Larantuka dan Rote;

4) Studi Inventaris Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Lingkungan Kerja OPP Lembar Tahap I (Lembar – Padangbai, Bolok –Larantuka – Rote);

5) Studi Analisa Jabatan Kantor OPP Lembar;

6) Koordinasi rencana Pembangunan Dermaga PT.NNT di Labuan Lombok / Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kayangan;

7) Pembahasan Laporan Kemajuan Pekerjaan studi di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar;

8) Penyusunan rencana kegiatan Kantor OPP Lembar T.A. 2014;

b. Seksi Operasi

Pelaksanaan kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menujang pelaksanaan Tugas dan Fungi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar, meliputi:

1) Koordinasi dengan Direktorat LLASDP tentang pelaksanaan Kegiatan Kantor OPP Lembar;
2) Mengikuti Kunjungan Kerja Wakil Menteri Perhubungan dalam rangka "Peninjauan Fasilitas Transportasi Darat, Laut dan Udara".
3) Melaksanakan Monitoring Pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja;
4) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Lebaran Tahun 2014 di Wilayah Kerja Kantor OPP Lembar;
5) Pemeriksaan dan evaluasi kesiapan fasilitas sarana dan prasarana dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2014;
6) Inventarisasi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan Padangbai, Lembar, Bolok, Rote dan Larantuka.
7) Kegiatan pemantauan tarif di pelabuhan penyeberangan Bolok.
8) Pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2014 di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Nusa Tenggara Barat.

4. KOPP PAGIMANA

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Pelaksanaan Program kerja yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Melaksanan penyiapan bahan penyusunan rencana induk, DLKr dan DLKp pelabuhan Penyeberangan.
   - Telah disusun buku hasil study rencana induk pelabuhan penyeberanagn sebanyak 6 paket study dan study audit struktur pelabuhan penyeberangan di wilayah kerja Kantor OPP Pagimana sebanyak 1 paket study,
2) Penyusunan rencana kerja, program dan desain
   - Menyiapkan bahan Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO Tahun 2015
3) Analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran penyeberangan, reklamasi dan jaringan jalan DLKr dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran penyeberangan'
   - Menyusun dan mengevaluasi fasilitas pelabuhan penyeberangan, termasuk prioritas rencana perbaikan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan di 13 wilayah kerja.
4) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam

pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Penyeberangan

- Pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja yg pada tahun 2014 masih dikelola oleh sakker sementara di masing-masing daerah.

5) Penyediaan Lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan

- Mengupayakan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan lahan .

b. Seksi Operasi

Pelaksanaan Program kerja yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Mengkordinasikan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.

- Melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan operasional di 13 pelabuhan di wilayah kerja.

2) Menyiapkan bahan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan

- Menyusun dan mengkoordinasikan bahan usulan kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

3) Menyiapkan bahan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, ketertiban, keselamatan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan.
4) Menyiapkan bahan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan.
5) Menyiapkan bahan penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup pelabuhan penyeberangan.

c. Seksi Tata Usaha

1) Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana

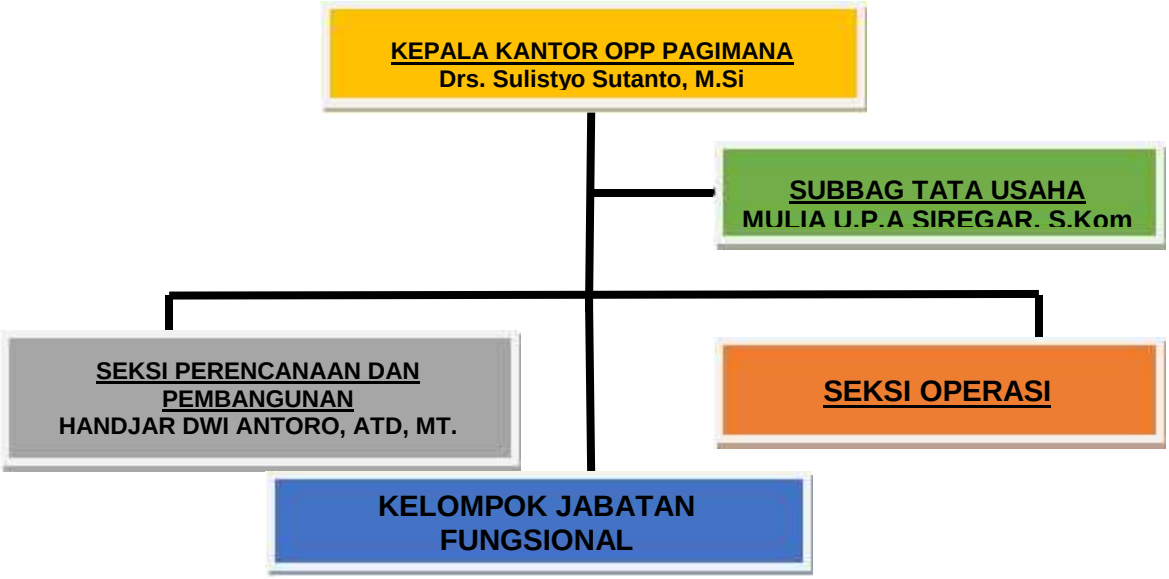

Tabel III.22. Kelompok Jabatan Fungsional

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional
1	Drs. SULISTYO SUTANTO, M. Si NIP. 19620317 198709 1 002	Kepala Kantor
2	HANJAR DWI ANTORO, ATD,MT NIP. 19701124 199403 1006	Kasi Renbang
3	MULIA U.P.A SIREGAR, S.Kom NIP. 19631229 198703 1 001	Kasubag T.U
4	ABDUL SYUKUR SAWALI, MM NIP. 19691204 199203 1 002	Penyusun Bahan Dan Perencanaan Pembangunan
5	AGUS POOE NIP. 19630817 199103 1 017	Bendahara Materil
6	HADRIANUS ROBBY. S NIP. 19691205 199703 1 007	Bendahara Pengeluaran
7	ELIAS MUHAJI NIP. 19630205 200701 1 009	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
8	RUDI HARYONO MANUSU NIP. 19730930 200801 1 010	Pengadministrasi Umum
9	EDY SURYANTO, AMd. LLASDP NIP. 19920816 201402 1 001	Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan
10	ANJAS GUMELAR, AMd. LLASDP NIP. 19930612 201402 N1 001	Pengawas Angkutan Penyebrangan
11	HATA MAMORA, AMd. LLASDP NIP. 19920522 201402 1 004	Pengawas Keamanan Ketertiban Pelabuhan
12	RITA KURNIASARI, AMd. LLASDP NIP. 19910919 201402 2 003	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
13	ELINDA SEPTIANI, AMd. LLASDP NIP. 19910908 201402 2 003	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
14	AZIZ BARUADI, SH NIP. 19690215 200604 1 003	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
15	SONY PADLY PAMOLANGO NIP. 19730228 201001 1 001	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
16	YANUAR EFAN THAMRIN, ST	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan

	NIP. 19840112 200604 1 005	
17	ACHMAD SUDIRMAN NIP. 19581212 197903 1 002	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
18	SUBAIR BAHORIMA, A.Md.MK NIP. 19691018 199803 1 002	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
19	BAHTIAR NIP. 19710403 199703 1 002	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
20	FERRY NANLOHY NIP. 19730403 200701 1 027	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
21	ANDI AZHAR. AP NIP. 19610601 200701 1 008	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
22	ANDI ERLAND NIP. 19770906 200801 1 009	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
23	BASRI NIP. 19851108 200904 1 002	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
24	IRMAN. B NIP. 19721006 200701 1 011	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
25	SYAHRUL, A.Md NIP. 19760603 200701 1 014	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
26	FATMAWATI DIPONEGORO, S.IP NIP. 19581023 197812 2 001	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
27	SUBOWO NIP. 19581112 198302 1 001	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
28	H. SYAMSUL ALAM NIP. 19580818 197902 1 001	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
29	ABDUL DJAHIR M NIP. 19630419 198303 1 002	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
30	SARINAH, A.Md. MI NIP. 19740502 199803 2 002	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
31	KASRUDIN, A.Md NIP. 19770414 200701 1 013	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
32	TAHIR, S.Sos NIP. 19600710 198203 1 003	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
33	ELOK HAPPY. A, S.Sos NIP. 19790325 201101 1 008	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
34	DISANJAYA, A.Md. LLAJ NIP. 19701204 199703 1 011	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
35	ABDUL RAHMAN NIP. 19781220 200501 1 011	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
36	JADID SAMIUN, SH NIP. 19730720 200604 1 006	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
37	NASRUN ARIF NIP. 19770815 200604 1 027	Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Pelabuhan
38	IRWAN, SH NIP. 19730808 200312 1 005	Pengawas Lalu Lintas Dan Angkutan Penyeberangan
39	ARI EKO TULUS KURNIAWAN, ST 19790125 201402 1 001	Penyusun Bahan Perencanaan Dan Pembangunan

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha, 2014

Tabel III.23. Nama – Nama Pegawai Outsourching

No	Nama	Uraian Tugas
1	Indra Kesna	Satpam
2	Risky Pakaya	Satpam
3	M. Fadly Abusama	Satpam
4	U. Hajat Setiawan	Satpam
5	Tony Setiawan	Satpam
6	Angger Irwanto	Satpam
7	Dodi Mulyadi	Driver
8	Julianto	Pramubakti
9	David Fauzi	Driver

10	Helda A. Syamsudin	Petugas Kebersihan
11	Ridwan B.	Petugas Kebersihan
12	Tri Wawan Sugiono	Pramubakti
13	Chardy Nata A. R	Petugas Kebersihan
14	Jaya Putra R.	Pramubakti
15	Sofia Astuti	Petugas Kebersihan
16	Setto Ari Wibowo	Pramubakti
17	Riski Yudistira	Pramubakti
18	Moch. Kescar	Pramubakti
19	Hendricus A. B	Pramubakti
20	Akbar Tanjung	Petugas Kebersihan
21	Moh. Rifat	Pramubakti
22	Servico	Pramubakti
23	Riskin Rivaldi	Jasa Layanan Keahlian Bidang SDP
24	Anton Mulyanto	Jasa Layanan Keahlian Bidang SDP

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha, 2014

Tabel III.24. Jumlah Pegawai KOPP Pagimana

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 2	3	8%
2	Strata 1	9	23%
3	Diploma III	9	23%
4	Diploma I	1	3%
5	SMA	17	44%
Jumlah		**39**	**100%**

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha, 2014

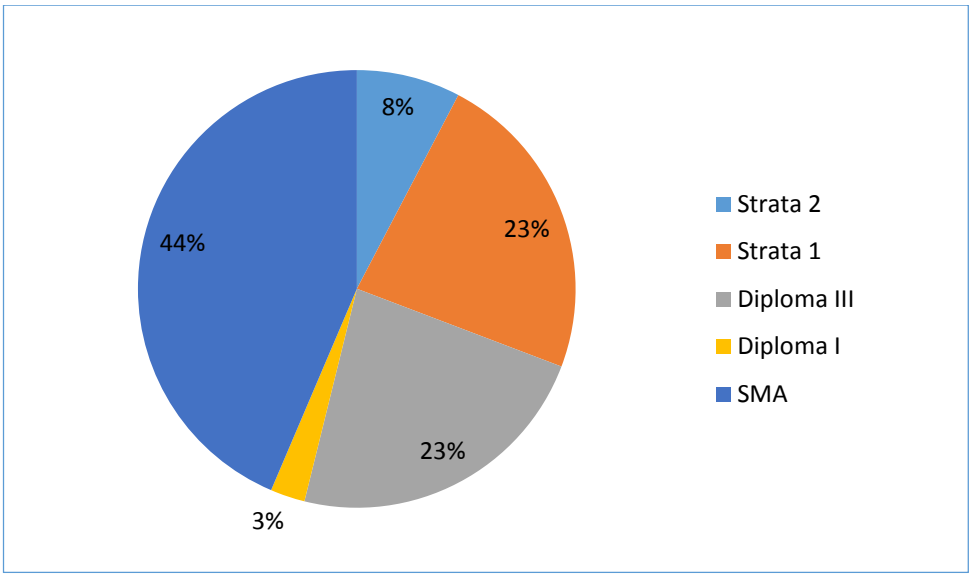

Gambar III.34. Grafik Persentase Jumlah Pegawai KOPP Pagimana

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

D. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN

1. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KARIANGAU

a. Tata Usaha

1) Pengelolaan Anggaran;

Melakukan penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan anggaran UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau TA.2015, melaksanakan kegiatan anggaran tahun 2014 baik untuk belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal, serta melaksanakan penyusunan laporan keuangan.

Tabel III.25. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.547.512.000	1.112.975.916	71,92
Belanja Barang	3.686.054.000	2.898.189.734	78,63
Belanja Modal	607.219.000	589.912.000	97,15
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	**5.840.785.000**	**4.601.077.650**	**78,77**
Pengembalian Belanja		(2.466)	**0**
Belanja Netto	**5.840.785.000**	**4.601.075.184**	**78,77**

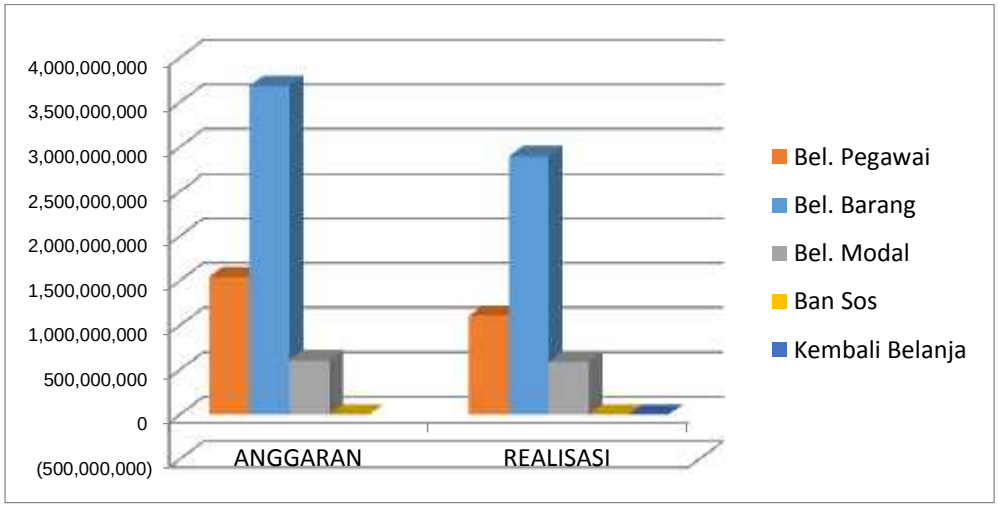

Gambar III.35. Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

2. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN GORONTALO

a. Tata Usaha Dan Kepegawaian

Petugas Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tupoksi melaksanakan tugas ketatausahaan dan kepegawaian di lingkup UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Petugas tata Usaha dan Kepegawaian terdiri dari :

1) Pengadministrasi Umum
2) Bendahara Pengeluaran
3) Bendahara Penerimaan
4) Bendahara Material

b. Fungsional Operasi

Fungsional Operasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan Operasional pelayanan jasa kepelabuhanan dan angkutan penyeberangan di wilayah kerja UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Fungsional Operasi terdiri dari :

1) Petugas Pengadministrasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
2) Petugas Lalu Lintas, Angkutan dan Jasa Kepelabuhanan
3) Petugas Keamanan dan Ketertiban Pelabuhan
4) Petugas Operator Radio Komunikasi

c. Fungsional Perencanaan

Fungsional Perencanaan memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan serta melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kepelabuhanan di wilayah kerja UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Fungsional Perencanaan terdiri dari :

1) Petugas Pengadaan Barang dan Jasa
2) Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan
3) Penilik Fasilitas Kepelabuhanan

3. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KALABAHI

a. UMUM

Secara umum pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat labuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi dalam operasionalnya menggunakan struktur organisasi Klas II dan merupakan home base untuk lintasan pelayaran dari Kalabahi menuju Kupang, Teluk Gurita dan Baranusa hingga Larantuka, Flores Timur.

Pelabuhan penyeberangan termasuk salah satu pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan dan angkutan penyeberangan itu sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Penetapan lintasan angkutan penyeberangan yang merupakan trayek tetap dan teratur dengan mempertimbangkan aspek :

1) Pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan.
2) Fungsi sebagai jembatan.
3) Hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu.

b. OPERASIONAL

Selaku operator pelabuhan penyeberangan dalam kaitan aspek operasional mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan yang diantaranya termasuk :

1) Perencanaan sistem zona
2) Perencanaan jumlah kapal
3) Perencanaan waktu bongkar muat kapal
4) Perencanaan penilikan, pemanfaatan dan perawatan sarana
5) Pelaksanaan program kerja, pengawasan dan evaluasi.

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sebagaimana tersebut bahwa Pelabuhan Penyeberangan mempunyai karakteristik tertentu diantaranya memiliki lintasan regular dan tetap di pola operasi yang menggunakan system Ro/Ro. Berikut lintasan yang dilayani adalah :

Tabel.III.26. Lintasan Yang Dilayani Oleh Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

No.	Lintasan	Status	Jarak (mil)	Frekuensi/Minggu	Kapal yang beropersi
1.	Kalabahi – Kupang	Komersil	126	3	Secara bergantian
2.	Kalabahi – Teluk Gurita – Wetar - Kiser	Perintis	80	2	Pulau Sabu
3.	Kalabahi – Baranusa, Lewoleba, Larantuka	Perintis	190	2	Namparnos

Dalam bahasan ini lebih difokuskan kepada kegiatan angkutan penyeberangan yang diterapkan dalam manajemen angkutan penyeberangan yaitu :

- Pembagian tugas operasional sesuai jadwal
- Perencanaan Zona

Mengingat volume angkutan serta ketersediaan prasarana yang tidak memadai maka dilaksanakan Zona sebagai berikut :

a) Zona A meliputi Pintu Masuk
b) Zona B meliputi Parkir Sepeda Motor dan Mobil termasuk yang menyeberang dan yang melakukan bongkar muat di atas kapal
c) Zona C meliputi parkir kendaraan debarkasi dan pintu keluar

- Jumlah kapal yang beroperasi disesuaikan dengan jumlah lintasan.
- Perencanaan waktu bongkar muat dibuat seefektif mungkin terdapat waktu yang cukup untuk kegiatan embarkasi mengingat sebagian besar barang diletakan di cardeck yang seharusnya untuk kendaraan ikut mempengaruhi kinerja bongkar muat.
- Perencanaan penilikan, pemanfaatan dan perawatan infrastruktur dilakkukan secara efektif termasuk melaporkan keseluruhan kondisi sesuai hasil pengamatan kepada Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi guna dilakukan tindakan seperlunya.
- Pelaksanaan program kerja, pengawasan dan evaluasi senantiasa dilakukan guna mengetahui sejauh mana kondisi sarana pendukung pelabuhan.

c. INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Barang Milik Negara perlu mendapat penanganan mulai dari perencanaan hingga realisasi termasuk didalamnya kegiatan inventaris berupa pencatatan dalam berbagai dokumen inventaris kantor. Berikut Barang Milik Negara yang merupakan aset :

Tabel.III.27. Inventarisasi Barang Milik Negara

No	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	M2	40,550	10.000.000,-	
2	Transporteble Generating Set	Unit	2	28.914.000,-	
3	Transportable Water Pump	Unit	1	250.000,-	
4	Sepeda Motor	Unit	4	74.500.000,-	
5	Kendaraan/Mobil Pengawalan	Unit	1	266.182.250,-	
6	Speed Boat/Motor Tempel	Unit	2	598.175.000,-	
7	Mesin Ketik Manual Standar(14-16 inci)	Buah	1	3.000.000,-	
8	Mesin Hitung Manual	Buah	1	100.000,-	
9	Lemari Kayu	Buah	2	7.000.000,-	
10	Filling Cabinet Besi	Buah	10	26.446.000,-	

No	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
11	Brankas	Buah	1	2.959.000,-	
12	Tabung Pemadam Api	Buah	4	20.000.000,-	
13	Meja Kerja Kayu	Buah	35	37.121.000,-	
14	Kursi Kayu	Buah	13	13.000.000,-	
15	Meja Komputer	Buah	2	782.000,-	
16	Kursi Fiber Glass/Plastik	Buah	200	40.800.000,-	
17	A.C. Window	Buah	1	1.655.000,-	
18	A.C. Split	Buah	4	18.392.000,-	
19	Radio	Buah	1	1.480.000,-	
20	Televisi	Buah	2	7.080.000,-	
21	Stabilisator	Buah	2	2.000.000,-	
22	Professional Sound System	Buah	1	9.900.000,-	
23	Camera Digital	Buah	1	12.000.000,-	
24	Pesawat Telepon	Buah	1	218.000,-	
25	Handy Talky (HT)	Buah	2	518.000,-	
26	Facsimile	Buah	1	5.000.000,-	
27	Telepon Lapangan	Buah	10	5.000.000,-	
28	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Buah	1	3.000.000,-	
29	Kursi Zeis	Buah	1	1.439.000,-	
30	Uninterupted Power System	Buah	2	16.000.000,-	
31	Kursi Gynecology	Buah	8	6.945.000,-	
32	Mesin Potong Jerami	Buah	2	11.000.000,-	
33	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	1	5.000.000,-	
34	Serial Scanner/Printer	Buah	2	9.000.000,-	
35	P.C Unit	Buah	4	27.953.000,-	
36	Laptop	Buah	5	84.525.000,-	
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	5.148.000,-	
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	584.547.000,-	
39	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	3	51.148.000,-	
40	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Unit	1	0,-	
41	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	2	85.010.000,-	
42	Jalan Khusus Lainnya	M2	10.210,-	764.700.000,-	
43	Bangunan Penguat Tebing / Pantai	Unit	2	587.508.000,-	
44	Bangunan Dermaga	Unit	2	7.840.066.000,-	
45	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir air Minum	Unit	1	7.975.000,-	

Barang Milik Negara tersebut senantiasa dilakukan penilikan secara berkala maupun insidentil guna memastikan kondisi efektif terkini yang menunjang kinerja pelayanan. Untuk itu sebagai tindaklanjut dari hal tersebut maka sesuai Surat Keputusan Pembentukan Tim Opname Fisik BMN dan hasilnya berupa rekomendasi penghapusan dan Kuasa Pengguna Barang Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi telah mengusulkan Permohonan Pembentukan Panitia Penghapusan.

d. PEMBANGUNAN

Dalam aspek ini disamping, mobilitas sumber daya manusia, perencanaan yang didalamnya termasuk pelaksanaan dan hingga evaluasi kerja maka aspek pembangunan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun berbagai sarana termasuk revitalisasi sarana prasarana berupa perawatan agar dapat berfungsi optimal.

Pelabuhan Penyeberangan kini memiliki dua dermaga yang satu dengan sistem bongkar muat Movable Bridge dan yang lain berupa plengsengan dengan fasilitas sandar sistem dolphin yang pentahapan telah dilakukan untuk tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.687.818.000,- dan lanjutannya akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya hingga dapat berfungsi secara optimal.

Kegiatan strategis dalam kaitan kepelabuhanan terutama infrastruktur adalah lanjutan pembangunan dermaga plengsengan Kalabahi II dengan tipe plengsengan dolphin yang kelanjutanya telah dilaksanakan dan telah dilanjutkan pada tahun anggaran 2014 hingga dapat berfungsi optimal untuk efektivitas bongkar muat penumpang dan kendaraan.

Melihat keseluruhan kegiatan yang dilakukan diberbagai aspek yang positif dapat meningkatkan kinerja dan keseluruhan infrastruktur dapat diketahui kondisinya secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan pokok dan fungsi dan masih banyak hal yang perlu dibenahi termasuk faktor kendala internal dan eksternal organisasi antara lain belum adanya legalitas hak tanah yang justru merupakan persyaratan untuk pengembangan prasarana penyeberangan.

BAB IV. PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2014

A. ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

1. Pagu Awal DIPA T.A 2014 sebesar **Rp. 3.980.782.443.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

   a. Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	3.964.582.443.000,-
PNBP	: Rp.	2.200.000.000,-
PLN	: Rp.	14.000.000.000,-

   b. Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	53.972.819.000,-
Belanja Barang	: Rp.	2.336.701.901.000,-
Belanja Modal	: Rp.	1.590.107.723.000,-

2. Pagu Revisi DIPA Induk ke-1 T.A 2014 sebesar **Rp. 3.619.419.968.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

   a. Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	3.603.219.968.000,-
PNBP	: Rp.	2.200.000.000,-
PLN	: Rp.	14.000.000.000,-

   b. Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	53.972.819.000,-
Belanja Barang	: Rp.	2.188.492.460.000,-
Belanja Modal	: Rp.	1.376.954.689.000,-

   Pengurangan pagu Revisi DIPA T.A 2014 disebabkan karena adanya pemotongan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

1. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Penyerapan Anggaran T.A 2014 sebesar **Rp. 3.227.729.380.260,-** dengan perincian sebagai berikut:

1) Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	3.226.314.102.290,-
PNBP	: Rp.	1.415.277.970,-
PLN	: Rp.	NIHIL

2) Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	37.195.031.664,-

Belanja Barang : Rp. 1.964.770.406.879,-

Belanja Modal : Rp. 1.225.763.941.717,-

b. Target, Realisasi Penerimaan PNBP T.A 2014

Target penerimaan PNBP T.A 2014 sebesar **Rp. 6.590.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Rp. 1.000.000.000,-
2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Rp. 20.000.000,-
3) UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Rp. 70.000.000,-
4) Balai PLJSKB di Bekasi Rp. 5.500.000.000,-

Realisasi Penerimaan PNBP T.A 2014 sebesar **Rp. 5.511.922.046,-** dengan rincian sebagai berikut:

1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Rp. 1.005.350.417,-
2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Rp. 42.168.800,-
3) UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Rp. 70.583.329,-
4) Balai PLJSKB di Bekasi Rp. 4.393.819.500,-

c. Kegiatan yang tidak Terserap T.A 2013

Total Sisa Anggaran yang tidak terserap pada T.A 2014 yaitu **Rp. 177.500.145.000,-** yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Dana Blokir / Bertanda Bintang Reguler sebesar **Rp. 14.000.145.000,-** yang terdiri dari :
   a) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Loan ADB) karena menunggu Surat Persetujuan dari Kementerian PU — Rp. 14.000.000.000,-
   b) Satker Direktorat LLASDP (Kegiatan Pembayaran Biaya Ops. KMP Bilin& KMP Kerapu III di Lts. Tenggarong Kota – Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kertanegara Thn 2013) merupakan sisa perhitungan pencairan sesuai hasil Audit BPKP — Rp. 145.000.000,-
2) Dana Non Alokasi sebesar **Rp. 3.500.000.000,-** yang terdiri dari :
   a) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur (Kegiatan Pembangunan Terminal tipe A Bangkalan tahap III (termasuk supervisi)) — Rp. 3.500.000.000,-
3) Dana Optimalisasi sebesar **Rp. 160.000.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
   a) Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Rp.

	(Kegiatan Rehabilitasi Terminal Solo tahap IV (termasuk supervisi))	20.000.000.000,-
b)	Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Kegiatan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan Pontianak – Sambas Segmen I, Jalan Pontianak – Sambas Segmen II, Jalan Pontianak – Sambas Segmen III, Jalan Pontianak – Sambas Segmen IV, Jalan Pontianak – Sambas Segmen V (termasuk supervisi)	Rp. 25.000.000.000,-
c)	Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah (Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Lintas Muara Teweh- Puruk Cahu, Asam Baru – Pangkalan Bun, Lamandau – Batas Kalbar, Ampah Muara Teweh)	Rp. 20.000.000.000,-
d)	Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Utara (Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan lintas Jalan Bitung – Likupang Segmen I, Jalan Kaiya – Atinggola I, Jalan Kawasan Strategis Nasional P. Lembeh, Jalan Manado – Bitung segmen I, Jalan Dalam Kota Amurang)	Rp. 25.000.000.000,-
e)	Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat (Kegiatan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan Lintas jalan Nasional Lingkar Bandara Mamuju, Jalan Nasional Dalam Kota Majene, Jalan Nasional Dalam kota Polewali, Jalan Nasional Dalam Kota Pasangkayu	Rp. 20.000.000.000,-
f)	Satker Pengembangan LLASDP Papua Barat (Kegiatan Pemb. Dermaga Penyeb. Folley (P. Misol) tahap II Lintas wahai – Waigama – Folley – Sorong (termasuk supervise) dan Pengadaan & Pemasangan Lampu Penerangan Solar Cell di Dermaga Papua Barat	Rp. 45.000.000.000,-
g)	Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat (kegiatan Penambahan lampu Penerangan area	

Pel. Mamuju)

4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 41.277.607.000,-** yang terdiri dari :

a)	Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Kegiatan Fasilitas Pendukung BRT di Koridor Jakarta depok, Jakarta Bekasi, Sarbagita, Medibangro, Maminasata karena belum ada desain)	Rp. 27.812.500.000,-
b)	Satker Pengembangan LLAJ Riau (Kegiatan Subsidi Perintis Lintas Kota Batam-Kab. Bintan-Kota Tanjung Pinang karena **gagal lelang**)	
c)	Satker Pengembangan LLAJ Bali (Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan karena jumlah SDM pelaksana pengadaan yang bersertifikat kurang memadai)	Rp. 3.000.000.000,-
d)	Kantor Otoritas Pelab. Penyeb. Merak (Kegiatan Pengadaan SBNP di OPP Merak sebanyak 3 unit karena keterlambatan rekomendasi SBNP dari Ditjen Perhubungan Laut yang baru diterima akhir Agustus)	Rp.1 000.000.000,-
e)	Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan (Kegiatan Peningk. Dermaga Sungai di Kuripan Kab. Barito Utara karena gagal lelang)	Rp.5.000. 000.000,-
f)	Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara (Kegiatan Pemb./Pengad Kapal Pembersih Alur Pelayaran Danau Tondano Thp I (MYC) karena gagal lelang)	Rp. 2.000. 000.000,-
g)	Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (kegiatan Dukungan Sail Morotai Tahun 2012 di teluk Daruba Propinsi Maluku)	Rp.1.465.107.000,-

2. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan barang inventaris milik negara, telah dilaksanakan kegiatan Pencatatan Atas Laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Ringkasan Laporan Barang

1) Tanah

Saldo Tanah pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar Rp. **448.516.863.669,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 449.596.863.669,-** mutasi kurang **Rp. 1.080.000.000,-**

2) Peralatan dan Mesin

Saldo BMN berupa Peralatan dan Mesin Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 3.606.286.782.156,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 2.206.948.548.410,-** mutasi tambah **Rp. 1.840.502.322.711,-** dan mutasi kurang **Rp. 441.164.088.965,-**

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 770.465.490.359,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 639.999.208.059,-** mutasi tambah **Rp. 308.013.800.499,-** dan mutasi kurang **Rp. 177.547.518.199,-**

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 2.689.285.899.301,-.** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 1.330.818.603.294,-** mutasi tambah **Rp. 1.676.614.896.358,-** dan mutasi kurang **Rp. 318.147.600.351,-**

5) Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo aset tetap dalam renovasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 395.439.424.907,-.** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 288.328.929.344,-** mutasi tambah **Rp. 117.367.332.755,-** mutasi kurang **Rp. 10.256.837.192,-.**

6) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 34.944.640.249,-.** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 22.232.557.249,-**

.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Disamping konstuksi dalam pengerjaan yang tertuang dalam Laporan BMN pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 **Rp. 3.097.888.180.462,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 3.794.383.258.907,-** mutasi tambah **Rp. 2.744.009.745.673,-** mutasi kurang **Rp. 3.440.504.824.118,-**.

8) Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 606.438.756.993,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 463.587.784.429,-** mutasi tambah **Rp. 153.084.662.264,-** dan mutasi kurang **Rp. 10.233.689.700,-**.

9) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah adalah aset-aset yang sudah dikeluarkan dari pencatatan sebagai aset definitif karena sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah atau sudah diserahkan pengoperasionalnnya kepada pihak lain, dan sedang diproses untuk penghapusan, penetapan status penggunaan dan atau hibah.

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 2.009.354.820.231,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 1.904.808.357.264** mutasi tambah **Rp. 241.425.718.167** dan mutasi kurang **Rp. 136.879.255.200.-**.

10) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2014 adalah senilai **Rp. 1.311.704.983.33o,-** terdiri dari:

a)	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 1.019.032.395.669,-
b)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 79.247.844.734,-
c)	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp. 68.228.358.594,-
d)	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp. 144.314.769.344,-
e)	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp. 455.086.573,-
f)	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dlm Renovasi	Rp. 411.528.416,-
		Rp. 15.000.000,-
g)	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	Rp. 657.536.063.118,-
h)	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	
Jumlah		**Rp. 1.969.241.046.448,-**

11) Persediaan

Saldo persediaan pada Direktoat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2014 sebesar **Rp. 76.065.060.996,-** terjadi kenaikan dari saldo per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 56.397.918.563,-.** Yang terdiri dari:

a)	Barang Konsumsi	Rp.	810.698.996,-
b)	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp.	6.330.404,-
c)	Suku Cadang	Rp.	1.689.000,-
d)	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp.	194.398.000,-
e)	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp.	99.220.000,-
f)	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat	Rp.	-
g)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat	Rp.	8.732.248.000,-
h)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp.	63.548.296.548,-
i)	Bahan Baku	Rp.	8.409.548,-
j)	Persediaan Lainnya	Rp.	2.663.074.500,-
Jumlah		**Rp.**	**76.065.060.996,-**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Neraca per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1. Neraca per 31 Desember 2014

Uraian	Jumlah
Barang Konsumsi	Rp 810.698.996
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 6.330.404
Suku Cadang	Rp 1.689.000
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 194.398.000
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 99.220.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 0
Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 8.732.248.000
Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 63..548.296.548
Bahan Baku	Rp 8.409.548
Persediaan Lainnya	Rp 2.663.074.500
Tanah	Rp 448.516.863.669
Peralatan dan Mesin	Rp 3.606.286.782.156
Gedung dan Bangunan	Rp 770.465.490.359
Jalan dan Jembatan	Rp. 1.658.847.222.849
Irigasi	Rp. 1.013.048.923.739
Jaringan	Rp 17.338.752.713
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 395.439.424.907
Aset Tetap Lainnya	Rp 34.944.640.249
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 3.097.888.180.462
Paten	Rp 23.167.000
Software	Rp 5.655.929.640
Hasil Kajian/Penelitian	Rp 101.830.982.850
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 498.928.677.503
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Rp -
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	Rp 2.009.354.820.231
JUMLAH	**Rp 11.765.397.805.743**

Sumber : Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat – 2014.

b. Satker yang sudah mengusulkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2014 untuk pekerjaan T.A 2013 dan 2014, adalah sebagai berikut :

1) Program LLAJ terdapat 10 Satker yang telah mengusulkan serah terima sebagai berikut :

a) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Pengawasan Operasional dan Keperintisan Angkutan LLAJ

c) Satker Pengembangan LLAJ Riau

d) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat

e) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah

f) Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggaran Barat

g) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur

h) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara

i) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan

j) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat

k) Balai LLAJSDP Jambi

2) Program LLASDP terdapat 24 Satker yang telah mengusulkan serah terima sebagai berikut :

a) Satker Direktorat LLASDP tahun 2013 dan 2014

b) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan

3. Verifikasi dan Akuntansi

a. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, Usulan calon pengelola anggaran dan proses tindak lanjut LHA yang dilakukan oleh instansi/Badan Pemeriksa/Pengawas Keuangan Negara, secara rinci meliputi kegiatan:

1) Meneliti dan mengevaluasi Usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Sub. Sektor Transportasi Darat meliputi: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran;

2) Meneliti dan memverifikasi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit Badan/Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi Kerugian Negara (TGR);

3) Meneliti/memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggahan Banding maupun Surat Pengaduan dari Peserta Lelang/LSM.

b. Pembahasan Usulan Calon Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2015

1) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (SATKER) meliputi:

a) Program LLAJ : 34 Satuan Kerja

b) Program LLASDP : 35 Satuan Kerja

c) Balai / UPT / Kantor Pusat : 13 satuan Kerja

2) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima/pengeluaran UPT meliputi:

a) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

b) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

(1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

(2) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau

(3) Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

(4) Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

(5) Balai LLAJSDP Jambi di Jambi

(6) Balai LLAJSDP Denpasar di Bali

(7) Balai LLAJSDP Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah

(8) Balai LLAJSDP Palu di Provinsi Sulawesi Tengah

(9) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Merak di Provinsi Banten

(10) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Provinsi Bali

(11) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Lembar di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(12) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Provinsi Sulawesi Tengah

c) Laporan Hasil Pemeriksaan

ITJEN

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2014 sebanyak 287 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar **Rp. 2.768.290.926,86** dengan perincian sebagai berikut:

a) Status tuntas sebanyak 69 temuan dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp. 693.878.274,74**

b) Status Proses sebanyak 45 temuan, indikasi kerugian Negara sebesar **Rp. 242.790.527,37**

c) Status sisa sebanyak 173 temuan yang belum di tindak lanjuti dengan indikasi kerugian Negara sebesar **Rp. 1.831.622.124,73**

BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, *vice versa*. Namun demikian, agar pembangungan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya.

A. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

1. Permasalahan

a. Pengembangan Sistem Informasi yang masih bersifat parsial sehingga pembangunan dan penerapan Sistem Informasi masih belum maksimal.

b. Proses serah terima asset yang terlambat.

c. Terdapat duplikasi data dimana outputnya berbeda-beda didalam unit kerja.

d. Terkendalanya proses permintaan data-data dukung pada unit kerja.

2. Upaya Pemecahan

a. Dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi.

b. Perbaikan mekanisme dalam serah terima asset agar keterlambatan dalam serah terima asset dapat diatasi.

c. Dilakukannya verifikasi data agar memiliki data yang valid dan akurat.

d. Dilakukan survey langsung terhadap unit kerja untuk mengetahui kendala dalam penyampaian data dukung.

B. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Permasalahan

a. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan hal ini antara lain disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidak teraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.

b. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.

c. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :

1) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;
2) Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
3) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antarkota antarprovinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
4) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
5) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
   a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
   b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
   c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
   d) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
   e) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
6) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
7) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
   a) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
   b) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan (PP sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 Th 2009);

c) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antarlembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;

d) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelangaran rambau. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

e) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri); sedangkan peran Perum PPD dalam sistem transportasi umum di Jakarta semakin kecil, karena semenjak desentralisasi, transportasi perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

f) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan "road pricing" yang belum tepat sasaran.

g) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

h) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

2. Upaya Pemecahan

a. Mewujudkan Road Map to Zero Overloading dengan melakukan :

1) Penanganan muatan lebih melalui moderinasasi pengelolaan, rehabilitasi dan aplikasi teknologi informasi jembatan timbang;
2) Menertibkan dimensi kendaraan bermuatan di jalan sesuai kebutuhan;
3) Memberdayakan aparat penegak hukum yaitu PPNS baik di terminal, jembatan timbang maupun fasilitas pengawasan yang ada;
4) Meningkatkan koordinasi dengan jasa penegak hukum lainya.

b. Penerapan sistem Quality Licencing (metode ini telah di ujicobakan dalam pemilihan operator angkutan yang memberikan pelayananan angkutan pemadu moda Bandara Soekarno-Hatta serta pemilihan operator Busway).

c. Pembangunan transportasi jalan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost recovery), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

d. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

e. Pembangunan transportasi jalan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.

f. Pembangunan transportasi jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pemba-ngunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development).

g. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market failure).

h. Pembangunan transportasi jalan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional.

i. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

C. DIREKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (LLASDP)

1. Permasalahan yang dihadapi

a. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau.

b. Masih belum tersusunnya data mengenai sarana prasarana transportasi penyeberangan.

c. Keterseidaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik.

d. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal.

e. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.

f. Belum adanya buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

g. Belum tersedianya standar operasional dan prosedur (SOP) untuk kegiatan rutin di Direktorat LLASDP.

2. Upaya yang dilakukan

h. Menyusun data base transportasi sungai di Indonesia.

i. Menyusun sistem informasi monitoring dan pengawasan pelabuhan penyeberangan.

j. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengembangan transportasi SDP.

k. Melakukan koordinasi dengan Sesditjen Perhubungan Darat dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi.

l. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perumusan peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.

m. Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

   1) Perlu dilakukan penyusunan buku petunjuk pelayaran di alur pelayaran sungai.

2) Menyusun SOP di masing-masing subdit guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN (BSTP)

1. Permasalahan yang dihadapi

a. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;

b. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;

c. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;

d. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.

e. Kemacetan lalu lintas;

f. Pelayanan angkutan umum belum memadai;

g. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

2. Upaya yang dilakukan

Dari hambatan-hambatan di atas maka untuk menanggulanginya dilakukan berbagai upaya yaitu :

a. Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan serta permasalahan transportasi yang terjadi pada masing-masing Kota/Kabupaten lebih mendalam dan mensosialisasikan visi dam misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengambangan trasportasi yang lebih baik,

b. Bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah baik pada bidang penyusunan master plan, lalu lintas, angkutan maupun lingkungan;

c. Pembinaan transportasi perkotaan melalui Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

d. Penyusunan Grand Desain/ Master Plan/ Rencana Induk Transportasi Perkotaan, dengan beberapa kota sebagai Kota Percontohan.

e. Penyempurnaan peraturan penrundangan-undangan dibidang transportasi perkotaan.

E. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (KTD)

1. Permasalahan Yang Dihadapi

a. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah meninggal akibat kecelakaan pada tahun sebanyak 20.076 orang .keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan

b. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan.
c. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan.
d. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program – program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

2. Upaya Pemecahan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat antara lain sebagai berikut :

e. Program-program revitalisasi batas kecepatan (speed limits) berikut pemantauan dan penindakan pelanggarannya, upaya penjinakan arus lalu lintas (traffic calming), penggunaan helm pengaman dan sabuk keselamatan, alat-alat penegas keberadaan sepeda motor dan pengendaranya (conspicuity), serta pembuatan/penempatan lajur-lajur khusus sepeda motor disarankan untuk diimplementasikan secara lebih intensif dalam 5 tahun ke depan.
f. Telah ditetapkan Rencana Umum Keselamatan Nasional Keselamatan Angkutan Jalan.
g. Direktorat KTD melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kem. Pekerjaan Umum, Kem. Kesehatan, Kem. Pendidikan Nasional).

F. BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI

BPLJSKB Bekasi mempunyai gambaran tentang hal – hal yang akan dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

a. Seksi Sertifikasi

Beberapa perbaikan yang sedang dilakukan dan perlu dilanjutkan antara lain :

1) Untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi sertifikasi perlu ditingkatkan :
   a) Sistem komputerisasi yang telah dihubungkan secara paralel dan ter-*link* perlu penambahan komputer yang memiliki kapasitas memory / RAM yang lebih besar.
   b) Diperlukan penambahan fasilitas penyimpanan arsip resume hasil uji seperti Printer sebanyak 2 buah, Hard Disk 1 Terra, Scanner dan Perangkat Komputer Data Base berkapasitas besar sehingga mempermudah dalam pencarian dan penemuan arsip.

2) Persiapan pemberlakuan e-resume pengujian tipe terus dimatangkan dan diujicobakan sehingga pelayanan pengujian tipe online dapat segera diwujudkan demi mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3) Perlunya peningkatan kualitas SDM.

b. Seksi Pengujian

Sepanjang Tahun 2014 permasalahan pada Seksi Pengujian yang dialami selama melakukan pelaksanaan tugas pokok, tugas kedinasan maupun tugas penunjang lainnya, meliputi :

1) Selama tahun 2014, masih ditemukan kendaraan yang dibawa ke BPLJSKB untuk dilakukan pengujian tipe tidak sesuai dengan ciri-ciri yang tertulis dalam surat pengantar (baik dari Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Industri) yang diajukan seperti:
   a) Perbedaan Nomor Rangka kendaraan uji.
   b) Perbedaan Nomor Mesin.
2) Beberapa kali juga ditemukan dalam berkas permohonan uji tipe, pemohon tidak melampirkan / tidak mengisi, tidak memberikan informasi yang jelas mengenai data teknis kendaraan (seperti ketentuan yang diatur dalam Keutusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2004) seperti:
   a) Data dimensi kendaraan uji.
   b) Data distribusi berat (berat kosong dan GVW) kendaraan uji pada masing- masing sumbu.
   c) Data kecepatan maksimum Kendaraan Bermotor (Vmax) dan Shifting Point untuk keperluan uji emisi Euro 3 untuk kategori sepeda motor.
   d) Data berbeda antara yang ada pada KM No. 9 Tahun 2004, spesifikasi teknis pabrik, TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan data yang terdapat pada kendaraan uji.
3) Pelaksanaan pengujian tipe sering terhambat karena masih adanya kendaraan uji yang mengalami keterlambatan datang di BPLJSKB.
4) Pelaksanaan pengujian tipe sering terhambat karena sering adanya pemadaman listrik oleh PLN, karena sebagian besar proses uji tipe menggunakan peralatan yang membutuhkan sumber daya listrik.
5) Sampai saat ini pengumpulan nilai untuk kredit point penguji, baru dicatat sebatas jumlah kendaraan yang diuji oleh setiap penguji, sedangkan nilai untuk aktifitas merawat, memperbaiki alat uji belum dapat dilakukan penilaian

secara menyeluruh karena aktifitas tersebut sebagian besar telah dikontrakan kepada pihak ketiga. Demikian pula halnya dengan penilaian terhadap kalibrasi belum dicatat karena perintah pelaksanaan kalibrasi untuk staf Balai PLJSKB merupakan tugas yang diperintahkan oleh Direktorat LLAJ dalam hal ini Subdit SAJ, sehingga pengumpulan angka kredit penguji terhadap pengujian masih relatif kecil mengingat jumlah kendaraan uji setiap tahunnya juga cukup terbatas. Hingga saat ini belum seluruh penguji memiliki kemampuan sebagai tenaga kalibrasi.

Hal-hal yang harus dilakukan dan dihadapi dimasa yang akan datang sebagai bentuk usaha mewujudkan tujuan pengujian tipe Kendaraan Bermotor yang meliputi menjamin keselamatan, mencegah pencemaran lingkungan dan pelayanan publik yang optimal, diantaranya sebagai berikut :

1) Penetapan batas waktu penerimaan kendaraan uji harus lebih jelas dan dituangkan dalam peraturan operasional.
2) Perlu dipertimbangkan untuk mengasuransikan tenaga penguji yang dimiliki oleh Balai PLJSKB sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab atas resiko yang dapat terjadi atas dirinya pada saat bertugas.
3) Dengan berkembangnya teknologi kendaraan uji dan mahalnya harga kendaraan uji, perlu dipertimbangkan untuk mengasuransikan setiap kendaraan yang akan diuji sebagai antisipasi kemungkinan buruk yang dapat terjadi.
4) Perlunya peningkatan komitmen seluruh staf dalam pelaksanaan uji tipe kendaraan, seperti alat uji harus akurat,pelayanan publik harus optimal serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
5) Perlu disediakannya gedung yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6) Dengan akan diberlakukannya sistem SI-IMUT (Sistem Informasi Manajemen Uji Tipe), maka :
   a) Perlu adanya sosialisasi tentang sistem tersebut yang khususnya diikuti oleh pemohon pengujian tipe agar proses pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lancar dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Dibutuhkan fasilitas (perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai) dan tenaga yang terampil dalam memasukkan data hasil uji tipe kendaraan bermotor yang telah selesai dilaksanakan.

7) Sebelum diberlakukannya SI-IMUT, pemohon diharapkan dapat mengirimkan data teknis kendaraan bermotor yang didaftarkan ke pihak Balai PLJSKB melalui email. Selain untuk memperlancar proses uji tipe (terkait penjadwalan), hal ini juga dimaksudkan untuk membiasakan pemohon agar dapat memberikan dan mengisi data teknis yang benar.

c. Seksi Sarana Pengujian

Seksi Sarana Pengujian dalam melaksanakan tugas pokok, tugas – tugas kedinasan maupun tugas penunjang lainnya, tidak terlepas dari permasalahan antara lain yaitu :

1) Peralatan Pengujian terutama Alat Uji Brake Tester dan Axle Load Meter yang ada saat ini mempunyai kapasitas maksimum = 10 ton, sehingga untuk menguji kendaraan dengan kapasitas lebih besar dari 10 ton per sumbunya (Kendaraan angkutan berat), termasuk juga untuk menguji Rem dan Berat dengan jumlah sumbu 2 (dua) atau 3 (tiga) secara serentak belum dapat dilakukan.

2) Peralatan pengujian Emisi Euro 3 untuk :

a) Jenis sepeda motor saat ini belum dilengkapi penunjang teknis seperti :

(1) Penjepit roda untuk ukuran sepeda motor besar sehingga untuk melakukan pengujian Emisi untuk sepeda motor besar belum dapat dilaksanakan.

(2) Ventury pada CVS alat uji emisi UN R40 belum dapat digunakan untuk kapasitas mesin diatas 1300 cc sehingga perlu diadakan backup alat uji emisi sepeda motor untuk kapasitas diatas 1300 cc.

b) Jenis Passenger Car (M1)

(1) Sampai saat ini pengujian masih dilakukan di BTMP dengan melakukan witness, karena beberapa peralatan uji masih belum comply ke dalam regulasi UN.

(2) Untuk tahun 2015 akan diberlakukan ASEAN MRA dan akan dilakukan pengujian untuk standard UN R83 dengan limit standar EURO4.

3) Sebagian besar peralatan uji tipe yang ada di Balai PLJSKB sudah mencapai usianya rata-rata diatas 25 tahun, dimana sistim cabling, sistim mekanik dan sistim elektroniknya sering mengalami kerusakan karena termakan usia tua dan

juga penunjukkan meternya pada umumnya masih menggunakan sistem analog, hal ini berdampak kepada keakurasian hasil data uji maka dengan demikian perlu kiranya adanya peremajaan alat baru yang bisa mengikuti perkembangan teknologi automotif dan regulasi uji tipe yang ada.

4) Peralatan Speedometer Passenger Car yang ada saat ini belum dilengkapi dengan Bogie Roller dimana hal ini sangat diperlukan sekali terutama pada saat menguji speedometer kendaraan yang menggunakan penggerak 4 x 4 maupun penggerak 6 x 4. Sedangkan untuk speedometer truck sudah dilengkapi bogie roller tetapi bogie roller nya belum dapat digunakan karena perlu perbaikan.
5) Gedung dimana pengujian lampu utama dilakukan dinding-dindingnya terbuka sehingga sinar dari luar mempengaruhi terhadap hasil pengujian. Untuk itu supaya pelaksanaan pengukuran lebih efektif perlu dibuatkan dinding penutup/sekat untuk menghalangi sinar yang masuk dari luar.
6) Untuk saat ini personel SDM Sarana Pengujian masih kurangnya pemahaman terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini karena selain kurangnya personel serta masih kurangnya SDM yang berlatang belakang listrik arus lemah, computer dan tingkat sarjana teknis lainnya yang dapat memperbaiki peralatan terlebih pada saat terjadi trouble.
7) Perlunya modernisasi dari peralatan lama agar tetap bisa digunakan secara optimal sambil menunggu peremajaan alat baru yang sesuai dengan teknologi terkini.
8) Dengan bertambahnya peralatan pengujian maka diperlukan restrukturisasi dan penggantian kabel/ panel listrik yang sudah usang ditiap-tiap gedung uji sehingga keamanan kelistrikan terjamin
9) Perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat LLAJ tentang penetapan spesifikasi alat uji tipe yang akan diadakan. Sehingga Diharapkan alat yang akan diadakan dapat dioperasionalkan secara maksimal yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi untuk MRA ASEAN.

Seksi Sarana Pengujian mempunyai gambaran tentang hal-hal yang akan dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1) Dalam rangka memenuhi standard tata letak laboratorium dan Peralatan Pengujian maka perlu kiranya ditata kembali Laboratorium serta Peralatan Pengujian sesuai peruntukkannya misalnya Laboratorium Pengujian khusus

Sepeda Motor, Laboratorium Pengujian Khusus Passenger Car dan Laboratorium pengujian khusus Truck/bus.

2) Pada dasarnya Pengujian Tipe dilakukan dalam 2 (dua) kondisi kegiatan yaitu Pengujian di dalam Gedung (Indoor Test) dan Pengujian di luar gedung (Outdoor Test) dimana untuk kedepan pengujian tipe lebih diarahkan dilakukan diluar gedung (outdoor test), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri dan karakteristik kendaraan bermotor pada medan tiruan.Sesuai perkembangan teknologi salah satunya saat ini banyak kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi dengan ABS dimana untuk melakukan pengujian Brake dilakukan diluar gedung, sehingga dengan demikian Balai PLJSKB sudah waktunya untuk berbenah diri yaitu dengan membangun fasilitas Outdoor test dengan fasilitas Proving ground.
3) Fasilitas pengujian Emisi Euro yang ada saat ini seperti Motor Cycle emission test, Passenger car emission test dan juga heavy duty vehicle emission test belum dilengkapi dengan sistim pengujian SHED TEST walaupun saat ini belum dipersyaratkan didalam Kepmen LH no.04 tahun 2009, namun karena kita akan segera terikat dengan perjanjian sistim keselamatan kendaraan bermotor melalui agreement of WP 29 yang terdiri dari1958 agreement, 1998 global agreement dan 1997 agreement on periodical technical inspections, dimana salah satu dari agreement ini yaitu 1958 agreement segera kita adopsi yang isinya antara lain menerapkan Economic Commission for Europe (ECE) Regulations dan Mutual Recognition of Approvals (MRA). Dengan demikian kita harus melengkapi sistim pengujian UERO dengan fasilitas Sealed Housing For Evaporate Determination (SHED TEST).
4) Perlunya backup alat uji emisi standar UN R40 (limit standar EURO 3 dan WMTC) untuk sepeda motor untuk kapasitas mesin lebih dari 1300cc. Karena alat yang ada sekarang hanya mampu untuk menguji sepeda motor dengan kapasitas maksimal 1300cc sehingga diatas 1300cc tidak dilakukan uji tipe emisi standar UN R40. Selain itu juga untuk persiapan uji sampling seperti amanat PP 55 tahun 2014 serta program Penaatan Baku Mutu Emisi dari Kementrian Lingkungan Hidup sesuai KepmenLH No.4 tahun 2009 yang diselenggarakan tiap tahun.
5) Dengan berkembangnya teknologi dan peralatan pengujian tipe serta perlunya akreditasi untuk laboratorium yang merujuk ke regulasi Internasional, maka tidak mungkin untuk pengelolaan laboratorium uji hanya dibebankan

pada seksi sarana. Kedepannya untuk tiap laboratorium harus dibentuk suatu tim fungsional khusus lab yang mampu untuk melakukan pengelolaan laboratorium secara profesional dan berkesinambungan. Dengan adanya tim yang khusus mengelola lab, diharapkan nantinya personel lebih fokus dan bekerja lebih profesional.

d. Seksi Sarana Pengujian

Seksi Sarana Pengujian dalam melaksanakan tugas pokok, tugas – tugas kedinasan maupun tugas penunjang lainnya, tidak terlepas dari permasalahan antara lain yaitu :

1) Peralatan Pengujian terutama Alat Uji Brake Tester dan Axle Load Meter yang ada saat ini mempunyai kapasitas maksimum = 10 ton, sehingga untuk menguji kendaraan dengan kapasitas lebih besar dari 10 ton per sumbunya (Kendaraan angkutan berat), termasuk juga untuk menguji Rem dan Berat dengan jumlah sumbu 2 (dua) atau 3 (tiga) secara serentak belum dapat dilakukan.
2) Peralatan pengujian Emisi Euro 3 untuk :
   a) Jenis sepeda motor saat ini belum dilengkapi penunjang teknis seperti :
      (1) Penjepit roda untuk ukuran sepeda motor besar sehingga untuk melakukan pengujian Emisi untuk sepeda motor besar belum dapat dilaksanakan.
      (2) Ventury pada CVS alat uji emisi UN R40 belum dapat digunakan untuk kapasitas mesin diatas 1300 cc sehingga perlu diadakan backup alat uji emisi sepeda motor untuk kapasitas diatas 1300 cc.
   b) Jenis Passenger Car (M1)
      (1) Sampai saat ini pengujian masih dilakukan di BTMP dengan melakukan witness, karena beberapa peralatan uji masih belum comply ke dalam regulasi UN.
      (2) Untuk tahun 2015 akan diberlakukan ASEAN MRA dan akan dilakukan pengujian untuk standard UN R83 dengan limit standar EURO4.
3) Sebagian besar peralatan uji tipe yang ada di Balai PLJSKB sudah mencapai usianya rata-rata diatas 25 tahun, dimana sistim cabling, sistim mekanik dan sistim elektroniknya sering mengalami kerusakan karena termakan usia tua dan juga penunjukkan meternya pada umumnya masih menggunakan sistem analog, hal ini berdampak kepada keakurasian hasil data uji maka dengan

demikian perlu kiranya adanya peremajaan alat baru yang bisa mengikuti perkembangan teknologi automotif dan regulasi uji tipe yang ada.

4) Peralatan Speedometer Passenger Car yang ada saat ini belum dilengkapi dengan Bogie Roller dimana hal ini sangat diperlukan sekali terutama pada saat menguji speedometer kendaraan yang menggunakan penggerak 4 x 4 maupun penggerak 6 x 4. Sedangkan untuk speedometer truck sudah dilengkapi bogie roller tetapi bogie roller nya belum dapat digunakan karena perlu perbaikan.
5) Gedung dimana pengujian lampu utama dilakukan dinding-dindingnya terbuka sehingga sinar dari luar mempengaruhi terhadap hasil pengujian. Untuk itu supaya pelaksanaan pengukuran lebih efektif perlu dibuatkan dinding penutup/sekat untuk menghalangi sinar yang masuk dari luar.
6) Untuk saat ini personel SDM Sarana Pengujian masih kurangnya pemahaman terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini karena selain kurangnya personel serta masih kurangnya SDM yang berlatang belakang listrik arus lemah, computer dan tingkat sarjana teknis lainnya yang dapat memperbaiki peralatan terlebih pada saat terjadi trouble.
7) Perlunya modernisasi dari peralatan lama agar tetap bisa digunakan secara optimal sambil menunggu peremajaan alat baru yang sesuai dengan teknologi terkini.
8) Dengan bertambahnya peralatan pengujian maka diperlukan restrukturisasi dan penggantian kabel/ panel listrik yang sudah usang ditiap-tiap gedung uji sehingga keamanan kelistrikan terjamin
9) Perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat LLAJ tentang penetapan spesifikasi alat uji tipe yang akan diadakan. Sehingga Diharapkan alat yang akan diadakan dapat dioperasionalkan secara maksimal yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi untuk MRA ASEAN.

Seksi Sarana Pengujian mempunyai gambaran tentang hal-hal yang akan dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1) Dalam rangka memenuhi standard tata letak laboratorium dan Peralatan Pengujian maka perlu kiranya ditata kembali Laboratorium serta Peralatan Pengujian sesuai peruntukkannya misalnya Laboratorium Pengujian khusus Sepeda Motor, Laboratorium Pengujian Khusus Passenger Car dan Laboratorium pengujian khusus Truck/bus.

2) Pada dasarnya Pengujian Tipe dilakukan dalam 2 (dua) kondisi kegiatan yaitu Pengujian di dalam Gedung (*Indoor Test*) dan Pengujian di luar gedung (*Outdoor Test*) dimana untuk kedepan pengujian tipe lebih diarahkan dilakukan diluar gedung (*outdoor test*), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri dan karakteristik kendaraan bermotor pada medan tiruan.Sesuai perkembangan teknologi salah satunya saat ini banyak kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi dengan ABS dimana untuk melakukan pengujian Brake dilakukan diluar gedung, sehingga dengan demikian Balai PLJSKB sudah waktunya untuk berbenah diri yaitu dengan membangun fasilitas Outdoor test dengan fasilitas Proving ground.
3) Fasilitas pengujian Emisi Euro yang ada saat ini seperti Motor Cycle emission test, Passenger car emission test dan juga heavy duty vehicle emission test belum dilengkapi dengan sistim pengujian SHED TEST walaupun saat ini belum dipersyaratkan didalam Kepmen LH no.04 tahun 2009, namun karena kita akan segera terikat dengan perjanjian sistim keselamatan kendaraan bermotor melalui agreement of WP 29 yang terdiri dari *1958 agreement, 1998 global agreement dan 1997 agreement on periodical technical inspections*, dimana salah satu dari agreement ini yaitu *1958 agreement* segera kita adopsi yang isinya antara lain menerapkan *Economic Commission for Europe* (*ECE*) *Regulations* dan *Mutual Recognition of Approvals* (*MRA*). Dengan demikian kita harus melengkapi sistim pengujian *UERO dengan fasilitas Sealed Housing For Evaporate Determination (SHED TEST*).
4) Perlunya backup alat uji emisi standar UN R40 (limit standar EURO 3 dan WMTC) untuk sepeda motor untuk kapasitas mesin lebih dari 1300cc. Karena alat yang ada sekarang hanya mampu untuk menguji sepeda motor dengan kapasitas maksimal 1300cc sehingga diatas 1300cc tidak dilakukan uji tipe emisi standar UN R40. Selain itu juga untuk persiapan uji sampling seperti amanat PP 55 tahun 2014 serta program Penaatan Baku Mutu Emisi dari Kementrian Lingkungan Hidup sesuai KepmenLH No.4 tahun 2009 yang diselenggarakan tiap tahun.
5) Dengan berkembangnya teknologi dan peralatan pengujian tipe serta perlunya akreditasi untuk laboratorium yang merujuk ke regulasi Internasional, maka tidak mungkin untuk pengelolaan laboratorium uji hanya dibebankan pada seksi sarana. Kedepannya untuk tiap laboratorium harus dibentuk suatu tim fungsional khusus lab yang mampu untuk melakukan pengelolaan

laboratorium secara profesional dan berkesinambungan. Dengan adanya tim yang khusus mengelola lab, diharapkan nantinya personel lebih fokus dan bekerja lebih profesional.

e. Seksi Teknologi Pengujian

Dalam melaksanakan tugas pokok, tugas – tugas kedinasan yang lain maupun tugas – tugas penunjang lainya, ditemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja Seksi Teknologi Pengujian antara lain sebagai berikut :

1) Dalam menentukan ambang batas untuk pengujian sepeda motor dibutuhkan studi / kajian ambang batas pengujian untuk sepeda motor dan rencana harmonisasi global regulasi pengujian tipe kendaraan bermotor serta masukan informasi dari Asossiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik kuantitas dan kualitas pengetahuan, sehingga sulit untuk melihat kedepan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengujian kendaraan bermotor.
3) Peralatan pengujian telah berumur kurang lebih dari 25 tahun, sehingga tingkat akurasinya rendah dan teknologinya sudah mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor.
4) Reassesment Laboratorium pengujian (ISO/IEC 17025) untuk lingkup pengujian emisi kendaraan bermotor, masih dalam proses pembahasan di KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Seksi Teknologi Pengujian mempunyai gambaran tentang hal – hal yang akan dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1) Menuju era globalisasi, harus dilakukan peningkatan fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor secara bertahap dengan berdasarkan harmonisasi global regulasi pengujian tipe kendaraan bermotor, seperti prasarana berupa penambahan fasilitas gedung dan fasilitas pengujian tipe di luar gedung (Outdoor test/proving ground), sarana berupa peningkatan peralatan uji yang akurat dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pengujian tipe kendaraan bermotor.
2) Penambahan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan minimal Strata I otomotif, sehingga sejalan dengan kemampuannya untuk mengikuti kemajuan teknologi dan pengujian tipe kendaraan bermotor.
3) Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak - pihak terkait seperti GAIKINDO, AIKI, BTMP – BPPT, LIPI, AKADEMISI (Perguruan tinggi) serta instansi terkait, sehingga akan menambah pengetahuan dan peningkatan

kualitas SDM dilingkungan Balai PLJSKB dalam mengikuti perkembangan teknologi dan pengujian tipe kendaraan bermotor.

4) Melakukan improvemant tehadap perkembangan teknologi dan pengujian tipe kendaraan bermotor berdasarkan harmonisasi global regulasi pengujian tipe kendaraan bermotor.
5) Melakukan peningkatan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor berbasis IT.
6) Melakukan perluasan lingkup akreditasi laboratorium pengujian berdasarkan ISO/IEC 17025 dengan item pengujian lainnya.
7) Melakukan pengembangan infrastruktur IT dan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor (e – *resume*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor.

G. BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (BLLAJSDP)

1. BLLAJSDP JAMBI

a. Permasalahan

1) Kegiatan

a) Wilayah kerja Balai LLAJSDP Jambi meliputi 139 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi dengan 9 fungsi yang harus dilaksanakan, dimana saat ini melalui kegiatan monitoring Prasarana dan Keselamatan belum semua kabupaten/kota mengikuti kegiatan ini sehingga data yang didapat belum menggambarkan kondisi profil perhubungan bidang darat masing-masing daerah, hal ini dikarenakan tidak ada/cukupnya anggaran perjalanan dinas bagi kabupaten/kota.

b) Target data yang diharapkan masih belum sesuai dengan standar yang telah dirumuskan oleh Balai LLAJSDP Jambi;

c) Formulir dan teknis pelaksanakan monitoring prasarana dan keselamatan harus dikaji ulang;

d) Kegiatan Monitoring Sarana BLLAJSDP Jambi tahun 2014 menemui beberapa kendala diantaranya :

(1) Terbatasnya jam operasional dalam pelaksanaan monitoring yang mengacu pada jam peradilan/hukum sehingga banyak kendaraan yang jadi obyek pemeriksaan tidak berjalan/menunggu sampai dengan selesainya kegiatan monitoring, seperti kendaraan angkutan umum dengan menggunakan plat hitam, AKDP, AKAP, yang kurang dalam surat-suratya tidak dapat terjaring 100%;

(2) Kegiatan hanya bisa dilaksanakan dalam 1 (satu) lokasi kab/kota. Idealnya kegiatan dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) provinsi dengan tujuan agar sasaran yang ditertibkan lebih dapat terakomodir;

e) Pembinaan terhadap kegiatan awak kendaraan umum teladan, pelajar pelopor keselamatan transportasi darat, wahana tata nugraha, penguji teladan belum dapat dilakukan secara optimal dalam kegiatan dimaksud, sehingga perlu suatu kegiatan pembinaan per provinsi.

f) Data otentik berkaitan dengan perusahaan AKAP,Pariwisata,Angkutan Alat Berat dan B3 belum didapat, baik secara inventaris maupun pembinaan secara langsung terutama difokuskan terhadap keselamatan di jalan dan overloading angkutan alat berat yang dikhawatirkan dapat merusak prasarana jembatan

g) Angkutan Sungai dan Danau baik sarana maupun prasarana belum dapat memberikan informasi yang uptudate khususnya dari segi pelayanan di dermaga maupun dari segi angkutannya.

h) Pemantauan kegiatan di lapangan berkaiatan dengan pelaksanaan SPM dan SOP pada terminal penumpang type A, dermaga dan jembatan timbang serta pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2) Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kualifikasi SDM yang tersedia pada Balai LLAJSDP Jambi belum dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tupoksi, saat ini jumlah PNS yang bertugas di Balai baru 21 orang, sedangkan kebutuhan minimal sesuai dengan jumlah 9 provinsi sebanyak 208 pegawai, hal ini sesuai dengan rincian minimum yang tertera dalam Pm no 86 tahun 2011 sebagai berikut :

Tabel V.1. Kebutuhan Pegawai Balai LLAJSDP Jambi Untuk Kegiatan 9 Provinsi

TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
SUBBAG TATA USAHA		
a.Melakukan pengelolaan urusan tata usaha, b.Melakukan pengelolaan rumah tangga, c. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, d.Melakukan pengelolaan urusan keuangan, e.Melakukan pengelolaan urusan hukum, f. Melakukan pengelolaan urusan hubungan masyarakat.	2 2 1 3 2 3	BENDAHARAWAN
SEKSI JARINGAN PELAYANAN DAN PRASARANA		
a.Perencana, Pengevaluasi, Pengawas	9	PPK

TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
b. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Dan Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan, c. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Di Jalan Nasional dan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Manajemen Di Jalan Nasional d. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebutuhan Lalu Lintas, e. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan Dan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Nasional, f. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor, g. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A, h. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.	18 9 9 9 9 9 18 9	BENDAHARAWAN 2 PEGAWAI SETIAP PROVINSI
SEKSI ANGKUTAN DAN TEKNIS SARANA		
a. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Jalan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Pariwisata b. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Beracun Dan Berbahaya (B3), c. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Antar Provinsi, d. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Dan Peningkatan Sarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, e. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Dan Peningkatan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan f. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, g. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Keselamatan Dan Teknis Sarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jalan Nasional h. Melakukan Penyiapan Bahan Pengawasan Keselamatan Dan Teknis Sarana Angkutan Sungai Dan Danau i. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pengujian	9 9 3 9 9 27 3 3 6 3	3 PEGAWAI SETIAP PROVISI (MEMBUTUHKAN ALAT KALIBRASI SEBANYAK 9 SET

TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
Berkala, Industri Karoseri, j. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perundang - Undangan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan k. Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perundang - Undangan Di Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	3	
TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BALAI LLAJSDP JAMBI	208 PEGAWAI	

b. Upaya Pemecahan

1) Untuk melengkapi data yang tidak terakomodir dalam monitoring prasarana dan keselamatan, maka BLLAJSDP mengambil data dari penilaian Wahana Tata Nugraha, pada penilaian WTN tersebut terdapat berbagai informasi mengenai prasarana LLAJSDP dan keselamatan yang ada pada kabupaten/kota;
2) BLLAJSDP akan melibatkan direktorat dalam penyusunan formulir tahun 2015, dan untuk kelanjutan monitoring 2014 sementara menggunakan formulir yang sudah ada;
3) Walaupun dalam pelaksanaan monitoring sarana terbatas dengan jam operasi peradilan, BLLAJSDP tetap mencoba memaksimalkan kegiatan monitoring tersebut dengan disiplin waktu sehingga berharap target terpenuhi;
4) Segala kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balai LLAJSDP yang belum bisa dilaksanakan akan diusulkan pada kegiatan tahun 2015
5) BLLAJSDP Jambi sudah mengusulkan dan mengirimkan pegawai BLLAJSDP Jambi untuk diklat bendahara dan PPK sebagai pemenuhan tuntan tugas pokok dan fungsi Balai

2. BLLAJSDP DENPASAR

a. Permasalahan yang dihadapi

1) Belum tertatanya dengan baik data pembangunan/pemasangan perlengkapan jalan nasional pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2) Terbatasnya biaya pemeliharaan perlengkapan jalan nasional;
3) Kurang seimbangnya alokasi anggaran untuk pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota;
4) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan nasional;
5) Banyaknya ruas jalan nasional yang menjadi Daerah Potensi Kecelakaan dan Daerah Potensi Kemacetan;

6) Belum terjalinnya dengan baik koordinasi antar lembaga Negara dalam perencanaan dan pembangunan/peningkatan jalan nasional;
7) Belum tersedianya data base Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Pariwisata, Angkutan Alat Berat dan Angkutan B3;
8) Minimnya pengawasan terhadap angkutan dan angkutan barang yang melintas di jalan nasional;
9) Kurangnya pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan industry karoseri;
10) Tingginya pelanggaran yang dilakukan angkutan barang dalam hal penimbangan kendaraan pada Unit Pelaksana Penimbngan Kendaraan Bermotor; dan
11) Banyaknya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/kota yang belum dikalibrasi.

b. Upaya yang dilakukan

Dalam menangani permasalahan diatas Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Denpasar telah melakukan upaya antara lain :

1) Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perlengkapan Jalan serta malakukan monitoring perlengkapan jalan ;
2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membantu melaporkan terkait perlengkapan jalan yang rusak;
3) Memprioritaskan pembangunan, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan atau daerah rawan bencana;
4) Mengumpulkan data daerah rawan kecelakaan yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
5) Melakukan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk daerah potensi kecelakaan;
6) Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam hal ini Balai Pelaksana Jalan Nasional mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan;
7) Melakukan inputing dan updating data jenis, jumlah, kondisi dan status angkutan yang beroperasi ;
8) Melaksanakan kegiatan penegakkan hukum untuk angkutan barang yang melintasi jalan nasional;
9) Melaksanakan pemantauan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor pada unit-unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan industry karoseri; dan

10) Pemenuhan pengadaan alat kalibrasi pengujian kendaraan bermotor.

3. BLLAJSDP PALANGKARAYA

a. Permasalahan Yang Dihadapi Balai LLAJSDP Palangka Raya

1) Permasalahan dibidang Sarana

a) Permasalahan dibidang Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) adalah masih belum adanya kegiatan ASDP yang dapat dilakukan oleh Balai LLAJSDP Palangka Raya dikarenakan pada DIPA kegiatan yang menjadi acuan Balai LLAJSDP Palangka Raya belum muncul secara spesifik yang memuat kegiatan LLASDP di wilayah Kalimantan.

b) Permasalahan dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah kalibrasi pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan dikarenakan sampai dengan tahun 2014 Balai LLAJSDP Palangka Raya belum memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Ditjen Hubdat. Demikian pula dengan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk dapat melakukan kalibrasi.

2) Permasalahan dibidang Prasarana adalah DED dan MRLL jalan yang baru dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi wilayah Kalimantan yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim.

3) Permasalahan dibidang Tata Usaha

a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang mempunyai kompetensi di bidang LLASDP dan bidang LLASDP serta bidang umum.

b) Kantor Balai LLAJSDP Palangka Raya sampai saat ini masih menggunakan kantor sewa pada pihak lain yang setiap tahun anggaran baru akan diperpanjang. Dengan tanggung jawab yang diamanatkan dalam PM 86 Tahun 2011 begitu besar, terjadi ketidak sesuaian antara status dan luas kantor Balai yang ada dengan cakupan wilayah kerja yang luas (se-Kalimantan).

b. Pemecahan / langkah-langkah yang diambil

1) Permasalahan dibidang Sarana

a) Dengan jalan mengusulkan kegiatan LLASDP pada DIPA Balai LLAJSDP Palangka Raya tahun yang akan datang, berikut melakukan koordinasi dengan Direktorat LL ASDP Ditjen Hubdat agar kegiatan yang sudah dapat dikerjakan oleh Balai LLAJSDP Palangka Raya dapat dilaksanakan oleh Balai LLAJSDP Palangka Raya.

b) Pada tahun anggaran 2015 Balai LLAJSDP Palangka Raya sudah mengusulkan untuk pengadaan alat kalibrasi PKB dan anggaran

pelaksanaan kalibrasi di wilayah Kalimantan, adapun untuk SDM yang belum tersedia, kami mengusulkan diadakan pelatihan atau memohon agar Staf pada Subdit Direktorat LLAJ yang telah tersertifikasi dapat melakukan pendataan kalibrasi peralatan PKB bersama-sama dengan tim dari Balai LLAJSDP Palangka Raya.

2) Permasalahan di bidang Prasarana

Dikarenakan untuk TA. 2015 tidak tercantum pelaksanaan kegiatan DED MRLL di 2 (dua) wilayah Kalimantan (Kaltara & Kalbar) , maka Balai LLAJSDP Palangka Raya akan mengusulkan kembali kegiatan DED MRLL pada TA. 2016.

3) Permasalahan di bidang Tata Usaha

a) Balai LLAJSDP Palangka Raya menerima tenaga Job Training yang berasal dari lulusan sekolah kedinasan Kemenhub yang secara kompetensi sudah memenuhi persyaratan, selain itu Balai LLAJSDP Palangka Raya sudah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk menawarkan mutasi bagi PNS yang memiliki kompetensi atau kinerja baik. Disamping itu Balai LLAJSDP Palangka Raya juga memohon agar penerimaan CPNS Ditjen Hubdat dapat diprioritaskan untuk kebutuhan PNS di Balai LLAJSDP Palangka Raya.

b) Balai LLAJSDP Palangka Raya sudah melakukan penganggaran biaya pembelian tanah pada TA. 2015 dan sudah melaksanakan appraisal tanah pada TA. 2014, Selanjutnya mengusulkan pembangunan gedung kantor Balai LLAJSDP Palangka Raya pada TA. 2016.

4. BLLAJSDP PALU

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai LLAJSDP Palu dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, antara lain :

1) Belum Tersedianyan Fasilitas Gedung/Kantor

Sampai dengan saat ini, Balai LLAJSDP Palu belum memiliki fasilitas gedung/kantor yang representative atau dengan kata lain fasilitas dimaksud masih berstatus sewa dengan bentuk rumah tinggal dengan kondisi system kelistrikan yang tidak stabil (naik turun) sehingga pelaksanaan pekerjaan sehari-hari tidak optimal.

2) Ketersediaan Fasilitas Peralatan Pendukung yang Minim

Dalam rangka pelaksanaan tugas danfungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 tenatang Organiasi dan Tata Kerja Balai LLAJSDP, minimnya ketersediaan peralatan pendukung seperti

peralatan survai, peralatan monitoring dan fasilitas lainnya dirasakan sangat mengganggu. Jarang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai LLAJSDP tidak dapat dilaksanakan.

3) Ketersediaan Fasilitas Kendaraan Operasional yang masih minim

   Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional pada saat ini di Kantor Balai LLAJSDP Palu memiliki 4 (Empat) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 4 (Empat) unit, yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas operasional, ditambah dengan keberadaan 1 (Satu) unit kendaraan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Keliling dan 1 (satu) unit Kendaraan Operasional Keselamatan Transortasi Darat.

   Namun demikian, dalam upaya melakukan monitoring dan pengawasan wilayah kerja yang harus diawasi, Balai LLAJSDP Palu tidak memiliki kendaraan bermotor operasional dalam rangka untuk pengawasan dan monitoring pelakasanaan tugas sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai LLAJSDP.

4) Sumber Daya Manusia

   Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi, Balai LLAJSDP Palu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan Kemampuan baik dibidang LLAJ maupun LLASDP terlebih dengan luasnya cakupan atau wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Balai LLAJSDP Palu.

   Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi saat ini, Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Balai LLAJSDP Palu masih terbatas dan lambatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi sebagaimana yang diharapkan akan mempengaruhi lambatnya proses pekerjaan. Masih banyak **pelaksanaan** pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala **Balai** dan pejabat structural lainnya, sedangkan pelaksana kegiataan yang membutuhkan jumlah personil yang cukup besar dan harus memiliki kualifikasi tertentu belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pejabat/pegawai Balai LLAJSDP Palu. Beberapa kualifikasi pegawai yang dibutuhkan diantaranya, adalah :

   a) Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
   b) Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
   c) Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
   d) Tenaga Personil sebagai Arsiparis

e) Tenaga Personil sebagai Teknisi
f) Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
g) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJ dan LLASDP
h) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
i) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (di jalan Nasional)
j) Tenaga Personil sebagai Pengevaluasi Analisis Dampak Lalu lintas
k) Tenaga Personil sebagai Pelaksanaan Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
l) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
m) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
n) Tenaga Personil sebagai Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP
o) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
p) Tenaga Personil sebagai Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
q) Tenaga Personil sebagai Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
r) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan B3
s) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
t) Tenaga Personil sebagai Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
u) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
v) Tenaga Personil sebagai Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
w) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
x) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP
y) Tenaga PPNS

z) Personil sebagai pengkaji permasalahan hukum;

b. Upaya Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul atau terjadi di lingkungan Balai LLAJSDP Palu, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1) Pengadaan Tanah/Bangunan

Berkenaan dengan belum adanya fasilitas kantor/bangunan, Balai LLAJSDP Palu mengajukan usulan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk pengadaan tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung/Kantor Balai LLAJSDP Palu. Sebenarnya pada tahun 2014 ini kegiatan pengadaan tanah pada Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Balai LLAJSDP Palu, namun karena adanya kebijakan Pemerintah dalam hal penghematan anggaran maka mata anggaran untuk kegiatan ini terkena kebijakan penghematan yang dilakukan Pemerintah,

Harapan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilanjutkan pada tahun Anggaran 2015. Dengan demikian diharapkan kegiatan operasional Balai LLAJSDP Palu dapat dimaksimalkan.

2) Pengadaan Peralatan Kerja

Minimnya peralatan Kerja menjadi alasan atau motivasi dari Balai LLAJSDP Palu mengusulkan pada kegiatan untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dengan penggerak roda 4x4, peralatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dan peralatan survai serta pengadaan kapal/kendaraan operasional pengawasan dan monitoring.

a) Pengadaan Alat-alat Survai LLAJ/LLAJSDP
b) Pengadaan Kendaraan Operasional Survai dan Monitoring
c) Pengadaan Kendaraan Sosialisasi Keselamatan LLASDP

3) Sumber Daya Manusia

Menyikapi belum teratasinya kekurangan SDM, Balai LLAJSDP Palu mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk dapat kiranya mengisi kekosongan jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi formasi PNS. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di wilayah kerja untuk dapat memberikan kesempatan bagi pejabat dan pegawainya untuk dapat berkiprah di Balai LLAJSDP Palu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu yang

diperlukan. Formasi Jumlah Personil PNS dilingkungan BLLAJSDP Palu, yang dibutuhkan dalam jangka pendek, yang terdiri dari :

a) Bidang Subbag Tata Usaha
   (1) Tenaga Personil sebagai Pramu Surat.
   (2) Tenaga Personil sebagai Arsiparis
   (3) Tenaga Personil sebagai Pengelola Keuangan (Bendahara)
   (4) Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
   (5) Tenaga Personil sebagai Analisis Jabatan
   (6) Tenaga Personil sebagai SPM
   (7) Tenaga Personil sebagai Petugas SAI
   (8) Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
   (9) Tenaga Personil sebagai Operator Komputer
   (10) Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
   (11) Tenaga Personil sebagai Teknisi
   (12) Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
   (13) Tenaga Personil sebagai Bendahara Pengeluaran
b) Bidang Jaringan Pelayanan Dan Prasarana
   (1) Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP
   (2) Petugas Monitoring Terminal Penumpang
   (3) Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin
   (4) Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin
   (5) PetugasInspektur Keselamatan LLAJ/Jalan
   (6) Petugas Inspektur ASDP
   (7) Petugas Monitoring Penimbangan Kendaraan Bermotor
   (8) Petugas Monitoring Pelayanan Kinerja Penyelenggaraan Pelabuhan SDP
   (9) Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP
c) Bidang Angkutan Dan Teknis Sarana
   (1) Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
   (2) Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
   (3) Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
   (4) Pengawas Teknis Angkutan Alat Berat dan B3
   (5) Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
   (6) Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan

(7) Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

(8) Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ

(9) Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ

(10) Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP

d) Kebutuhan Personil dalam jangka pendek, yang memungkinkan disediakan adalah :

(1) Personil yang ditugaskan sebagai Bendahara ,

(2) Personil yang ditugaskan sebagai SAI,

(3) Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SIMAK BMN,

(4) Personil yang ditugaskan sebagai Pramu Surat,

(5) Personil yang ditugaskan sebagai Operator Komputer

(6) Personil Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP

(7) Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata), Angkutan Alat Berat dan B3

(8) Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan

(9) Personil Penyiapan bahan Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

(10) Personil Penyiapan bahan Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP

(11) Personil Penyiapan dan Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin, Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin, Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),

(12) Personil penyiapan bahan Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP

H. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (KOPP)

1. KOPP MERAK

a. Permasalahan

1) Belum tersedianya kantor yang permanen, sehingga perlu dipersiapkan segera pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan dan bangunan kantor KOPP Merak.

2) Belum tersedianya pegawai yang sesuai dengan jumah dan susunan yang diperlukan berdasarkan analisa beban kerja per masing – masing jabatan fungsional
3) Operasional di lapangan masih terkendala dengan jumlah personil dan sarana operasional yang terbatas yang dimiliki oleh KOPP Merak.
4) Kurangnya Partisipasi Pegawai KOPP Merak dalam pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Tupoksi Kantor KOPP Merak
5) Keberadaan aturan setingkat Keputusan Menteri Perhubungan dan SK Direktur Jenderal yang tidak selaras dengan PM 85 Tahun 2011 perlu direview seperti : KM 52 Tahun 2004 tentag penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, Sehingga selaras dengan PM 85 Tahun 2011.

b. Upaya Pemecahan

1) melakukan rekuitmen Pegawai Baru untuk menentukan jumlah dan susunan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja, berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia.
2) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kantor Pusat dan Untuk saat ini sekiranya Kantor Pusat dapat dicarikan solusi pembiayaan buat tenaga bantu yang bukan PNS alokasi insentifnya.
3) Perlu meningkatkan pegawai untuk mengikuti bermacam-macam kegiatan, diklat, bimtek short course, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pehubungan maupun Kementerian Keuangan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pegawai, menambah wawasan dan pengetahuan, meminimisasi kesenjangan pengetahuan serta meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi dan untuk memastikan bahwa diklat yang tepat diberikan untuk orang yang tepat agar tercapai kinerja yang diharapkan.
4) Perencanaan kegiatan TA 2014, lebih rinci dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga diharapkan daya serap TA. 2015 dapat menjadi 100%.
5) Memberikan informasi kepada bagian hukum, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.

2. KOPP GILIMANUK

a. Permasalahan yang Dihadapi

Kantor KOPP sudah berjalan dalam kurun waktu hampir 2 Tahun sejak 01 Mei 2012, dan sampai dengan saat ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran, antara lain :

1) Belum tersedianya Juklak dan Juknis Kantor KOPP Gilimanuk Berdasarkan PM 85 tahun 2011;
2) Kurangnya tenaga SDM yang memadai baik jumlah maupun kompetensi yang dimiliki guna menunjang kelancaraan operasional perkantoran;
3) Eksistensi Kantor KOPP Gilimanuk masih belum begitu dirasakan keberadaannya dikarenakan hal – hal berikut ini :
   a) Masih tingginya dominasinya peran PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di setiap pelabuhan penyeberangan;
   b) Belum adanya lahan dan bangunan untuk dipergunakan bagi Kantor KOPP Gilimanuk;
   c) Sulitnya merekrut Pegawai Staff/PNS KOPP di masing - masing pelabuhan penyeberangan yang mencakup wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk;
   d) Aset-aset Pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat saat ini masih dimiliki oleh PT. ASDP, sehingga salah satu tugas dan fungsi Sie. Perencanaan dan Pembangunan belum dapat berjalan dengan optimal.
4) Masih diperlukannya penambahan sarana dan prasarana guna menunjang administrasi perkantoran dan teknis dilapangan.
5) Belum tersedianya petunjuk yang jelas tentang pembagian kewenangan antara Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, mana yang menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan mana yang masih menjadi kewenangan PT. ASDP Indonesia Ferry dikaitkan dengan dua aturan yang berlaku yaitu KM. 11 Tahun 2002 dan PM. 85 Tahun 2011.

b. Upaya Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam kurun waktu berjalan sampai dengan saat ini, operasional Kantor KOPP Gilimanuk terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terkait dengan hal tersebut Kantor KOPP Gilimanuk perlu menyikapi upaya-upaya pemecahan masalah, antara lain :

1) Perlu dilakukan pengusulan penyusunan Juklak dan Juknis Kantor KOPP Gilimanuk sehingga memperjelas dalam menunjang kelancaran Operasional Perkantoran (sebagai bahan masukan Bagian Hukum Ditjen Hubdat);
2) Pengusulan Penambahan SDM yang memadai ke Kantor Pusat untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dan lapangan, khususnya untuk penempatan staff/PNS di masing – masing Pelabuhan Penyeberangan di bawah pengawasan Kantor KOPP;
3) Perlu adanya kejelasan mengenai pengadaan lahan bagi Kantor KOPP Gilimanuk guna terbentuknya Bangunan Kantor KOPP Gilimanuk yang tetap, hal ini dikarenakan Seluruh tanah di Kelurahan Gilimanuk merupakan tanah negara, dan Pemkab Jembrana mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
4) Dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana perkantoran di tahun anggaran berikutnya yang bertujuan memperlancar operasional perkantoran dan teknis di lapangan.
5) Perlu segera disiapkan petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang hubungan kerja dan batas – batas kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan baik dengan Direktorat LLASDP sebagai Pembina teknis Otoritas Pelabuhan Penyeberangan maupun dengan PT. ASDP Indonesia Ferry dan satker sementara yang ada didaerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan program dan operasional di lapangan.

3. KOPP LEMBAR

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar khususnya adalah:

1) Jumlah Personil (PNS) untuk melaksanakan tupoksi KOPP Lembar belum memadai, saat ini jumlah pegawai PNS Kantor KOPP Lembar sebanyak 12 Orang termasuk Kepala Kantor yang terdiri dari 8 Orang di Lembar dan 4 Orang di Pelabuhan Sape (merupakan PNS dulunya di perbantukan di PT. ASDP) sedangkan wilayah kerja Kantor KOPP Lembar mencakup 9 Pelabuhan yang tersebar di wilayah Bali, NTB dan NTT.
2) Belum adanya pembagian teknis pelaksanaan bagian di lapangan, guna memperlancar pelaksanaan tupoksi.

b. Upaya – Upaya Pemecahan

Guna memperlancar pelaksanaan tupoksi, maka Kantor KOPP Lembar perlu menambah jumlah personilnya, untuk itu Kantor KOPP Lembar berkoordinasi dengan STTD dan BP2TD Palembang untuk memperbantukan alumni – alumni STTD

dan BP2TD Palembang untuk bekerja sebagai tenaga bantu di Kantor KOPP Lembar.

4. KOPP PAGIMANA

a. Permasalahan

1) Tupoksi yang msih tumpang tindih antara Balai LLASDP, PT. ASDP (persero) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
2) Masih belum jelasnya Tupoksi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagai fungsi regulator pemerintahan dibidang Pelabuhan Penyeberangan, dengan masih berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dipelabuhan penyeberangan yang diusahakan.
3) Kurangnya SDM di Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di kantor induk dan 13 pelabuhan di wilayah kerja. Jumlah pegawai saat ini baru 52 orang. Idealnya sekitar 240 orang.
4) Belum tersedianya fasilitas gedung kantor, sehingga pada kondisi saat ini gedung kantor yang dipakai oleh KOPP Pagimana merupakan kantor yang dikontrak dan berpindah tempat.
5) Status kepemilikan aset pelabuhan penyeberangan pada saat ini merupakan kepemilikan dari PT. ASDP (Persero) Indonesia Ferry sehingga dalam pelaksanaan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan menjadi tidak berjalan dengan baik.
6) Kondisi fasilitas di pelabuhan penyeberangan yang dibawah wilayah kerja KOPP pagimana banyak kondisi dermaga dan fasilitas dermaga yang rusak, terutama di Pelabuhan Penyeberangan di daerah Maluku Utara dan Pelabuhan Penyeberangan Hunimua di Ambon sehingga daat mengganggu kegiatan bongkar muat barang dan kendaraan serta mengganggu proses naik dan turun penumpang.

b. Upaya Pemecahan Masalah

1) Agar dapat dievaluasi kembali Tupoksi Balai LLAJSDP, PT. ASDP (persero), dan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, sehingga jelas dalam mejalankan dan melaksanakan Tuposi yang diamanahkan.
2) Meninjau dan mencabut Kebutusan Menteri Perhubungan KM Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dipelabuhan penyeberangan yang diusahakan sehingga Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dapat

dengan jelas menjalankan dan melaksanakan Tupoksinya sebagai Regulator Pemerintah di bidang pelabuhan penyeberangan.

3) Perlu adanya penambahan pegawai di KOPP Pagimana yang berasal dari Kantor Pusat dan perlu adanya koordinasi dengan pihak daerah untuk memutasi pegawai daerah menjadi pegawai pusat.
4) Dalam rangka penyediaan fasilitas perkantoran, perlu disusun anggaran yang efektif dan efisien dalam penyediaan gedung kantor.
5) Perlu pengambil-alihan aset pelabuhan secara penuh sehingga KOPP Pagimana dapat melaksanakan tupoksinya menjadi lebih baik sesuai Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.
6) Perlu diadakan Perbaikan fasilitas di pelabuhan penyeberangan terutama fasilitas dermaga sehingga dapat memperlancar proses perlancar proses kegiatan bongkar muat barang dan kendaraan dan naik turun penumpang di pelabuhan.

I. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN

1. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KARIANGAU

a. Permasalahan

Sampai saat ini lahan/tanah yang digunakan oleh UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau untuk kegiatan operasional masih berstatus milik Pemerintah Kota Balikpapan dan belum dilakukan proses hibah ke Kementerian Perhubungan.

b. Upaya Pemecahan

UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah berusaha melakukan kerjasama dengan KPKNL dan BPN Balikpapan untuk dapat memproses sertifikat tanah atas lahan yang digunakan, namun masih terkendala dengan belum adanya Surat Hibah dari Pemkot Balikpapan. Oleh karena itu UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat membantu proses permohonan hibah.

2. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN GORONTALO

a. Permasalahan Yang Dihadapi

1) Kepadatan Arus Lalu Lintas pada saat jam kedatangan dan keberangkatan kapal;
2) Pendangkalan kolam Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo;
3) Kurangnya SDM Teknis di UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

b. Upaya Pemecahan Masalah

1) Mengusulkan kegiatan Studi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dimana pada Tahun Anggaran 2015 telah

diakomodir oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q Sub Direktorat Lalu Lintas SDP;

2) Mengusulkan Studi Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo pada Tahun Anggaran 2016;
3) Pada Tahun Anggaran 2015 kami akan memperoleh tambahan pegawai baru sebanyak 7 (tujuh) orang dengan kualifikasi pendidikan:
   a) 5 (lima) orang D III LLASDP
   b) 2 (dua) orang SMA/sederajat

   Sesuai dengan kebutuhan operasional UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yang membawahi 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa, kami masih membutuhkan tambahan formasi pegawai sebanyak 12 (dua belas) orang dengan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut :
   a) 10 (sepuluh) orang D III LLASDP
   b) 2 (dua) orang SMA/sederajat

3. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KALABAHI

a. Permasalahan Yang Dihadapi

1) Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi jumlah untuk mengakomodir kegiatan kepelabuhanan
2) Untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan, masih terkendala legalitas tanah yang sampai dengan sekarang masih merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Alor dan hanya diserahkan kepada pihak pelabuhan penyeberangan kalabahi berupa ijin rekomendasi penggunaan tanah seluas 11.000 m2 tidak termasuk pengembangan tanah berupa urukan atau timbunan lebih kurang 5000 m2.

b. Upaya Pemecahan

1) dari segi Sumber Daya Manusia bahwa oleh karena kegiatan kepelabuhanan sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi maka untuk mengantisipasi kekurangan pegawai maka telah diadakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan status honorer dan alokasi dana bersumber dari APBN murni sejak tahun 2005 sebanyak 13 orang maka setelah dilakukan berbagai verifikasi maka terdapat 10 tenaga honorer yang lolos masuk dalam data base Kategori II dan seleksi untuk CPNS pada bulan November 2013.
2) Untuk pengembangan infrastuktur pelabuhan lainnya yang terkendala karena legalitas tanah maka kami telah mengajukan surat permohonan pengalihan status tanah ke pihak pelabuhan penyeberangan Kalabahi seluas 11.000 m2

dan sebagai informasi bahwa dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Alor telah menyetujuinya dan masih menunggu pertemuan dengan DPRD untuk meminta persetujuan termasuk tata cara alih status hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan.

BAB VI. PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014 merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini tercermin pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi darat yaitu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa angkutan darat khususnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Secara umum laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan transportasi darat yang meliputi bidang angkutan jalan, bidang angkutan penyeberangan dan bidang angkutan perkotaan serta keselamatan transportasi darat yang membutuhkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, operasional dan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sistem kerjasama dan koordinasi yang baik, serta didukung dengan peralatan kerja yang cukup.

Sedangkan Balai, KOPP dan UPT di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu peningkatan pelayanan jasa angkutan, serta terus mempertahankan dan mengembangkan pelayanan jasa angkutan dengan terus melakukan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan yaitu dengan peningkatan kinerja SDM yang ada.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI